PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah selanjutnya di sebut dengan Bupati;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Beppelitbangda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2020 mempunyai fungsi pokok :

a. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder di Daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik.

b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun.

c. Menggambarkan kepastian arah kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

(2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.

(3) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka pembangunan tahun ketiga RPJMD periode tahun 2016-2021.

(4) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
g. BAB VII PENUTUP

Pasal 4

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYUSUNAN RKPD

Bagian Pertama

Umum

Pasal 5

(1) Bappelitbangda menyusun rancangan awal RKPD.

(2) Rancangan Awal RKPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai acuan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Kepala Bappelitbangda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

(2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Rancangan RKPD menjadi Bahan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 7

(1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.

(2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappelitbangda Setiap Tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.

(3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar Perangkat Daerah dan Antar Rencana Pembangunan Kecamatan.

Bagian Ketiga

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 8

(1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappelitbangda.

(2) Bappelitbangda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi pendanaan yang menunjukan prakiraan maju.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Pengendalian

Pasal 9

(1) Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Pengendalian oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, sehingga program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

(4) Pemantauan Kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

(5) Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

(1) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

(2) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.

(3) Kepala Bappelitbangda menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019, NOMOR 26

(3) Kepala Bappelitbangda menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode selanjutnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2019, NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **I**

DAFTAR TABEL ..... **II**

DAFTAR GAMBAR ..... **IV**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN 3
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 6
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN 7
1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN **10**

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 10
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 11
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 31
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum 55
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah 75
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2018 DAN REALISASI RPJMD 78
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH 83

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH **86**

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH 86
3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 86
3.1.2. Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah 89
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 111
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 111
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 116

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH **132**

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 132
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020 179
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional 179
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 183
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah 184

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH **192**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH **193**

BAB VII PENUTUP **210**

DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1. PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 12
TABEL 2. 2. FORMASI BATUAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 15
TABEL 2. 3. CURAH HUJAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 16
TABEL 2. 4. RATA-RATA SUHU DAN KELEMBABAN UDARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016 17
TABEL 2. 5. RENCANA KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 2016-2035 24
TABEL 2. 6. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2017 27
TABEL 2. 7. KEPADATAN PENDUDUK DAN SEX RATIO KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 28
TABEL 2. 8. PDRB ADHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 32
TABEL 2. 9. PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 34
TABEL 2. 10. DISTRIBUSI PDRB ADHK DAN ADHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 36
TABEL 2. 11. PERTUMBUHAN PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 39
TABEL 2. 12. PDRB PERKAPITA ADHB DAN ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 45
TABEL 2. 13. TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 47
TABEL 2. 14. PERKEMBANGAN IPM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 50
TABEL 2. 15. APK DAN APM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2006-2017 52
TABEL 2. 16. AKHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2006-2017 53
TABEL 2. 17. PERSENTASE GIZI BURUK DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2016-2017 54
TABEL 2. 18. RASIO PENDUDUK YANG BEKERJA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2017 55
TABEL 2. 19. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2010-2018 55
TABEL 2. 20. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KESEHATAN TAHUN 2010-2018 57
TABEL 2. 21. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PEKERJAAN UMUM TAHUN 2012-2018 58
TABEL 2. 22. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2012-2018 59
TABEL 2. 23. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PENATAAN RUANG TAHUN 2012-2018 60
TABEL 2. 24. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERHUBUNGAN TAHUN 2010 – 2018 61
TABEL 2. 25. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2010-2018 62
TABEL 2. 26. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL TAHUN 2013-2018 62
TABEL 2. 27. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA TAHUN 2012-2018 63
TABEL 2. 28. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN SOSIAL TAHUN 2013-2018 64
TABEL 2. 29. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KETENAGAKERJAAN TAHUN 2012-2018 64
TABEL 2. 30. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2012-2018 65
TABEL 2. 31. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PENANAMAN MODAL TAHUN 2012-2018 65
TABEL 2. 32. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEBUDAYAAN TAHUN 2010-2018 66
TABEL 2. 33. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2010-2018 67
TABEL 2. 34. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN TAHUN 2010-2018 67
TABEL 2. 35. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2010-2018 68
TABEL 2. 36. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN 2013-2018 69
TABEL 2. 37. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN STATISTIK TAHUN 2012-2018 69
TABEL 2. 38. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KEARSIPAN TAHUN 2013-2018 70

TABEL 2. 39. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2013-2018 70
TABEL 2. 40. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERPUSTAKAAN TAHUN 2010-2018 71
TABEL 2. 41. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2010-2018 71
TABEL 2. 42. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERTANIAN TAHUN 2012-2018 72
TABEL 2. 43. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PARIWISATA TAHUN 2012-2018 73
TABEL 2. 44. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2012-2018 73
TABEL 2. 45. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERDAGANGAN TAHUN 2011-2018 74
TABEL 2. 46. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN INDUSTRI TAHUN 2010-2018 74
TABEL 2. 47. INDIKATOR CAPAIAN KINERJA URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013-2018 75
TABEL 2. 48. PENCAPAIAN INDIKATOR KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH TAHUN 2011-2018 76
TABEL 2. 49. PENCAPAIAN INDIKATOR FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR TAHUN 2010-2018 ... 76
TABEL 2. 50. INDIKATOR IKLIM INVESTASI TAHUN 2010-2018 77
TABEL 2. 51. PENCAPAIAN INDIKATOR SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2010-2018 78
TABEL 2. 52. PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 79
TABEL 3. 1. PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.. 88
TABEL 3. 2. REALISASI DAN PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015-2020 112
TABEL 3. 3. REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015-2020 114
TABEL 3. 4. REALISASI DAN PROYEKSI KERANGKA PENDANAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015-2020 115
TABEL 3. 5. PERBANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015-2020 124
TABEL 3. 6. REALISASI DAN PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2015-2020 129
TABEL 4. 1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 133
TABEL 4. 2. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020 139

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 7
GAMBAR 2. 1. PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 13
GAMBAR 2. 2. KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH 26
GAMBAR 2. 3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2017 27
GAMBAR 2. 4. DISTRIBUSI PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 29
GAMBAR 2. 5. PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 30
GAMBAR 2. 6. PERKEMBANGAN PDRB ADHB DAN PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2013-2017 35
GAMBAR 2. 7. DISTRIBUSI SEKTOR PDRB ADHB KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 37
GAMBAR 2. 8. PERKEMBANGAN SEKTOR DOMINAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 38
GAMBAR 2. 9. LAJU PERTUMBUHAN SEKTOR PDRB ADHK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017 41
GAMBAR 2. 10. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2012-2017 42
GAMBAR 2. 11. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DAN KABUPATEN SEKITAR TAHUN 2017 43
GAMBAR 2. 12. TINGKAT INFLASI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 44
GAMBAR 2. 13. GINI RATIO KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2011-2017 46
GAMBAR 2. 14. PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN KALIMANTAN SELATAN DAN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 48
GAMBAR 2. 15. IPM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2012-2017 49
GAMBAR 4. 1. ELEMEN PENDUKUNG PENCAPAIAN VISI 132

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui sistem perencanaan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah maka Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan di atas, maka untuk tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

RKPD ini disusun dengan memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rumusuan tujuan dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaan yang merupakan

penjabaran dari RPJMD sebagai rencana tahunan untuk tahun 2020 yang bersinergi dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang disusun harus mempedomani rumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang berpedoman pada RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2020 dilakukan dengan pendekatan teknokratis dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, pendekatan partisipatif dengan melibatkan stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah, pendekatan politis dengan melihat arahan RPJMD Kab. HST Tahun 2016–2021 serta dengan melihat pokok-pokok pikiran DPRD, dan pendekatan perencanaan *Top-Down* dengan melakukan sinergi terhadap RPJMN, RPJMD Prov. Kalsel, Rancangan RKPD Provinsi Kalsel, tujuan *SDGs,* dan SPM yang ditetapkan pemerintah dan lain-lain serta melalui pendekatan perencanaan *Bottom-Up* melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada tingkat desa/kelurahan, pelaksanaan musrenbang RKPD di Kecamatan dan Kabupaten.

Seiring dengan perkembangan peraturan saat ini, sangat menekankan untuk pengintegrasikan antara perencanaan dan penganganggaran. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah kabupaten dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan tersusunnya RKPD ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang konsisten untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan prioritas daerah. RKPD yang disusun akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2020, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

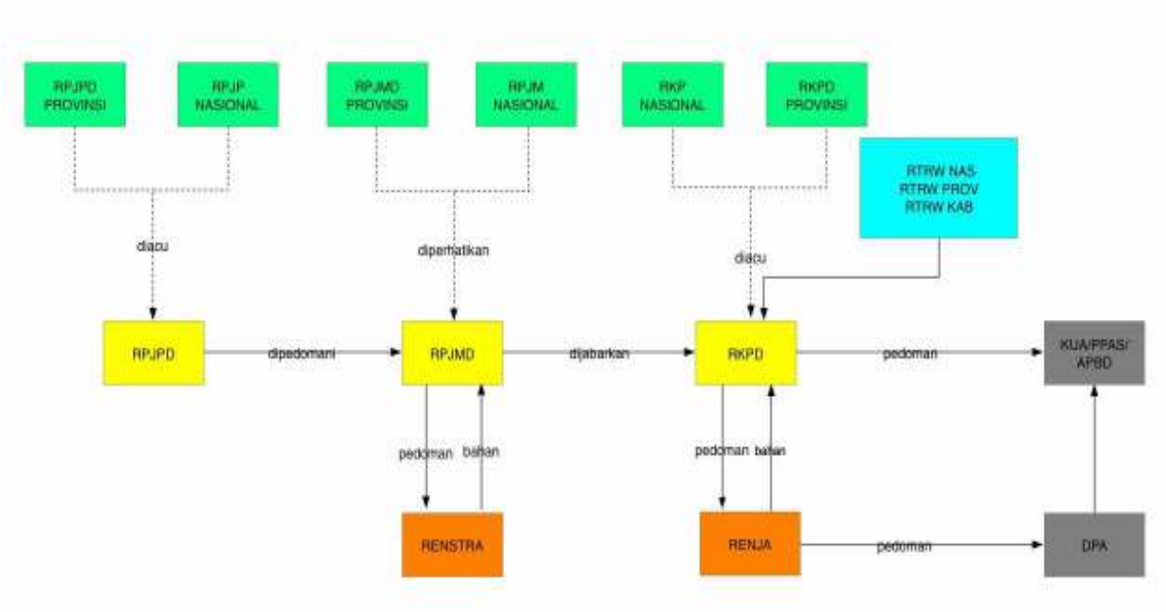
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11).

1.3. Hubungan antar Dokumen

Keberadaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 memiliki hubungan dengan Dokumen Perencanaan lainnya karena merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan. Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2020 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat, perencanaan tingkat provinsi serta dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Adapun hubungan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 dengan dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :



Gambar 1. 1. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 yang telah disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2000-2025. RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah untuk Tahun 2020 yang berwawasan 1 (satu) tahunan. Renja Perangkat Daerah tahun 2020 merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 juga mengacu pada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, serta memperhatikan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1

(satu) tahun yaitu tahun 2020 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka maksud penyusunan RKPD ini adalah untuk memberi arahan dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Secara khusus maksud penyusunan RKPD ini adalah :

1. Menjabarkan pelaksanaan tahun ke-5 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021.
2. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan kebutuhan masyarakat yang berkembang serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2020.
3. Mengidentifikasi proyeksi ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan.
4. Memberikan arahan dan tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini adalah :

1. Menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah 2020.
2. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2020.

1.5. Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dokumen RKPD tahun 2020 terdiri dari 6 bab, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan salah satu bagian wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki ibukota di Barabai. Sejarah terbentuknya Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki napak tilas yang tidak singkat. Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dimulai pada bulan September 1953 dimana tokoh-tokoh masyarakat bermusyawarah untuk menuntut agar Barabai menjadi daerah otonom sendiri terpisah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi daerah Kewedanan Barabai yang pada zaman sebelum Perang Dunia II disebut Barabai Plaatslijke. Pada tanggal 28 Maret 1954 dari hasil berbagai musyawarah dibentuk panitia pendirian daerah Barabai. Selanjutnya, dalam periode pelaksanaan, beberapa partai politik yang ada di Barabai seperti Murba, Parindra dan PNI mengeluarkan resolusi menuntut agar daerah yang dahulunya disebut Kewedanan Barabai dijadikan Kabupaten Daerah Tingkat II.

Setelah perjuangan yang cukup panjang tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 Februari 1957 Nomor Pem- 20/2/II, Barabai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif Barabai. Selanjutnya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas nama Menteri Dalam Negeri mengukuhkan ketetapan tersebut pada tanggal 5 Desember 1959 Nomor Des-575-1-9. Pada tanggal 23 Desember 1959 dilaksanakan serah terima jabatan antara pejabat bupati Hulu Sungai Selatan dengan daerah Swatantra Tingkat II Hulu Sungai Tengah. Dengan dasar tersebut, maka ditetapkanlah tanggal 24 Desember 1959 sebagai hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Tengah sebagai daerah otonom yang melaksanakan pembangunan daerahnya sendiri hingga saat ini.

Perjalanan sejarah daerah ini dijadikan sebagai sebuah pendorong semangat yang tak lekang oleh waktu dimana pembangunan daerah harus terus diupayakan untuk kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu, rumusan kebijakan daerah melalui data dan informasi yang tersaji pada gambaran umum kondisi daerah ini menjadi titik tolak pengembangan berbagai program prioritas. Pembahasan gambaran umum kondisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan dijabarkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah sebagai berikut :

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Dalam pengkajian fenomena pembangunan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan, data dan informasi terkait geografi dan demografi wilayah menjadi landasan dan dasar kajian yang penting. Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis, utamanya dalam memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Selain itu, analisis terhadap aspek demografi dalam pembangunan daerah dapat memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama utamanya dalam partisipasi

sumberdaya manusia dalam pencapaian pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki wilayah seluas 1,770,77 km^2 yang beribukota di Barabai. Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 11 kecamatan, 8 kelurahan dan 161 desa.

Adapun pembagian wilayah administratif kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

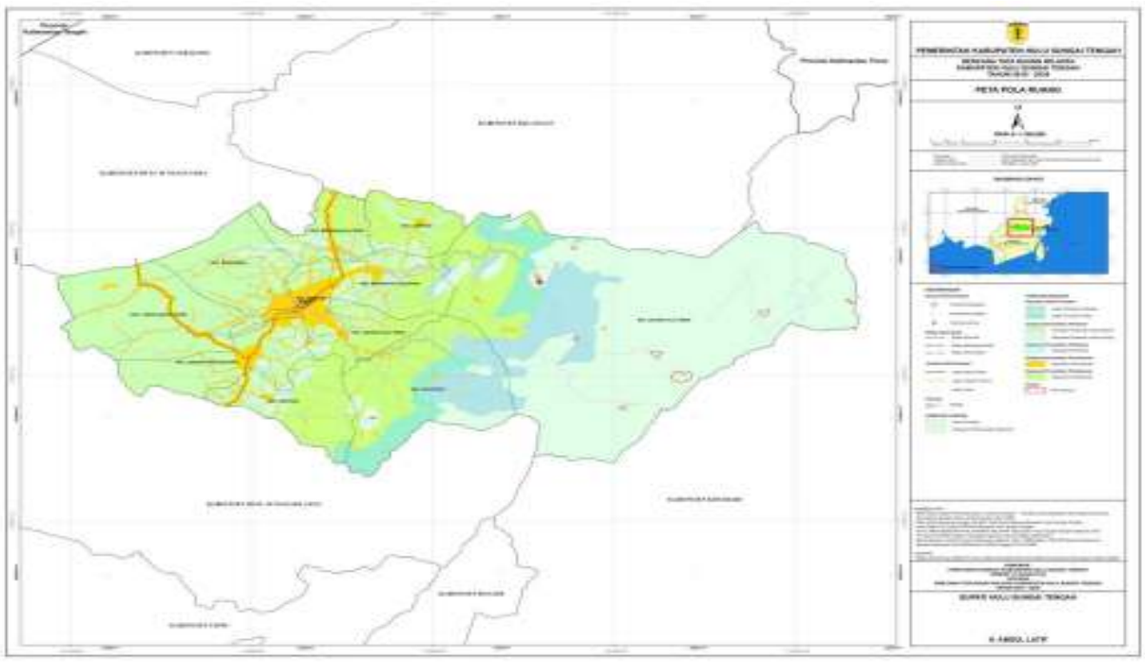
Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Kecamatan	Ibukota	Luas (km²)	%	Kelu rahan	Desa	RW	RT
1	Haruyan	Haruyan	101,35	5,72	-	17	51	103
2	Batu Benawa	Pagat	54,44	3,07	-	14	41	80
3	Hantakan	Hantakan	208,55	11,78	-	12	36	60
4	BatangAlai Selatan	Birayang	76,06	4,3	1	18	51	90
5	Batang Alai Timur	Tandilang	778,71	43,98	-	11	33	57
6	Barabai	Barabai	40,71	2,3	6	12	30	90
7	Labuan Amas Selatan	Pantai Hambawang	97,82	5,52	1	17	51	91
8	Labuan Amas Utara	Kasarangan	170,32	9,62	-	16	40	102
9	Pandawan	Pandawan	116,41	6,57	-	21	60	127
10	Batang Alai Utara	Ilung	65,36	3,69	-	14	42	82
11	Limpasu	Limpasu	61,04	3,45	-	9	27	47
	Jumlah		1,770,77	100	8	161	462	929

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2014

Berdasarkan persentase luas wilayah kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Batang Alai Timur dengan wilayah seluas 771,42 Km2 atau 43,73 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Barabai dengan wilayah

seluas 40,83 Km2 atau 2,31 % dari total wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2, 1, Peta Administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Secara administratif, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	Kab. Balangan
Sebelah Timur	Kab. Kotabaru
Sebelah Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan
Sebelah Barat	Kab. Hulu Sungai Utara

2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036, secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada pada 2°27'0.9"-2°46'55" lintang selatan dan 115°9'17"-115°53'33" bujur timur. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah hulu sungai yang umumnya disebut "Banua Anam". Kabupaten ini memiliki jarak 165 km dari Kota Banjarmasin yang merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan letak geografis dan batas wilayah tersebut, maka posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

sangat strategis dan berada di tengah perlintasan kawasan hulu sungai dan jalur lintas antar provinsi.

3. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari 3 (tiga) kawasan yakni : kawasan rawa, dataran rendah, dan wilayah pegunungan Meratus yang merupakan kawasan pedalaman dan terpencil. Ketinggian terendah yakni dengan tinggi permukaan (-6)-7 mdpl seluas 24.586,15 ha, tinggi permukaan >7-25 mdpl seluas 30.839,69 ha, tinggi permukaan >25-100 mdpl seluas 22.251,72 ha, tinggi permukaan >100-500 mdpl seluas 49.030,5 ha, tinggi permukaan >500 -1.000 mdpl seluas 41.216,73 ha, sedangkan permukaan tertinggi yakni tinggi permukaan > 1.000 mdpl seluas 9.152,63 ha. Kawasan tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berada di Gunung Halau-Halau/Gunung Besar Pegunungan Meratus dengan ketinggian ± 1.851 mdpl. Kemiringan tanah bervariasi yaitu terendah 0-2 % seluas 132.517,72 ha, 2-15 % seluas 20.168,37 ha, 15-40 % seluas 21.336,86 ha dan >40 % seluas 3.054,46 ha. Untuk kawasan rawa tersebar berada di Kecamatan Batang Alai Utara, Pandawan, Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Budidaya yang dilaksanakan mayoritas hanya di musim kemarau dengan komoditas padi dan hortikultura. Kawasan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga dijadikan sebagai lumbung ikan dan tempat budidaya kerbau. Pada dataran rendah, budidaya dapat dilakukan sepanjang tahun dengan komoditas pertanian yang lebih luas dan beragam yaitu padi dan hortikultura, perikanan serta peternakan. Kawasan dataran rendah lebih potensial dijadikan sebagai kawasan budidaya, mengingat keunggulan dan kemudahan penangannya dibandingkan kawasan rawa dan pegunungan. Dari dataran rendah inilah, dihasilkan komoditas padi, sayur mayur, ternak besar dan kecil, perikanan budidaya karamba dan kolam, perkebunan karet, kelapa serta tanaman lainnya.

4. Geologi

Jenis tanah di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari Histosol-HS seluas 8.601,52 ha dan Acrisol–AC (terdiri atas Ferric Acrisols, Humic Acrisols, Lithosols, Humic Ferralsols dan Orthic Acrisols) seluas 168.475,92 ha. Jenis batuan yang terdiri dari formasi batuan, sandi, penyusun, endapan dan luasan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 2. Formasi Batuan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Formasi	Sandi	Penyusun	Endapan	Luas (Ha)
Formasi Pudak	Kap	*Extrusive: intermediate:*	*Volcanism: submarine*	3.491,26
Formasi Haruyam	Kvh	*Extrusive:mafic: lava*	*Volcanism: submarine*	13.854,10
Granit Kelai	Kgr1	*Intrusive: felsic*	*Plutonism: sub-volcanic*	27.518,15
Tonalit Sepauk	Kls	*Intrusive: felsic: granitoid*	*Plutonism: batholiths*	2.970,46
Intrusi Sintang	Toms	*Intrusive: intermediate*	*Plutonism: sub-volcanic*	11.089,80
Malihan Pinoh	PzTRp	*Metamorphic: schist*	*Metamorphism: regional: high-grade*	8.703,95
Ofiolit Jura	Mub	*Ophiolite*		3.135,90
Endapan alluvium	Qa	*Sediment: clastic: alluvium*	*Terrestrial: alluvial*	56.531,49
Formasi Pitap	Ksp	*Sediment: clastic: flysch*	*Neritic*	30.249,47
Formasi Warukin	Tmw	*Sediment: clastic:sandstone*	*Littoral: delta*	18.352,75
Batu Nunggal	Kpb/LAUT			1.180,13
TOTAL LUAS				177.077

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka, 2014

5. Hidrologi

Secara hidrologi, ada 3 wilayah aliran sungai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu sungai Batang Alai, sungai Barabai dan sungai Haruyan dan satu saluran (kanal) pengendali banjir

yang membentang dari Kecamatan Batu Benawa ke Rawa Bangkau. Disamping itu ada 1 bendung yaitu Bendung Batang Alai dan 3 Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan yaitu DI Intangan di Kecamatan Batang Alai Selatan, DI Haruyan dan DI Mangunang di Kecamatan Haruyan. Sedangkan DI kewenangan kabupaten adalah DI Baruh di Kecamatan Limpasu, DI Kahakan di Kecamatan Batu Benawa dan DI Telang di Kecamatan Batang Alai Utara. Untuk pemanfaatan sumber air dengan debet di atas 100 liter/ detik meliputi sumber mata air sungai Batang Alai dan sungai Barabai.

6. Klimatologi

Secara klimatologi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki jumlah curah hujan tahunan rata-rata pada tahun 2016 adalah sebanyak 225 mm^3 dengan jumlah hari hujan rata-rata sebanyak 18 hari/bulan. Intensitas hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember, hal ini terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3. Curah Hujan
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Hujan	
		Hari	MM^3
1	Januari	16	139
2	Februari	15	186
3	Maret	17	326
4	April	21	238
5	Mei	21	282
6	Juni	15	219
7	Juli	18	166
8	Agustus	11	153
9	September	16	117
10	Oktober	17	180
11	November	21	338
12	Desember	26	339
	Rata-rata	18	225

Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2018

Intensitas suhu udara di Hulu Sungai Tengah rata-rata 29°C, ini menunjukkan bahwa daerah Hulu Sungai Tengah berhawa sejuk. Sedangkan rata-rata kelembaban udara di Hulu Sungai Tengah adalah 89%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rata-rata kelembaban udara dan rata-rata suhu udara selama setahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4. Rata-Rata Suhu dan Kelembaban Udara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016

No	Bulan	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)
1	Januari	29	89
2	Februari	29	91
3	Maret	29	90
4	April	29	90
5	Mei	30	90
6	Juni	28	90
7	Juli	29	88
8	Agustus	30	87
9	September	28	89
10	Oktober	29	88
11	November	28	89
12	Desember	28	89
	Rata-rata	29	89

Sumber : Kabupaten HST Dalam Angka Tahun 2018

7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035, Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi atas 2 kawasan yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berupa Kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam, kawasan rawan bencana alam, dan

kawasan lindung geologi. Lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

a). Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Hutan lindung di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 60.087 ha, yang meliputi : Kecamatan Batang Alai Timur seluas 57.357 tepatnya di Desa Batu Tangga, Nateh, Tandilang, Pembakulan, Muara Hungi, Datar Batung, Batu Perahu, Juhu, dan Aing Bantai; Kecamatan Hantakan seluas 2.363 ha, tepatnya di Desa Datar Ajab, Patikalain, Haruyan Dayak, dan Pasting; Kecamatan Haruyan seluas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar tepatnya di Desa Sungai Harang; dan Kecamatan Batang Alai Selatan seluas 256 ha tepatnya di Desa Wawai Gardu dan Tanah Habang. Di dalam kawasan hutan lindung tersebut terdapat kawasan permukiman seluas ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timur dan Kecamatan Hantakan.

- Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya merupakan kawasan resapan air yang terletak di Kecamatan Hantakan dan Batang Alai Timur.

- Kawasan Perlindungan Setempat

  Kawasan perlindungan setempat terdiri dari : sempadan sungai seluas 604 ha yang berada di sepanjang kanan dan kiri sungai diseluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah; Kawasan sekitar danau/waduk yang terdapat di Desa Mantaas dan Desa Pahalatan Kecamatan Labuan Amas Utara dan Desa Panggang Marak Kecamatan Labuan Amas Selatan; Kawasan sekitar mata air yang meliputi Desa Juhu, Desa Batu Perahu, Desa Aing Bantai, Muara Hungi, Pembakulan, Hinas Kiri, Atiran, Datar Batung,

Nateh di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Patikalain, Desa Hinas Kanan, Desa Datar Ajab, Desa Tilahan, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan sempadan mata air yang meliputi kawasan mata air di Kecamatan Batang Alai Timur, Kecamatan Hantakan, dan Kecamatan Haruyan; dan Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang meliputi Kawasan RTH di Perkotaan Barabai, Perkotaan Birayang, Perkotaan Pantai Hambawang, Perkotaan Pagat, Perkotaan Pandawan, Perkotaan, Perkotaan Kasarangan, Perkotaan Ilung, Perkotaan Hantakan, Perkotaan Tandilang dan Perkotaan Limpasu.

- Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Alam

  Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan alam meliputi : Lingkungan non bangunan yang terdiri dari monumen Divisi IV ALRI di Desa Birayang Surapati Kecamatan Batang Alai Selatan, monumen Tugu Pahlawan di Taman Dwi Warna Kecamatan Barabai, dan peninggalan situs Batu di Desa Juhu Kecamatan Batang Alai Timur; Lingkungan bangunan non gedung yang terdiri dari makam H. Amin Desa Walangku Kecamatan Labuan Amas Utara, situs makam Tumenggung Jayapati Kecamatan Limpasu, makam wali katum (M. Ramli) desa Tabudarat Kecamatan Labuan Amas Selatan, makam Pahlawan di Desa Pagat Kecamatan Batu Benawa dan makam Pahlawan di Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan; dan Lingkungan bangunan gedung yang terdiri dari Gedung Sarikat Islam dan Balai Rakyat di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Rawan Bencana Alam

  Kawasan Rawan Bencana Alam terdiri dari : Kawasan rawan tanah longsor, yang meliputi Desa Muara Hungi, Desa Batu Perahu, Desa Atiran, Desa

Hinas Kiri, Desa Juhu di Kecamatan Batang Alai Timur, Desa Alat, Desa Hinas Kanan, Desa Alat, Desa Murung B, Desa Patikalain, Desa Haruyan Dayak, Desa Pasting, Desa Tilahan, Desa Naungan Seberang, Desa Kindingan di Kecamatan Hantakan, dan Desa Batu Panggung di Kecamatan Haruyan; Kawasan rawan banjir yang meliputi sempadan Sungai Batang Alai, Sungai Barabai dan Sungai Haruyan; Kawasan rawan kebakaran meliputi kawasan rawan kebakaran hutan di Kecamatan Batang Alai Timur, Batang Alai Utara, Hantakan, Haruyan, Labuan Amas Utara dan Pandawan serta Kawasan rawan kebakaran permukiman di Kecamatan Barabai.

- Kawasan Lindung Geologi

  Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah yang meliputi : daerah air tanah langka di Kecamatan Barabai, Pandawan dan Batu Benawa; daerah yang memiliki akuifer produktifitas kecil di Kecamatan Batang Alai Utara dan Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan daerah yang memiliki jenis tanah bergambut di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan dan Labuan Amas Selatan.

b). Kawasan Budidaya

Sedangkan untuk penggunaan lahan kawasan budidaya, terdiri atas : kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan partanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industry, kawasan peruntukan parawisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya. Lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

  Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, terdiri atas hutan produksi tetap seluas 8.816 ha yang tersebar di Kecamatan Hantakan, Batang Alai Timur, Haruyan dan hutan produksi terbatas seluas 14.007 ha yang tersebar di Kecamatan Batang Alai Timut, Batang Alai Selatan, dan Hantakan.

- Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri atas Kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang telah ditetapkan sebagai kawasan lahan pertanian berkelanjutan seluas 43.600 ha, kawasan peruntukan pertanian lahan kering seluas 4.526 ha, kawasan peruntukan hortikultura yang tersebar di seluruh kecamatan, Kawasan peruntukan perkebunan seluas 31.907 ha, Kawasan peruntukan peternakan yang meliputi kawasan perternakan kerbau rawa, kawasan perternakan sapi dan kawasan peternakan unggas.

- Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Meliputi : kawasan perikanan budidaya air tawar di seluruh kecamatan; kawasan perikanan tangkap di Kecamatan Labuan Amas Utara, Pandawan, Haruyan, Labuan Amas Selatan, dan Batang Alai Utara; kawasan industri pengolahan dan pemasaran ikan di Kecamatan Labuan Amas Utara, Labuan Amas Selatan, Pandawan, Haruyan, dan Kecamatan Barabai; kawasan reservat konservasi perikanan seluas 10 ha di Desa Manta'as Kecamatan Labuan Amas Utara; kawasan pendaratan ikan di Desa Sungai Buluh Kecamatan Labuan Amas Utara.

- Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi : mineral logam terdiri dari emas, mangan, besi dan galena; mineral bukan logam terdiri dari phospat dan lempung; batuan terdiri dari granit, andesit, batu gamping, marmer dan tanah merah.

- Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri terdiri atas kawasan peruntukan industri menengah berupa industri karet di Kecamatan Haruyan dan Indutri Logam di Kecamatan Batang Alai Selatan; kawasan Industri kecil dan mikro berupa industry kopiah haji di Kecamatan Labuan Amas Selatan, industry kerajinan anyaman, batubata, meubel di Kecamatan Pandawan, industry meubel di Kecamatan Batu Benawa, industry jasa perbengkelan dan mesin dan industry produk makanan olahan di Kecamatan Barabai, industry kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional di Kecamatan Haruyan, industry meubel dan hasil perikanan di Kecamatan Labuan Amas Utara, industry aneka makanan di Kecamatan Batang Alai Selatan, dan industry arang kelapa di Kecamatan Limpasu.

- Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan parawisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari parawisata budaya meliputi parawisata religious di kecamatan Pandawan, Barabai dan Labuan Amas Selatan, parawisata budaya di Kecamatan Haruyan dan Labuan Amas Utara; Parawisata alam yang tersebar di Kecamatan Batu Benawa, Hantakan, Haruyan, Batang Alai Timur, Batang Alai Selatan dan Limpasu; dan yang terakhir parawisata buatan di Kecamatan Barabai berupa wisata kuliner pujasera dan kerajinan jamu sari gading, Kecamatan Haruyan berupa wisata kerajinan anyaman ijuk, Kecamatan Pandawan berupa wisata kerajinan anyaman purun dan Kecamatan Labuan Amas Selatan berupan wisata kerajinan kopiah haji dan sulam bordir.

- Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah seluas 12.730 ha, yang tersebar pada Kawasan Permukiman Barabai seluas 2.535 ha, kawasan

permukiman Batang Alai Selatan seluas 1.326 ha, kawasan permukiman Batang Alai Timur seluas 213 ha, Kawasan Permukiman Batang Alai Utara seluas 1.046 ha, Kawasan Permukiman Batu Benawa seluas 617 ha, Kawasan Permukiman Hantakan seluas 417 ha, Kawasan Permukiman Haruyan seluas 874 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Selatan seluas 1.773 ha, Kawasan Permukiman Labuan Amas Utara seluas 1.615 ha, Kawasan Permukiman Limpasu seluas 447 ha, dan Kawasan Permukiman Pandawan seluas 1.508 ha.

- Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan Peruntukan Lainnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari kawasan perdagangan yang tersebar di Kecamatan Barabai, Labuan Amas Selatan, Batang Alai Selatan dan Pandawan; kawasan pertahanan dan keamanan meliputi Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer (Kodim)-1002/Barabai dan Batalion Yonif-621/Manuntung di Kecamatan Barabai, Kepolisan Sektor dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang tersebar di wilayah kecamatan.

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan keadaan geografis, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mempunyai daya dukung untuk mengembangkan berbagai potensi sumberdaya dengan kebijakan pembangunan spasial dalam rumusan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Daya dukung geografis tersebut antara lain letak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berada di pusat banua anam dan menjadi perlintasan jalur antar daerah dan jalur antar provinsi sehingga posisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat strategis untuk menjadi pusat perdagangan dan bisnis. Selain itu, kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Tengah sangat mendukung untuk berbagai budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dalam rangka realisasi pembangunan, dirumuskan kawasan strategis untuk mendukung potensi

pengembangan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2. 5. Rencana Kawasan Strategis
Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2035

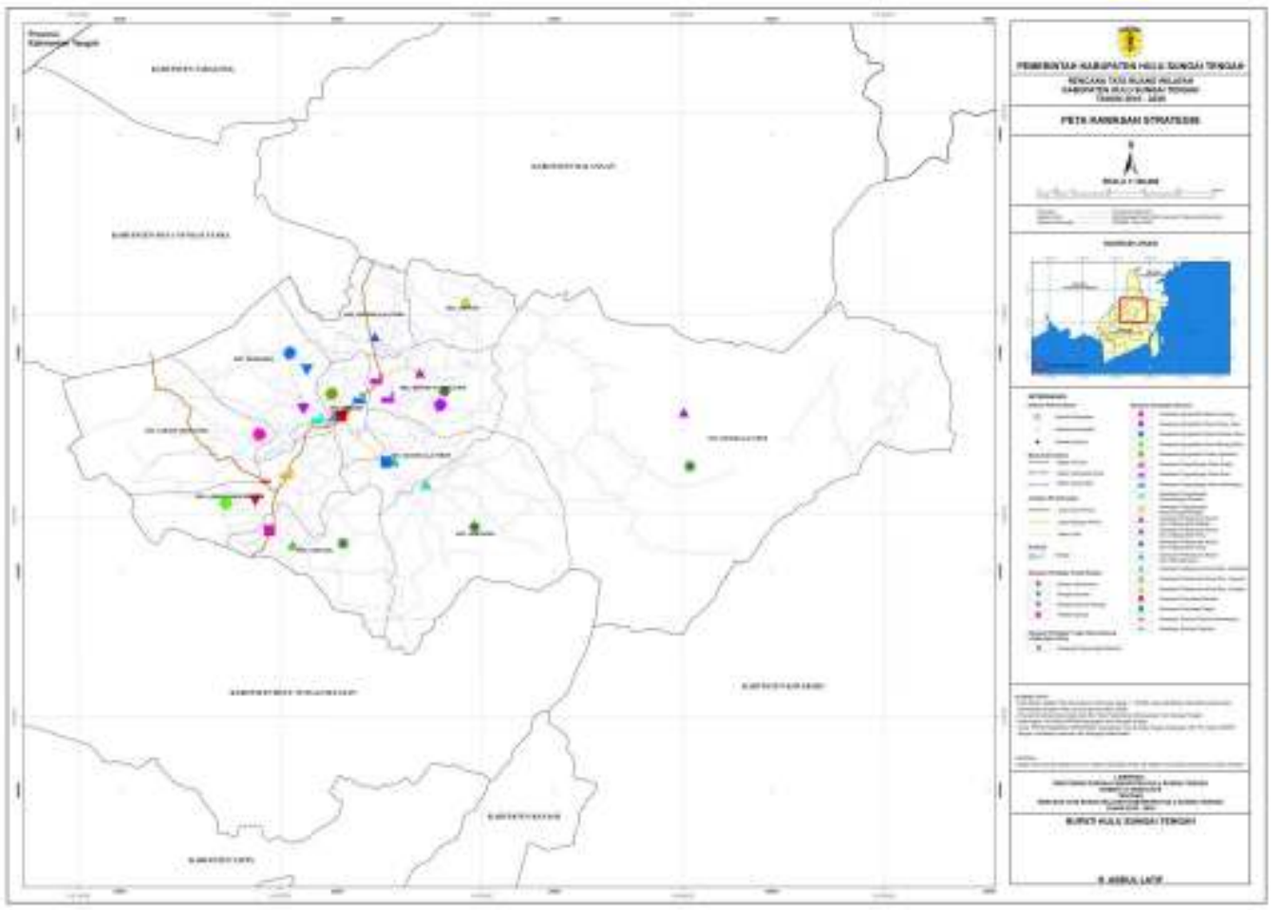
Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
Kabupaten	Kepentingan pertumbuhan ekonomi	Perkotaan Barabai sebagai ibukota kabupaten	
		Kawasan Pagat di Kecamatan Batu Benawa	
		Kawasan *agropolitan*	Pasar agribisnis di Kecamatan Barabai
			Desa Banua Kupang di kecamatan Labuan Amas Utara
			Desa Cukan Lipai di Kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Kambat Utara di Kecamatan Pandawan
			Desa Murung Taal dan Mahang Baru di Kecamatan Labuan Amas Selatan
		Kawasan pergudangan	Desa Mandingin di Kecamatan Barabai
			Desa Kapar dan Desa Kias di kecamatan Batang Alai Selatan
			Desa Sungai Rangas di Kecamatan Labuan Amas Selatan
			Desa Matang Ginalun di Kecamatan Pandawan

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi	
			Kawasan Jalan Lingkar Utara dan Selatan Kota Barabai
		Kawasan terminal Pantai Hambawang di Kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Kawasan terminal terpadu di Kecamatan Barabai	
		Kawasan *strategis* ekonomi jalan lingkar utara dan lingkar selatan Kota Barabai	
		Kawasan perkebunan karet	Kecamatan Batang Alai Selatan
			Kecamatan Hantakan
			Kecamatan Batang Alai Timur
			Kecamatan Limpasu
			Kecamatan Batang Alai Utara
			Kecamatan Batu Benawa
			Kecamatan Haruyan
	Kepentingan Sosial Budaya	Mesjid Karamat Pelajau di desa Pelajau kecamatan Pandawan	
		Mesjid Karamat Desa Jatuh kecamatan Pandawan	
		Makam Wali Katum di desa Tabudarat Hulu kecamatan Labuan Amas Selatan	
		Wisata Budaya di Desa Barikin Kecamatan Haruyan	
	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan	

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Lokasi
	Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pegunungan meratus di Kecamatan Batang Alai Timur, Hantakan, sebagian Kecamatan Haruyan dan Batang Alai Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2035

Detail lokasi kawasan strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada peta berikut.



Gambar 2. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah

c. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011 berjumlah 244.889 Jiwa, sedangkan hasil proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan berjumlah 266.501 jiwa. Dalam kurun waktu enam tahun, Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 15.403 jiwa atau sebesar 8,83%. Perkembangan jumlah penduduk

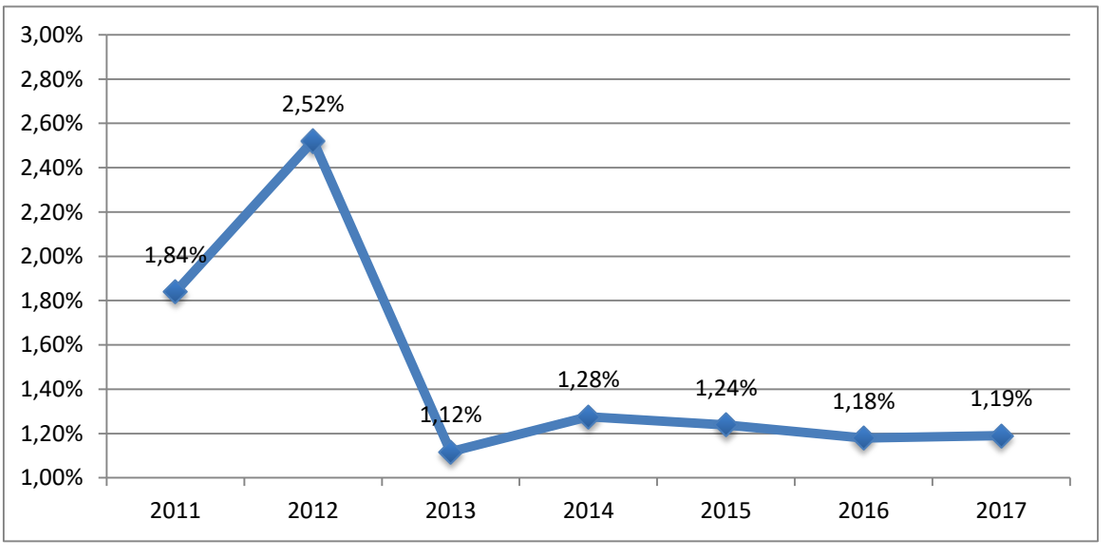
Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2017

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total Penduduk
2011	122.213	122.676	244.889
2012	125.312	125.751	251.063
2013	126.887	126.981	253.868
2014	128.464	128.643	257.107
2015	130.252	130.040	260.292
2016	131.875	131.501	263.376
2017	133.695	132.806	266.501

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus meningkat, akan tetapi apabila dilihat dari pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan, Pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 3. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2017

Pada tahun 2017, terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yang pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan

lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan pada tahun 2017, jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan (132.806 jiwa) lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki (133.695 jiwa) dengan sex ratio 100,67. Meskipun terjadi perubahan struktur jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, tetap terjadi peningkatan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya baik jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Peningkatan jumlah penduduk ini akan berdampak pada kepadatan penduduk. Pada tahun 2017, tingkat Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 151 jiwa/Km^2. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

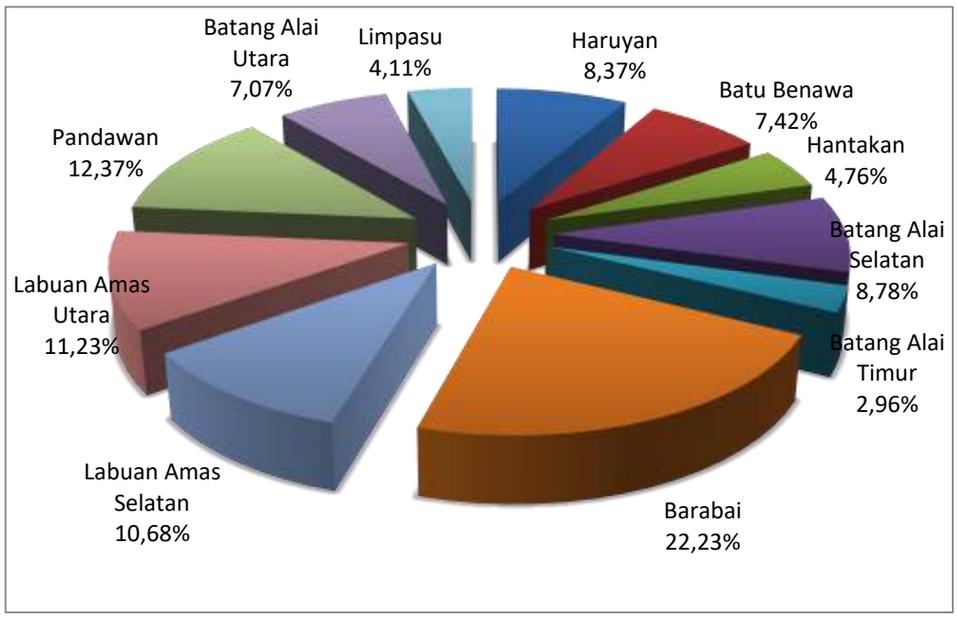
Tabel 2. 7. Kepadatan Penduduk dan Sex Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Penduduk			Sex ratio	Kepadatan Penduduk
			Laki-laki	Perempuan	Total		
1	Haruyan	101,35	11.201	11.118	22.319	100,75	220
2	Batu Benawa	54,44	9.905	9.875	19.780	100,30	363
3	Hantakan	208,55	6.424	6.265	12.689	102,54	61
4	Batang Alai Selatan	76,06	11.606	11.802	23.408	98,34	308
5	Batang Alai Timur	778,71	3.955	3.945	7.900	100,25	10
6	Barabai	40,71	29.797	29.452	59.249	101,17	1.455
7	Labuan Amas Selatan	97,82	13.979	14.474	28.453	96,58	291
8	Labuan Amas Utara	170,32	15.260	14.656	29.916	104,12	176
9	Pandawan	116,41	16.534	16.441	32.975	100,57	283
10	Batang Alai Utara	65,36	9.461	9.389	18.850	100,77	288
11	Limpasu	61,04	5.573	5.389	10.962	103,41	180
Jumlah		1770,77	133.695	132.806	266.501	100,67	151

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat di Kecamatan Barabai yakni sebesar 1.455 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batang Alai Timur

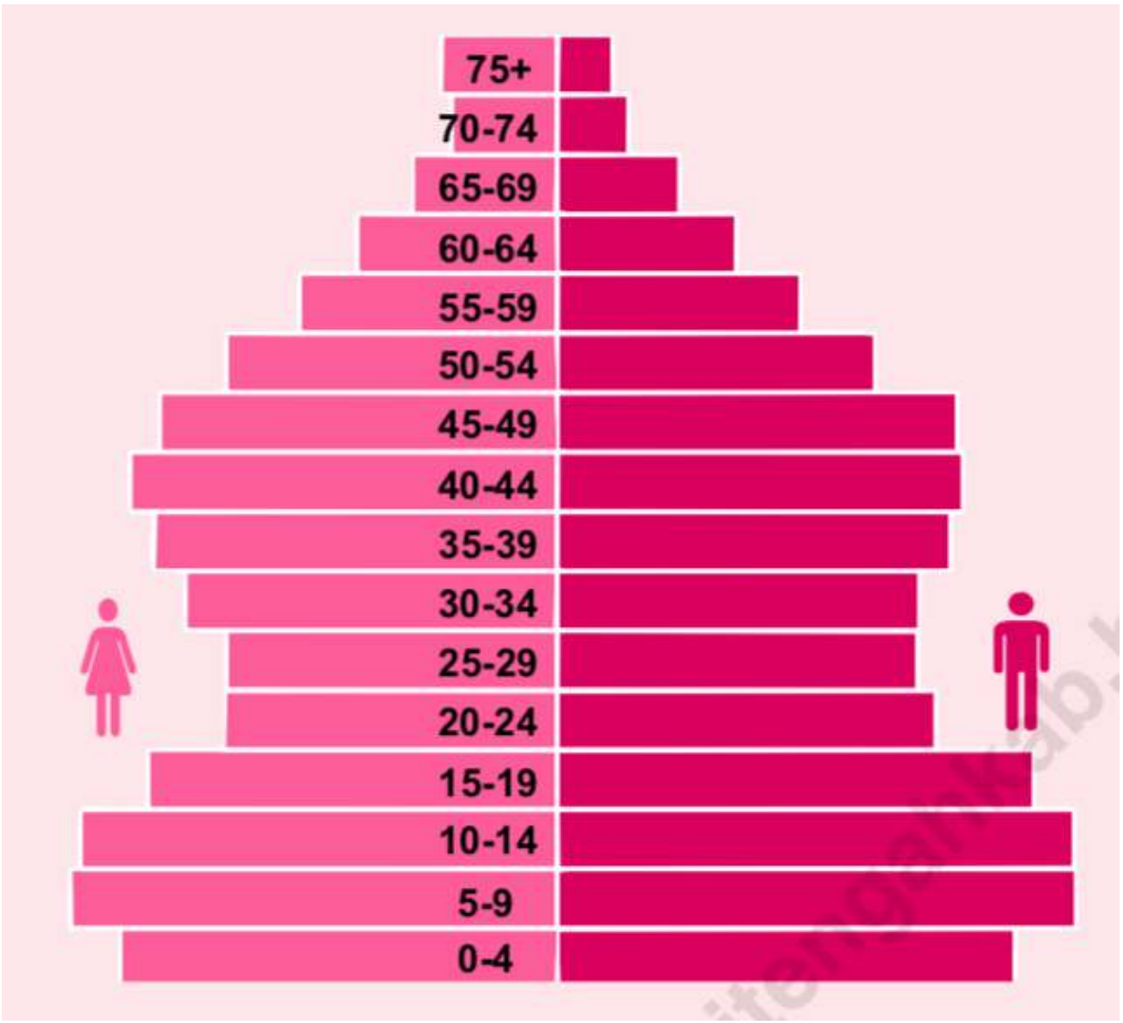
sebesar 10 Jiwa/Km2 yang merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ketimpangan distribusi penduduk di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 4. Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

Distribusi penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat berdasarkan wilayah kecamatan tidak merata, terdapat *gap* yang cukup tinggi antara kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak (Kecamatan Barabai sebanyak 59.249 jiwa atau 22,23%) dengan kecamatan yang minim penduduk (Kecamatan Batang Alai Timur sebanyak 7.900 jiwa atau 2,96%). Konsentrasi penduduk tertinggi di Kecamatan Barabai yang merupakan ibukota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain itu, penduduk juga banyak tinggal di Kecamatan lain, seperti Kecamatan Pandawan (12,37%) yang sebagian wilayahnya dekat dengan perkotaan Barabai, Kecamatan Labuan Amas Utara (11,23%) dan Labuan Amas Selatan (10,68%) yang sebagian wilayahnya dilalui jalur antar provinsi. Ketimpangan distribusi penduduk ini dikarenakan tidak meratanya fasilitas antar wilayah kecamatan. Daerah perkotaan lebih menarik sebagian besar penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikarenakan fasilitasnya yang lebih lengkap.

Berdasarkan struktur umur, pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah didominasi oleh kelompok umur dewasa (produktif) yakni 66 % dari total penduduk. Jumlah penduduk terbesar kedua pada kelompok umur muda yakni 28 % dari total penduduk dan jumlah penduduk terkecil pada kelompok umut tua yakni sebesar 6 % dari total penduduk. Hal ini digambarkan dengan piramida penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017 sebagai berikut.



Gambar 2. 5. Piramida Penduduk
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

Dari struktur ini terlihat bahwa usia bayi dan usia sekolah cukup besar sehingga perlu adanya fokus pembangunan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan tetapi dilihat secara komprehensif, bahwa pola struktur

penduduk yang besar pada usia sekolah, kemudian mengecil pada usia dewasa (produktif) hingga akhirnya rendahnya penduduk usia tua. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa penduduk banyak melakukan migrasi ke luar daerah dimana terlihat pada usia sekolah/kuliah dan usia kerja yang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi penduduk dalam migrasi keluar cukup tinggi, baik migrasi karena ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik maupun juga didorong oleh penduduk yang mencari pekerjaan di luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan dilihat dari kelompok umur produktif dan non produktif, bahwa kelompok umur produktif masih dominan yakni sebesar 66 % dari total penduduk dan kelompok umur non produktif sebesar 34 % dari total penduduk. Meskipun kelompok umur produktif masih dominan, akan tetapi kelompok umur non produktif masih cukup besar. Hal ini akan menjadi perhatian untuk menyediakan pelayan publik yang lebih baik oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari capaian pembangunan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga. Pada aspek ini terlihat sebuah f*enomena* daerah serta *analisis* dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

a. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah antara lain: Produk *Domestik Regional Bruto* (PDRB), PDRB Perkapita, struktur perekonomian wilayah, Indeks gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju *inflasi* hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama

bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam *monitoring* dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan.

1. Nilai Produk *Domestik Regional Bruto*

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di suatu regional yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan terkait tahun dasar dan metodologi penghitungannya. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Berdasarkan lapangan usaha, analisis PDRB terbagi atas Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) dan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK).

Analisis PDRB atas dasar harga berlaku bertujuan untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah pada tahun yang bersangkutan dan untuk menunjukkan pendapatan yang dihasilkan oleh penduduk yang bekerja pada lapangan usaha-lapangan usaha di suatu wilayah tertentu pada tahun yang bersangkutan. PDRD ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 8. PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	962,867	1,046,437	1,168,375	1,310,614	1,437,154	1,561,141
2	Pertambangan dan Penggalian	25,840	28,921	32,483	37,874	40854	44,958

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)
3	Industri Pengolahan	569,513	620,928	704,619	772,399	831,936	912,593
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	3,092	3,068	3,962	6,154	8,010	9,397
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17,808	19,424	22,216	24,529	26,597	29,617
6	Konstruksi	306,784	335,585	383,503	443,596	480,865	547,629
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	354,986	399,299	454,420	522,789	589,700	651,158
8	Transportasi dan Pergudangan	179,031	200,222	225,280	247,668	280,293	295,725
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	126,172	139,015	161,766	180,245	198,017	216,325
10	Informasi dan Komunikasi	149,981	166,747	189,103	207,962	229,490	254,176
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	70,252	84,322	95,882	105,548	118,015	130,691
12	Real Estate	121,936	135,949	153,856	169,148	184,570	194,417
13	Jasa Perusahaan	7,002	7,766	8,864	9,967	11,031	12,210
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	373,481	425,280	478,157	566,555	594,758	625,695
15	Jasa Pendidikan	244,388	271,607	312,881	366,824	428,706	446,506
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	65,520	74,698	83,786	98,456	111,891	119,507
17	Jasa lainnya	48,711	51,569	60,681	69,985	77,646	84,026
	PDRB	3,627,364	4,010,837	4,539,834	5,140,313	5,649,533	6,135,771

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Dilihat dari table diatas, PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tungah pada dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kenaikan sebesar 40,88 %. Hal ini

menunjukan bahwa adanya peningkatan kemampuan sumber daya ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan bertujuan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun berdasarkan pada tahun dasar. Tahun dasar perhitungan PDRB ADHK adalah tahun 2010. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 9. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

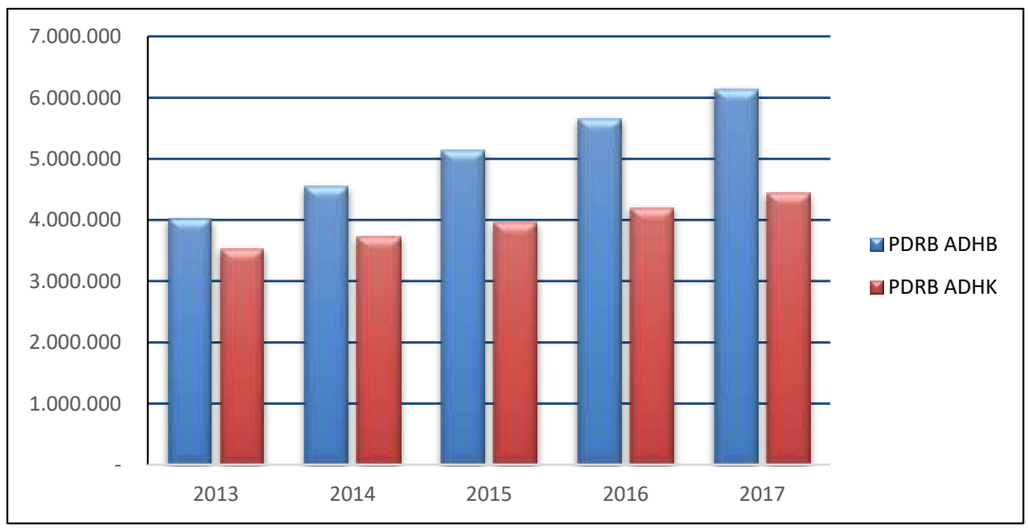
No	Sektor	2012 (Rp.Juta)	2013 (Rp.Juta)	2014 (Rp.Juta)	2015 (Rp.Juta)	2016 (Rp.Juta)	2017 (Rp.Juta)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	906,627	951,958	986,151	1,034,796	1,094,531	1,159,124
2	Pertambangan dan Penggalian	23,830	25,289	26,915	28,494	29,726	32,551
3	Industri Pengolahan	526,629	550,632	575,175	585,857	619,272	655,727
4	Pengadaan Listrik Dan Gas	3,593	3,755	4,434	5,807	6,170	6,466
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,094	16,779	17,949	19,165	20,529	22,102
6	Konstruksi	285,267	299,681	319,287	342,699	360,948	391,177
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	315,774	337,121	360,892	394,020	425,176	455,277
8	Transportasi dan Pergudangan	161,253	170,855	180,852	191,213	204,016	214,433
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,272	124,590	132,348	141,571	151,690	161,486
10	Informasi dan Komunikasi	137,909	150,226	162,077	175,940	191,602	205,835
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	61,942	70,760	75,261	78,598	85,732	91,212
12	Real Estate	112,557	119,725	127,973	134,490	142,590	149,731
13	Jasa Perusahaan	6,060	6,448	6,778	7,164	7,690	8,219
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	328,901	345,630	365,540	397,676	405,948	416,556
15	Jasa Pendidikan	222,086	239,658	259,799	284,091	310,681	318,701

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)	(Rp.Juta)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	59,265	64,762	68,867	73,726	80,454	84,827
17	Jasa lainnya	44,269	45,422	48,805	51,735	55,338	58,171
	PDRB	3,329,328	3,523,291	3,719,103	3,947,042	4,192,093	4,431,596

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Rentan waktu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 PDRD ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mengalami peningkatan sebesar 24,87 %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2012 sampai dengan 2017.

Dilihat dari perkembangan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Perkembangan ini menunjukan adanya perbaikan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2. 6. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2013-2017

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 tidak mengalami perubahan, yakni masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, Jasa

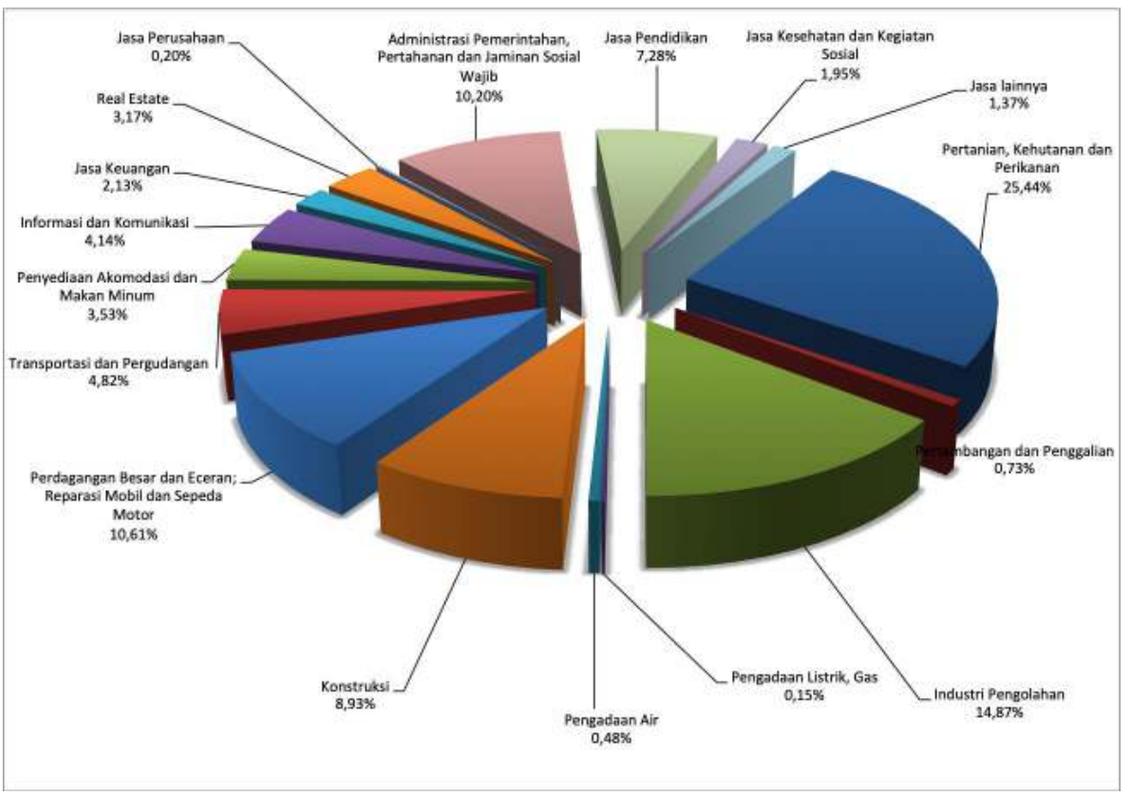
Pemerintahan dan Sektor Perdagangan. Berikut distrubusi PDRB ADHB dan PDRD ADHK masing-masing sector Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017.

Tabel 2. 10. Distribusi PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

No	Sektor	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	26,54	27,23	26,09	27,02	25,74	26,52	25,50	26,22	25,44	26,11	25,44	26,16
2	Pertambangan dan Penggalian	0,71	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,74	0,72	0,72	0,71	0,73	0,73
3	Industri Pengolahan	15,70	15,82	15,48	15,63	15,52	15,47	15,03	14,84	14,73	14,77	14,87	14,80
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,09	0,11	0,08	0,11	0,09	0,12	0,12	0,15	0,14	0,15	0,15	0,15
5	Pengadaan Air	0,49	0,48	0,48	0,48	0,49	0,48	0,48	0,49	0,47	0,49	0,48	0,50
6	Konstruksi	8,46	8,57	8,37	8,51	8,45	8,59	8,63	8,68	8,51	8,61	8,93	8,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,79	9,48	9,96	9,57	10,01	9,70	10,17	9,98	10,44	10,14	10,61	10,27
8	Transportasi dan Pergudangan	4,94	4,84	4,99	4,85	4,96	4,86	4,82	4,84	4,96	4,87	4,82	4,84
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,48	3,52	3,47	3,54	3,56	3,56	3,51	3,59	3,51	3,62	3,53	3,64
10	Informasi dan Komunikasi	4,13	4,14	4,16	4,26	4,17	4,36	4,05	4,46	4,06	4,57	4,14	4,64
11	Jasa Keuangan	1,94	1,86	2,10	2,01	2,11	2,02	2,05	1,99	2,09	2,05	2,13	2,06
12	Real Estate	3,36	3,38	3,39	3,40	3,39	3,44	3,29	3,41	3,27	3,40	3,17	3,38
13	Jasa Perusahaan	0,19	0,18	0,19	0,18	0,20	0,18	0,19	0,18	0,20	0,18	0,20	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,30	9,88	10,60	9,81	10,53	9,83	11,02	10,08	10,53	9,68	10,20	9,40
15	Jasa Pendidikan	6,74	6,67	6,77	6,80	6,89	6,99	7,14	7,20	7,59	7,41	7,28	7,19
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,81	1,78	1,86	1,84	1,85	1,85	1,92	1,87	1,98	1,92	1,95	1,91
17	Jasa lainnya	1,34	1,33	1,29	1,29	1,34	1,31	1,36	1,31	1,37	1,32	1,37	1,31
	Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

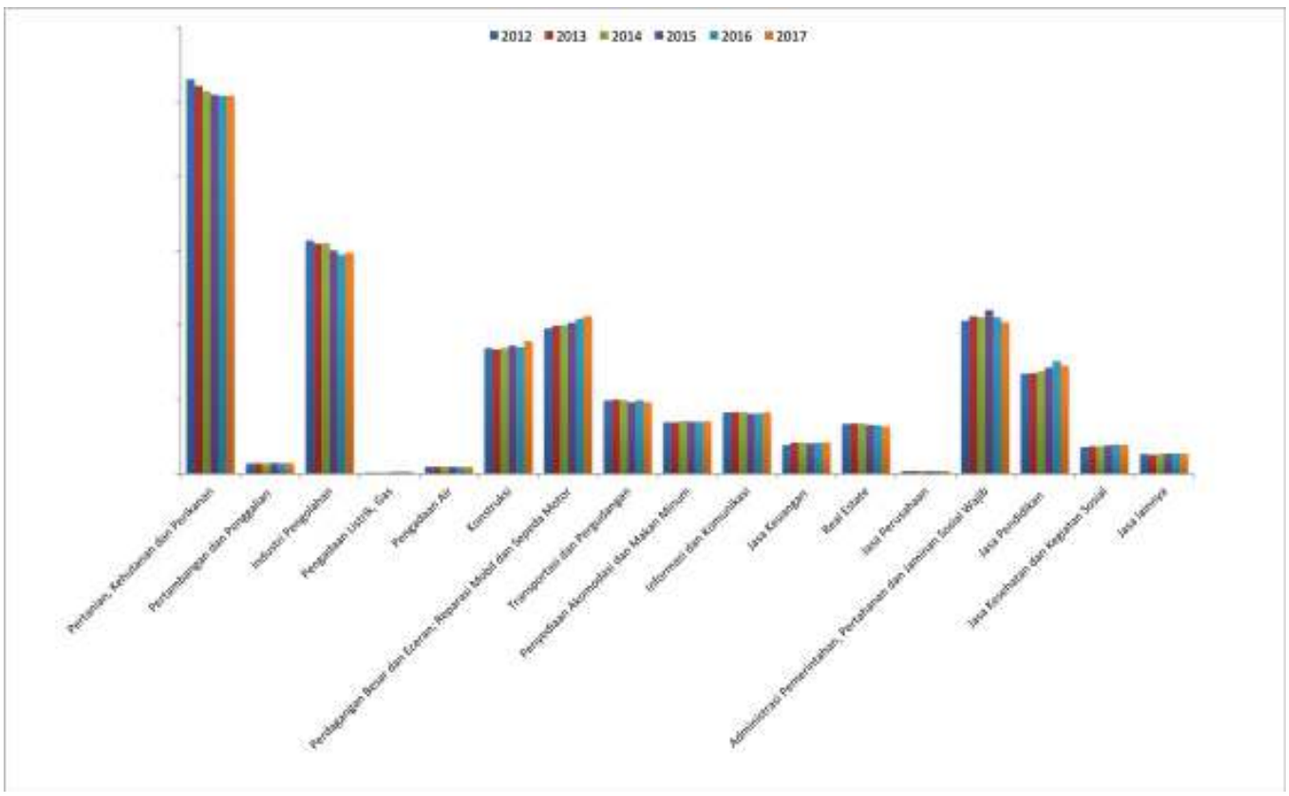
Berdasarkan harga berlaku, struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yakni sebesar 25,44 % diikuti oleh sektor industri pengolahan sebesar 14,87 %, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 10,61 %, sektor jasa pemerintahan sebesar 10,20 %, sektor konstruksi sebesar 8,93 %, serta sektor jasa pendidikan sebesar 7,28 %. Sedang sektor lain kontribusinya masih kecil berkisar 0,15 % sampai dengan 4,82 %. Distribusi masing-masing sektor pada tahun 2017 dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 7. Distribusi Sektor PDRB ADHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

Berdasarkan gambar diatas, menandakan bahwa perkembangan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih sangat tergantung dengan pertanian dan aktivitas pemerintahan, sehingga sangat rentan terhadap kondisi iklim dan anggaran serta kualitas belanja pemerintah. Selain itu, pangsa industri manufaktur juga menjadi nilai tambah dalam produksi barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hal ini tidak terlepas dari dukungan kinerja industri

pengolahan makanan dan minuman, industri karet dan industri farmasi. Walaupun demikian, perkembangan struktur perekonomian dilihat masing-masing sektor dari tahun ke tahun terlihat ada perubahan tetapi masih lamban yaitu bergerak dari sektor primer ke skunder dan tersier (perdagangan dan jasa). Perkembangan masing-masing sektor dari tahun ke tahun dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 2. 8. Perkembangan Sektor Dominan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

Kecenderungan penurunan pada sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu diwaspadai. Hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran perekonomian daerah atau makin ditinggalkannya sektor primer karena kurangnya nilai tambah yang diterima. Kasus yang sama juga terjadi pada sektor industri pengolahan, penurunan ini menggambarkan bahwa industri pengolahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak mampu bersaing dengan produk industri pengolahan dari daerah lain, sehingga perlu upaya agar sektor ini tidak semakin menurun distribusinya. Sektor dominan lainnya seperti sektor jasa pemerintah

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan sektor ini seiring dengan perkembangan kemampuan fiskal daerah, semakin tinggi kemampuan fiskal daerah maka semakin tinggi kontribusi sektor jasa pemerintah terhadap perekonomian daerah, begitu juga sebaliknya. Sektor dominan yang merupakan sektor potensial untuk dikembangkan yakni sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sebagai daerah yang posisinya berada di tengah-tengah kawasan hulu sungai merupakan kawasan yang ideal sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Selain struktur perekonomian, dapat diketahui laju pertumbuhan PDRB pada masing-masing sektor dengan melihat pada PDRB atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga konstan, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan serta sektor jasa pemerintah juga mengalami kecenderungan penurunan kontribusi dari tahun ke tahun. Sedang sektor lainnya rata-rata mengalami kecenderungan terjadi peningkatan. Berikut laju pertumbuhan masing-masing sektor pembentuk PDRB dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2. 11.Pertumbuhan PDRB ADHK
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

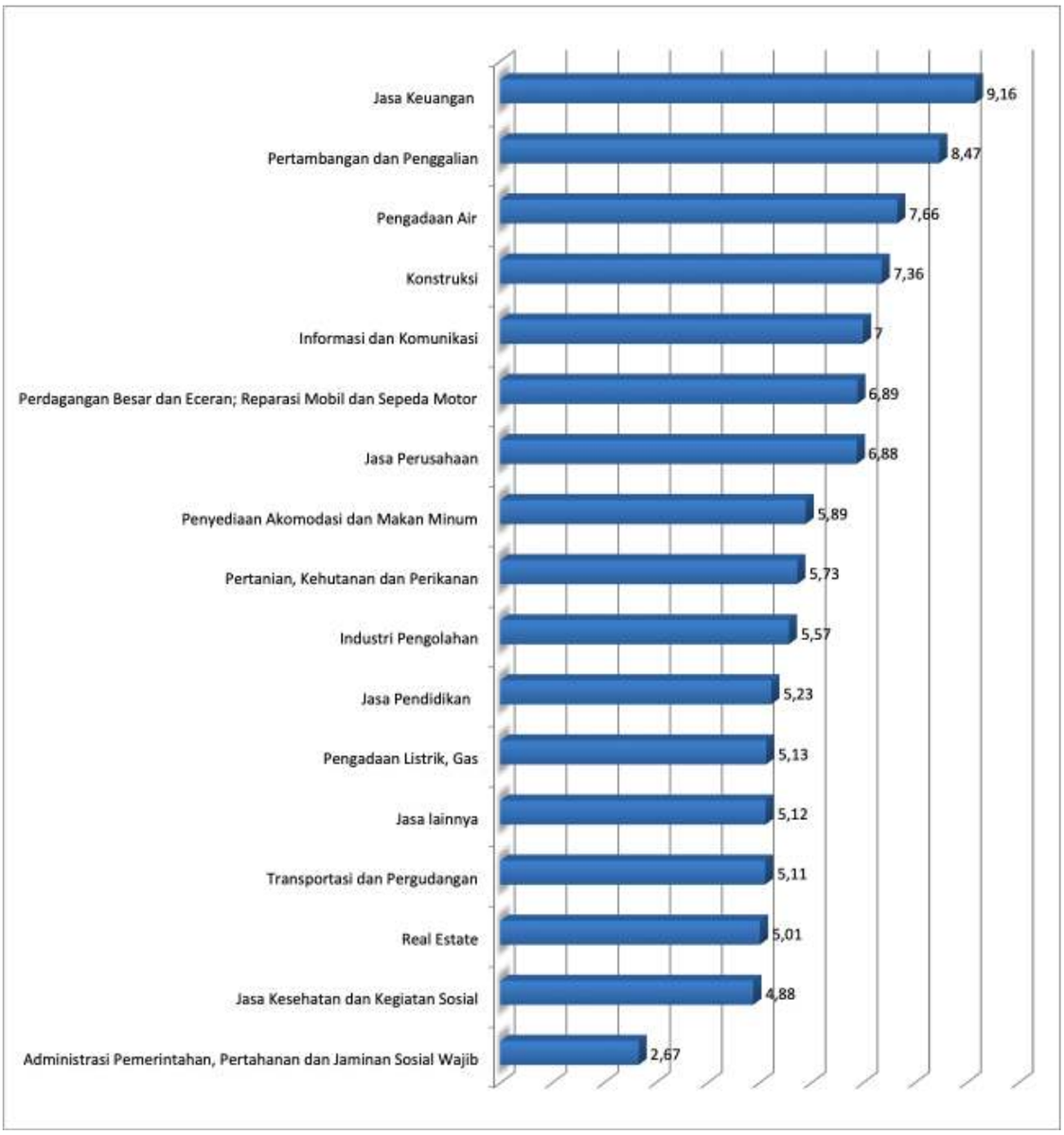
No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,59	5,00	3,59	4,93	5,77	5,73	4,44
2	Pertambangan dan Penggalian	10,04	6,12	6,43	5,86	4,33	8,47	6,88
3	Industri Pengolahan	4,91	4,56	4,46	1,86	5,70	5,57	4,51
4	Pengadaan Listrik, Gas	9,68	4,49	18,09	30,97	6,25	5,13	12,44
5	Pengadaan Air	1,85	4,25	6,97	6,77	7,12	7,66	5,77
6	Konstruksi	5,65	5,05	6,54	7,33	5,33	7,36	6,21
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,66	6,76	7,05	9,18	7,91	6,89	7,58
8	Transportasi dan Pergudangan	7,07	5,95	5,85	5,73	6,70	5,11	6,07

No	Sektor	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,31	6,24	6,23	6,97	7,15	5,89	6,63
10	Informasi dan Komunikasi	4,03	8,93	7,89	8,55	8,90	7,00	7,55
11	Jasa Keuangan	6,42	14,24	6,36	4,43	9,08	9,16	8,28
12	Real Estate	6,68	6,37	6,89	5,09	6,02	5,01	6,01
13	Jasa Perusahaan	6,71	6,41	5,11	5,70	7,33	6,88	6,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,23	5,09	5,76	8,79	2,08	2,67	5,27
15	Jasa Pendidikan	5,23	7,91	8,40	9,35	9,36	5,23	7,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	9,28	6,34	7,06	9,13	4,88	7,48
17	Jasa lainnya	4,21	2,61	7,45	6,00	6,97	5,12	5,39
	PDRB	4,85	5,83	5,56	6,13	6,21	5,72	5,72

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

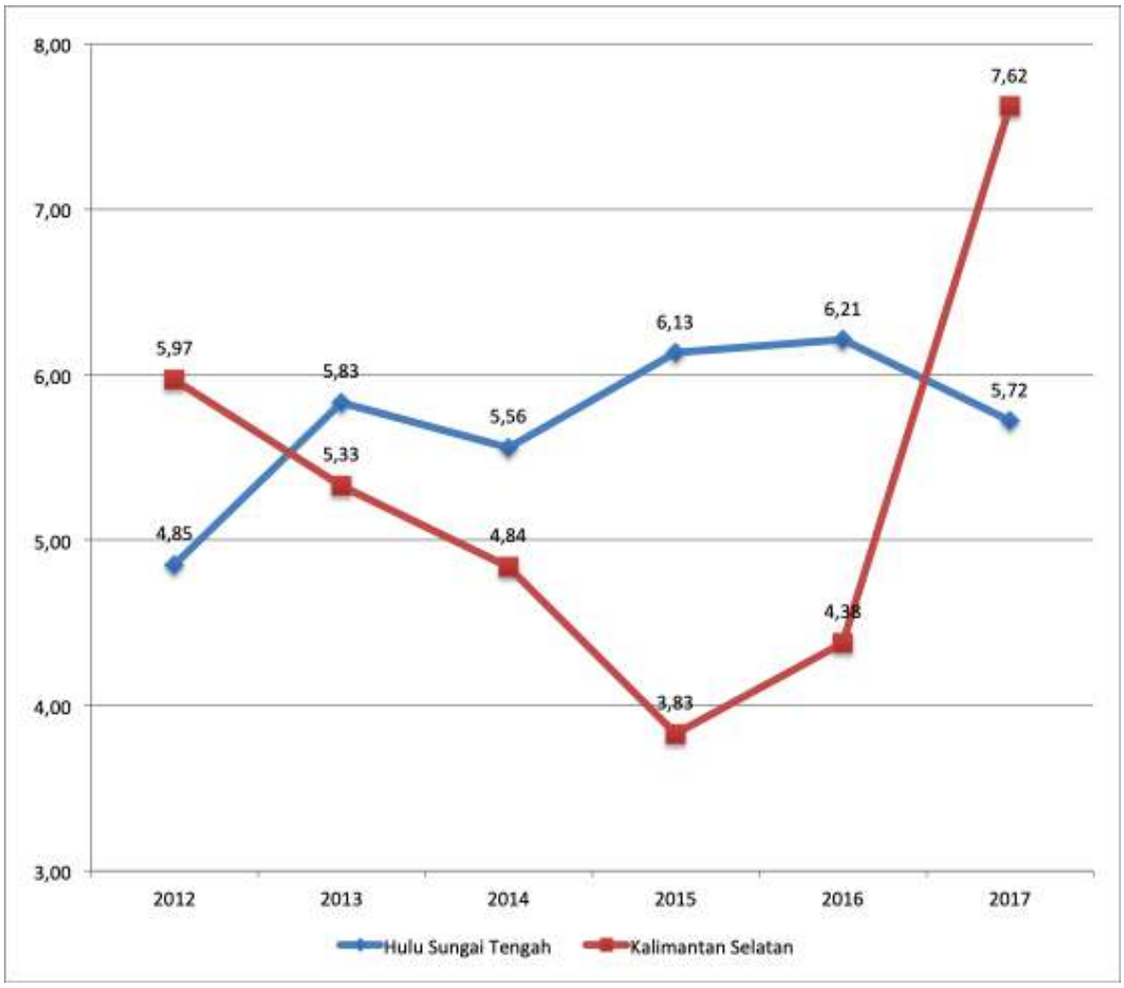
Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilihat dari rata-rata pertumbuhan tertinggi selama 6 tahun yakni sektor pengadaan listrik dan gas rata-rata sebesar 12,44 %, sektor Jasa Keuangan rata-rata sebesar 8,28 %, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Jasa Pendidikan rata-rata sebesar 7,58 %, dan sektor jasa kesehatan rata-rata sebesar 8,00 %. Sektor lainnya dengan rata-rata pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan PDRB ADHK (5,72 %) yakni Sektor informasi dan komunikasi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor jasa perusahan, sektor real estate, sektor konstruksi, sektor pengadaan air dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor yang rata-rata pertumbuhannya dibawah rata-rata pertumbuhan PDRB (5,72 %) yakni sektor jasa lainnya, sektor industri pengolahan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Dari rata-rata laju pertumbuhan PDRB-ADHK tahun 2012–2017 sebesar 5,72 % per tahun, maka ada 13 lapangan usaha yang laju

pertumbuhannya di atas rata-rata laju pertumbuhan PDRB dan ada 4 lapangan usaha yang rata-rata laju pertumbuhannya di bawah laju pertumbuhan PDRB. Sedangkan Laju pertumbuhan masing-masing sektor dilihat pada tahun 2017 yang tertinggi adalah sektor jasa keuangan. Terjadi perubahan struktur dimana pada tahun 2016 laju pertumbuhan sektor jasa pendidikan tertinggi, akan tetapi mengalami penurunan drastis pada tahun 2017. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Gambar 2. 9. Laju Pertumbuhan Sektor PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2017

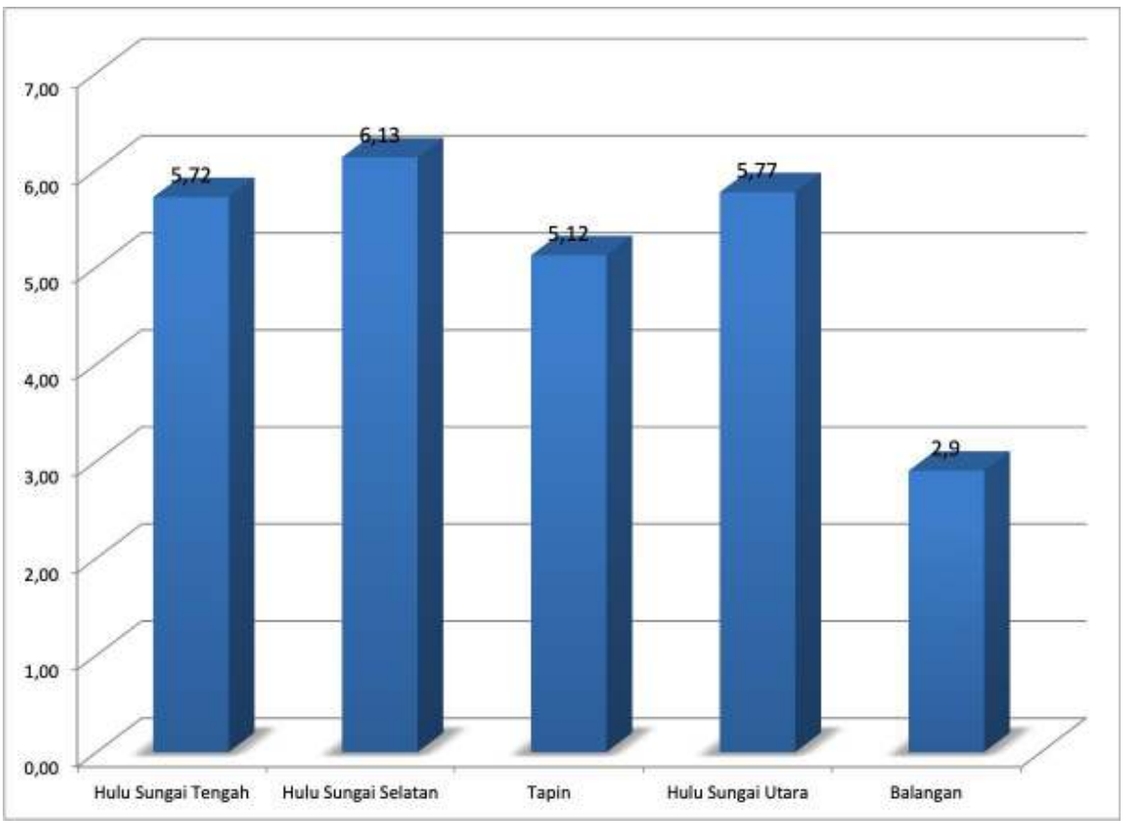
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 bahkan jauh dibawah laju pertumbuhan ekonomi kalimantan selatan. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.



Gambar 2. 10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi sangat tergantung dengan kinerja sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor utama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mempunyai kontribusi terbesar terhadap total PDRB. Selain itu, penurunan pada beberapa sektor dominan lainnya sangat berpengaruh terhadap turunnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan serta jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih dibawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Hulu Sungai Utara meskipun masih diatas Kabupaten Tapin dan Balangan dimana pada tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertinggi diantara kabupaten sekitar. Berikut laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten sekitar.

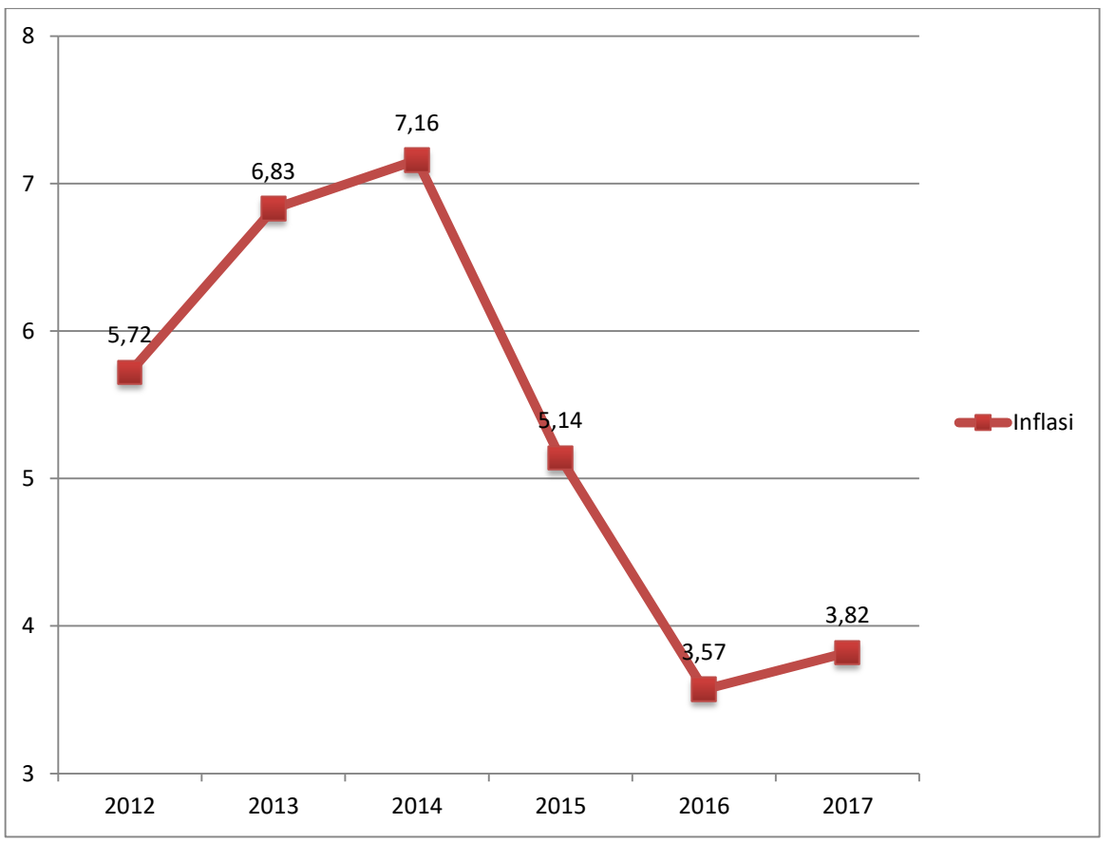


Gambar 2. 11. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017

2. Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), terjadinya negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi, tingginya permintaan barang dan jasa, dan perilaku

masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terjadi fluktuasi. Lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. 12. Tingkat Inflasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

Inflasi tertinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 7,16 %. Hal ini disebabkan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM pada tahun 2014. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi deflasi yakni 5,14 % pada tahun 2015 dan 3,57 % pada tahun 2016 serta naik pada tahun 2017 menjadi 3,82 %.

3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita bertujuan untuk menunjukkan nilai PDRB perorang yakni gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro. Menurut klasifikasi Bank Dunia, pendapatan perkapita kurang dari $1.045 dikategorikan sebagai pendapatan perkapita rendah, sementara pendapatan perkapita antara $1.045 - $4.125 termasuk pendapatan perkapita menengah kebawah, dan pendapatan perkapita lebih tinggi dari $12.746 temasuk pendapatan perkapita tinggi. Berikut PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2. 12. PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

PDRB	2012	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB Perkapita ADHB (Juta Rupiah)	14,47	15,80	17,66	19,75	21,45	23,02
PDRB Perkapita ADHK (Juta Rupiah)	13,28	13,88	14,47	15,16	15,92	16,63
Laju Pertumbuhan						
PDRB Perkapita ADHB ()	6,62	9,19	11,76	11,84	8,62	N/A
PDRB Perkapita ADHK ()	3,52	4,51	4,23	4,83	4,96	4,48

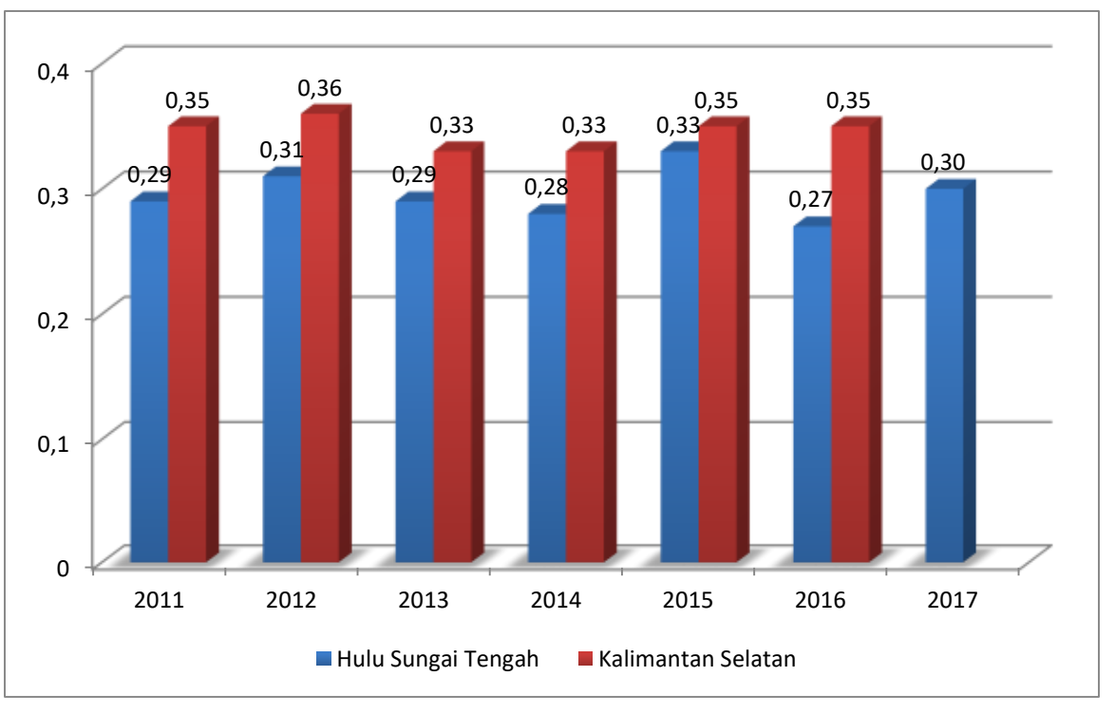
Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama kurun tahun 2012-2017 semakin meningkat setiap tahunnya. Apabila diukur dalam USD menurut klasifikasi bank dunia, PDRB Perkapita Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk dalam kategori wilayah berpendapatan menengah kebawah.

4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang

sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama, sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Indeks Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini penting untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya dinikmati oleh segelintir orang yang akhirnya menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Angka gini ratio dibawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan cukup merata atau masih baik, angka gini ratio diatas 0,5 dapat diartikan tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan serius atau buruk, sedangkan jika diantara 03-05 kondisi ketimpangan sedang. Dari data dalam 5 tahun terakhir, angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih berada di angka 0,3, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Hulu Sungai Tengah masih kategori sedang. Dibandingkan dengan Prov.Kalimantan Selatan angka gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih lebih rendah seperti pada gambar berikut.



Gambar 2. 13. Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2017

5. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimana hal ini merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah. Dalam mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2017, garis kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar Rp 322.392,-. Data-data kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

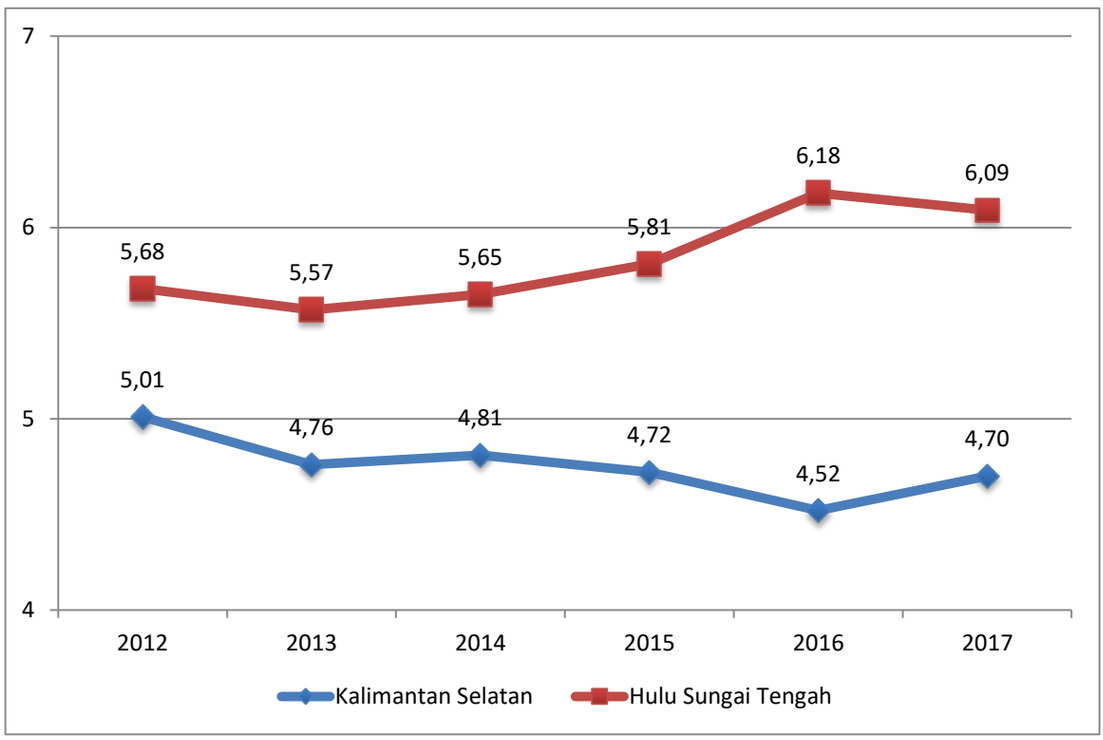
Tabel 2. 13. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/bln)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2012	241.973	14.274	5,68
2013	257.580	14.181	5,57
2014	268.522	14.557	5,65
2015	279.530	15.080	5,81
2016	322.392	16.220	6,18
2017	322.392	16.169	6,09

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu mendapat perhatian yang serius. hal ini dikarenakan trend kenaikan pada jumlah penduduk miskin maupun tingkat kemiskinan pada tahun 2015 dan 2016 serta pada tahun 2017 menurun namun tetap lebih tinggi dibandingkan kemiskinan Kalimantan Selatan dan Kabupaten lainnya. Meskipun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada periode 2015 sampai dengan 2017 laju pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan pendapat perkapita serta penurunan angka inflasi, namun

tidak berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Perlu adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menangani fenomena tersebut. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan, angka kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah selama 6 tahun terkahir masih lebih tinggi. Dua tahun terkahir angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan terus menurun, hal ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berikut perbandingan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.



Gambar 2. 14. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Selatan dan Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

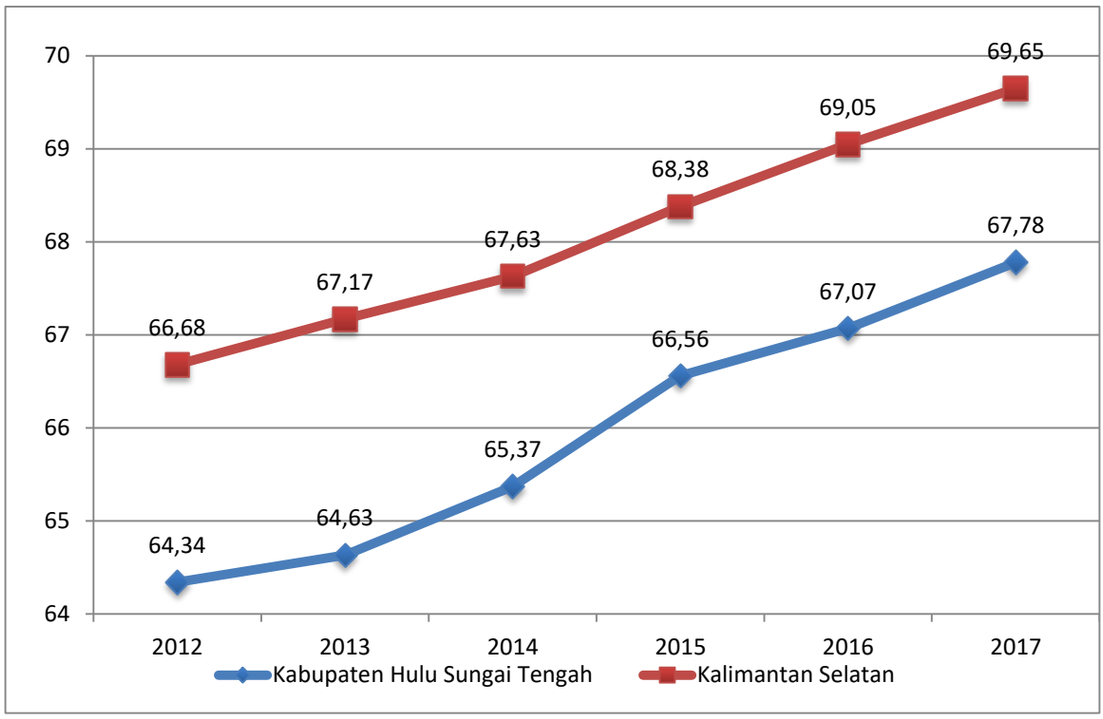
Perkembangan aspek kesejahteraan masyarakat khususnya fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat secara umum dari perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan,

pendidikan dan ekonomi, IPM dapat dijadikan indeks acuan pembangunan manusia di suatu daerah.

1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indeks komposit dari komponen kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Indeks kesehatan merupakan dimensi umur panjang dan sehat yang diukur dari indikator umur harapan hidup. Indeks pendidikan mencerminkan dimensi pengetahuan yang diukur dari angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sedang indeks pendapatan merupakan dimensi kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita rill. Semakin tinggi angka yang dihasilkan semakin baik kualitas manusianya.

Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan metode perhitungan baru pada kurun tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan, namun masih dibawah IPM Kalimantan Selatan. Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai tengah.



Gambar 2. 15. IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

Pada tahun 2012, IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebesar 64,34 dan terus meningkat sampai tahun 2017 menjadi 67,78. Selama kurun tahun 2012 sampai dengan

tahun 2017 telah naik sebesar 5,35 %. Lebih rinci perkembangan komponen perhitungan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 14. Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2012-2017

Tahun	Umur Harapan Hidup (Th)	Angka Harapan Sekolah (Th)	Rata-rata Lama Sekolah (Th)	Pengeluaran Riil Per Kapita (Rp.000,-)	IPM	Reduksi Shortfall
2012	64,06	11,23	6,90	10.802	64,34	1,22%
2013	64,24	11,25	6,94	10.960	64,63	0,81%
2014	64,33	11,42	7,27	11.040	65,37	2,09%
2015	64,83	11,94	7,52	11.142	66,56	3,44%
2016	65,06	12,00	7,58	11.527	67,07	1,53%
2017	65,30	12,17	7,79	11.635	67,78	2,16%

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Kenaikan IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini adalah hasil komposit dari kenaikan angka umur harapan hidup dari 64,06 (tahun) pada tahun 2012 menjadi 65,30 (tahun) pada tahun 2017 atau naik 1,24 tahun. Sama halnya dengan angka harapan sekolah selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2017 naik dari 11,23 tahun menjadi 12,17 tahun atau naik 0,94 tahun. Rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan selama kurun tahun 2012 sampai dengan 2017 dari 6,90 tahun menjadi 7,79 tahun atau naik sebesar 0,89 tahun. Begitu juga dengan pengeluaran perkapita rill naik dari Rp 10.802,- pada tahun 2012 menjadi Rp 11.635,- pada tahun 2017.

Dari data Reduksi shortfall IPM dari tahun 2012–2017 terlihat bahwa pada periode 2012–2013 kecepatan perubahan IPM masuk kategori sangat lambat dengan nilai reduksi shortfall masih di bawah 1,3. Tetapi perubahan IPM pada tahun 2014 sampai dengan 2015 berubah sangat cepat yang ditandai dengan nilai reduksi shortfall di atas nilai 1,7. Reduksi shortfall IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah turun kembali ke

kategori menengah dengan nilai berada antara 1,5-1,7 pada tahun 2016 dan naik kembali ke katagori berubah sangat cepat pada tahun 2017.

2. Pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Perbedaan mendasar antara keduannya dimana APM mengukur jumlah siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolahnya, sedangkan APK tidak memperhatikan siswa yang bersekolah sesuai dengan umur usia sekolah. Baik APK maupun APM merupakan indicator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Indikator ini dapat menunjukkan keterjangkauan pendidikan di suatu daerah.

APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tingkat SD/MI pada 10 tahun terakhir sudah melebihi angka 100 %, pada kurun tahun 2006-2012 berkisar antara 111–114 %, pada tahun 2013 kembali naik ke angka 117,52 %, akan tetapi pada tahun 2017 turun menjadi 109,32 %. Sedang APM dari tahun 2020–2011 selalu mengalami peningkatan dan pada tahun 2012 sudah mencapai 97,49 %, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 87,07 % dan stagnan pada tahun 2014, serta meningkat kembali menjadi 99,12 pada tahun 2017.

Sementara itu APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada jenjang SMP/MTs dari tahun ke tahun mengalami trend

peningkatan dimana pada tahun 2014 sudah mencapai angka 100,53 %. Akan tetapi turun menjadi 81,27 % pada tahun 2017. Begitu pula untuk APM SMP/MTs selalu meningkat dari tahun 2006 sampai dengan angka 85,69 % pada tahun 2013, tetapi pada tahun 2014 turun menjadi 78,90 % dan pada tahun 2017 turun kembali menjadi 72,66 %.

Pada tingkat SMA/SMK/MA, APK Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2006–2011 selalu meningkat, tetapi dari tahun 2012-2015 mengalami kecenderungan penurunan hingga pada tahun 2017 menjadi 84,90 %. Sedangkan pencapaian APM SMA/SMK/MA pada tahun 2006–2011 mengalami peningkatan, tetapi kurun tahun 2012–2015 terjadi fluktuasi dimana sempat naik sampai angka 81,63 % pada tahun 2013, dan terus turun hingga menjadi 55,81 % pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 66,63 %.

Perkembangan APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari Tahun 2006 sampai dengan tahun 2017 secara lebih jelas pada tabel berikut.

Tabel 2. 15. APK dan APM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2017

No.	Tahun	SD/MI		SMP/MTs		SMA/MA/SMK	
		APK	APM	APK	APM	APK	APM
1	2006	102,06	92,06	89,78	69,11	44,00	34,00
2	2007	102,06	92,21	84,62	77,05	82,00	67,00
3	2008	110,05	95,90	91,16	74,88	86,00	74,00
4	2009	112,38	97,08	95,67	77,00	87,09	75,00
5	2010	113,51	98,23	96,21	76,90	88,01	79,87
6	2011	114,11	99,18	98,43	77,94	91,13	82,81
7	2012	111,43	97,49	97,50	85,36	86,43	78,81
8	2013	117,52	87,07	97,47	85,69	82,75	81,63
9	2014	103,91	87,06	100,53	78,90	80	67,10
10	2015	102,76	88,75	99,89	82,63	75,74	55,81
11	2016	106,68	96,49	89,91	74,85	83,71	64,97
12	2017	109,32	99,12	81,27	72,66	84,90	66,63

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Pada kedua indikator tersebut, baik pada jenjang SMP/MTs menunjukkan tren penurunan pada dua tahun terakhir yakni tahun 2016 dan 2017, yang berarti terjadinya penurunan anak usia sekolah yang bersekolah. Terlepas dari hal tersebut, perlu adanya upaya dalam rangka peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan sehingga terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah yang dapat bersekolah baik melalui peningkatan sarana prasarana, pembiayaan maupun peningkatan minat bersekolah.

3. Kesehatan

- Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Fokus kesejahteraan Sosial lainnya dapat tergambar dari tingkat Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). AKHB adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. AKHB didapatkan dengan menghitung Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran. Semakin kecil AKHB yang dicapai berarti tingkat kesejahteraan masyarakat makin rendah karena berkaitan dengan kemampuan pengetahuan tentang pentingnya pelayanan kesehatan dan kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Perkembangan AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 16. AKHB Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006-2017

No.	Tahun	AKB per 1,000 kelahiran	AKHB
1	2006	7	993
2	2007	12	988
3	2008	14	986
4	2009	11	989
5	2010	10	990
6	2011	13	987
7	2012	12	988
8	2013	12	988

No.	Tahun	AKB per 1,000 kelahiran	AKHB
9	2014	18	982
10	2015	18	982
11	2016	18	982
12	2017	14	986

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

AKHB yang semakin kecil pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa jumlah bayi yang meninggal umur dibawah 1 tahun semakin banyak terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran untuk memeriksakan kehamilan dan keterlambatan rujukan sehingga perlunya peningkatan jangkauan dan akses pelayanan kesehatan. Kendala lainnya adalah banyaknya kasus kehamilan yang tidak dikehandaki, dimana ibu hamil seringkali terlambat ataupun tidak memeriksakan kehamilannya. Hal ini tentunya memerlukan kerja keras dengan upaya yang lebih sistematis dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil yang rentan.

- Persentase Balita Gizi Buruk

Gizi buruk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah kurun tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 17. Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2017

Tahun	Balita Gizi Buruk
2016	0,03 %
2017	0,03 %

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

4. Ketenagakerjaan

- Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja atau disebut juga kesempatan kerja digunakan untuk mengetahui peluang atau tersedianya lapangan pekerjaan sehingga penduduk angkatan kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya masing-masing. Dapat disimpulkan bahwa kesempatan kerja merupakan seberapa besar permintaan atas tenaga kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 18. Rasio Penduduk Yang Bekerja
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2011-2017

TAHUN	PENDUDUK BEKERJA	ANGKATAN KERJA	RASIO PENDUDUK BEKERJA
2011	129.882	137.574	0,94
2012	128.801	135.299	0,95
2013	127.339	129.502	0,98
2014	123.276	128.481	0,96
2015	135.082	139.214	0,97
2016	n/a	n/a	n/a
2017	138.463	144.426	0,96

Sumber : Hulu Sungai Tengah Dalam Angka Tahun 2018

Berdasarkan table diatas, pada tahun 2017 sebesar 96% dari angkatan kerja yang ada memperoleh kesempatan kerja sedangkan 4% dari angkatan kerja masih mencari kerja atau pengangguran.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

a. Focus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Indikator-indikator utama pencapaian dalam pembangunan pelayanan pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut.

Tabel 2. 19. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pendidikan
Tahun 2010-2018

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata lama sekolah (th)	6,87	6,87	6,9	6,94	7,27	7,27	7,58	7,79	7,53

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Usia Harapan Sekolah (th)	10,95	11,09	11,23	11,25	11,42	11,42	12	12,17	12
3	Angka Melek Huruf (%)	97,42	97,43	97,49	97,5	97,56	97,57	97,92	97,50	98,89
4	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (%)	98,23	99,18	98,24	98,54	100	88,75	99,98	93,19	89,84
5	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (%)	76,90	77,94	86,39	87,28	89,01	86,23	92,20	91,43	97,5
6	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah	76,37	82,04	98,79	110,83	87,28	77,14	74,9	75,5	77,0
7	Rasio Guru/Murid	573,84	607,85	695,80	932,57	1159,1	846,41	787,75	838,78	819,51
8	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	67	78	83	85	88	96	62	80,0	85,0
9	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	56	64	72	81	86	92	70	80,0	88,0
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%)	0,93	1,41	0,15	0,14	0,15	0,02	0,006	0,03	0,15
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	1,42	1,55	0,44	0,29	0,4	0,3	0,1	0,99	0,75
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,19	100	100	100	100	100	92,96	99,78	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	100	100	100	100	99,92	100	94,10	98,27	97,56
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%)	85,59	83,87	61,5	100,77	88,49	90,19	97,40	100,0	99,8
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA (%)	82,99	74,10	85,11	86,74	63,86	63,98	80,45	100,0	99,0

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
16	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	34,95	48,86	50,55	73,41	75,92	71,73	85,64	90,82	85,07

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

2. Kesehatan

Derajat kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah hasil dari upaya pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 20. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2010-2018

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio Posyandu per jumlah balita	18,55	18,63	14,97	15,08	16,88	17,90	55,70	61,98	61
2	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik per satuan penduduk	0,73	0,73	0,23	0,09	0,25	0,60	0,30	0,35	0,24
3	Rasio Rumah Sakit Per satuan Penduduk	0,004	0,0041	0,0040	0,0039	0,0039	0,0038	0,0038	0,0038	0,0074
4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,13	0,13	0,094	0,17	0,12	0,15	0,27	0,22	0,15
5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,31	1,31	1,82	2,29	2,51	2,52	0,83	0,49	0,27
6	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	100 %	30,43 %	33,50 %	54,00 %	100 %	85,60 %	68,52 %	66,78 %	86,26 %
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,90 %	98,57 %	83,10 %	80,40 %	83,00 %	83,40 %	84,51 %	84,40 %	83,00 %

No	Indikator	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
8	Cakupan Desa /Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	79,88	67,8	79,9	81,1	91,1	85,8	90,53	84,61	80,50
9	Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33,20 %	33,10 %	33,80 %	37,60 %	37,00 %	46,96 %	39,40 %	43,81 %	49,00 %
11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan kunjungan Bayi	96,00 %	68,01 %	61,60 %	84,00 %	68,79 %	72,65 %	76,96 %	83,50 %	83,30 %
14	Cakupan puskesmas	172,73	172,73	172,73	172,73	172,73	172,73	152,50	155,70	155,70
15	Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu,Poskesdes,Polindes dll)	94,08	94,08	95,86	97,63	57,14	95,00	56,70	60,50	60,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

3. Pekerjaan Umum

Pembangunan urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 21. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (baik dan sedang)	71,22%	59,02%	61,06%	63,60%	66,13%	67,06%	67,88%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Rasio jaringan Irigasi	24,84%	26,81%	28,79%	67,34%	92,04%	92,80%	93,21%
3	Persentase rumah tangga bersanitasi yang layak	55,30%	55,99%	58,24%	59,41%	60,20%	61,01%	62,13%
4	Persentase infrastruktur pejalan kaki yang layak di perkotaan	3,63%	4,72%	6,89%	8,16%	9,07%	22,67%	33,40%
5	Persentase berkurangnya luas genangan	0,42%	6,77%	12,27%	22,99%	25,52%	29,44%	46,11%
6	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	19,35%	22,75%	24,09%	25,63%	27,18%	28,22%	28,53%
7	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	18,27%	19,55%	20,60%	25,12%	46,13%	52,20%	57,54%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012 - 2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 22. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perumahan Dan Permukiman Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rumah Tangga pengguna air bersih	73,84%	76,67%	83,42%	73,73%	74,28%	76,99%	78,56%
2	Rumah tangga pengguna listrik	72,56%	77,56%	82,56%	87,56%	88,14%	89,95%	94,01%
3	Rumah tangga Bersanitasi	55,30%	55,99%	58,24%	59,41%	60,20%	61,01%	62,13%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	Lingkungan pemukiman kumuh	7,99%	7,99%	7,99%	7,99%	7,46%	6,93%	4,66%
6	Rumah Layak Huni	84,84%	86,54%	87,39%	90,36%	90,28%	90,82%	91,15%
7	Rasio permukiman layak huni	92,01%	92,01%	92,01%	92,01%	92,54%	93,07%	95,34%

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

5. Penataan Ruang

Pembangunan Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada dapat dilihat dari beberapa indikator berikut.

Tabel 2. 23. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase penambahan luas Ruang Terbuka Hijau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase peraturan Tata ruang Daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundangan Tata Ruang	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	42,86%	42,86%
3	Meningkatnya kepuasan pelayanan pemanfaatan ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%
4	Persentase tingkat kepatuhan sesuai dengan rekomendasi pemanfaatan ruang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

6. Perhubungan

Pembangunan urusan Perhubungan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 24. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2010 – 2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	302.400	237.600	198.000	162.000	145.800	129.600	111.800	110.300	109.400
2	Rasio ijin trayek	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	2,165	1,336	1,272	1,326	1,392	1,448	1327	1020	945
4	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Angkutan darat	0,041	0,053	0,063	0,077	0,086	0,096	0,107	0,116	0
6	Kepemilikan KIR angkutan umum	851	890	929	994	1,023	1,010	1,056	1,169	1,225
7	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	60 menit	60 menit	60 menit
8	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum									
	1. mobil angkutan umum	23,800	23,800	23,800	-	-	-	-	-	-
	2. mobil bus	26,300	26,300	26,300	-	-	-	-	-	-
	3. mobil barang									
	a, JBB s/d 2ton	-	-	-	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
	b, JBB 2 tons/d 7 ton	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	c, JBB 7 ton keatas	-	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
9	Pemasangan rambu-rambu	99	85	88	99	115	207	N/A	24	N/A

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

7. Lingkungan Hidup

Pembangunan urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 25. Indikator Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Penanganan Sampah	73,28%	78,13%	85,17%	85,14%	82,36%	95,61%	72,86%	50,11%	73,90%
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk	0,32	0,47	0,5	0,5	0,55	0,63	0,47	0,31	0,79
4	Penegakan Hukum Lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas LH dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

8. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pembangunan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 26. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kepemilikan KTP	65,36%	74,48%	87%	85,13%	89,93%	95,43%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Rasio Penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,45	0,94	0,8	0,85	0,90	0,96
3	Rasio bayi ber akte kelahiran	0,57	0,67	0,74	0,86	0,89	0,96
4	Kepemilikan akta kelahiran per 100 penduduk	0,41	0,17	0,25	0,35	0,45	0,50
5	Rasio pasangan ber akte nikah	0,68	0,22	0,74	0,38	0,52	0,54
6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Belum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Belum	sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

Sumber : Disdukcatpil dan KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

9. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 27. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	3,49	3,45	3,39	3,35	3,31	3,24	3,19
2	Rasio akseptor KB	78,20	78,30	78,40	69,82	77	80	86
3	Cakupan peserta KB aktif	76,29	76,79	81,30	69,82	76,18	76	79
4	Keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I	29,91	35,23	35,20	35,23	N/A	N/A	N/A

Sumber : Disdukcatpil dan KB Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

10. Sosial

Pembangunan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 - 2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 28. Indikator Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	13	13	13	14	14	14
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	38,51	13,18	13,74	16	16	20
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	5,40	13,18	38,46	16	19	22

Sumber :Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

11. Ketenagakerjaan

Pembangunan Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 29. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka sangketa pengusaha-pekerja pertahun	3,1	16,4	5,48	6,06	1,50	N/A	N/A
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	75,23%	71,12%	69,51%	71,12%	71,65%	71,96%	74,58%
3	Pencari kerja yang ditempatkan	475 orang	285 orang	560 orang	229 orang	194 orang	386 orang	447 orang
4	Tingkat pengangguran terbuka	4,80%	1,67%	4,05%	4,05%	5,37%	4,13%	4,13%

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Keselamatan dan perlindungan	1,10	1,50	1,20	1,20	1,70	2,70	2,70
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

12. Koperasi dan UKM

Pembangunan Koperasi dan UKM di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012 - 2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 30. Indikator Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase Koperasi aktif	47,74 %	47,74 %	47,74 %	47,74 %	47,74 %	47,74 %	68,83 %
2	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	94,80 %	97,39 %	92,88 %	92,88 %	93,50 %	95,85 %	91,65 %

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

13. Penanaman Modal

Pembangunan urusan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 31. Indikator Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	1	2	1	0	98	13

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Rp Milyar	19,0	0,075	15,4	4,7	79,331	40,22	61,265
3	Sistem informasi pelayanan perizinan dan administrasi pemerintahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Indeks kepuasan layanan masyarakat	79,34	80,06	80,67	86,06	81,57	81,56	83,74

Sumber : Dinas PTSP Namod dan Naker Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

14. Kebudayaan

Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 32. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	2	2	3	3	3	3	3	9
2	Jumlah Benda, Situs,dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	12	16	16	16	16	16	16	16	16

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

15. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 33. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Organisasi Pemuda/OKP Yang Aktif	14	14	14	14	14	14	17	18	18
2	Jumlah organisasi olahraga	28	29	29	29	29	29	29	29	30
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	4	5	5	5	5	6	6	6	6
4	Jumlah Kegiatan Olahraga Yang Diikuti	6	6	6	7	7	7	7	7	7
5	Gelanggang/balai remaja (selain swasta)	1	1	1	1	1	1	1	2	2
6	Jumlah Lapangan Olahraga milik Pemda	78	78	78	78	78	78	78	95	101

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata, 2018

16. Keamanan dan Ketertiban

Pembangunan Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 34. Indikator Capaian Kinerja Urusan Keamanan dan Ketertiban Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	N/A	N/A	N/A	1	1	6	4	4	0
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	N/A	N/A	N/A	1	1	5	5	1	1
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk	33	43	43	41	41	42	43	187	157
4	Jumlah linmas per 10,000 penduduk	1	1	1	2	2	2	2	2	2
5	Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	1	1	1	2	2	2	2	2	2

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
6	Penegakan PERDA	0	0	0	0	0	0	20	20	20
7	Cakupan patroli petugas Satpol PP	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten	80	80	80	80	80	80	55	60	65
9	Petugas Linmas di Kabupaten	1.380	1.380	1.380	1.380	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
10	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	40%	50%	65%	78%	78%	80%	95%	100%	100%
11	Tingkat waktu tanggap (reponse time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	0%	87%	95%	82%	90%	85%	95%	100%	100%

Sumber : Kantor Satpol PP dan PK, Kesbangpol dan BPBD Kab. HST, 2019

17. Ketahanan Pangan

Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 35. Indikator Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Ketersediaan pangan utama	40%	47%	45%	48%	45%	50%	52%	78%	76,6%
2	Regulasi Ketahanan Pangan	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,2019

18. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 36. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio kecukupan sarana/prasarana desa	8:161	25:161	160:161	161:161	161:161	161:161
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	220	220	220	220	220	220
3	LPM Aktif	161	161	161	161	161	161
4	PKK Aktif	181	181	181	181	181	181
5	Posyandu Aktif	408	404	418	416	428	430
6	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	35,10%	35,40%	34,80%	35%	36%	40%

Sumber : DPMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

19. Statistik

Pembangunan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 37. Indikator Capaian Kinerja Urusan Statistik Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Buku ”Kabupaten dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”PDRB Kabupaten”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

20. Kearsipan

Pembangunan Kearsipan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 -2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 38. Indikator Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah SKPD Yang Melaksanakan Kearsipan Sesuai Ketentuan	4	5	10	12	16	36
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	0	0	1	1	1

Sumber : Kapustarda Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2019

21. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013 -2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 39. Indikator Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah jaringan komunikasi	60	66	68	62	68	76
2	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	22	33	33	35	37	33
3	Jumlah surat kabar nasional/lokal	12	12	12	12	12	12
4	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	3	5	7	3	4	5
5	Website milik pemda	3	4	5	5	7	9
6	Sistem informasi manajemen pemda	N/A	N/A	9	5	8	12

Sumber : Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah. 2019

22. Perpustakaan

Pembangunan Perpustakaan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 40. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun	17.780 Org	18.925 Org	17.726 Org	24.509 Org	39.879 Org	20.584 Org	28.545 Org	36.505 Org	36.505 Org
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan	4.450 Judul	6.251 Judul	7.351 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul	7.555 Judul	9.039 Judul	9.039 Judul
3	Jumlah Perpustakaan	363	374	384	391	403	419	419	419	420

Sumber : Kapustarda Kabupaten Hulu sungai Tengah, 2019

23. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 41. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	98,44	86,57	85,22	84,92	80,34	77,46	82	86	90
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	1,55	13,43	14,78	15,08	19,66	22,54	18	14	11
3	Rasio KDRT	1,5 %	0,0179 %	0,0058 %	0,0057 %	0,0010 %	0,0026 %	0,0026 %	0,0020 %	0,0012 %

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
4	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	73,02	79,78	79,91	93,89	93,89	94,50	96	98	98

Sumber : Dinas Sosial PP dan PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

b. Focus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 42. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)	4,65	4,83	4,86	5,07	5,10	5,25	5,25
2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	26,54	26,09	25,74	25,53	25,48	25,44	25,50

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

2. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 43. Indikator Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,	Jumlah Kunjungan wisata pertahun	55.284	64.244	74.000	54.390	68.780	69.689	77.208
2,	Kontribusi sector parawisata terhadap PDRB	8,13	12,93	9,57	8,86	7,15	8,14	8,30

Sumber : Disporapar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

3. Perikanan dan Kelautan

Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2012-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 44. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perikanan dan Kelautan Tahun 2012-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1,	Produksi Perikanan	9740,6	9907,0	9041,6	9969,3	10271,5	10480,5	10611,5
2,	Konsumsi Ikan	105,43	105,73	105,74	105,78	50,86	50,87	51,35
3,	Cakupan bina kelompok nelayan	N/A	28	8	3	16	21	13
4,	Produksi perikanan kelompok nelayan	7.556,7	7.591,5	6.569,2	5.717,4	7.691	7.740	7.829

Sumber : Dinas KP dan Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

4. Perdagangan

Pembangunan Perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2011-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 45. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2011-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	9,25	9,79	9,96	10	10,17	10,44	10,44	10,62
2	Ekspor bersih perdagangan (Rp Milyar)	839,4	580,5	848,2	339,7	250,7	264,7	476,8	263,54

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

5. Industri

Pembangunan Industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2010-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 46. Indikator Capaian Kinerja Urusan Industri Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	16%	15,98%	15,70%	15,48%	15,52%	15,03%	14,73%	14,77%	14,87%
2	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri	N/A	N/A	N/A	N/A	5,91%	5,35%	N/A	N/A	N/A
3	Persentase tingkat pertumbuhan IKM	2,00%	2,50%	3,10%	3,44%	4,50%	5,36%	5,77%	3,44%	15,89%
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	7,14	14,28	14,28	7,14	14,28	15,24	15,24	15,24	15,24

Sumber : Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

c. Focus Layanan Urusan Penunjang

1. Perencanaan Pembangunan

Pembangunan urusan perencanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2013-2018 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu :

Tabel 2. 47. Indikator Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2013-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Tersedianya RPJPD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	95,26 %	98,73 %	99,99 %	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan daerah lain. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah, infrastruktur, iklim berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

a. Focus Kemampuan Ekonomi Daerah

Pada fokus kemampuan ekonomi daerah, pencapaian beberapa indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48. Pencapaian Indikator Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2011-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/ kapita/ bulan (Rp)	854.916	875.203	906.853	940.932	973.461	752.361	880.008	929.531
2	Pengeluaran Konsumsi RT non pangan/ kapita/ bulan (Rp, juta)	457.906	468.250	484.045	503.448	521.474	315.632	379.063	402.006
3	Pengeluaran Konsumsi pangan RT per kapita/ bulan (Rp)	39.701	406.953	422.808	437.484	451.987	436.729	500.945	527.525
4	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan (%)	53,56	53,50	53,38	53,50	53,57	41,95	43,07	43,25
5	Produktivitas total daerah (Rp)	18.508.165	18.461.827	19.533.143	21.394.770	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Nilai Tukar Petani	108,07	108,40	105,14	99,77	99,03	97,52	96,69	95,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

b. Focus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus fasilitas wilayah/ infrastruktur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49. Pencapaian Indikator Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	971	1.133	1.360	1.511	1.511	1.700	1.800	1.825	1.920

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum	34.675	34.325	34.127	33.864	33.412	32.863	32.100	30.100	7.825
3	Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun	9.859	9.821	8.995	8.564	8.472	8.257	7.800	7.300	6.900
4	Rasio ketersediaan daya listrik	50,62	53,52	55,45	62,28	68,01	70,11	89,41	92,49	98,37
5	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	82,00 %	83,03 %	87,02 %	88,35 %	89,88 %	91,00 %	99,36 %	99,87 %	99,59 %
6	Persentase penduduk yang menggunakan HP / telepon	63,10 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	92 %	92 %

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

c. Focus Iklim Berinvestasi

Pencapaian indikator aspek daya saing daerah dengan fokus iklim investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50. Indikator Iklim Investasi Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka kriminalitas	12,43	13,72	14,62	10,6	8,83	11,93	6,87	5,72	N/A
2	Lama proses perijinan	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari	1 - 15 hari
3	Jumlah pajak dan retribusi daerah	25 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	28 jenis	28 jenis
4	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	2	8	3	3	2	0	0	2	3

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5	Persentase desa berkembang terhadap total desa	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25%	25%	25%	67%

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

d. Focus Sumber Daya Manusia

Pencapaian pada indikator aspek daya saing daerah dengan fokus sumber daya manusia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51. Pencapaian Indikator Sumber Daya Manusia Tahun 2010-2018

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio lulusan S1/S2/S3	7,60 %	8,10 %	2,40 %	8,60 %	19,20 %	13,00 %	10,35 %	6,45 %	N/A
2	Rasio Ketergantungan	N/A	N/A	N/A	N/A	51,08	50,74	50,55	50,34	50,16

Sumber : Data Strategis Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD

Pelaksanaan program dan kegiatan merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Capaian dari sasaran pembangunan daerah merupakan hasil dari pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. 52. Pencapaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sampai Dengan Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2018	Target Akhir Tahun 2021
Misi 1 : Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara						
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (jumlah kasus tertangani/10.000 penduduk)	11,93	7,52	<10
			Jumlah kejadian konflik SARA	0	0	0
		Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	2	2	2
Misi 2 : Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian						
2	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,35	7,53	7,60
			Usia harapan sekolah (tahun)	11,52	12,00	12,50
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	64,65	65,30	67,50
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,05	4,13	4-6

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2018	Target Akhir Tahun 2021
Misi 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan						
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase Desa berkembang	25,47	89,95	81,37
			Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	59,91	67,88	62,13
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase rumah layak huni (persen)	81,25	91,15	98,12
			Luas Kawasan Kumuh (Ha)	141,46	82,45	0
			Cakupan layanan air bersih (persen)	89,41	78,56	100
4	Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	535,98	618,44	574,04

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2018	Target Akhir Tahun 2021
Misi 4 : Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan						
5	Meningkatkan perekonomian daerah	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,57	5,72	4-6
			Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	3,64	5,73	4-5
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persen)	5,65	6,09	3,97
		Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB/Rp)	20.234	23.020	36.052
			Indeks Gini	0,29	0,30	<0,30
Misi 5 : Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem						
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,72	71,50	69,4
			Indeks Pencemaran Air	45,3	66,00	60,1
			Indeks Pencemaran Udara	81,2	92,73	92
			Indeks Tutupan Lahan	59,43	59,71	59,43

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (2014/ 2015)	Capaian Kinerja s.d Tahun 2018	Target Akhir Tahun 2021
Misi 6 : Peningkatan pelayanan masyarakat						
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,50	84,37	85,00
Misi 7 : Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah						
9	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	52 (CC)	57,87 (CC)	85 (A)
			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,82 (Tinggi)	3,03 (Sangat Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pencapaian dari sasaran pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada beberapa permasalahan utama pembangunan yang menjadi tantangan pada tahun 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Pertumbuhan ekonomi turun (penurunan pada lapangan usaha pertanian)
2. IPM meningkat tetapi dibandingkan dengan daerah tetangga masih rendah terutama pada usia harapan hidup
3. Angka kemiskinan lebih tinggi dari provinsi dan cenderung stagnan
4. Angka pengangguran cukup tinggi
5. Pelayanan publik belum standart dan memuaskan
6. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah
7. Potensi indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) menurun akibat pertambangan (adanya rencana penambahan kapasitas produksi PT. AGM dan eksplorasi PT. MCM)
8. Aksesibilitas pada beberapa desa terpencil belum baik dan lancar
9. Pemenuhan infrastruktur dasar (kumuh, air minum dan sanitasi) masih rendah
10. Maraknya peredaran narkoba
11. Kapasitas fiskal yang masih rendah dengan ketergantungan dana pusat sangat besar

Permasalahan pada penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai berikut.

1. Potensi masuknya dan berkembangnya paham radikal
2. Meningkatnya penyakit masyarakat, penggunaan minuman keras, narkoba dan zat aditif lainnya
3. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak bersekolah
4. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah
5. kualifikasi dan kompetensi guru belum sesuai standard SPM
6. Adanya anak usia sekolah yang putus sekolah

7. Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
8. Mutu Pendidikan (akedemik dan non akedemik) belum optimal
9. Rendahnya cakupan dan mutu pelayanan kesehatan
10. Rendahnya aksesibilitas terhadap layanan rujukan yang berkualitas
11. Rendahnya budaya baca
12. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja
13. Masih terbatasnya akses jalan
14. Belum optimalnya layanan kualitas jalan dan jembatan
15. Belum optimalnya manajemen transportasi darat
16. Belum optimalnya fasilitasi keselamatan lalu lintas
17. Belum optimalnya pengelolaan irigasi dan sumberdaya air
18. Belum optimalnya penanganan banjir
19. Belum terpenuhinya cakupan layanan dan kualitas air bersih
20. Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman dan perumahan
21. Belum optimalnya penanganan sanitasi
22. Kualitas pengelolaan sampah
23. Belum optimalnya penataan ruang dan bangunan
24. Belum maksimalnya produksi TPH
25. Belum maksimalnya produksi hasil peternakan
26. Masih rendahnya hasil produksi dan produktifitas perkebunan
27. Belum maksimalnya produksi hasil perikanan
28. Kuantitas terjadinya penangkapan ikan ilegal masih tinggi
29. Pengelolaan produksi hasil TPH belum berorientasi pasar
30. Pengolahan produksi hasil peternakan belum berorientasi pasar
31. Masih rendahnya harga dan mutu hasil perkebunan
32. Pengolahan produksi hasil perikanan belum berorientasi pasar
33. Masih adanya penduduk rawan pangan
34. Masih terbatasnya kemampuan kelembagaan pertanian
35. Rendahnya pendapatan/ kesejahteraan petani
36. Belum maksimalnya peran sektor perdagangan dalam pertumbuhan ekonomi
37. Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah

38. Pertumbuhan produksi IKM dan nilai tambah produksi masih kecil
39. Lemahnya kebijakan pelayanan perizinan dan kebijakan investasi
40. Belum optimalnya penggalian potensi investasi/penanaman modal
41. Belum dikelolanya obyek dan potensi pariwisata secara optimal
42. Tingginya tingkat permasalahan hubungan industrial
43. Belum terpenuhinya luas RTH minimal 30% dari luas kawasan kota Barabai
44. Peningkatan pencemaran lingkungan
45. Belum maksimalnya pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
46. Masih banyaknya keluarga miskin dan PMKS
47. Belum optimalnya manajemen penanggulangan bencana
48. Masih minimnya pemasyarakatan dan prestasi olahraga
49. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan
50. Belum optimalnya manajemen kependudukan dan pencatatan sipil
51. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan desa
52. Belum optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk
53. Masih terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak
54. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengembangkan seni budaya daerah
55. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
56. Pelayanan komunikasi dan informatika yang tidak optimal

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Beberapa indikator ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada data terakhir tahun 2017 masih stabil meskipun laju pertumbuhan melambat dibandingkan tahun 2016 sebesar 6,21 % menjadi 5,72% pada tahun 2017. Namun demikian, di sisi lain juga masih menyisakan beberapa indikator yang masih terpaut di belakang wilayah lain (tingkat kemiskinan, besarnya PDRB, dan IPM).

Perlambatan ritme ekonomi global turut membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah, Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Luasnya dampak penyebaran krisis tersebut juga turut menyebabkan pemulihan perekonomian global menjadi berlarut-larut. Dampak dari lesunya ekonomi global dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak mencapai 5 persen selama beberapa tahun terakhir.

Di tengah masalah perlambatan ekonomi global. ternyata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih stabil diatas 5%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah termasuk kategori tinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2017 dipengaruhi turunnya kontribusi sector-sektor unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kontribusi sector keuangan mencapai 9,16 % yang berperan besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peningkatan kredit baik konsumtif maupun usaha menjadi

pemicu dalam pertumbuhan sektor tersebut Semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin banyak keuntungan yang dihasilkan oleh perbankan, sehingga menaikkan nilai tambahnya.

Disaat kabupaten lain mendapat imbas negatif dari menurunnya harga batubara, perekonomian Hulu Sungai Tengah cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Stabilnya perekonomian Hulu Sungai Tengah disebabkan karena tidak bergantung kepada pertambangan batubara. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara) menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, jalur perdagangan (ekspor) ini menjadi rentan terhadap dampak perekonomian global, yang mempengaruhi pergerakan ekonomi beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Masalah utama perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah justru tingginya angka kemiskinan. Persentase kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah 6.09 persen pada tahun 2017. Meskipun turun dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 6.18 % namun masih dalam kategori tinggi dan merupakan yang tertinggi kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Persentase tertinggi ditempati oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mencapai 6,65 persen. Sedangkan persentase kemiskinan terendah berada di Kabupaten Banjar yang hanya 2,96 persen. Setelah itu, diikuti oleh Kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin dengan persentase masing-masing 3,77 persen dan 4,19 persen.

Kondisi ini kemungkinan disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi penduduk serta pergerakan struktur perekonomian (kontribusi PDRB persektor) dari primer ke sekunder (pertanian ke perdagangan/jasa) dimana mayoritas penduduk Kabupaten HST masih bertumpu pada sektor pertanian. Secara detail perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten HST dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1. Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi				Proyeksi		Target
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	PDRB adhb	Rp (juta)	4.539.834	5.140.313	5.649.533	6.135.771	7.336.750	8.253.843	8.253.843
2	PDRB adhk	Rp (juta)	3.719.103	3.947.042	4.192.093	4.431.596	4.682.376	4.963.318	4.963.318
3	Pertumbuhan Ekonomi adhb	%	13,19	13,23	9,91	8,61	19,57	12,50	12,0 - 13,0
4	Pertumbuhan Ekonomi adhk	%	5,56	6,13	6,21	5,72	5,5 – 6,0	5,5 – 6,5	5,75 – 6,25
5	Tingkat inflasi	%	7,16	5,14	3,57	3,82	5 – 7	5 – 7	6,17
6	Jumlah Penduduk miskin	%	5,65	5,81	6,18	6,09	5,75	5,75	5,6
7	Tingkat Pengangguran	%	4,05	2,97	2,97	4,13	2,5-4,5	2,5-4,5	3,5
8	PDRB per kapita	Rp /kap (juta)	17,66	19,75	21,45	23,02	23,73	24,20	24,5
9	Besaran Indeks Gini	-	0,28	0,33	0,27	0,3	0,3	0,3	<0,3
10	Besaran IPM	-	65,37	66,56	67,07	67,78	69,02	69,02	70,84
11	Rasio pajak daerah terhadap PDRB	%	0,17	0,16	0,18	0,20	0,18	0,15	0,16
12	Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB	%	19,56	21,50	22,44	18,34	15,70	15,02	15,05

3.1.2. Tantangan dan Prospek serta Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak inklusif,

   Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun juga dibarengi dengan tingginya angka kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan pollitik. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

   Kemiskinan menjadi permasalahan penting dalam pembangunan. Banyak aspek yang terlibat dengan kemiskinan, seperti kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Hubungan ini tampak seperti timbal balik. Jika tidak diputus, maka lingkaran ini akan tetap berlanjut, bahkan tingkat kemiskinan akan semakin dalam.

2. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia,

   Dalam melihat kualitas SDM, bisa dilihat dari keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah

Indonesia. Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programes (UNDP) sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru, utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi). Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, kualitas SDM Kabupaten Hulu Sungai Tengah jika dilihat berdasarkan IPM tergolong rendah. Untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah nilai IPM pada tahun 2017 adalah 67,78 atau berada pada kategori sedang. IPM Kabupaten Hulu Sungai Tengah menempati peringkat ke-9 dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan,

3. Belum optimalnya pemerataan infrasturuktur

Tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah namun juga dibarengi dengan tingginya angka kemiskinan. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan pollitik. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih berorientasi pada peningkatan pertumbuhan

ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menjadi permasalahan penting dalam pembangunan. Banyak aspek yang terlibat dengan kemiskinan, seperti kesehatan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan. Hubungan ini tampak seperti timbal balik. Jika tidak diputus, maka lingkaran ini akan tetap berlanjut, bahkan tingkat kemiskinan akan semakin dalam.

4. Masih Kecilnya Share Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

Meskipun perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, tetapi share Kabupaten Sungai Tengah untuk perekonomian Kalimantan Selatan sangat kecil. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dituntut untuk menggali dan memanfaatkan secara optimal seluruh potensi yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan share Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain tantangan dalam pembangunan ekonomi juga dapat dilihat potensi dan prospek ekonomi dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu indikator ekonomi penting yang sering menjadi sorotan banyak pihak adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Besar kecilnya pertumbuhan PDRB suatu wilayah, dipengaruhi oleh pertumbuhan stok kapital (modal), pertumbuhan tenaga kerja dan kemajuan teknologi. Semakin besar pertumbuhan ketiga faktor tersebut, maka akan semakin besar juga pertumbuhan PDRB suatu daerah dan sebaliknya. Namun pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah

pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tujuan akhir pembangunan ekonomi adalah mewujudkan kesejahteraan penduduk (welfare) dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu media perantara untuk meraihnya. Dengan demikian, yang menjadi target pengambil kebijakan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan output) yang tinggi, akan tetapi juga sampai sejauh mana hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka fokus perhatian akan tertuju pada identifikasi sektor lapangan usaha yang dapat mendorong pencapaian sekaligus kedua tujuan di atas (pertumbuhan ekonomi tinggi dan penciptaan kesejahteraan). Kesejahteraan sebetulnya mencakup dimensi yang luas, dan paling utama adalah dimensi pemerataan. Jika kesejahteraan hanya mengerucut kepada segolongan kecil penduduk, belum dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan tercapai. Pembangunan juga belum tercapai pada saat ekonomi mampu tumbuh tinggi, namun pada saat yang sama masih banyak dijumpai penduduk yang terjebak dalam kubangan kemiskinan.

Untuk itu dapat dijelaskan potensi dan prospek pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut,

- Pertumbuhan stok kapital (modal) dengan penguatan sektor unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

  Dalam postur ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah komponen modal/kapital memiliki share cukup tinggi dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atau menjadi komponen kedua yang memiliki share terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran modal sangat penting dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam kerangka makro ekonomi, akumulasi modal dapat bersumber dari tabungan domestik atau menarik modal dari luar. Untuk memaksimalkan tabungan domestik, Kabupaten Hulu Sungai Tengah harus mampu menggerakkan roda ekonomi berputar lebih cepat. Nilai tambah yang tercipta akan meningkatkan tingkat tabungan domestik. Untuk mencapainya diperlukan strategi yang efektif, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan semua potensi sumber pertumbuhan yang dimiliki. Hal tersebut berarti pilihannya adalah penguatan sektor/lapangan usaha yang menjadi unggulan daerah.

Hasil identifikasi berdasarkan sisi LQ, Shift Share dan Tifologi Klassen, menunjukkan bahwa lapangan usaha unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Konstruksi, Perdagangan Besar Dan Eceran, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, serta Jasa Pendidikan. Selain itu ada pula sektor industri pengolahan yang memiliki share terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto non pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sementara untuk mengoptimalkan penarikan modal dari luar pilihannya dapat berupa peningkatan efisiensi produksi dan penguatan daya beli penduduk. Efisiensi produksi tidak terlepas dari penyediaan infrastruktur yang memadai dan untuk memenuhi hal tersebut, menjadi tantangan yang cukup besar di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Infrastruktur merupakan barang publik, maka penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pilihan yang dapat ditempuh untuk memupuk modal adalah penguatan sektor unggulan dan penguatan daya beli penduduk. Kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain, dan memerlukan proses yang tidak singkat. Artinya hal

tersebut juga terkait dengan transisi ekonomi yang terjadi. Tentunya transisi dari sektor yang kurang produktif mengarah kepada sektor yang lebih produktif.

Berdasarkan potensi dan prospek ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yakni dengan "menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif". Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan melalui :

a. Pemerataan pembangunan dengan mengoptimalkan sektor konstruksi

   Proporsi usaha/perusahaan pada Sektor Konstruksi sebenarnya tidak sampai dua persen dari total usaha/perusahaan berdasarakan hasil Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statisik (BPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Namun kontribusinya dalam menghasilkan nilai tambah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup tinggi. Tahun 2016 porsi nilai tambah yang dihasilkan dalam PDRB non pertanian mencapai lebih dari 10 persen. Pertumbuhan ekonomi Sektor Konstruksi juga menunjukkan performa yang baik meskipun dibawah pertumbuhan ekonomi total, yaitu mencapai 5,33 persen. Dengan adanya program pemerintah mengenai percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur, peran sektor ini pada pembangunan nasional akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor ini memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian meski dengan jumlah usaha yang terbilang sedikit. Selain itu, Sektor Konstruksi menyerap tenaga kerja sebanyak 4.371 tenaga kerja atau sekitar 7,07 persen. Pada skala usaha Usaha Menengah Besar (UMB), penyerapan tenaga kerja

bahkan mencapai 32,94 persen, atau yang terbesar di antara sektor lainnya. Jika penyerapan tenaga kerja dihitung berdasarkan rata-rata per usaha, sektor konstruksi merupakan sektor dengan penyerapan tenaga kerja terbesar kedua setelah sektor Jasa Pendidikan, yaitu rata-rata sebanyak 8 tenaga kerja per usaha. Sedangkan untuk proporsi pekerja antara Usaha Mikro Kecil (UMK) dan UMB sangat timpang, yaitu 92 : 8, hal ini sebanding dengan jumlah usaha konstruksi skala UMK jauh lebih besar yaitu mencapai 70,35 persen.

Proporsi usaha/perusahaan pada Sektor Konstruksi berdasarkan kualifikasi usaha menunjukkan bahwa sebagian besar usaha memiliki kualifikasi perorangan. Sebanyak 80 persen usaha konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki kualifikasi perorangan atau memiliki batas nilai satu pekerjaan mencapai 300 juta rupiah. Sedangkan untuk kualifikasi K atau batas pekerjaan mencapai 2,5 miliar, ada 8 persen dari keseluruhan usaha Sektor Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tidak jauh berbeda dengan kualfikasi K, ada 7 persen dari keseluruhan usaha Sektor Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk kualifikasi M atau batas nilai satu pekerjaan mencapai 50 miliar. Sedangkan untuk kualifikasi B, sangat kecil mendekati nol persentasenya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Untuk non kualifikasi atau masa berlaku sertifikasi dari LPJK sudah kedaluarsa mencapai 5 persen dari keseluruhan usaha Sektor Konstruksi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di sektor konstruksi, dilakukan dengan beberapa kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai berikut.

1. Peningkatan Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan

   Membangun infrastruktur bertujuan mengembangkan kualitas, infrastruktur yang handal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses terjangkau dan merata bagi semua. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat serta pendukung terciptanya ketahanan pangan. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

2. Pemanfaatan Sektor Konstruksi untuk Pemerataan Infrastruktur dan Aksesibilitas Wilayah

   Kebutuhan infrastruktur semakin meningkat sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, mobilitas penduduk, dan kebutuhan hidup penduduk. Kebutuhan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat.

Kebutuhan infrastruktur juga sangat terkait dengan kemajuan suatu wilayah. Semakin maju suatu daerah akan semakin lengkap dan berkualitas infrastruktur yang dimilikinya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan sangat erat kaitannya dengan penyediaan infrastruktur pendukung yang berkualitas dan merata pada semua wilayah. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dan merata merupakan bentuk layanan pemerintah daerah yang dapat membawa masyarakatnya pada peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu, pembangunan daerah merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu regional wilayah sehingga mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Namun perlu digarisbawahi bahwa salah satu inti dari tujuan pelaksanaan pembangunan daerah adalah pemerataan hasil pembangunan sehingga dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karenanya, pembangunan daerah juga dapat diartikan sebagai pengembangan setiap lini kehidupan masyarakat yang menyebabkan rasa nyaman, damai dan sejahtera setiap individu yang tinggal di dalamnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Hasil dari pembangunan daerah yang paling sering dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah pembangunan di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan hingga pelayanan masyarakat. Untuk memenuhi capaian target setiap bidang tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas,

sarana prasarana dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Keuntungan dalam peningkatan aksesibilitas wilayah tersebut adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya.

Hingga saat ini, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih,energi,dan kelistrikan disetiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara maksimal. Sehingga perlu diberikan perhatian khusus supaya potensi ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bisa dimanfaatkan secara optimal yang pada nantinya akan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

b. Mengoptimalkan pembangunan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

Hulu Sungai Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memilih sebagai daerah pusat perdagangan di Banua Enam, Hal ini didukung dengan lokasi daerah yang cukup strategis, yaitu berada ditengah-tengah atau diantara lima kabupaten

lainnya. Meskipun daerah tersebut kaya potensi Sumber Daya Alam, pemerintah dan masyarakat sepakat untuk tidak membangun pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit sebagaimana kabupaten lainnya, karena dinilai merusak alam dan banyak merugikan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain sektor pertanian dan perikanan, sektor perdagangan dipilih menjadi salah satu pendapatan utama bagi warga di daerah tersebut.

Sektor ini menyumbang nilai tambah yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini tercermin dari kontribusinya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mencapai 10,61 persen, atau terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor juga menunjukkan performa yang sangat baik, mencapai 6,89 persen pada tahun 2017. Sedangkan selama tahun 2012-2017, pertumbuhan ekonomi sektor ini selalu di atas pertumbuhan ekonomi total.

Selain kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tergolong tinggi. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor juga memiliki jumlah usaha terbanyak. Jumlah usaha sektor ini lebih dari separuh dari seluruh usaha nonpertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau mencapai 52,7 persen. Seiring dengan hal itu, sektor ini juga menyerap tenaga kerja paling banyak, yaitu sekitar 39,96 persen dari keseluruhan tenaga kerja nonpertanian.

Dengan kata lain, empat di antara sepuluh tenaga kerja pada usaha nonpertanian bekerja pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.

Usaha Mikro kecil (UMK) jauh lebih banyak dari Usaha Menengah Besar (UMB) dengan perbandingan yang cukup jauh. Dari total 17.454 usaha pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, hampir semuanya adalah UMK, yaitu mencapai 99,96 persen. Hal ini tidak jauh berbeda jika melihat dari sisi tenaga kerja, dari total 24.689 tenaga kerja pada Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, 96,32 persen diantaranya merupakan tenaga kerja pada UMK.

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, dapat dilakukan melalui :

1. Pemanfaatan Internet Untuk Memperluas Pasar

   Banyaknya toko online saat ini karena perkembangan zaman dan berkembangnya kecepatan dan teknologi internet, membuat online shopping menjadi salah satu pilihan untuk berbelanja. Bahkan ada beberapa perusahan yang mengkhususkan melakukan perdagangan secara online, dan tidak melakukan perdagangan secara konvensional. Hal ini berkaitan dengan perubahan pada pola hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam pola belanja. Saat ini masyarakat, banyak memilih bertransaksi online dibanding secara

konvensional. Peralihan pola belanja dari offline menjadi online telah membuat sejumlah gerai ritel tutup. Tingginya minat masyarakat untuk berbelanja online dibandingkan konvensional menjadi salah satu penyebab transaksi di toko ritel yang ikut menurun.

Mulai maraknya toko online di Indonesia ternyata masih belum menjadi trend di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini bisa terlihat dari 17.454 usaha perdagangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hanya 2 persen saja atau sebesar 325 saja yang menggunakan internet. Jika dilihat lebih dalam lagi, hanya 1,25 persen saja yang menggunakan internet untuk membeli/ menjual barang/jasa. Sedangkan sebagian besar sisanya masih belum memanfaatkan internet. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian besar masih tradisional dan belum memanfaatkan internet sebagai sarana penunjang usahanya. Padahal banyak sekali keuntungan yang bakal didapatkan oleh pengusaha dengan memanfaatkan media internet. Keuntungan pertama, perdagangan secara elektronik memungkinkan perusahan untuk menjual produknya kepada lebih banyak orang. Dengan kata lain, perusahan atau toko dapat menjual produknya kepada siapa saja dipenjuru belahan dunia. Kedua, lebih efisien karena perusahaan dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan, karena perusahan tidak perlu merekrut banyak pegawai toko dan tidak perlu menyediakan tempat yang luas. Ketiga, dengan melakukan penghematan

biaya yang dikeluarkan, otomatis perusahan dapat menekan seminimal mungkin harga jual kepada pelanggan. Sehingga lebih banyak pelanggan yang dapat menjangkau harga barang tersebut. Dengan demikian barang menjadi lebih banyak yang terjual dan profit perusahaanpun bertambah besar. Selain itu, media internet juga bisa digunakan sebagai ajang untuk promosi dan iklan melalui sosial media.

2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Melalui Pemanfaatan Lokasi yang Strategis

Hulu Sungai Tengah merupakan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memilih sebagai daerah pusat perdagangan di Banua Enam. Hal ini didukung dengan lokasi daerah yang cukup strategis, yaitu berada di tengah-tengah di antara lima kabupaten lainnya. Meskipun daerah tersebut kaya potensi pertambangan, pemerintah dan masyarakat sepakat untuk tidak membangun sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit sebagaimana kabupaten lainnya, karena dinilai merusak alam dan banyak merugikan kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, selain sektor pertanian dan perikanan, sektor perdagangan dipilih menjadi salah satu pendapatan utama bagi warga di daerah tersebut. Hal ini tercermin dari kontribusinya pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mencapai 10,61 persen, atau terbesar kedua setelah sektor Industri Pengolahan pada tahun 2017.

Kinerja sektor perdagangan Hulu Sungai Tengah semakin meningkat, hal ini ditandai dengangan semakin banyaknya unit usaha-usaha retailer dan supplier berbagai barang untuk Banua Anam.

Dari besarnya share PDRB sektor lapangan usaha perdagangan, tampak bahwa nilai tambah yang tercipta di perdagangan, didominasi oleh usaha perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor, yang menyumbang PDRB sektor lapangan usaha perdagangan mencapai 93 persen per tahun, Kinerja perdagangan Hulu Sungai Tengah juga terbilang cukup prospektif. Di tengah dinamika perekonomian yang terjadi di kabupaten ini, sektor lapangan usaha perdagangan masih tegar. Bahkan menunjukkan trend meningkat secara konsisten dengan pertumbuhan rata-rata 8 persen selama 5 tahun terakhir.

Potensialnya Sektor Perdagangan tidak di sia-siakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal tersebut dibuktikan dengan sedang dibangunnya pasar agrobisnis modern yang bertujuan untuk menata pasar agar terlihat rapi, bersih, indah dan nyaman bagi pedagang maupun pembelinya. Semua pedagang akan ditampung di pasar agrobisnis tersebut, seperti pedagang hasil-hasil pertanian daerah, pedagang ayam, ikan basah, hingga sayur mayur. Pasar tersebut juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang akan membuat pedagang maupun pembeli merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi.

c. Mengoptimalkan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum

Meskipun dari sisi pangsa PDRB, kontribusi sektor ini cukup kecil. Selama lima tahun terakhir, share sektor penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata hanya mencapai 3,51 persen pertahun. Namun demikian, pertumbuhan setiap tahunnya cukup tinggi dan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan total, Rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 7,34 persen. Selain itu, usaha ini menjadi andalan mata pencaharian penduduk Hulu Sungai Tengah. Sekitar 9.613 orang bekerja pada sektor ini. Lapangan usaha tersebut sekaligus menjadi sektor unggulan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan pada hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha penyediaan akomodasi makan dan minum memiliki pertumbuhan yang realtif lebih cepat, memiliki daya saing dan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan rata-rata daerah di Provinsi Jawa Tengah lainnya.

Daya beli masyarakat yang cukup baik serta tingginya tingkat konsumsi masyarakat Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu aspek pendorong tumbuhnya sektor ini. Dalam selang waktu 5 tahun terakhir banyak bermunculan hotel/penginapan serta usaha kuliner baru yang turut mendorong pertumbuhan sektor tersebut.

Secara umum, jumlah aktivitas penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum menempati urutan kedua terbanyak setelah usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi dan perawatan mobil atau sepeda motor. Jumlah usaha pada sektor ini mencapai

6.151 atau 18,58 persen dari total usaha non pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Tidak hanya itu, aktivitas ini menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, yaitu sekitar 9.613 atau mencapai 15,56 persen dari keseluruhan tenaga kerja nonpertanian. Lebih jauh lagi, sektor usaha ini mampu menjadi andalan bagi pelaku ekonomi berskala kecil. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) pada sektor ini mencapai 9594 usaha, atau sekitar 99,98 persen dari keseluruhan usaha penyedia akomodasi dan makan minum.

Dari sisi pangsa PDRB, kontribusi sektor ini cukup kecil. Selama lima tahun terakhir, share sektor penyediaan akomodasi dan makan minum rata-rata hanya mencapai 3,46 persen pertahun. Namun demikian, pertumbuhan setiap tahunnya cukup tinggi, Rata-rata pertumbuhan pertahun mencapai 6,5 persen.

Mendorong produktivitas lapangan usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman membawa dampak ganda, tidak hanya mendorong pertumbuhan lapagan usaha tersebut saja, akan tetapi juga dapat mendukung upaya mengatasi persoalan sosial, yaitu mempersempit jurang ketimpangan pendapatan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Postur lapangan usaha penyediaan makanan dan minuman didominasi oleh usaha mikro dan kecil/UMK (tenaga kerja dibawah 20 orang). Selama ini, salah satu pemicu lebarnya kesenjagan ekonomi adalah kesenjangan nilai tambah dari UMK dan UMB. Oleh karena itu, jika produktivitas lapangan usaha penyediaan akomodasi, makanan dan minuman meningkat maka pendapatan dan kesejahteraan pelaku

usaha UMK meningkat, sehingga pada akhirnya akan mempersempit ketimpangan.

d. Mengoptimalkan sektor jasa Pendidikan untuk peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pencetak modal manusia yang unggul

Pendidikan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Oleh karenanya, penyelenggaraan pendidikan sangat penting, karena mampu mencetak sumber daya manusia berkualitas yang merupakan modal dasar pembangunan. Dengan demikian, aktivitas pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta merupakan investasi sekaligus ladang usaha bagi penduduk Hulu Sungai Tengah. Dalam penciptaan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah, peran usaha pendidikan merupakan yang terbesar kelima dengan share sebesar 7,28 persen. Selain itu, selama periode 2012-2017 kontribusi Sektor Pendidikan terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Tengah selalu baik.

Dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sektor ini memiliki peran yang cukup penting. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 8657 tenaga kerja atau 14,01 persen dari tenaga kerja non pertanian. Angka tersebut berada pada peringkat ketiga setelah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Sektor G); dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Sektor I), padahal jumlah usaha ini terbilang sedikit, hanya 1.014 atau hanya mencapai 3,06 persen. Selain itu, mayoritas

usaha pada sektor ini berskala mikro kecil (UMK), mencapai 99,41 persen, hal tersebut dikarenakan aktivitas ini umumnya berupa usaha nonprofit dan merupakan bagian dari pelayanan dasar pemerintah.

Aktifitas ekonomi pada kegiatan jasa pendidikan tercermin dari nilai PDRB sektor lapangan usaha jasa pendidikan. Dalam perekonomian Hulu Sungai Tengah, selama selang waktu 2012-2017 porsi sektor tersebut rata-rata mencapai 7,03 persen. Sementara pertumbuhan pertahun rata-rata mencapai 9,97 persen dalam selang waktu yang sama. Pertumbuhan sektor lapangan usaha jasa pendidikan didorong oleh besarnya animo masyarakat untuk memberikan pendidikan yang lebih baik kepada putra putrinya, diantaranya memasukkan anak-anak mereka ke berbagai lembaga kursus untuk menambah dan melengkapi pendidikan yang dienyam pendidikan formalnya.

e. Peningkatan produktivitas Industri Pengolahan sebagai Lapangan Usaha Andalan

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan sektor lainnya pada periode 2012-2017. Industri pengolahan termasuk salah satu tulang punggung perekonomian Hulu Sungai Tengah dengan kontribusi mencapai 23 persen terhadap PDRB nonpertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selain menciptakan nilai tambah, industri pengolahan termasuk andalan untuk penyerapan tenaga kerja.

Hasil Listing Sensus Ekonomi 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa jumlah usaha industri pengolahan (Sektor C) mencapai 3.872 atau 11,70 persen dari total usaha nonpertanian. Jumlah usaha pada sektor ini menempati urutan ketiga setelah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor (Sektor G) dan Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum (Sektor I). Padahal kontribusi Sektor C terhadap PDB nonpertanian jauh di atas kedua sektor tersebut. Artinya, secara kasat mata produktivitas usaha industri pengolahan lebih tinggi dari Sektor G dan I. Uniknya, hampir seluruh usaha industri pengolahan berskala kecil. Jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) sebesar 99,04 persen. Penentuan skala usaha salah satunya mempertimbangkan jumlah tenaga kerja. Jika dilihat secara rata-rata, jumlah tenaga kerja pada industri pengolahan UMK mencapai 2 tenaga kerja per usaha, sementara untuk Usaha Menengah Besar (UMB) mencapai 144 tenaga kerja per usaha. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri pengolahan mencapai 7.410 atau 11,99 persen dari total tenaga kerja pada usaha-usaha selain pertanian.

Industri pengolahan merupakan usaha yang memerlukan keahlian khusus. Industri pengolahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah meliputi industri karet serta industri yang berbasis rumah tangga seperti industri kopyah haji, industri anyaman purun, industri gula merah dan lain-lain.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas sektor lapangan usaha industri pengolahan dilakukan melalui :

1. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang usaha

Perkembangan zaman dan berkembangnya kecepatan dan teknologi internet, membuat batas-batas antar wilayah seakan tidak berarti. Perdagangan secara online memungkinkan perusahaan untuk menjual produknya kepada lebih banyak orang. Dengan kata lain, perusahan atau toko dapat menjual produknya kepada siapa saja dipenjuru belahan dunia. Selain itu, bahan baku berkualitas juga bisa didapatkan dari segala penjuru dunia. Tidak hanya itu, internet menawarkan banyak hal yang bisa merangsang kreatifitas para pelaku industri pengolahan.

Meskipun banyak sekali manfaat yang ditawarkan oleh internet, namun sebagian besar pengusaha industri di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih belum memanfaatkannya. Hal ini bisa terlihat dari 3.817 usaha industri pengolahan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hanya 1,42 persen saja atau sebesar 55 saja yang menggunakan internet. Jika dilihat lebih dalam lagi, hanya 1,03 persen saja yang menggunakan internet untuk membeli/ menjual barang/jasa dan 0,39 persen menggunakan internet untuk keperluan lainnya. Sedangkan sebagian besar sisanya masih belum memanfaatkan internet. Hal ini mengindikasikan bahwa usaha industri pengolahan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagian besar masih tradisional dan belum memanfaatkan internet sebagai sarana penunjang usahanya.

2. Pengembangan industri rumah tangga

Di tengah kondisi ekonomi yang fluktuatif dan tingginya angka pengangguran, pengembangan industri rumah tangga merupakan salah satu alternatif yang tepat dalam menyediakan solusi keterbatasan pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Industri rumah tangga khususnya industri pangan saat ini menjadi salah satu bidang alternatif yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan, sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat Sekalipun dihasilkan dalam skala kecil dan diolah secara sederhana, namun produk yang dihasilkan industry rumah tangga tidak kalah bersaing dengan produk-produk makanan baik lokal maupun internasional sejenis, yang berlabel besar ataupun yang diproduksi dalam jumlah massal. Bahkan, hasil produksi rumah tangga ini, dinilai mempunyai cita rasa yang lebih khas, karena dibuat langsung tanpa menggunakan mesin dan cenderung lebih teliti. Selain itu, keberadaan industri rumah tangga yang semakin berkembang akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, karena menjadi sumber lapangan kerja dan pendapatan yang baru, sehingga berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kesinambungan pembangunan daerah membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pos-pos pendapatan daerah. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berusaha menggali segala potensi dan sumber-sumber pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan maupun dari sumber lainnya yang sah. Disamping pendapatan daerah, dalam rangka pemenuhan anggaran belanja daerah juga diperhitungkan dari besarnya pembiayaan daerah. Dari pos-pos inilah dapat diperhitungkan sejauh mana pembangunan daerah dapat didanai.

Pendanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah saat ini masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yakni diatas 90% dari total pendapatan daerah. Meskipun demikian, sejalan dengan konteks otonomi daerah, secara bertahap Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus berupaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Secara rinci realisasi dan proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 2. Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	**Pendapatan Daerah**	**1.105.018.365.202**	**1.267.822.948.739**	**1.125.165.680.319**	**1.152.120.334.681**	**1.239.724.056.268**	**1.342.126.530.629**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**83.037.443.091**	**96.994.158.192**	**118.421.755.241**	**91.332.357.283**	**112.284.002.253**	**114.686476.614**
1.1.1	Pajak Daerah	8.455.135.938	9.965.754.476	12.083.082.101	12.853.345.156	12.398.085.730	12.800.000.000
1.1.2	Retribusi Daerah	6.446.044.346	10.017.993.958	11.311.663.467	8.607.453.298	10.985.811.066	10.000.000.000
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.196.632.772	7.275.374.095	7.310.808.360	7.862.245.494	7.300.000.000	7.500.000.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	57.939.630.035	69.735.035.663	87.716.201.313	62.009.313.335	81.600.105.457	84.386.476.614
1.2	**Dana Perimbangan**	**797.349.116.670**	**931.939.688.972**	**770.217.653.002**	**827.531.125.912**	**920.165.353.000**	**1.020.165.353.000**
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	149.488.335.670	160.829.096.021	94.262.789.201	138.373.468.142	168.960.082.000	168.960.082.000
1.2.2	Dana Alokasi Umum	486.103.207.000	529.034.959.000	519.741.516.000	519.741.516.000	536.136.238.000	536.136.238.000
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	161.757.574.000	242.075.633.951	156.213.347.801	169.416.141.770	215.069.033.000	315.069.033.000
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**224.631.805.441**	**238.889.101.575**	**236.526.272.076**	**233.256.851.486**	**207.274.701.015**	**207.274.701.015**

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1.3.1	Bantuan Dana Hibah	327.551.600	774.605.000	345.722.060	19.989.326.606	6.240.625.000	6.240.625.000
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	61.962.272.841	52.980.512.575	58.819.694.016	65.469.069.880	73.279.329.015	73.279.329.015
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	162.341.981.000	185.133.984.000	177.360.856.000	147.798.455.000	127.754.747.000	127.754.747.000
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

Kerangka pendanaan untuk membiayai rencana kerja pembangunan daerah selain berasal dari pendapatan daerah juga berasal dari penerimaan pembiayaan daerah. Secara rinci gambaran penerimaan pembiayaan daerah dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 3. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	**Pembiayaan Daerah**	**84,041,703,070**	**51,272,192,504**	**62,097,331,913**	**62,097,331,913**	**0**	**225.000.000.000**
1.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**84,041,703,070**	**51,272,192,504**	**62,097,331,913**	**62,097,331,913**	**0**	**225.000.000.000**
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84,041,703,070	51,272,192,504	62,097,331,913	62,097,331,913	0	225.000.000.000
1.1.2	Transfer Dari Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.1.3	Penerimaan Piutang	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Penerimaan Penyertaan Modal pada Bank Kalsel	-	-	-	-	-	-

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

Proyeksi total kemampuan pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 Lebih rinci total sebagai berikut.

Tabel 3. 4. Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	PENDAPATAN DAERAH	1,105,018,365,202	1,267,822,948,739	1,125,165,680,319	1,152,120,334,681	1,239,724,056,268	1.342.126.530.629
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	84,041,703,070	51,272,192,504	62,097,331,913	62,097,331,913	0	225.000.000.000
3	**JUMLAH**	**1,189,060,068,272**	**1,319,095,141,243**	**1,187,263,012,232**	**1,214,217,666,594**	**1,239,724,056,268**	**1.567.126.530.629**

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 2019

3.2.2.Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah masih bertumpu pada sumber-sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah diarahkan pada pendapatan yang bersumber pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pendapatan daerah dari dana perimbangan berasal dari sumber bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Untuk pencapaian target proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2020 dilakukan dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan baik PAD maupun sumber pendapatan lainnya, Kebijakan yang ditempuh untuk peningkatan pendapatan daerah adalah melalui :

1. Peningkatan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan khususnya pajak dan retribusi daerah.
2. Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Memantapkan pendataan dan sosialisasi serta penyempurnaan system dan prasarana dan sarana pengalihan pemungutan PBB.
5. Penyusunan dan perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pendapatan daerah serta mengefektifkan pelaksanaan peraturan daerah yang telah ada.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola

pendapatan daerah.

7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sebagai alat penunjang untuk melaksanakan pemungutan pendapatan daerah.
8. Pembuatan data base dan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah.
9. Peningkatan koordinasi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dana perimbangan dan dana dekonsentrasi yang berasal dari APBN dan APBD Propinsi.
10. Penyiapan data dukung yang tervalidasi dalam rangka kesiapan untuk pengusulan kegiatan dari dana alokasi khusus (DAK).
11. Percepatan realisasi kegiatan dan laporan dari dana alokasi khusus (DAK).

Pendapatan daerah berasal proyeksi Pendapatan Asli Daerah, proyeksi pendapatan dana perimbangan dan proyeksi pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Proyeksi peningkatan PAD berasal dari :

1. Pajak Daerah

   Ada 10 sumber penerimaan pajak daerah yang akan dipungut yaitu berasal dari pemungutan PBB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Sarang Burung Walet.
2. Retribusi Daerah

   Penerimaan retribusi daerah bersumber pada pungutan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

   Penerimaan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan hanya berasal dari laba atas penyertaan modal.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

   Penerimaan Lain-lain PAD yang sah diproyeksikan berasal dari

penerimaan jasa giro, denda keterlambatan dan pendapatan BLUD, pendapatan dana kapitasi BPJS, penerimaan dari hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan bunga deposito.

Pendapatan dari dana perimbangan diharapkan dari 3 sumber dana perimbangan yaitu :

1. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak (DBH/BP)

   Dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat adalah dalam bentuk bagi hasil pajak penghasilan, pajak PBB Pemerataan, pajak PBB sektor pertambangan migas, dan PBB biaya pemungutan sektor pertambangan migas. Dana bagi hasil bukan pajak meliputi bagi hasil provisi sumberdaya hutan (PSDH), bagi hasil iuran tetap (land-rent), royalti, bagi hasil pungutan dari perikanan, dan bagi hasil dari pertambangan minyak bumi. Dana ini masih diproyeksikan dan akan disesuaikan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DBH maka proyeksi tersebut akan disesuaikan.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

   DAU juga masih diproyeksikan dan apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DAU maka proyeksi akan disesuaikan.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

   DAK terbagi atas 2 yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik berupa Dana Operasional PAUD, Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Biaya Jaminan Persalinan (Jampersal), dan Biaya Operasional KB. Adapun DAK Fisik ada 12 bidang DAK yang diterima yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan/irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, transportasi darat dan perdagangan. Apabila ada ketetapan pemerintah tentang alokasi DAK maka proyeksi akan disesuaikan.

Pendapatan lainnya adalah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dari beberapa sumber Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, maka hanya 2 sumber penerimaan yang ditargetkan menyumbang pos ini yaitu :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi

   Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi berasal dari Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2. Dana Penyesuaian

   Dana Penyesuaian/ Otonomi Khusus berupa dana untuk tunjangan sertifikasi profesi guru dan dana desa yang ditransfer pemerintah pusat serta dana insentif daerah.

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah pada tahun 2020 disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah serta menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah sesuai prioritas RPJMD yang telah ditetapkan. Belanja Daerah diarahkan pada pemenuhan klasifikasi sebagai berikut :

1. Pendanaan program pembangunan daerah yakni program yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan RPJMD (*money follow program*).
2. Pendanaan program prioritas yang memiliki sasaran dan indikator yang terukur dan merupakan penyelenggaraan urusan lainnya serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Pendanaan digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung, Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaannya perencanaan belanja daerah menganut prinsip anggaran yang dinamis dan berimbang, dimana total belanja daerah akan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah dan kemampuan dari anggaran pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Jadi apabila terjadi anggaran belanja yang melebihi anggaran pendapatan atau defisit, maka defisit dapat ditutupi oleh sisa anggaran penerimaan pembiayaan sehingga SiLPA tahun anggaran berjalan tidak negatif. Perencanaan belanja daerah diarahkan untuk selalu menyesuaikan dengan kemampuan

anggaran.

Disamping itu perencanaan belanja daerah disusun dengan menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta harus memuat target kinerja yang terukur untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Dalam penyusunan perencanaan belanja daerah juga mensyaratkan holistik dan integratif di semua program dan kegiatan.

Perencanaan belanja daerah pada tahun anggaran 2020 secara garis besar terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memperhitungkan pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Dalam perencanaan belanja daerah Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

   Merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

   a. Proyeksi belanja gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Pada belanja ini perlu antisipasi dari adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan gaji pokok PNS, pemberian gaji ke-13 dan 14

untuk PNS, adanya promosi dan mutasi PNSD, dan lain-lain.

b. Dalam belanja pegawai juga diperhitungkan acress maksimum sebesar 2,5 % baik untuk gaji pokok, maupun tunjangan lainnya yang akan menampung terjadinya perubahan status kepegawaian bagi PNSD.

c. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai, akan dilakukan berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Peningkatan anggaran belanja pegawai juga dalam rangka menampung kenaikan pemberian tunjangan tambahan penghasilan kepada PNSD.

d. Pada pos ini juga diperhitungkan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundangan yang berdampak terhadap anggaran belanja pegawai seperti iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, belanja DPRD dan belanja KDH/Wakil KDH, serta pembayaran tunjangan profesi guru yang sudah bersertifikasi dan tambahan penghasilan bagi guru yang belum bersertifikasi.

2. Belanja Bunga

Merupakan belanja pembayaran bunga utang. Pada tahun anggaran 2020 diproyeksikan pada pos ini tidak ada belanja, karena tidak adanya kewajiban bagi Pemerintah Kab. HST untuk membayar utang.

3. Belanja Subsidi

Merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat. Mengingat kemampuan keuangan daerah dan pemberian subsidi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun anggaran 2020 tidak menganggarkan belanja subsidi.

4. Belanja Hibah

Merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat/

perorangan. Pada tahun anggaran 2020 pada pos belanja ini dilakukan penganggaran dalam rangka memberikan bantuan hibah kepada organisasi profesi, organisasi semi pemerintah, kelompok masyarakat yang menunjang pembangunan daerah seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

5. Belanja Bantuan Sosial

   Merupakan belanja pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada kelompok/ anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pada tahun anggaran 2020 melalui pos belanja bantuan sosial dianggarkan dana untuk menampung pemberian bantuan kepada organisasi sosial kemasyarakatan seperti bantuan kepada panti asuhan, bantuan untuk program pengentasan kemiskinan dan lain-lain.

6. Belanja Bagi Hasil

   Merupakan belanja bagi hasil pendapatan kabupaten kepada pemerintah desa. Pada tahun anggaran 2020 melalui pos belanja bagi hasil dianggarkan dana 10 % dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk diberikan kepada pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan.

7. Belanja Bantuan Keuangan

   Merupakan belanja bantuan keuangan pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi/ pemerintah desa/ pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. Pada tahun anggaran 2020 melalui pos belanja bantuan keuangan dianggarkan dana yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan desa dalam menjalankan otonomi desa, bantuan kepada desa yang melaksanakan Pemilihan Pembakal yang besarannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Anggaran belanja bantuan keuangan kepada desa akan disesuaikan apabila ada

ketetapan alokasi dana perimbangan dari pemerintah.

8. Belanja Tidak Terduga

   Merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2020 melalui pos ini dianggarkan dana untuk menampung belanja-belanja yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya seperti bencana alam, bencana sosial, kedaruratan sosial politik/ pemilu, kedaruratan keamanan serta pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, dan belanja tak terduga lainnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan lain-lain.

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal.

1. Belanja Pegawai

   Merupakan belanja untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

2. Belanja Barang/Jasa

   Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

3. Belanja Modal

   Merupakan belanja untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah.

Dari proyeksi kemampuan pendanaan dan dengan prinsip anggaran berimbang, belanja daerah diproyeksikan sama dengan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak ada defisit anggaran tahun berjalan. Belanja daerah ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Lebih rinci pada tabel berikut.

Tabel 3. 5. Perbandingan Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	BELANJA DAERAH	**1.137.787.875.768**	**1.256.997.809.330**	**1.175.975.773.613**	**1.040.776.891.936**	**1.313.827.408.785**	**1.567.126.530.629**
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**575.804.036.963**	**638.576.080.052**	**626.361.458.024**	**624.007.630.195**	**701.527.757.375**	**741.209.349.772**
1.1	Belanja Pegawai	444.965.168.432	456.629.764.852	417.456.296.196	427.374.656.306	478.638.961.196	504.150.991.272
1.2	Belanja Hibah	23.250.000.000	13.468.450.100	9.630.807.900	5.915.136.000	7.938.731.000	30.000.000.000
1.3	Belanja Bantuan Sosial	662.256.000	1.697.250.000	12.690.050.000	11.341.555.152	13.962.767.000	4.129.450.000
1.4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.284.703.324	1.697.206.000	763.159.028	3.052.331.972	2.338.389.679	2.280.000.000
1.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	105.325.909.207	164.267.334.900	185.617.144.900	175.982.666.500	198.648.908.500	67.420.865.079
1.6	Belanja Tidak Terduga	316.000.000	816.074.200	204.000.000	341.284.265	-	2.000.000.000

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2	**BELANJA LANGSUNG**	**561.983.838.805**	**618.421.729.278**	**549.614.315.589**	**416.769.261.741**	**612.299.651.410**	**825.917.180.857**
2.1	Belanja Pegawai	31.445.933.175	32.306.162.448	18.066.051.503	15.140.433.667	22.858.846.086	30.833.781.586
2.2	Belanja Barang / Jasa	255.335.616.540	245.892.659.865	206.846.170.797	199.734.264.492	296.495.002.321	399.935.417.065
2.3	Belanja Modal	275.202.289.090	340.222.906.965	324.702.093.289	201.894.563.582	292.945.803.003	395.147.982.206

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

Kenaikan kemampuan belanja daerah disebabkan naiknya kemampuan pendanaan daerah pada tahun 2020. Agar pembangunan daerah tetap bisa dilaksanakan maka dalam perencanaan belanja difokuskan pendanaan terhadap program-program paling prioritas khususnya pada Belanja Langsung. Perencanaan belanja dengan memakai prinsip skala prioritas diharapkan pencapaian sasaran pembangunan daerah tetap tercapai. Disamping itu diharapkan setiap SKPD dapat secara kreatif mengusahakan peluang-peluang pendanaan di luar APBD seperti dana-dana APBD Provinsi, APBN maupun dana swasta.

Berdasarkan urusan Pemerintahan, maka Belanja Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Urusan yang akan dibiayai dan dilaksanakan pada tahun 2020 adalah :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyrakat;
6. Sosial;
7. Tenaga Kerja;
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Pangan;
10. Pertanahan;
11. Lingkungan Hidup;
12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
15. Perhubungan;
16. Komunikasi dan Informatika;
17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. Penanaman Modal;
19. Kepemudaan dan Olah Raga;
20. Statistik;

21. Persandian;
22. Kebudayaan;
23. Perpustakaan;
24. Kearsipan;
25. Kelautan dan Perikanan;
26. Pariwisata;
27. Pertanian;
28. Energi dan Sumberdaya Mineral;
29. Perdagangan; dan
30. Perindustrian;
31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka belanja daerah diarahkan untuk membiayai keperluan belanja pada perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. HST No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
3. Dinas Kesehatan;
4. RSUD H, Damanhuri;
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Satpol PP dan Pemadam Kebakaran;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja;
12. Dinas Perdagangan;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
16. Dinas Pertanian;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
18. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan;
19. Dinas Perpustakaan;

20. Sekretariat Daerah;
21. Sekretariat DPRD;
22. Inspektorat;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
25. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
26. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
27. Kecamatan Barabai;
28. Kecamatan Batu Benawa;
29. Kecamatan Hantakan;
30. Kecamatan Batang Alai Selatan;
31. Kecamatan Limpasu;
32. Kecamatan Batang Alai Timur;
33. Kecamatan Batang Alai Utara;
34. Kecamatan Pandawan;
35. Kecamatan Labuan Amas Utara;
36. Kecamatan Labuan Amas Selatan; dan
37. Kecamatan Haruyan

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Ada beberapa pos penerimaan pembiayaan daerah yaitu SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah dan Penerimaan Piutang Daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), pembayaran pokok utang dan pemberian dana talangan.

Secara rinci realisasi dan proyeksi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6. Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2015-2020

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**84.041.703.070**	**51.272.192.504**	**62.097.331.913**	**62.097.331.913**	**-**	**225.000.000.000**
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	84.001.703.070	51.272.192.504	62.097.331.913	62.097.331.913	-	225.000.000.000
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	40.000.000	-	-	-	-	-
1.7	PENERIMAAN PENYERTAAN MODAL	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Realisasi				Proyeksi	
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	-	-	-	-	-	-
2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	**84.041.703.070**	**51.272.192.504**	**62.097.331.913**	**62.097.331.913**	**-**	**225.000.000.000**

Sumber : TAPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019

Dengan melihat proyeksi belanja daerah dan proyeksi pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran. Kebijakan besarnya defisit anggaran adalah maksimal sama dengan besarnya pembiayaan netto dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan tidak boleh negatif. Dengan demikian defisit anggaran harus dapat ditutupi oleh pembiayaan netto sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun berjalan adalah nihil (tidak negatif).

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016-2021 ditetapkan yakni **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT HULU SUNGAI TENGAH YANG AGAMIS, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".** Untuk melihat elemen-elemen yang mendukung tercapainya visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode 2016-2021. gambaran visi di atas dapat terlihat pada diagram berikut.



Gambar 4. 1. Elemen Pendukung Pencapaian Visi

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat empat elemen utama yaitu aspek agamis, aspek mandiri, aspek sejahtera, dan aspek bermartabat. Dalam mencapai visi tersebut dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hubungan antar visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2020	**2021**			**2020**	**2021**
Misi 1 : Peningkatan Kualitas kehidupan dan keserasian hubungan antara ulama dan umara								
1	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kejadian konflik sara	0	0	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk)	<10	<10
						Jumlah kejadian konflik SARA	0	0
					Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	2	2

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2020	**2021**			**2020**	**2021**
Misi 2 : Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang meliputi bidang kesehatan dan pendidikan serta kemandirian								
2	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	IPM	70,84	71,75	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,85	8
						Usia harapan sekolah (tahun)	12,25	12,50
		Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,5	4-6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (tahun)	66,80	67,50
					Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,5	4-6

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2020	**2021**			**2020**	**2021**
Misi 3 : Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jalan, jembatan dan perumahan layak huni secara merata, serta pembangunan irigasi untuk menunjang ketahanan pangan								
3	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Persentase Desa Berkembang	72,05	81,37	Meningkatnya pemerataan infrastruktur yang berkualitas	Persentase Desa berkembang	72,05	81,37
						Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	67,10	62,13
					Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman	Persentase rumah layak huni (persen)	95,55	98,12
						Luas Kawasan Kumuh (Ha)	45,86	0
						Cakupan layanan air bersih (persen)	90,93	100,00
4	Meningkatkan Ketersediaan Dan Keterjangkauan Akses Pangan	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	625	574,04	Tercapainya ketersediaan bahan pangan utama	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	625	574,04

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2020	**2021**			**2020**	**2021**
Misi 4 : Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan								
5	Meningkatkan perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,75-6,25	4-6	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	5,75-6,25	4-6
						Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (persen)	5,5-6,0	4-5
6	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan (persen)	5,60	3,97	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka kemiskinan (persen)	5,60	3,97
					Meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat	Pendapatan per kapita (ADHB/Rp juta)	24.503	36.052
		Indeks Gini	<0,30	<0,30		Indeks Gini	<0,30	<0,30

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2020	**2021**			**2020**	**2021**
Misi 5 : Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam secara mandiri yang berorientasi pada pelestarian hutan dan ekosistem								
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,50	69,4	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,50	69,4
						Indeks Pencemaran Air	66	60,1
						Indeks Pencemaran Udara	92,73	92
						Indeks Tutupan Lahan	59,71	59,43
Misi 6 : Peningkatan pelayanan masyarakat								
8	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85

Visi : Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat								
NO	**TUJUAN**	**INDIKATOR TUJUAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**	**SASARAN**	**INDIKATOR SASARAN**	**Target Capaian Kinerja Tahun**	**Target Capaian Kinerja Akhir**
			2020	**2021**			**2020**	**2021**
Misi 7 : Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah								
9	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Opini BPK	WTP	WTP	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas	Opini BPK	WTP	WTP
					Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	75 (B)	85 (A)
						Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	3,05 (Sangat Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)

Tabel 4. 2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Indeks Integritas Nilai UN SD	angka	74	DISDIK
01.01	meningkatnya pendidikan SD yang berkualitas	Nilai rata - rata Ujian SD	angka	6,2	DISDIK
		Indeks Integritas Nilai UN SD	angka	74	DISDIK
01.02	Meningkatkan kualitas guru yang berkompeten	Rasio Guru/siswa	orang	1/20	DISDIK
2	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Indeks Integritas Nilai UN SMP	angka	74	DISDIK
02.01	meningkatkan pendidikan sekolah menengah pertama yang berprestasi dan berkualitas	Indeks Integritas Nilai UN SMP	angka	74	DISDIK
		Rata-rata Nilai kelulusan SMP	angka	6,9	DISDIK
3	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Nilai rata - rata Ujian SD	angka	6,2	DISDIK
4	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Angka Putus sekolah SD	angka	0	DISDIK
04.01	meningkatnya manajemen pendidikan	Angka Putus sekolah SD	persentase	0	DISDIK
		Angka Putus Sekolah SMP	persentase	0,05	DISDIK
5	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Angka Putus Sekolah SMP	angka	0,05	DISDIK

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase	99,49	DISDIK
06.01	Meningkatnya akses pendidikan bagi masyarakat	angka putus sekolah	Persentase	0,03	DISDIK
7	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda cagar Budaya	Tingkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase	83	DISDIK
07.01	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda Cagar Budaya	Tingkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah	Persentase	83	DISDIK
		Tingkat kelestarian budaya daerah	Persentase	45	DISDIK
8	Meningkatkan Kelestarian Bangunan dan Benda cagar Budaya	Tingkat kelestarian budaya daerah	Persentase	45	DISDIK
9	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Rata-rata nilai Ujian SMP	angka	6,9	DISDIK
10	Meningkatnya aksebilitas pendidikan	Rasio Guru/siswa	orang	1/20	DISDIK
11	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi Minimal A	Persentase	71	DISDIK
12	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Lembaga DIKMAS yang Terakreditasi Minimal B	Persentase	71	DISDIK

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
13	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Sekolah SD yang Terakreditasi Minimal A	Persentase	71	DISDIK
14	Meningkatnya kualitas pendidikan yang bekarakter	Persentase Sekolah SMP yang Terakreditasi Minimal A	Persentase	71	DISDIK
15	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	%	68	DINKES
15.01	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Rasio	182/1000	DINKES
		Angka Kematian Bayi	Rasio	17/10	DINKES
15.02	Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Prosentase Peningkatan Status Gizi Masyarakat	%	70	DINKES
15.03	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Perbup/Perda Tentang Gerakan Masyarakat Sehat	buah	1	DINKES
15.04	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta peningkatan cakupan imunisasi	Persentasi desa/kelurahan yang mencapai UCI	%	93,5	DINKES
		Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) skala Kabupaten yang ditanggulangi < 24 jam	%	90	DINKES
		Persentasi dea/keluarahan yang memilki Posbindu PTM aktif	%	60	DINKES
		Persentasi keberhasilan pengobatan pasien TB	%	235	DINKES

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		semua kasus			
		Case Fatality Rate DBD	%	100	DINKES
		Pengendalian Penyakit Menular	%	100	DINKES
15.05	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prosentasi Sarana dan Prasarana Puskesmas yang terstandarisasi	%	31,57	DINKES
		Prosentasi Puskesmas yang terakreditasi	%	31,57	DINKES
		Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	DINKES
		Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana kesehatan	persen	100	DINKES
		Jumlah peralatan kesehatan yang didistribusikan ke fasyankes sesuai kebutuhan	Set	1	DINKES
		Jumlah alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	Kegiatan	1	DINKES
		Jumlah alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga memiliki izin	Sertifikat	10	DINKES
		Tidak ada kasus keracunan karena makanan	kasus	0	DINKES
		Tidak ada kasus keracunan karena obat	kasus	0	DINKES

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
16	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	Tingkat Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	persen	80	RSUDHD
16.01	Meningkatkan kualitas Pelayanan Pasien	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	Persen	85	RSUDHD
		Peningkatan Akreditasi Rumah sakit dari Utama menjadi Paripurna	Nilai	Paripurna	RSUDHD
		BOR, TOI, BTO, AVLOS yang ideal	Persen	100	RSUDHD
17	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang	persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang	persen	48,24	PUPR
18	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	persen	67,10	PUPR
19	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase Cakupan Layanan Air Minum	persen	84,90	PUPR
20	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an yang berkualitas	Prosentase Luas lahan pertanian yang terairi jaringan irigasi dengan baik	persen	43,43	PUPR
21	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur ke-PU-an	Prosentase Infrastruktur Keciptakaryaan yang layak	persen	0	PUPR

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	yang berkualitas				
22	Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan Yang Layak	%	94,06	DISPERKIM
22.01	Terwujudnya infrastruktur rumah, perumahan dan permukiman yang layak	Persentase Sarana dan Prasarana Perumahan Yang Layak	%	94,06	DISPERKIM
		Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	%	25,76	DISPERKIM
		Persentase sarana dan prasarana permukiman yang layak	%	93,08	DISPERKIM
23	Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	%	25,76	DISPERKIM
24	Terpenuhinya Infrastruktur Rumah, Perumahan dan Permukiman yang Layak	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	13,68	DISPERKIM
24.01	Terwujudnya infrastruktur permukiman yang layak di kawasan kumuh	Persentase Berkurangnya Luas Kawasan Kumuh Perkotaan	%	13,68	DISPERKIM
25	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pertanahan	Persentase pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Persentase	90	DISPERKIM

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
26	Terpenuhinya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Yang Layak	Persentase Sarana dan Prasarana Permukiman Yang Layak	%	93,08	DISPERKIM
27	Meningkatkan ketertiban Administrasi Pertanahan	Jumlah dokumen Raperbup mengenai Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Pendaftaran Tanah dan sosialisasi Perbup NSPM	Raperbup/Sosialisasi	1	DISPERKIM
27.01	Meningkatnya ketertiban Administrasi Pertanahan	Tersedianya rumusan kebijakan pendaftaran tanah berupa Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Raperbup/Sosialisasi	1	DISPERKIM
28	Terwujudnya Sistem Informasi Pertanahan yang komprehensif secara sistematis	Terwujudnya data Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang komprehensif secara sistematis	Sistem / Peta	4	DISPERKIM
28.01	Meningkatnya Sistem Informasi Pertanahan yang komprehensif secara sistematis	Terwujudnya data Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang komprehensif secara sistematis	Sistem / Peta	4	DISPERKIM
29	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	75	SATPOLPPDAMKAR
29.01	Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran Perda	%	75	SATPOLPPDAMKAR
30	Meningkatkan Waktu Tanggap Respon	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	SATPOLPPDAMKAR

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	(Time Respon Rate)	kabupaten			
30.01	Meningkatnya Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	SATPOLPPDAMKAR
31	Meningkatkan Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Menit	5	SATPOLPPDAMKAR
31.01	Meningkatnya Waktu Tanggap Respon (Time Respon Rate)	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)	Menit	5	SATPOLPPDAMKAR
32	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban umum	%	75	SATPOLPPDAMKAR
33	Meningkatkan ketertiban dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat	Indeks ketenteraman masyarakat	%	100	SATPOLPPDAMKAR
34	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentasi Penanganan Konflik Sosial	Kasus/Kejadian	0	KESBANGPOL
34.01	Meningkatnya partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam mendukung program pemerintah	Fasilitasi ormas yang aktif	Kegaiatan	0	KESBANGPOL
35	Meningkatkan Ketentramkan dan Ketertiban Umum	Jumlah Potensi Konflik sosial yang dapat di atasi	pertemuan/ koordinasi	2	KESBANGPOL

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
35.01	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat dan politik	Masyarakat yang di bina	Kegiatan	2	KESBANGPOL
		Angka partisipasi pemilu	kegiatan	2	KESBANGPOL
36	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase penanganan konflik sosial yang terjadi	Kasus/Kejadian	0	KESBANGPOL
36.01	Menurunkan tingkat konflik sosial di masyarakat	Jumlah Potensi konflik sosial yang dapat di atasi	Kasus/Kejadian	0	KESBANGPOL
37	Meningkatkan kesetaraan KB aktif	Persentasi pasangan usua subur yang ber KB	%	100	DINSOSPPPAKB
37.01	Jumlah peningkatan sasaran KB aktif	Persentasi pasangan usia subur yang ber KB	%	100	DINSOSPPPAKB
38	Peningkatan pemberdayaan perempuan	Indeks pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	100	DINSOSPPPAKB
38.01	Indeks Pembanguna Gender (IPG) Indeks pemberdayaan Gender (IDG)	Persentasi Kelompok usaha perempuan / keluarga masyarakat yang dapat meningkatkan ekonomi dan Persentasi SKPD yang menerapkan PPRG	%.	100	DINSOSPPPAKB
39	Meningkatnya keterampilan perempuan dan keluarga	Terwujudnya kabupaten layak anak	%	100	DINSOSPPPAKB
39.01	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) dan menurunnya angka kekerasan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Pemenuhan hak anak dan partisifasi anak	%	100	DINSOSPPPAKB

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
39.02	Terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	kasus	5	DINSOSPPPAKB
40	Meningkatkan kemandirian penyandang masalah sosial	Persentasi PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB
40.01	Persentasi PMKS	Persentasi PMKS	%	3,72	DINSOSPPPAKB
41	Meningkatkan pelayanan panti asuhan , panti jompo dan panti rehabilitasi	Tingkat kepuasa pelayan panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	14	DINSOSPPPAKB
41.01	Meningkatkan pelayanan panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi	Tingkat Kepuasan pelayanan panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	14	DINSOSPPPAKB
42	Meningkatkan Pelayanan terhadap korban bencana alam	Tingkat pelayan terhadap korban bencana alam dan sosial	%	100	DINSOSPPPAKB
42.01	Tingkat pelayanan terhadap korban bencana alam sosial	Tingkat pelayanan terhadap korban bencana alam sosial	%	100	DINSOSPPPAKB
43	Persentasi PMKS yang mendapatkan rehabilitasi	Jumlah PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB
43.01	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentasi PMKS yang mendapat rehabilitasi	%	100	DINSOSPPPAKB
43.02	Menurunkan angka penyandang masalah sosial	Jumlah PMKS	%	100	DINSOSPPPAKB

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
44	Menurunkan daerah rawan bencana	Persentase wilayah desa tanggap dan tangguh bencana	Desa	1	BPBD
44.01	Pelaksanaan sosialisasi tanggap bencana	Jumlah masyarakat yang paham	%	40	BPBD
44.02	Pembinanaan desa tangguh bencana	Jumlah desa tangguh bencana	Desa	6	BPBD
44.03	Pelatihan tanggap bencana	Jumlah tenaga tanggap bencana yang aktif	%	75	BPBD
44.04	Melaksanakan pemetaan daerah rawan bencana	Luas dan sebaran wilayah bencana yang terdeteksi	Kecamatan	2	BPBD
45	Menurunkan korban dan kerugian akibat bencana	Persentase penurunan korban dan kerugian akibat bencana	%	50	BPBD
45.01	Penanganan korban bencana	Tingkat Waktu tanggap darurat penanganan bencana	Jam	1	BPBD
45.02	Mobilitas kebencanaan	Jumlah sarana mobilitas kebencanaan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Unit	3	BPBD
45.03	Memberikan Pelayan Logistik	Jumlah logistik yang disalurkan	Item	12	BPBD
45.04	Peningkatan pelayanan non pangan	Jumlah pelayanan kebencanaan non pangan	Item	3	BPBD
46	Meningkatkan pemulihan pasca bencana	persentase pemulihan aspek fisik dan non fisik pasca bencana	%	40	BPBD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
46.01	Memberikan pelayanan perbaikan infrastruktur pasca bencana	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana	%	40	BPBD
47	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	kg/kap/thn	553,45	DKP-KAN
47.01	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	%	78,38	DKP-KAN
		Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar	sample	77,77	DKP-KAN
		Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang terisi Bahan Pangan Utama	%	100	DKP-KAN
		Persentase Pemberdayaan Kelompok distribusi Pangan Masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga stabilisasi Harga Pangan	%	83	DKP-KAN
		Persentase Tingkat Konsumsi Pangan	%	92,51	DKP-KAN
48	Meningkatkan Produksi Perikanan	Tercapainya Hasil produksi Perikanan	ton	10218	DKP-KAN
48.01	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan perkapita/pertahun	perkapita/tahun	50,55	DKP-KAN
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	40	DKP-KAN
48.02	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi ikan tangkap	ton	7973	DKP-KAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Laporan Yang di tindak lanjuti	laporan	10	DKP-KAN
		Melaksanakan Pengkayaan (restocking) Sumberdaya Perikanan	ekor	205200000	DKP-KAN
		Jumlah Produksi Ikan Budidaya	ton	2250	DKP-KAN
		Persentase peningkatan produksi perikanan	%	1	DKP-KAN
48.03	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan Konsumsi Ikan perkapita/pertahun	%	0,2	DKP-KAN
49	Mengendalikan Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Persentase Penurunan Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	%	0,1	DLHP
		Persentase Industri/Kegiatan Yang Memenuhi Ketentuan Pengelolaan LH	%	65	DLHP
		Persentase Peningkatan IKLH	%	0,1	DLHP
49.01	Terkendalinya Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	Persentase Cakupan Layanan Persampahan Kawasan Perkotaan	%	67	DLHP
50	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	Persentase Pelayanan Perhubungan	%	90	DLHP
50.01	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perhubungan	%	91,7	DLHP

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
51	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tepat Waktu	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	persen	67,87%	DISDUKCAPIL
52	Meningkatkan Kemandirian Desa	Jumlah status Desa Berkembang	jumlah desa	126 Desa	DPMPD
53	Meningkatkan layanan Komunikasi dan Informasi Publik	Persentase kualitas layanan komunikasi dan informasi publik	%	75	DISKOMINFO
54	Meningkatkan kualitas data statistik daerah	Persentase kualitas data statistik	%	90	DISKOMINFO
54.01	Meningkatnya kualitas data statistik	Pesentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data lengkap dan valid	%	90	DISKOMINFO
55	Meningkatkan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase pengamanan informasi dan persandian	%	65	DISKOMINFO
55.01	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase SKPD menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	%	65	DISKOMINFO
56	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Goverment	Persentase Kualitas Pengelolaan Sarana Infrastruktur TIK dan E-Government	%	80	DISKOMINFO
56.01	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Infrastruktur	Indek Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)	Indek	2,7 dari 4,0	DISKOMINFO

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	TIK dan E-Goverment	Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indek	3,9 dari 5,0	DISKOMINFO
57	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Pelayanan Perizinan	Hasil Indeks kepuasan masyarakat di bidang pelayanan perizinan	Nilai IKM	84,25	PM-PTSP-NAKER
57.01	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan	Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Bidang Pelayanan Perizinan	%	84,25	PM-PTSP-NAKER
58	Meningkatkan Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Realisasi investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rupiah	70391956200	PM-PTSP-NAKER
58.01	Meningkatnya Investasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rupiah	70391956200	PM-PTSP-NAKER
59	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Partisipasi	%	72,89	PM-PTSP-NAKER
59.01	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Bersertifikat Terampil	%	100	PM-PTSP-NAKER
60	Meningkatkan Kesejahteraan dan Perlindungan terhadap Pekerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan sistem pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Secara Berkesinambungan	Perusahaan	72	PM-PTSP-NAKER
60.01	Meningkatnya Kepatuhan Perusahaan Tentang Aturan Ketenagakerjaan	Persentase perusahaan yang menerapkan sistem aturan ketenagakerjaan	%	43.06	PM-PTSP-NAKER

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
60.02	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Pekerja	Jumlah kasus perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama yang ditindaklanjuti dan diselesaikan	Kasus	1	PM-PTSP-NAKER
61	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja urusan kepemudaan keolahragaan dan kepariwisataan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	DISPORAPAR
62	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	80.500	DISPORAPAR
63	Meningkatkan pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Prosentase Organisasi Kepemudaan dan pemuda yang mandiri	%	73,91	DISPORAPAR
63.01	Meningkatnya Kemandirian pemuda dalam pembangunan daerah	Persentasi organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri	%	73,91	DISPORAPAR
64	Meningkatkan pembinaan pemuda dan organisasi kepemudaan	Tingkat Partisipasi paskibra Kabupaten Hulu Sungai Tengah	%	83,33	DISPORAPAR
65	Meningkatkan kualitas olahraga	Permasyarakatan olahraga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	kegiatan	16	DISPORAPAR
66	Meningkatkan kualitas olahraga	Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga	buah	13/2	DISPORAPAR
67	Meningkatkan kualitas olahraga	Peningkatan prestasi olahraga pelajar	peringkat	6	DISPORAPAR

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
67.01	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan olahraga masyarakat	Peringkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan	peringkat	9	DISPORAPAR
68	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan	Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan	persen	75	PERPUS
69	Meningkatkan Kualitas pengelolaan kearsipan	Persentase peningkatan Perangkat Daerah yang tertib arsip	SKPD	36	PERPUS
70	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Padi)	%	2	DINTAN
70.01	Meningkatnya Produksi TPH	Jumlah Produksi Padi	Ton	279978	DINTAN
		Jumlah Produksi Jagung	Ton	5042	DINTAN
		Jumlah Produksi Kedelai	Ton	812	DINTAN
		Jumlah Produksi Cabe Besar	Ton	999	DINTAN
		Jumlah Produksi Cabe Rawit	Ton	117	DINTAN
		Jumlah Produksi Bawang Merah	Ton	60	DINTAN
		Jumlah Produksi Jeruk	Ton	10803	DINTAN
		Jumlah Produksi Kacang Tanah	Ton	878	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Produksi Kacang Hijau	Ton	375	DINTAN
		Jumlah Produksi Ubi Kayu	Ton	4012	DINTAN
		Jumlah Produksi Tomat	Ton	1056	DINTAN
		Jumlah Produksi Pisang	Ton	17525	DINTAN
		Jumlah Produksi Durian	Ton	1004	DINTAN
		Jumlah Produksi Rambutan	Ton	7119	DINTAN
70.02	Meningkatnya Produktivitas TPH	Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Padi)	Ku/Ha	52	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Jagung)	Ku/Ha	40,15	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Kedelai)	Ku/Ha	13,13	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Cabe Besar)	Ku/Ha	84,7	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Cabe Rawit)	Ku/Ha	17,45	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional -	Ku/Ha	75,4	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		Bawang Merah)			
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Nasional - Jeruk)	Ku/Ha	148,24	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Kacang Tanah)	Ku/Ha	14,25	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Kacang Hijau)	Ku/Ha	12,08	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Ubi Kayu)	Ku/Ha	140,97	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Tomat)	Ku/Ha	97,8	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Pisang)	Ku/Ha	189,6	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Durian)	Ku/Ha	113	DINTAN
		Produktivitas TPH (Komoditi Unggulan Daerah - Rambutan)	Ku/Ha	67,5	DINTAN
71	Meningkatkan Nilai Tambah Produk Pertanian	% Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	%	15	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Beras Kemasan)	Kelompok	2	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Pisang)	Rumah Tangga	4	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Singkong)	Rumah Tangga	4	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Sirup Jeruk)	Rumah Tangga	15	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Tempe)	Kelompok	2	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Telur Asin)	Rumah Tangga	4	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Rumah Tangga	10	DINTAN
71.01	Meningkatkan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Bokar)	Kelompok	8	DINTAN
72	Meningkatkan Pola Pertanian Modern	% Kelompok Tani yang Naik Kelas	%	30	DINTAN
72.01	Meningkatkan Kualitas SDM Pertanian	% Kelompok yang Meningkat Skornya	%	30	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluhan Pertanian	%	5	DINTAN
73	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Jagung)	%	1	DINTAN
74	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Kedelai)	%	1	DINTAN
75	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi Peternakan	%	2,5	DINTAN
75.01	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Produksi Daging	Kg	2825000	DINTAN
		Jumlah Produksi Telur	Butir	4737834	DINTAN
76	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi Perkebunan	%	4,05	DINTAN
76.01	Meningkatnya Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Karet, Kelapa, Aren, Kakao,Kopi, Sagu, Lada)	Ton	20472;4545;952;110;130;2591;0	DINTAN
77	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Cabe Besar)	%	3	DINTAN
78	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Cabe Rawit)	%	2,7	DINTAN
79	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Bawang Merah)	%	23,24	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
80	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Nasional - Jeruk)	%	3,4	DINTAN
81	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Kacang Tanah)	%	0,98	DINTAN
82	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Kacang Hijau)	%	1,1	DINTAN
83	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Ubi Kayu)	%	0,98	DINTAN
84	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Tomat)	%	0,18	DINTAN
85	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Pisang)	%	2,67	DINTAN
86	Meningkatkan Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH (Unggulan Daerah - Rambutan)	%	3,78	DINTAN
87	Meningkatkan Jenis Produk Pertanian Yang Bernilai Tambah	Jumlah Jenis Produk Pertanian Yang Bernilai Tambah	Jenis	9	DINTAN
87.01	Meningkatkan Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Beras Kemasan)	Kelompok	2	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian	Kelompok	4	DINTAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		(Keripik Pisang)			
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Keripik Singkong)	Kelompok	4	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Sirup Jeruk)	Kelompok	15	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Tempe)	Kelompok	2	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Telur Asin)	Kelompok	4	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Kelompok	10	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Gula Semut)	Kelompok	10	DINTAN
		Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian (Bokar)	Kelompok	8	DINTAN
88	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Persentasi koperasi yang sehat	%	57,50	DISDAG
88.01	Meningkatnya peran koperasi dan UMK	Persentasi koperasi yang tumbuh dan	%	57,50	DISDAG

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	berkembang			
		Pertumbuhan UMK	UMK	9195	DISDAG
89	Meningkatkan peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Persentasi Pertumbuhan UMK	%	23,36	DISDAG
90	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	% temuan barang yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa	%	30	DISDAG
90.01	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	% temuan barang yang mengandung bahan berbahaya dan kadaluarsa	%	30	DISDAG
		Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	375000	DISDAG
91	Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Ekspor Bersih Perdagangan	Rupiah	375000	DISDAG
92	Meningkatkan kemandirian IKM	Persentase Tingkat pertumbuhan IKM	%	10,74	DISDAG
92.01	Meningkatnya pertumbuhan IKM	Persentase Tingkat pertumbuhan IKM	%	10,74	DISDAG
93	Peningkatan produk perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta sesuai dengan	Persentase produk hukum daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	%	100	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi				
93.01	Meningkatnya produk perundang-undangan daerah yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Persentase produk hukum daerah yang harmonis, tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi	%	100	SEKDA
94	Penurunan kasus/sengketa/perkara hukum	Persentase kasus/sengketa/perkara hukum yang diselesaikan	%	100	SEKDA
94.01	Penurunan kasus/sengketa/perkara hukum	Persentase kasus/sengketa/perkara hukum yang diselesaikan	%	100	SEKDA
95	Peningkatan kepedulian terhadap HAM	Nilai implementasi RANHAM	predikat	peduli	SEKDA
95.01	Meningkatnya kepedulian terhadap HAM	Nilai implementasi RANHAM	predikat	peduli	SEKDA
96	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	predikat	tinggi	SEKDA
96.01	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Predikat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	predikat	tinggi	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		Disampaikannya LKPJ tepat waktu	predikat	Tepat waktu	SEKDA
		Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan batas desanya dalam perbup	desa/kelurahan	50	SEKDA
		Jumlah kesepakatan Kepala Daerah yang dihasilkan	dokumen	0	SEKDA
97	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Disampaikannya LKPJ tepat waktu	%	Tepat waktu	SEKDA
98	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	predikat	BB	SEKDA
98.01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	predikat	B	SEKDA
99	Peningkatan kualitas pelayanan birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPP di daerah	%	81	SEKDA
99.01	Meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	%	81	SEKDA
100	Peningkatan kelengkapan regulasi BUMD	Tingkat kelengkapan regulasi BUMD	%	100	SEKDA
100.01	Meningkatnya kelengkapan regulasi BUMD	Tingkat kelengkapan regulasi BUMD	%	100	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
101	Kelancaran bidang ekonomi	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi yang selesai ditindaklanjuti	%	100	SEKDA
101.01	Kelancaran bidang ekonomi	Persentase rekomendasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi yang selesai ditindaklanjuti	%	100	SEKDA
		Jumlah Perbub standar satuan harga Kab. HST yang terbit	dokumen	2	SEKDA
102	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan administrasi pembangunan dengan perencanaan	%	100	SEKDA
102.01	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan	%	100	SEKDA
		Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan aturan	%	100	SEKDA
103	Terkendalinya pelaksanaan pembangunan	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan aturan	%	100	SEKDA
104	Peningkatan kualitas hubungan ulama dan umara dalam pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pertemuan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan	%	100	SEKDA
104.01	Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara dalam pembangunan	Persentase rekomendasi hasil pertemuan yang	%	100	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	daerah	dilaksanakan sesuai kesepakatan			
105	Peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase jumlah mahasiswa/santri yang terfasilitasi beasiswa yang memenuhi komitmen sesuai perjanjian	%	100	SEKDA
105.01	Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan	Persentase jumlah mahasiswa/santri yang terfasilitasi beasiswa yang memenuhi komitmen sesuai perjanjian	%	100	SEKDA
		Persentase jumlah asrama yang berfungsi dengan baik	%	100	SEKDA
		Persentase hasil koordinasi (rencana tindak lanjut) kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan	%	100	SEKDA
106	Peningkatan pelayanan publik di bidang kehumasan	Persentase klarifikasi isu/berita negatif tentang kebijakan Pimpinan Daerah	%	100	SEKDA
106.01	Meningkatnya pelayanan publik di bidang kehumasan	Persentase klarifikasi isu/berita negatif tentang kebijakan Pimpinan Daerah	%	100	SEKDA
107	Peningkatan kelancaran aktifitas Kepala Daerah	Hasil survey kepuasan Kepala Daerah terhadap pelayanan keprotokolan	predikat	baik	SEKDA
107.01	Meningkatnya kelancaran aktivitas Kepala Daerah	Hasil survey kepuasan Kepala Daerah terhadap pelayanan keprotokolan	predikat	baik	SEKDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
108	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah desa/kelurahan yang ditetapkan batas desanya dalam perbup	desa/kelurahan	50	SEKDA
109	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah kesepakatan Kepala Daerah yang dihasilkan	dokumen	0	SEKDA
110	Peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase jumlah asrama yang berfungsi dengan baik	%	100	SEKDA
111	Kelancaran bidang ekonomi	Jumlah Perbub standar satuan harga Kab. HST yang terbit	dokumen	2	SEKDA
112	Peningkatan pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	Persentase pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	%	3	SEKDA
112.01	Meningkatnya pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	Persentase pelaku usaha pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) di daerah yang taat aturan	%	3	SEKDA
113	Peningkatan pelayanan kemasyarakatan	Persentase hasil koordinasi (rencana tindak lanjut) kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan	%	100	SEKDA
114	Mewujudkan Optimalisasi Kinerja Sekretariat	Tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan	%	100	SEKWAN

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
115	Mewujudkan Optimalisasi Kinerja Sekretariat	Ketersediaan SDM, Sarana dan Prasarana	%	100	SEKWAN
116	Mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	0	BRB
116.01	Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Rasio Rata-rata Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	-	0	BRB
117	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa/Kelurahan dengan Tertib Administrasi	--	10 Desa	BRB
117.01	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Tertib Administrasi	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	--	14 Desa/Kelurahan	BRB
118	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan pemerintah Desa/Kelurahan	Desa yang Dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	--	12 Desa/Kelurahan	BRB
118.01	Jumlah desa yg dilakukan evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/kelurahan	--	4 Desa/Kelurahan	BRB
119	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	B	PDW
120	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Rasio indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi desa yang berkategori ? B	%	87	PDW

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
121	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	21	PDW
122	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dibina dan dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa.	Desa	21	PDW
123	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	84,25	LAS
123.01	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	nilai	84,25	LAS
124	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan dengan tertib administrasi	desa/kelurahan	10	LAS
124.01	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan dengan tertib administrasi	desa/kelurahan	10	LAS
125	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya.	desa/kelurahan	18	LAS
125.01	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya.	desa/kelurahan	18	LAS
126	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	84,25	LAU

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
127	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	10	LAU
127.01	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa dengan tertib administrasi	Desa	10	LAU
128	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintah desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya	Desa	16	LAU
128.01	Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan pemerintah desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunannya	Desa	16	LAU
129	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dikecamatan	Indek	B	HRY
129.01	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dikecamatan	Indeks	B	HRY
130	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	17	HRY
130.01	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Dengan Tertib Administrasi	Desa	17	HRY
131	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Evaluasi Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Desa	17	HRY

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
131.01	Meningkatnya Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Persentase desa Hasil Evaluasi Minimal Kategori Berkembang	%	100	HRY
132	Meningkatkan kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Katagori	B	BTB
132.01	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Katagori	B	BTB
133	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persentase	100	BTB
133.01	Meningkatnya pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa	Persentase	100	BTB
134	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Persentase Desa hasil evaluasi evaluasi minimal kategori berkembang	Persentase	100	BTB
134.01	Meningkatnya kinerja perkembangan pembangunan desa	Persentase Desa hasil evaluasi evaluasi minimal kategori berkembang	Desa	100	BTB
135	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Persentase Desa hasil evaluasi evaluasi minimal kategori berkembang	persen	100	BTB
136	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	b	HTK
137	Meningkatkan penyelenggaraan	Jumlah kelurahan desa dengan tertib	desa	12	HTK

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	pemerintahan desa	administrasi			
138	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Jumlah desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan desa	desa	10	HTK
139	Mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas Camat.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B	BAS
139.01	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B	BAS
140	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Desa/Kelurahan dengan tertib administrasi	Desa/Kelurahan	19	BAS
141	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Desa /Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa	Desa/Kelurahan	19	BAS
141.01	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa.	Desa/Kelurahan	19	BAS
142	Meningkatkan kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terhaadap pelayanan di Kecamatan	Indeks	B	BATARA
142.01	Rata-rata pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	B	BATARA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
143	Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa / Kelurahan dengan Tertib Administrasi	Desa	8	BATARA
143.01	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang tertib	%	65	BATARA
144	Meningkatnya Kinerja Perkembangan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan Desa	Desa	14	BATARA
144.01	Meningkatkan Pemberdayaan dan Pembangunan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan desa	desa	14	BATARA
145	Mengoptimalkan pelaksanaan tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	%	90	BAT
145.01	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	%	90	BAT
146	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan tertib administrasi	persen	11	BAT
146.01	Meningkatnya pengelolaaan administrasi pemerintahan Desa	Jumlah Desa dengan tertib administrasi	Desa	11	BAT
147	Meningkatkan Kualiatas pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	kali	12	LPS

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
148	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Jumlah Desa dengan tertib Administrasi	Dokumen	12	LPS
149	Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan pemerintahan desa	Jumlah Desa yang dilakukan evaluasi kinerja perkembangan pembangunan Desa	Desa	9	LPS
150	Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan /pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK , b.Inspektorat	%	90	INSPEKTORAT
150.01	Meningkatnya kepatuhan terhadap penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan/pengawasan	Persentase penyelesaian itindak lanjut hasil pemeriksaan : a. BPK b.Inspektorat	%	90	INSPEKTORAT
		Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaan : a. BPK, b. Inspektorat	%	90	INSPEKTORAT
151	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Daerah	Persentase hasil evaluasi SAKIP Pemda yang mendapat nilai baik terhadap evaluasi Internal	%	80	INSPEKTORAT
152	Meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat	Livel Kapabilitas APIP	level	3	INSPEKTORAT
152.01	Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)	Level Kapabilitas APIP	level	3	INSPEKTORAT

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
153	Meningkatkan akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemkab. HST	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang menyajikan sudah sesuai dengan SAP	%	90	INSPEKTORAT
153.01	Meningkatnya akuntabilitas keuangan di lingkungan Pemkab. HST	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang menyajikan sudah sesuai dengan SAP	%	80	INSPEKTORAT
154	Meningkatkan Implementasi SPIP	Level/Tingkat Maturitas SPIP	level	3 dengan catatan	INSPEKTORAT
154.01	Meningkatnya Implementasi SPIP	Level /tingkat Maturitas SPIP	level	3 dengan catatan	INSPEKTORAT
155	Meningkatkan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan /pengawasan	Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah/negara sesuai hasil pemeriksaa : a. BPK b. Inspetorat	%	90	INSPEKTORAT
156	Meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target RPJMD	%	80	BAPPELITBANGDA
156.01	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target RPJMD	%	80	BAPPELITBANGDA
		Persentase capaian target RKPD	%	100	BAPPELITBANGDA
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam RKPD	%	50	BAPPELITBANGDA
		Persentase keselarasan program RKPD dengan	%	97	BAPPELITBANGDA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
		RPJMD			
157	Meningkatkan pendanaan pembangunan	Persentase belanja langsung dalam APBD	%	50	BAPPELITBANGDA
157.01	Meningkatnya pendanaan pembangunan	Jumlah dana APBN, DAK dan APBD Provinsi di Kab. HST	Rp	250000000	BAPPELITBANGDA
158	Meningkatkan konsistensi perencanaan dengan penganggaran	Persentase program dan kegiatan RKPD yang dilaksanakan dalam APBD	%	90	BAPPELITBANGDA
158.01	Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran	Persentase program dan kegiatan RKPD yang terakomodir dalam APBD	%	90	BAPPELITBANGDA
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen APBD	%	40	BAPPELITBANGDA
159	Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah	Persentase hasil litbang yang digunakan	%	100	BAPPELITBANGDA
159.01	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	persentase rekomendasi hasil litbang yg dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	%	100	BAPPELITBANGDA
160	Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Penatausahaan Pengelolaa Keuangan	%	100	BPKAD
160.01	Meningkatkan Kualitas Sistem	% Ranperda/Ranperbup APBD/APBDP disusun	buah	2	BPKAD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
	Pengelolaan Keuangan Daerah	Tepat Waktu			
		Pengesahan DPA tepat waktu	%	100	BPKAD
		% Ranperda/Ranperbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan Tepat Waktu	%	100	BPKAD
		IKM Pelayanan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan	%	85	BPKAD
161	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keakuratan data BMD	%	100	BPKAD
161.01	Meningkatnya Pengamanan dan Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keakuratan data BMD	%	100	BPKAD
162	Meningkatkan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Jumlah	25	BPPRD
162.01	Meningkatnya Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Rp	25	BPPRD
		Prosentase Piutang Pajak dan Retribusi Daerah	%	23	BPPRD
		Prosentasi Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah	%	20	BPPRD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Target		SKPD
			Satuan	2020	
1	2	3	4	5	6
163	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Persentasi pencapaian pelaksanaan perjanjian kinerja di setiap SKPD pada setiap jenjang jabatan	%	90	BKDSDM
163.01	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Indek Profesionalitas ASN	-	85	BKDSDM
164	Meningkatkan Kinerja Aparatur	Persentasi pelayanan administrasi yang dapat diselesaikan secara online	%	90	BKDSDM
164.01	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Tingkat kepuasan layanan kepegawaian	%	85	BKDSDM
165	Maningkatkan kinerja aparatur	Persentasi pencapaian pelaksanaan perjanjian kinerja di setiap SKPD pada setiap jenjang jabatan	%	90	BKDSDM
165.01	Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Indek Profesionalitas ASN	-	85	BKDSDM
166	Maningkatkan kinerja aparatur	Persentasi pelayanan administrasi yang dapat diselesaikan secara online	%	90	BKDSDM

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 adalah : **"Peningkatan Sumber Daya Manusia Untuk Pertumbuhan Berkualitas".** Sesuai tema diatas, sasaran dan target pembangunan nasional yang harus dicapai serta dukungan sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Nasional	Target Nasional	Target HST
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,5	5,75-6,25
2.	Inflasi	2,0-4,0	6,17
3.	Tingkat Kemiskinan	8,5-9,0	5,60
4.	Indeks Pembangunan Manusia	72,05	70,84
5.	Gini Rasio	0,375-0,380	<0,30
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,8-5,1	3,5
7.	Pembangunan Antar Wilayah (Kalimantan)	4,08	-

Dalam mencapai sasaran tersebut diatas disusun Arah Pembangunan Nasional berdasarkan Nawacita yang terdiri atas :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi social,

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Nawacita disusun menjadi prioritas pembangunan nasional yang terdiri dari :

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional maka arah kebijakan dan program prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Prioritas Nasional 1: Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, dengan arah kebijakan yaitu:**
   a. Meningkatkan keterjangkauan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dan penduduk yang terkendala dokumen kependudukan.
   b. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
   c. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas untuk semua penduduk.
   d. Meningkatkan daya tahan ekonomi bagi kelompok miskin dan rentan.
   e. Memajukan kebudayaan dan penguatan karakter untuk mewujudkan bangsa berprestasi.

   Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan.
   b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
   c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
   d. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
   e. Pengentasan kemiskinan.
   f. Pembangunan budaya, karakter, dan prestasi bangsa.

2. **Prioritas Nasional 2: Infrastruktur dan pemerataan wilayah, dengan arah kebijakan yaitu:**
   a. Meningkatkan akses hunian, air minum, dan sanitasi yang layak serta terjangkau.
   b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi di kawasan 3T yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, keterpaduan multimoda, dan mendukung kawasan yang lebih maju.
   c. Meningkatkan standar bangunan dan memperkuat rantai pasokan konstruksi melalui inovasi kebencanaan.
   d. Membangun infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan konektivitas dan menjangkau seluruh wilayah serta terhubung dengan kawasan prioritas dan sistem jaringan utama logistik.
   e. Mengembangkan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan.
   f. Membangun infrastruktur serta memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta penyiaran melalui transformasi digital.

   Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Perluasan infrastruktur dasar.
   b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana.
   c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda mendukung pertumbuhan ekonomi.
   d. Peningkatan infrastruktur perkotaan.
   e. Perluasan teknologi informasi dan komunikasi.
3. **Prioritas Nasional 3: Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja, dengan arah kebijakan yaitu:**
   a. Meningkatkan kapasitas pemanfaatan peluang usaha dan pengelolaan UMKM.
   b. Mempercepat transformasi struktural.
   c. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.
   d. Menurunkan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

e. Membangun ekosistem yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM.
b. Peningkatan nilah tambah dan investasi di sektor riil.
c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. **Prioritas Nasional 4: Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan yaitu:**
   a. Meningkatkan EBT untuk memenuhi kebutuhan energi.
   b. Meningkatkan produktivitas pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan berkualitas.
   c. Meningkatkan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
   d. Meningkatkan daya dukung, daya tampung serta mitigasi dampak dan bahaya perubahan iklim.
   e. Mengoptimalkan pembangunan berketahanan bencana.

   Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
   b. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air.
   c. Pemenuhan kebutuhan energi baru dan terbaharukan (EBT).
   d. Peningkatan daya dukungn SDA dan daya tampung lingkungan.
   e. Penguatan ketahanan bencana.
5. **Prioritas Nasional 5: Stabilitas pertahanan dan keamanan, dengan arah kebijakan yaitu:**
   a. Meningkatkan posisi kekuatan pertahanan.
   b. Meningkatkan stabilitas kawasan dan kerja sama pembangunan internasional.
   c. Menegakkan hukum dan anti korupsi.
   d. Membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba,

penanggulangan terorisme serta gangguan kamtibmas.

e. Meningkatkan keamanan siber.

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kemampuan pertahanan.
b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pembangunan internasional.
c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi.
d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut.
e. Penanggulangan narkotika dan penguatan Kamtibmas.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan

Tema pembangunan provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yakni "**MEMACU DAYA SAING PEREKONOMIAN YANG DIDUKUNG SDM YANG BERKUALITAS".**

Sesuai tema diatas, sasaran dan target pembangunan provinsi Kalimantan Selatan yang harus dicapai serta dukungan sasaran dan target pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Provinsi Kalsel	Target Kalsel	Target Kewilayahan HST	Target HST
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,30	6,0	5,75-6,25
2.	IKLH	69,50	-	71,50
3.	Tingkat Kemiskinan	4,2	5,8	5,60
4.	Indeks Pembangunan Manusia	71,20	68,8	70,84
5.	Gini Rasio	0,33	-	<0,30
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,10	-	3,5
7.	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,48	-	-

Sasaran pembangunan tersebut diatas dicapai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri atas :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Arah kebijakan sebagai berikut :

   a. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah

b. Penurunan prevelensi stunting
c. Peningkatan IPM
d. Penurunan angka pernikahan anak
e. Peningkatan ketahanan budaya dan kualitas seni masyarakat
f. Pemenuhan hak disabilitas dan tuna sosial

2. Peningkatan daya saing ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan kemandirian pangan
b. Peningkatan kontribusi sektor pertanian
c. Peningkatan kontribusi sektor industri, perdagangan dan jasa
d. Peningkatan kontribusi sektor parawisata
e. Peningkatan nilai investasi
f. Peningkatan daya saing tenaga kerja
g. Peningkatan penanganan pra dan pasca bencana
h. Peningkatan daya dukung SDA dan daya tampung lingkungan

3. Tata kelola pemerintahan yang baik

Arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
b. Penguatan SAKIP
c. Pelaksanaan PILKADA Kalsel
d. Perencanaan penganggaran yang responsif gender

4. Peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas

Arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan sarana dan prasarana dasar
b. Peningkatan sarana dan prasarana mendukung perekonomian untuk pemerataan pembangunan

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Berdasarkan pada visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021 dan arah pembangunan tahun ke 5 (empat) RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2021, tema Pembangunan tahun 2020 adalah **"PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN",** Sesuai dengan tema

pembangunan diatas, prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut.

Prioritas Daerah 1 :

Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban umum

Arah Kebijakan :

1. Sukses penyelenggaraan pilkada dan pilbakal
2. Meningkatkan penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba
3. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan peran serta komponen masyarakat dalam penanggulangan penyebaran hoaks serta dalam menjaga stabilitas daerah

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Indeks Ketertiban Umum	75%
	Indeks Ketentraman Masyarakat	100%
Menurunkan tingkat Konflik sosial di masyarakat	Jumlah potensi konflik sosial yg dapat di atasi	2
Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Masyarakat dan Politik	Angka Partisipasi Pemilu	75%
Meningkatnya kualitas hubungan ulama dan umara dalam pembangunan daerah	Persentase rekomendasi hasil pertemuan yang dilaksanakan sesuai kesepakatan	100%
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti	100%

Prioritas Daerah 2 :

Meningkatkan daya saing pendidikan

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi guru
2. Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan
3. Perluasan pemberian bantuan beasiswa/mahasiswa
4. Peningkatan minat dan budaya baca
5. Peningkatan kegiatan seni budaya

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
	Indeks Integritas Nilai UN	74
Meningkatnya kualitas pendidikan yang berkarakter	Nilai rata - rata Ujian SD	6,2
	Nilai rata - rata Ujian SMP	6,9
	Persentase Lembaga PAUD Dikmas, SD, dan SMP yang TerakreditasI	71%
Meningkatnya aksesibilitas pendidikan	Angka Putus sekolah	0 - 0,05 %
	Rasio Guru/siswa	01,20
Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan di Perpustakaan	25%
Meningkatnya Kecintaan Seni dan Budaya Daerah	Tingkat kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah	83%
Meningkatnya pelayanan kemasyarakatan	Persentase mahasiswa/santri yang terfasilitasi beasiswa yang memenuhi komitmen sesuai perjanjian	100%
	Persentase asrama mahasiswa yang berfungsi dengan baik	100%

Prioritas Daerah 3 :

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan pemberian jaminan kesehatan kepada
2. Seluruh masyarakat (universal health coverage)
3. Pemenuhan standart kebutuhan sdm kesehatan
4. Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan
5. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Melahirkan	182/100.000
	Angka Kematian Bayi Baru Lahir	17/1.000
	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan di PKM	68%
	Persentase Pemenuhan Pencapaian SPM Kesehatan	100%
	Prosentase peningkatan status gizi masyarakat	70%
Meningkatkan kualitas Pelayanan Pasien	Klasifikasi Akreditasi RSUD	Paripurna
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RS	80%

Prioritas Daerah 4 :

Meningkatkan keterampilan masyarakat

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja

1. Pelatihan keterampilan bagi pemuda
2. Pelatihan bagi keluarga miskin
3. Pelatihan keterampilan bagi perempuan dan keluarga

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja Yang Bersertifikat Terampil	100%
Menurunkan Angka penyandang masalah sosial	% Kemandirian PMKS	75%
Peningkatan pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100%

Prioritas Daerah 5 :

Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang ekonomi

Arah Kebijakan :

1. Pemenuhan sanitasi, air bersih dan kualitas rumah tidak layak huni
2. Peningkatan konektivitas khususnya pada daerah terpencil
3. Peningkatan infrastruktur pertanian
4. Peningkatan kualitas infrastruktur publik
5. Mendorong penggunaan apbdes untuk pembangunan

6. Infrastruktur yang lebih berkualitas yang menunjang perekonomian dan perkembangan desa

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang layak	Persentase sarana dan prasarana permukiman yang layak	94,06%
	Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh perkotaan	13,68%
Meningkatnya penyediaan air minum dan sanitasi yang layak	Cakupan pelayanan air minum (PDAM dan Non PDAM)	83%
	Cakupan pelayanan RT bersanitasi layak	13%
	Persentase berkurangnya luas genangan yang lebih dari 2 jam	57,22%
Meningkatnya Aksesibilitas jalan dan jembatan yang mantap	Persentase jalan dan jembatan mantap	67,10%
Meningkatnya Jaringan Irigasi pertanian	Luas Lahan Pertanian yang terairi oleh jaringan irigasi	15.000 Ha
Meningkatnya kemandirian Desa	% Desa dengan nilai IDM di atas 0,599	92%

Prioritas Daerah 6 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualtas (inklusif)

Arah Kebijakan :

1. Pengembangan ekonomi produktif
2. Pengembangan pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan konstruksi dengan memaksimalka penyerapan tenaga kerja lokal
3. Fasilitasi pemasaran produk ukm
4. Penanganan kemiskinan by name by address
5. Pemberian bantuan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka pemenuhan spm sosial
6. Peningkatan peran pemerintah desa melalui peningkatan penggunaan apbdes untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan perekonomian desa

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Produksi Pertanian	% Peningkatan Produksi TPH	1 - 2 %
	% Peningkatan Produksi Peternakan	2,50%
	% Peningkatan Produksi Perkebunan	4,05%
Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan	40%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	78,38%
Meningkatnya Jenis Produk Pertanian Yang Bernilai Tambah	Jumlah Jenis Produk Pertanian Yang Bernilai Tambah	15 JENIS
Meningkatnya peran koperasi dan UMK dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	Persentasi Pertumbuhan UMK	8,80%
Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah	NTB Perdagangan	11%
	Persentasi pertumbuhan Volume produk daerah yang dipasarkan	5%
Meningkatnya pertumbuhan IKM	Persentasi tingkat pertumbuhan IKM	10,74%
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	80.500 orang
Meningkatnya investasi di Kabupaten HST	Jumlah Nilai Investasi (PMDN/PMA)	Rp 70 milyar

Prioritas Daerah 7 :

Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan advokasi dan kampanye #save meratus
2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terkendalinya Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase Peningkatan IKLH	71,5

Prioritas Daerah 8 :

Meningkatkan pelayanan publik

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan publik
2. Peningkatan sop pelayanan

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat di Bidang Pelayanan Perizinan	Rata-rata pencapaian indeks kepuasan masyarakat (IKM) di bidang pelayanan perizinan	85%
Meningkatnya Kepuasan Masyarakan terhadap Pelayanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perhubungan	90%
Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk yang memiliki Kartu Keluarga	97%
	Persentase Penduduk yang memiliki e-KTP	97%
	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran	54%
	Persentase Jumlah Orang Meninggal yang memiliki Akta Kematian	5%
	Persentase Anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	33,30%
Meningkatnya kualitas pelayanan birokrasi	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	81%
Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75%

Prioritas Daerah 9 :

Meningkatkan kinerja pemerintah daerah

Arah Kebijakan :

1. Penguatan kapasitas
2. Penguatan fungsi pembinaan apip
3. Peningkatan pembiayaan pembangunan
4. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (termasuk mendorong peran aktif pemerintah desa)
5. Penyelesaian pemetaan batas desa
6. Mendorong pemenuhan data berbasis desa

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sangat Tinggi
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase keakuratan data BMD	100%
Meningkatnya Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rasio Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	25%
	% kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah	20%
Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur	Indek Profesionalitas ASN	85
Meningkatkan Implementasi SPIP	Level/Tingkat Maturitas SPIP	3,3
Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian target RPJMD	80%
	Persentase capaian target RKPD	100%

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 diuraikan atas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berkaitan langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan yang kedua adalah program dan kegiatan perangkat daerah yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, dimana kedua jenis program dan kegiatan tersebut merupakan program dan kegiatan prioritas daerah terpilih untuk tahun 2020.

Berdasarkan prioritas pembangunan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020, maka rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana terlampir.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
1	Angka kriminalitas (jumlah kausus tertangani/10.000 penduduk)	%	<10	<10	
2	Jumlah kejadian konflik SARA	kali	0	0	
3	Jumlah kegiatan forum koordinasi antar umat beragama	kali	2	2	
4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	tahun	7,85	8,00	
5	Usia harapan sekolah (tahun)	tahun	12,25	12,50	
6	Angka Harapan Hidup (tahun)	tahun	66,80	67,50	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	%	3,5	4 - 6	
8	Persentase rumah layak huni (persen)	%	95,55	98,12	
9	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	ha	45,86	0	
10	Cakupan layanan air bersih (persen)	%	90,93	100	
11	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	%	67,1	62,13	
12	Persentase Desa berkembang	%	72,05	81,37	
13	Jumlah Ketersediaan pangan utama (kg/kapita/tahun)	(kg/kapita/tahun)	625	574,04	
14	Laju Pertumbuhan ekonomi (persen)	%	5,75 - 6,25	4-6	
15	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan	%	5,5 - 6,0	4-5	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
	Perikanan (persen)				
16	Angka kemiskinan (persen)	%	5,60	3,97	
17	Pendapatan per kapita (ADHP/Rp)	Rp (juta)	24.503	36.051	
18	Indeks Gini	%	<0,30	<0,30	
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	71,50	69,40	
20	Indeks Pencemaran Air	-	66	60,1	
21	Indeks Pencemaran Udara	-	92,73	92	
22	Indeks Tutupan Lahan	-	59,71	59,43	
23	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	85,00	85,00	
24	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	
25	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	-	75 (B)	85 (A)	
26	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	-	3,05 (Sangat Tinggi)	3,10 (Sangat Tinggi)	

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Konstan)	%	4 - 6	4 - 6	
2	Laju inflasi	-	6,17	6,00	
3	PDRB per kapita	juta rupiah	32.743	32.743	
4	Indeks Gini	-	< 0,30	< 0,3	
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	95,85	96,03	
6	Angka kriminalitas	-	< 11	< 10	
7	Angka melek huruf	-	98,17	98,26	
8	Angka rata-rata lama sekolah	-	7,85	8,00	
9	Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A	-	102,96	103,00	
10	Angka partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B	-	99,98	100,00	
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	-	90,00	90,25	
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	-	91	93	
13	Angka kelangsungan hidup bayi	-	994,00	995,00	
14	Angka usia harapan hidup	-	66,80	67,50	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
15	Persentase balita gizi buruk	-	0,011	0.010	
16	Rasio penduduk yang bekerja	-	98.74	99.00	
17	Jumlah grup kesenian	kelompok	20	20	
18	Jumlah klub olahraga	buah	5	5	
19	Jumlah gedung olahraga	buah	3	3	
20	Angka partisipasi sekolah dasar	-	90,00	90,25	
21	Angka partisipasi sekolah menengah pertama	-	91	93	
22	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	-	88	90	
23	Rasio guru/murid	-	468.654	426.621	
24	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	-	468.654	426.621	
25	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	-	-	
26	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	99.00	99.00	
27	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	98.50	100.00	
28	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0	0	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
29	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,05	0	
30	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	
31	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	
32	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	-	98	100	
33	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	-	85	88	
34	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88	90	
35	Rasio posyandu per satuan balita	-	22.5	25	
36	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	-	0,8	1	
37	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	0,008 / 1.000	0,008/1.000	
38	Rasio dokter per satuan penduduk	-	0.18	0.20	
39	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	4.55	4.89	
40	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	-	100	100	
41	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	90.00	92.50	
42	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization	%	100	100.00	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
	(UCI)				
43	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	-	100	100	
44	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	55.00	60.00	
45	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	
46	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	
47	Cakupan kunjungan bayi	%	92.50	100.00	
48	Cakupan puskesmas	%	172.73	172.73	
49	Cakupan pembantu puskesmas	%	75.00	80.00	
50	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	-	71.00	75.0	
51	Rasio Jaringan Irigasi	-	18.00	20.00	
52	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	-	N/A	N/A	
53	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	75.00	80.00	
54	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	82.50	85.00	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
55	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	6.00	5,00	
56	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	77.92	83.73	
57	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	33.09	34.39	
58	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	98.75	99.00	
59	Rumah tangga pengguna air bersih	%	95.78	95.58	
60	Rumah tangga pengguna listrik	%	98.78	100.00	
61	Rumah tangga ber-Sanitasi	%	75.00	75,00	
62	Lingkungan pemukiman kumuh	%	1.59	1.41	
63	Rumah layak huni	%	85.63	86.50	
64	Rasio permukiman layak huni	%	99.55	99.60	
65	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	28.60	30.00	
66	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	8.75	10.00	
67	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	0	0	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
68	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	ada	ADA	
69	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	-	ada	ADA	
70	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	-	ada	ADA	
71	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	
72	Jumlah arus penumpang angkutan umum	-	155	160	
73	Rasio ijin trayek	-	0.002	0.002	
74	Jumlah uji kir angkutan umum	-	1,746	1,805	
75	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	-	1	1	
76	Cakupan Angkutan darat	-	0,152	0,164	
77	Kepemilikan KIR angkutan umum	-	1,166	1,193	
78	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	menit	15	15	
79	Pemasangan Rambu-rambu	buah	250	350	
80	Persentase penanganan sampah	%	100	100	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
81	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	%	100	100	
82	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	-	4.00	5.00	
83	Penegakan hukum lingkungan	%	100	100	
84	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	-	1.00	1.00	
85	Rasio bayi berakte kelahiran	-	1.00	1.00	
86	Rasio pasangan berakte nikah	-	0.94	0.98	
87	Kepemilikan KTP	%	96.27	100.00	
88	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	-	0.65	0.73	
89	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	-	ADA	ADA	
90	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	SUDAH	SUDAH-	
91	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	66.73	64.42	
92	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	33.27	35.58	
93	Rasio KDRT	%	0	0	
94	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
95	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	99.00	100.00	
96	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	100	100	
97	Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	N/A	N/A	
98	Rasio akseptor KB	%	85.68	85.68	
99	Cakupan peserta KB aktif	%	84.33	84.33	
100	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	29.11	29.11	
101	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	PA	13	13	
102	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	%	33.11	36.52	
103	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	35.70	39.66	
104	Angka partisipasi angkatan kerja	-	72.89	73.21	
105	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	1.50	0.00	
106	Tingkat partisipasi angkatan kerja	-	72.89	73.21	
107	Pencari kerja yang ditempatkan	%	85.00	100.00	
108	Tingkat pengangguran terbuka	-	4 - 6	4 - 6	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
109	Keselamatan dan perlindungan	%	8.00	10.00	
110	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	%	80.00	100.00	
111	Persentase koperasi aktif	%	57.50	60.00	
112	Proporsi Usaha Mikro dan Kecil	%	90.68	90.00	
113	Jumlah investor (PMDN/PMA)	-	3	3	
114	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA)	-	125,000,000,000	150,000,000,000	
115	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	3	3	
116	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	16	16	
117	Jumlah organisasi pemuda	-	25	25	
118	Jumlah organisasi olahraga	-	28	28	
119	Jumlah kegiatan kepemudaan	-	6	6	
120	Jumlah kegiatan olahraga	-	8	8	
121	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	-	0.017	0.017	
122	Lapangan olahraga	-	0.025	0.025	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
123	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	7	8	
124	Kegiatan pembinaan politik daerah	kegiatan	6	6	
125	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	-	44	45	
126	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	-	3	3	
127	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	-	2	2	
128	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	-	ADA	ADA	
129	Penegakan PERDA	%	100	100	
130	Cakupan patroli petugas Satpol PP	-	20	20	
131	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	100	100	
132	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	-	-	-	
133	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	%	100	100	
134	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100	100	
135	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	-	100	100.00	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
136	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	-	84,25	85,00	
137	Regulasi ketahanan pangan	-	ADA	ADA	
138	Ketersediaan pangan utama	-	567,34	574,04	
139	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	kelp	220	220	
140	LPM Aktif	-	-	-	
141	PKK aktif	TP PKK	181	181	
142	Posyandu aktif	-	440	445	
143	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	39.00	40.00	
144	Buku ”kabupaten dalam angka”	-	ADA	ADA	
145	Buku ”PDRB kabupaten”	-	ADA	ADA	
146	Pengelolaan arsip secara baku	-	15	15	
147	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	1	1	
148	Jumlah jaringan komunikasi	-	78	80	
149	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	buah	35	35	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
150	Jumlah surat kabar nasional/lokal	SKH	12	12	
151	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	stasiun	7	7	
152	Website milik pemerintah daerah	domain	5	5	
153	Sistim Informasi Manajemen Pemda	-	10	10	
154	Jumlah perpustakaan	-	64	65	
155	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	-	60,65	65	
156	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	23	25	
157	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	-	5.20	5.25	
158	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	27.15	27.50	
159	Kunjungan wisata	-	82.5	86,5	
160	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	-	10.00	10.00	
161	Produksi perikanan	-	110.45	111.65	
162	Konsumsi ikan	-	106.05	106.13	
163	Cakupan bina kelompok nelayan	-	30	40	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
164	Produksi perikanan kelompok nelayan	-	7,25	8	
165	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	12.16	12.47	
166	Ekspor Bersih Perdagangan	-	375,000,000,000	400,000,000,000	
167	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	-	10.76	11.12	
168	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	-	5.60	5.65	
169	Pertumbuhan Industri.	-	8.59	9.29	
170	Cakupan bina kelompok pengrajin	-	19.25	20.25	
171	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	-	1,058,214	1,117,117	
172	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	-	343,919	363,063	
173	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	-	1,925	2	
174	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	-	34,3	35	
175	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	-	8,75	8,8	
176	Rasio ketersediaan daya listrik	-	91.66	95.88	
177	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	%	98.78	100.00	

No	Indikator	Satuan	Terget Tahun 2020	Terget RPJMD 2021	Ket
178	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	97.50	99.00	
179	Angka kriminalitas	-	<11	<10	
180	Lama proses perijinan	-	5 HARI	5 HARI	
181	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	-	37	37	
182	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	buah	4	4	
183	Persentase desa berstatus desa berkembang terhadap total desa	%	78	81	
184	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	18.07	20.00	
185	Rasio ketergantungan	-	48.00	47.50	
186	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	-	-	

BAB VII
PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman untuk penganggaran tahunan yaitu berupa pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020. KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah digunakan sebagai pedoman menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah agar segera menindaklanjuti dengan menyesuaikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020 yang menjabarkan lebih rinci tentang program, sasaran program, indikator capaian program, keluaran dan hasil kegiatan serta lokasi kegiatan.
2. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti untuk menyusun kerangka anggaran dan regulasi untuk mendukung pencapaian program tersebut dengan pendekatan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program-program RKPD ini dengan sebaik-baiknya.
4. Guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap penjabaran dan sinergitas serta capaian indikator ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Kebijakan Umum APBD serta PPAS Tahun Anggaran 2020.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad,

semangat, kejujuran, dan disiplin serta komitmen para pelaku pembangunan dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi masalah pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada yang dimiliki untuk mewujudkan visi "Terwujudnya Masyarakat Hulu Sungai Tengah yang Agamis, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat".

Barabai, Juni 2019

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

H. A. CHAIRANSYAH

LAMPIRAN

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Pendidikan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				49.080.616.600			119.107.766.067
1	1			Pendidikan				49.080.616.600			119.107.766.067
1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 Persentase	1.237.978.100		100 Persentase	1.595.386.100
1	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	1200 OK	45.000.000		770 OK	38.500.000
1	1	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat	Hulu Sungai Tengah	2 jenis	244.578.100		2 jenis	825.000
					Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet		12 bulan			12 bulan	195.000.000
					Jumlah Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disewa		0 gedung kantor			0 gedung kantor	0
					Jumlah Bulan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan		12 bulan			12 bulan	8.580.000
					Jumlah Bulan Penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	92.669.100
					Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		12 bulan			12 bulan	32.872.000
					Jumlah Bahan Bacaan dan Buku yang Dibeli		730 eksemplar			730 eksemplar	4.380.000
1	1	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Terlaksananya Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	830 OH	450.640.000		830 OH	796.560.000
1	1	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi	Hulu Sungai Tengah	24 orang	497.760.000		24 orang	426.000.000

1	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		90 Persentase	129.660.000		90 Persentase	440.635.000
1	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Fasilitas Gedung yang Dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 unit	18.410.000		0 unit	0
					Jumlah Unit Fasilitas yang Ditingkatkan		0 unit			0 unit	0
					Jumlah Unit yang Dipelihara		1 tahun			1 tahun	25.115.000
1	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah Unit Peralatan yang Dibeli	Hulu Sungai Tengah	21 unit	15.000.000		21 unit	179.840.000
					Jumlah Perlengkapan yang Dibeli		34 set / unit			34 set / unit	94.680.000
					Jumlah Peralatan yang Dipelihara		1 tahun			1 tahun	20.000.000
					Jumlah Perlengkapan yang Dipelihara		0 unit			0 unit	0
1	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 unit	96.250.000		0 unit	0
					Jumlah Mobil / R2 yang Dipelihara		83 unit			83 unit	121.000.000
1	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai evaluasi SAKIP		B Huruf	0		B Huruf	0
1	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan yang disampikan tepat waktu		90 Persentase	0		90 Persentase	0
1	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standart		90 persentase	21.250.000		90 persentase	64.869.000
1	1	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun	Hulu Sungai Tengah	13 dokumen	21.250.000		13 dokumen	64.869.000
1	1	10		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase Orang tua anak sadar wajar 9 tahun		102.96 %	163.735.000		102.96 %	216.760.000
1	1	10	4	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah Sekolah yang di fasilitasi BOS	Hulu Sungai Tengah	258 Sekolah	163.735.000		258 Sekolah	216.760.000
1	1	10		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik dan berfungsi		90 %	0		90 %	0

1	1	10		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase kondisi sarana pendidikan yang lengkap, kondisi baik TOLONG DIHAPUS YANG INI		81 %	0		81 %	0
1	1	10		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase kondisi sarana pendidikan yang lengkap, kondisi baik		95 %	13.906.100.000		%	60.237.300.000
1	1	10	30	Pembangunan, Peningkatan Prasarana SD	Jumlah Prasarana yang Dibangun	Hulu Sungai Tengah	280 unit / ruang / paket	7.553.000.000		280 unit / ruang / paket	42.542.800.000
1	1	10	31	Rehabilitasi Prasarana SD	Jumlah Prasarana yang di rehab	Hulu Sungai Tengah	206 ruang / unit	6.353.100.000		206 ruang / unit	17.194.500.000
1	1	10	32	Pengadaan Sarana Pembelajaran SD	Jumlah Sarana yang Dibeli	Hulu Sungai Tengah	1 paket	0		1 paket	500.000.000
1	1	11		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Persentase siswa yang mendapat bantuan		99,98 %	0		99,98 %	0
1	1	11		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Persentase kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik dan berfungsi		89 %	4.065.125.000		89 %	6.306.000.000
1	1	11	30	Pembangunan, Peningkatan Prasarana SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun	Hulu Sungai Tengah	26 unit	3.160.000.000		26 unit	5.360.000.000
1	1	11	31	Rehabilitasi Prasarana SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diperbaiki	Hulu Sungai Tengah	5 unit	460.000.000		5 unit	500.000.000
1	1	11	32	Pengadaan Sarana Pembelajaran SMP	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Prasarana yang Dibeli	Hulu Sungai Tengah	1195 unit	445.125.000		1195 unit	446.000.000
1	1	11		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Persentase kondisi sarana pendidikan yang lengkap, kondisi baik		90 %	24.310.000		90 %	25.310.000
1	1	11	5	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah Sekolah yang Difasiitasi BOS	Hulu Sungai Tengah	35 sekolah	24.310.000		35 sekolah	25.310.000
1	1	13		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase siswa SD berprestasi		76 Persentase	462.825.000		76 Persentase	298.835.000
1	1	13	20	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Hulu Sungai Tengah	282 Siswa	462.825.000		282 Siswa	205.985.000
					Jumlah siswa yang dipersiapkan mengikuti lomba tingkat provinsi		32 Siswa			32 Siswa	92.850.000

1	1	13		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum yang berlaku sesuai Standar		100 Persentase	811.769.000		100 Persentase	850.969.000
1	1	13	4	Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian	Jumlah Siswa yang difasilitasi ikut ujian	Hulu Sungai Tengah	5.700 siswa	719.824.000		5.700 siswa	756.524.000
1	1	13	8	Pelatihan Penyusunan Kurikulum SD	Jumlah tenaga pendidikan yang dapat menerapkan kurikulum	Hulu Sungai Tengah	0 sekolah	37.695.000		0 sekolah	0
					Jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan karakter		0 Sekolah			0 Sekolah	0
					Jumlah kurikulum muatan lokal yang diterapkan		89 sekolah			89 sekolah	37.695.000
1	1	13	15	Penyelenggaraan Akreditasi SD	Jumlah Sekolah yang Siap Diakreditasi	Hulu Sungai Tengah	100 sekolah	54.250.000		100 sekolah	56.750.000
1	1	13		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase Sekolah SD yang mempunyai sarana dan prasarana lengkap, baik dan berfungsi		85 Persentase	0		85 Persentase	0
1	1	13		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SD	Persentase Sekolah SD yang mempunyai sarana dan prasarana penunjang peningkatan mutu belajar lengkap, baik dan berfungsi		85 Persentase	1.557.000.000		85 Persentase	757.000.000
1	1	13	22	Pengadaan sarana prasarana penunjang peningaktan mutu SD	Jumlah Buku-Buku Sekolah SD	Hulu Sungai Tengah	1 paket	1.557.000.000		1 paket	510.000.000
					Jumlah Alat Peraga yang Dibeli		10 paket			10 paket	247.000.000
1	1	14		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Persentase Sekolah SMP yang Mempunyai Sarana dan Prasarana Penunjang Mutu Belajar Lengkap, Baik dan Berfungsi		70 Persentase	2.013.000.000		70 Persentase	7.570.000.000
1	1	14	20	Pengadaan sarana prasarana penunjang peningaktan mutu SMP	Jumlah Buku-Buku Sekolah SMP	Hulu Sungai Tengah	0 paket	2.013.000.000		0 paket	0
					Jumlah Peralatan Peraga Belajar yang Dibeli		122 paket			122 paket	7.570.000.000
1	1	14		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Persentase Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum yang Berlaku Sesuai Standar		80 Persentase	403.753.500		80 Persentase	544.253.500

1	1	14	7	Pelaksanaan Pra Ujian dan Ujian SMP	Jumlah siswa yang difasilitasi ikut ujian	Hulu Sungai Tengah	5000 orang	362.954.000		5000 orang	503.454.000
1	1	14	14	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	Jumlah sekolah yang siap diakreditasi	Hulu Sungai Tengah	20 sekolah	40.799.500		20 sekolah	40.799.500
1	1	14		Program Peningkatan Mutu Wajib Belajar Pendidikan Dasar SMP	Persentase Siswa SMP Berprestasi		95 Persentase	483.510.000		95 Persentase	494.232.667
1	1	14	15	Penyelenggaraan Lomba Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Hulu Sungai Tengah	14 lomba	483.510.000		14 lomba	248.832.667
					Jumlah siswa yang dipersiapkan mengikuti lomba tingkat provinsi		14 lomba			14 lomba	245.400.000
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	Persentase siswa putus sekolah yg tertampung		80 Persentase	1.245.594.000		80 Persentase	11.254.646.000
1	1	18	42	Penyelenggaraan Pendidikan Non formal	Jumlah Kelompok Paket A	Hulu Sungai Tengah	0 orang	1.245.594.000		0 orang	250.000.000
					Jumlah Kelompok Paket B		0 orang			0 orang	1.367.320.000
					Jumlah Kelompok Paket C		0 orang			0 orang	2.755.494.000
					Jumlah Siswa yang Bisa Baca Tulis		440 orang			440 orang	6.881.832.000
1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	Persentase Sarana dan Prasarana PNF Kondisi Baik		0 Persentase	11.777.400.000		80 Persentase	12.818.400.000
1	1	18	33	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik PAUD/TKA	Jumlah Guru yang Dibantu	Hulu Sungai Tengah	1236 orang	10.238.400.000		1236 orang	3.650.400.000
					Jumlah Ustadz dan Ustadzah TK Al Qur an		22080 orang			22080 orang	6.624.000.000
1	1	18	41	Pengadaan Sarana Penunjang PAUD, Dikmas dan SKB	Jumlah Buku yang Tersedia	Hulu Sungai Tengah	0 paket	125.000.000		0 paket	0
					Jumlah Peralatan Peraga/Praktik yang Dibeli		1 paket			1 paket	45.000.000
					Jumlah Mebeleur yang Dibeli		2 paket			2 paket	80.000.000
1	1	18	43	Pembangunan Peningkatan Prasarana PAUD, DIKMAS dan SKB	Jumlah Prasarana yang Dibangun	Hulu Sungai Tengah	9 unit	575.000.000		9 unit	1.287.500.000
1	1	18	44	Rehabilitasi Prasarana PAUD, DIKMAS dan SKB	Jumlah Prasarana yang Direhab	Hulu Sungai Tengah	8 ruang	839.000.000		8 ruang	1.131.500.000

1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	% guru yg bersertifikat		80 %	0		80 %	0
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang bersertifikat		90 %	686.610.000		90 %	1.947.069.800
1	1	20	28	Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik SMP	Jumlah Guru Yang Meningkat Kompetensinya	Hulu Sungai Tengah	60 orang	0		60 orang	220.350.000
					Jumlah Guru yang Difasilitasi untuk Mengikuti Sertifikasi		10 orang			10 orang	100.000.000
					Honorarium Tim Penilai DUPAK		12 orang			12 orang	44.550.000
1	1	20	29	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD	Jumlah Guru Yang Meningkat Kompetensinya	Hulu Sungai Tengah	450 orang	686.610.000		450 orang	1.432.169.800
					Jumlah Guru yang Difasilitasi untuk Mengikuti Sertifikasi		15 orang			15 orang	150.000.000
1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase sekolah yang lengkap gurunya		90 %	0		90 %	0
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	% sekolah yag mengisi data dengan lengkap dan benar		100 persentase	0		100 persentase	0
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	% sekolah yg punya KIB dan KIR dengan benar		100 persentase	0		100 persentase	0
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	jumlah kunjungan website skpd		8000 orang/tahun	0		8000 orang/tahun	0
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	% Pemetaan sekolah yang valid		75 persentase	0		75 persentase	0
1	1	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Dengan Manajemen Data, Keuangan, Aset Lengkap dan Benar		75 persentase	0		75 persentase	317.950.000
1	1	22	19	Pembinaan manajemen informasi sekolah	Jumlah Sekolah yang Harus Mengisi Pada Dapodik	Hulu Sungai Tengah	649 sekolah	0		649 sekolah	32.000.000
					Jumlah Hasil Pemetaan Sekolah		1 dokumen			1 dokumen	254.450.000
					Jumlah Sekolah yang Dimutakhirkan Data Asetnya		307 dokumen			307 dokumen	31.500.000
					Jumlah Perubahan Informasi yang Disajikan Dalam 1 Bulan		0 macam			0 macam	0
1	1	26		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Persentase PAUD HI		20 persentase	42.325.000		20 persentase	28.250.000
1	1	26	2	Akreditasi PAUD, Dikmas dan SKB	Jumlah PAUD, Dikmas dan SKB yang Diakreditasi	Hulu Sungai Tengah	25 lembaga	42.325.000		25 lembaga	28.250.000
					Jumlah PAUD HI Perkecamatan		0 lembaga			0 lembaga	0

1	1	26		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	%paud HI		20 persentase	0		20 persentase	0
1	1	26		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Persentase GTK dan PTK Berprestasi Tk. Prov		100 persentase	159.460.000		100 persentase	400.000.000
1	1	26	10	Apresiasi PTK PAUD Dikmas	Jumlah Jenis Lomba PTK PAUD, Dikmas	Hulu Sungai Tengah	15 Persentase	159.460.000		15 Persentase	200.000.000
					Jumlah PTK PAUD Dikmas yang Mengikuti Lomba		15 persentase			15 persentase	200.000.000
1	1	26		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	Persentase PTK PAUD dan Dikmas yang memiliki sertifikat perjenjang		100 persentase	64.380.000		100 persentase	309.700.000
1	1	26	8	Peningkatan Kompetensi Guru PAUD	Jumlah PTK PAUD yang Bersertifikat	Hulu Sungai Tengah	0 guru	64.380.000		80 guru	259.700.000
					Jumlah PTK yang Lulus Uji Kompetensi		0 orang			56 orang	50.000.000
1	1	26		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	% PTK dikmas yang kompeten		56 persentase	0		56 persentase	0
1	1	26		Program Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal	% PAUD HI		20 persentase	0		20 persentase	0
1	1	27		Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Desa yang Mempunyai PAUD		95 Persentase	346.150.000		95 Persentase	346.150.000
1	1	27	5	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	Jumlah PAUD yg Menerima BOP	Hulu Sungai Tengah	3 Lembaga	346.150.000		3 Lembaga	250.800.000
					Jumlah Bunda PAUD Desa dan Kecamatan yang Mengikuti Apresiasi		14 lembaga			14 lembaga	28.600.000
					Jumlah Peserta Sosialisasi		450 orang			450 orang	66.750.000
1	1	28		Program Peningkatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Sekolah yang Lengkap Gurunya		85 persentase	9.478.682.000		90 persentase	12.284.050.000
1	1	28	1	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SD/MDA	Jumlah Guru / Ustadz yang Dibantu	Hulu Sungai Tengah	400 orang	7.485.377.000		400 orang	1.475.160.000
					Jumlah Guru SD yang Dikontrak		655 orang			655 orang	8.162.330.000
					Jumlah Guru Terpencil yang Diberi Tunjangan Khusus		35 orang			35 orang	633.250.000
1	1	28	2	Penyediaan Bantuan Tenaga Pendidik SMP/PONPES	Jumlah Guru / Ustadz yang Dibantu	Hulu Sungai Tengah	525 orang	1.993.305.000		525 orang	1.921.740.000
					Jumlah Guru SMP yang Dikontrak		0 orang			0 orang	0

					Jumlah Guru Terpencil yang Diberi Tunjangan Khusus		5 orang			5 orang	91.570.000
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				773.175.000			773.175.000
2	16			Kebudayaan				773.175.000			773.175.000
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase grup seni budaya yang aktif		100 Persentase	659.175.000		100 Persentase	659.175.000
2	16	17	1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah grup kesenian yang aktif	Hulu Sungai Tengah	18 group	659.175.000		18 group	255.235.000
					Jumlah Penyelenggara Festifal Seni dan Budaya Daerah		14 group			14 group	403.940.000
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Baik dan Terlindungi		75 persentase	114.000.000		75 persentase	114.000.000
2	16	17	6	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Baik dan Terlindungi	Hulu Sungai Tengah	19 orang	114.000.000		19 orang	114.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				109.903.087.690			133.197.296.372
1	2			Kesehatan				109.903.087.690			133.197.296.372
1	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	53.500.000		100 %	1.032.518.730
1	2	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK Makanan dan Minuman	Hulu Sungai Tengah	100 HOK	53.500.000		100 HOK	1.032.518.730
1	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	2.367.536.710		100 %	2.527.339.943
1	2	1	20	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	4 Jenis	193.520.710		4 Jenis	249.310.693
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		100 Rekening			4 Rekening	120.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		32 Jenis			1 Jenis	26.928.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		Unit			66 Unit	180.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		Jenis			3 Jenis	63.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		Jenis			2 Jenis	4.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		Kegiatan			0 Kegiatan	0
1	2	1	21	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	3 Jenis	493.848.000		3 Jenis	243.101.250
1	2	1	22	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	OB	1.680.168.000		1332 OB	1.641.000.000
1	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	2.852.837.500		100 %	375.000.000
1	2	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun		0 unit	2.690.000.000		0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			0 unit	0

					jumlah unit yang dipelihara		0 unit			0 unit	0
1	2	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Hulu Sungai Tengah	unit	15.000.000		20 unit	350.000.000
					jumlah unit peralatan yang dibeli		buah			0 buah	0
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		buah			0 buah	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		buah			95 buah	25.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		buah			0 buah	0
1	2	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 buah	147.837.500		0 buah	0
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		0 buah			0 buah	0
1	2	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		100 Kategori	0		100 Kategori	0
1	2	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	14.250.000		100 %	363.573.110
1	2	6	17	Penyusunan Dokumen Perencanaaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Hulu Sungai Tengah	6 Buah	6.800.000		6 Buah	77.792.400
1	2	6	18	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	Hulu Sungai Tengah	5 Buah	7.450.000		5 Buah	152.680.710
1	2	6	20	Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan yang berfungsi	Hulu Sungai Tengah	2 Unit	0		2 Unit	133.100.000
1	2	15		Program Pengadaan dan Peningkatan Kefarmasian	Persentase Puskesmas yang memiliki ketersediaan obat, BMHP dan Vaksin		90 % persen	2.921.194.000		90 % persen	2.700.000.000
1	2	15	9	Penyediaan Obat dan BMHP	Jumlah obat dan BMHP yang diadakan untuk di puskesmas dan jaringannya	Hulu Sungai Tengah	100 % jenis	2.921.194.000		100 % jenis	2.700.000.000
1	2	15		Program Pengadaan dan Peningkatan Kefarmasian	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar		65 persen	154.287.000		70 persen	329.000.000
1	2	15	12	Peningkatan Pengelolaan Obat dan BMHP	Jumlah Puskesmas dan jaringannya yang mendapatkan distribusi obat dan vaksin	Kecamatan Barabai	19 buah	154.287.000		19 buah	329.000.000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat		100 % %	0		100 % %	386.668.555
1	2	16	27	Puskesmas Limpasu	Prosentase pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan dana JKN Puskesmas Limpasu	Kecamatan Limpasu	100 % %	0		100 % %	55.555
1	2	16	30	Puskesmas Kubur Jawa	prosentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan [JKN kubur jawa]	Kecamatan Batang Alai Selatan	100 % %	0		100 % %	386.613.000

1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Birayang		100 % %	0		100 % %	600.000.000
1	2	16	28	Puskesmas Birayang	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN) Birayang	Hulu Sungai Tengah;Kecamatan Batang Alai Selatan	100 %	0		10000 %	600.000.000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi Pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN Pantai Hambawang)		100 %	0		100 %	1.083.442.898
1	2	16	9	Peningkatan kesehatan masyarakat	Prosentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN Pantai Hambawang)	Hulu Sungai Tengah	100 %	0		100 %	1.083.442.898
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Porsentase pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) barabai		100 %	0		100 %	1.800.000.000
1	2	16	33	Puskesmas Barabai	Porsentasi pemanfaatan Biaya operasional dan pemeliharaan JKN Barabai	Kecamatan Barabai	100 %	0		100 %	1.800.000.000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN Awang Besar)		100 %	0		100 %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi Pemanfaatan biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN) Puskesmas Durian Gantang		100 %	0		100 %	329.278.000
1	2	16	25	Puskesmas Durian Gantang	Prosentasi Pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan (JKN) Durian Gantang	Kecamatan Labuan Amas Selatan	100% %	0		100% %	329.278.000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan JKN Puskesmas Hantakan		100 %	0		100 %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pemanfaatan Biaya Operasional Pemeliharaan (JKN Barikin)		100 %	0		100 %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN) Batu Tangga		100 %	0		100 %	216.538.410
1	2	16	29	Puskesmas Batu Tangga	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasianal dan Pemeliharaan (JKN) Batu Tangga	Hulu Sungai Tengah	100 %	0		100 %	216.538.410
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN) Tandilang		100 %	0		100 %	139.230.000

1	2	16	40	Puskesmas Tandilang	Prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) Tandilang	Kecamatan Batang Alai Timur	100 %	0		100 %	139.230.000
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentasi pemanfaatan biaya operasional dan pemeliharaan (JKN) Limpasu		100 %	0		100 %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	prosentasi pemanfaatan biaya operasional pemeliharaan [JKN kubur jawa]		100 %	0		100 %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Presentasi Pemanfaatan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (JKN) Puskesmas Kambat Utara		100 % %	0		100 % %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan Haruyan		100 %	0		100 %	0
1	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan UKM sesuai standar		100 %	18.706.779.900		100 %	14.565.000.000
1	2	16	47	BOK Puskesmas Barabai	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Barabai	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	1.072.450.000		3 Kegiatan	862.710.000
1	2	16	48	BOK Puskesmas Awang Besar	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Awang Besar	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	592.670.000		3 Kegiatan	571.970.000
1	2	16	49	BOK Puskesmas Pantai Hambawang	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Pantai Hambawang	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	743.341.000		3 Kegiatan	743.341.000
1	2	16	50	BOK Puskesmas Durian Gantang	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Durian Gantang	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	647.072.000		3 Kegiatan	647.072.000
1	2	16	51	BOK Puskesmas Kasarangan	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Kasarangan	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	823.073.100		3 Kegiatan	775.860.000
1	2	16	52	BOK Puskesmas Sei.Buluh	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Sei.Buluh	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	628.228.000		3 Kegiatan	625.228.000
1	2	16	53	BOK Puskesmas Haruyan	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Haruyan	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	1.193.529.000		3 Kegiatan	815.529.000
1	2	16	54	BOK Puskesmas Barikin	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Barikin	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	631.251.000		3 Kegiatan	590.051.000
1	2	16	55	BOK Puskesmas Pandawan	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Pandawan	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	836.609.000		3 Kegiatan	836.609.000
1	2	16	56	BOK Puskesmas Kambat Utara	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Kambat Utara	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	921.595.000		3 Kegiatan	675.495.000
1	2	16	57	BOK Puskesmas Pagat	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Pagat	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	687.508.000		3 Kegiatan	642.483.000
1	2	16	58	BOK Puskesmas Kalibaru	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Kalibaru	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	653.596.300		3 Kegiatan	628.399.000

1	2	16	59	BOK Puskesmas Hantakan	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Hantakan	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	1.490.029.000		3 Kegiatan	810.687.000
1	2	16	60	BOK Puskesmas Birayang	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Birayang	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	1.861.605.000		3 Kegiatan	819.858.000
1	2	16	61	BOK Puskesmas Kubur Jawa	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Kubur Jawa	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	654.466.000		3 Kegiatan	622.066.000
1	2	16	62	BOK Puskesmas Ilung	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Ilung	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	843.705.000		3 Kegiatan	843.705.000
1	2	16	63	BOK Puskesmas Limpasu	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Limpasu	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	738.165.000		3 Kegiatan	708.165.000
1	2	16	64	BOK Puskesmas Batu Tangga	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Batu Tangga	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	812.067.000		3 Kegiatan	598.217.000
1	2	16	65	BOK Puskesmas Tandilang	Jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan PKM Tandilang	Hulu Sungai Tengah	3 Kegiatan	953.820.500		3 Kegiatan	623.555.000
1	2	16	66	Monitoring Bantuan Operasional Kesehatan	Prosentase serapan BOK di Puskesmas	Hulu Sungai Tengah	80 %	1.922.000.000		80 %	1.124.000.000
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase PHBS di 5 Tatanan (RT, Sekolah, Institusi Kes, Tempat Kerja dan Tempat-Tempat Umum)		58 %	518.645.000		58 %	921.589.200
1	2	19	2	Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah Petugas dan Tatanan yang mendapat penyuluhan PHBS	Hulu Sungai Tengah	43 orang	389.095.000		43 orang	110.000.000
					Jumlah media penyuluhan PHBS yang digunakan		3 jenis			3 jenis	396.187.000
					Prosentase UKS dan SBH dibina		100 %			100 %	110.000.000
					Jumlah petugas dan pengelola tatanan yang mendapat pembinaan PHBS		43 orang			43 orang	55.000.000
					Jumlah Petugas Promkes dan Penyuluh Kesehatan dibina		38 orang			38 orang	58.000.000
1	2	19	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Remaja Dan Usia Lanjut	Jumlah Petugas yang Mendapatkan Orientasi Pelayanan Kesehatan Remaja dan Lansia	Hulu Sungai Tengah	152 Orang	79.075.000		152 Orang	154.512.200
1	2	19	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga	Jumlah petugas yang mendapatkan orientasi pelayanan kesehatan kerja	Hulu Sungai Tengah	143 orang	50.475.000		143 orang	25.040.000
					Jumlah orang yang difasilitasi tes kebugaran		300 orang			300 orang	12.850.000
1	2	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Desa Siaga Aktif		0 %	359.150.000		100 %	385.435.000
1	2	19	18	Peningkatan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Prosentase Posyandu Aktif dengan Strata Purnama dan Mandiri	Hulu Sungai Tengah	58 %	359.150.000		58 %	113.200.000
					Prosentase Desa Siaga Aktif		39 %			39 %	272.235.000

1	2	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prosentase Cakupan Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang		100 %	273.259.000		100 %	416.721.500
1	2	20	3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah Puskesmas yang memiliki data informasi gizi (peta)	Hulu Sungai Tengah	19 Pusk	273.259.000		19 Pusk	28.312.500
					Jumlah Penderita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang mendapat PMT		150 orang			150 orang	218.035.000
					Jumlah Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah		8700 orang			8700 orang	21.210.000
					Jumlah peserta yang mendapatkan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi		342 orang			342 orang	121.610.000
					Jumlah kader yang diberikan orientasi/sosialisasi		120 orang			120 orang	27.554.000
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan		55 %	0		55 %	0
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase desa/kel yang melaksanakan STBM		75 %	476.725.000		75 %	276.375.000
1	2	21	11	Pembinaan Sanitasi Masyarakat	Jumlah desa/kel melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Hulu Sungai Tengah	44 desa/kel	476.725.000		44 desa/kel	276.375.000
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan		60 %	0		60 %	0
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan		34 %	0		34 %	0
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Puskesmas yang melaksanakan pengolahan limbah medis padat dan cair		40 %	216.320.000		40 %	287.177.000
1	2	21	12	Pengelolaan Limbah Medis	Jumlah puskesmas yang dikelola limbah medis padatnya	Hulu Sungai Tengah	19 buah	216.320.000		19 buah	287.177.000
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Puskesmas melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dan olahraga		100 %	0		100 %	0
1	2	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase rumah tangga menggunakan air minum/air bersih, tempat-tempat umum (TTU), tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memenuhi syarat		55 %	147.360.000		55 %	241.461.000

1	2	21	10	Pengawasan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat	Jumlah sarana air bersih yang diawasi	Hulu Sungai Tengah	160 buah	147.360.000		160 buah	103.620.000
					Jumlah tempat-tempat umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan		110 buah			110 buah	45.298.000
					Jumlah pemilik/pengelola tempat pengelolaan makanan (TPM) mendapat sosialisasi		280 orang			280 orang	92.543.000
1	2	22		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Prosentasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular		100 %	1.438.920.000		100 %	1.925.533.300
1	2	22	5	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah petugas yang terampil melaksanakan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Penyakit Endemik.Epidemik.	Hulu Sungai Tengah	100 orang	407.420.000		100 orang	901.033.300
1	2	22	20	Penyemprotan / fogging sarang nyamuk	Jumlah Fogging/penyemprotan sarang nyamuk	Hulu Sungai Tengah	600 kali	1.031.500.000		700 kali	1.024.500.000
1	2	25		Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Rasio puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana sesuai standar		100 %	16.213.094.300		100 %	34.583.137.204
1	2	25	35	Peningkatan dan Pembangunan PKM dan Pustu	Jumlah puskesmas / pustu yang dibangun/ditingkatkan	Hulu Sungai Tengah	4 buah	7.411.125.000		3 buah	13.740.770.000
1	2	25	36	Rehabilitasi PKM / Pustu	Jumlah Puskesmas / pustu yang direhabilitasi	Hulu Sungai Tengah	8 buah	2.420.198.800		8 buah	8.100.000.000
1	2	25	37	Pengadaan Sarana Prasarana PKM / Pustu	Jumlah barang yang diadakan	Hulu Sungai Tengah	5 paket	6.381.770.500		5 paket	12.742.367.204
1	2	29		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak,Dan Balita	Prosentase Penanganan Kesehatan Bayi, Anak dan Balita di Faskes/Posyandu		90 %	124.532.000		90 %	90.215.500
1	2	29	5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	Hulu Sungai Tengah	133 orang	124.532.000		133 orang	90.215.500
1	2	32		Program Peningkatan Kesehatan Ibu melahirkan dan Anak	Prosentase Persalinan oleh Nakes di Faskes		84.8% %	0		84.8% %	268.517.100
1	2	32	8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin	Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Bayi yang dilaksanakan AMP	Hulu Sungai Tengah	56 Kasus	0		56 Kasus	63.575.000
					Jumlah Ibu Hamil/Keluarga yang mendapat penyuluhan P4K dan KP Ibu		330 Orang			330 Orang	49.938.000
					Jumlah Petugas yang mengikuti orientasi dan peningkatan Kapasitas		133 Orang			133 Orang	110.004.100
					Jumlah Kemitraan dengan Dukun Kampung		130 kali			135 kali	27.000.000

					Jumlah buku PUS dan kohort KB yang tercetak		340 Buah			340 Buah	18.000.000
					Jumlah ibu hamil miskin/kurang mampu yg tidak memliki jaminan kesehatan yg mendapat pelayanan jampersal		0 Orang			0 Orang	0
1	2	39		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prosentase peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular		100 %	0		100 %	350.000.000
1	2	39	1	Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Hulu Sungai Tengah	60% orang	0		60% orang	350.000.000
1	2	39		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Prosentasi cakupan pengendalian penyakit gangguan jiwa dan korban napza yang dilaksanakan di Puskesmas		19 %	0		19 %	0
1	2	41		Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prosentase penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas		100 %	0		100 %	0
1	2	41		Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Prosentase Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan UKP Sesuai Standar		100 %	15.150.621.080		100 %	14.662.066.422
1	2	41	2	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Barabai	Jumlah pasien yang dilayani di PKM barabai	Hulu Sungai Tengah	30000 orang	1.815.136.000		30000 orang	1.800.000.000
1	2	41	3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Awang Besar	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Awang Besar	Hulu Sungai Tengah	9.533 orang	514.782.000		9.533 orang	514.782.000
1	2	41	4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Pantai Hambawang	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Pantai Hambawang	Hulu Sungai Tengah	0 Orang	1.037.649.264		12622 Orang	908.784.000
1	2	41	5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Durian Gantang	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Durian Gantang	Kecamatan Labuan Amas Selatan	6000 Orang	352.855.500		6534 Orang	352.855.500
1	2	41	6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kasarangan	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Kasarangan	Hulu Sungai Tengah	0 Orang	825.132.656		17000 Orang	829.592.656
1	2	41	7	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Sei. Buluh	Jumlah pasien yang dilayani di puskesmas Sungai Buluh	Hulu Sungai Tengah;Kecamatan Labuan Amas Utara;Sungai Buluh	5495 orang	329.700.000		5495 orang	329.700.000
1	2	41	8	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Haruyan	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Haruyan	Hulu Sungai Tengah	13000 Orang	782.940.000		13000 Orang	810.000.000
1	2	41	9	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Barikin	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Barikin	Hulu Sungai Tengah	4.300 Orang	395.301.260		4.300 Orang	350.000.000
1	2	41	10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Pandawan	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Pandawan	Hulu Sungai Tengah	18578 Orang	1.077.389.856		18578 Orang	1.077.389.856

1	2	41	11	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kambat Utara	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Kambat Utara	Hulu Sungai Tengah	12769 orang	766.140.000		12769 orang	766.140.000
1	2	41	12	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Pagat	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Pagat		123524 Orang	617.620.680		123524 Orang	617.620.000
1	2	41	13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kalibaru	Jumlah Pasien yang dilayani di pusksmas kalibaru	Kecamatan Batu Benawa	7069 orang	694.560.000		8000 orang	576.000.000
1	2	41	14	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Hantakan	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Hantakan	Kecamatan Hantakan	8236 Orang	819.271.600		8236 Orang	771.240.000
1	2	41	15	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Birayang	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Birayang	Hulu Sungai Tengah;Kecamatan Batang Alai Selatan	12000 orang	864.000.000		12000 orang	864.000.000
1	2	41	16	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Kubur Jawa	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Kubur Jawa	Kecamatan Batang Alai Selatan	8500 Orang	432.358.000		8500 Orang	510.800.000
1	2	41	17	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Ilung	Jumlah pasien yang dilayani di PKM Ilung	Hulu Sungai Tengah	13550 orang	875.000.000		14500 orang	875.000.000
1	2	41	18	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Limpasu	Jumlah Pasien yang dilayani di Puskesmas Limpasu	Hulu Sungai Tengah	5966 orang	531.865.854		3229 orang	284.029.000
1	2	41	19	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Batu Tangga	jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Batu Tangga	Hulu Sungai Tengah	1625 orang	216.538.410		1625 orang	216.538.410
1	2	41	20	Peningkatan Pelayanan Kesehatan PKM Tandilang	Jumlah pasien yang dilayani di Puskesmas Tandilang	Hulu Sungai Tengah	2113 Orang	180.000.000		2113 Orang	180.000.000
1	2	41	21	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Prosentasi jumlah kejadian kegawatdaruratan yang ditangani	Hulu Sungai Tengah	100 %	1.996.480.000		100 %	394.470.000
					Prosentasi jasa pelayanan kesehatan yang dibayarkan		100 %			100 %	1.588.400.000
1	2	41	22	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah puskesmas yg melaksanakan pelayanan kes tradisional	Hulu Sungai Tengah	60 buah	25.900.000		15 buah	44.725.000
1	2	41		Program Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi		6 puskesmas	1.692.359.000		6 puskesmas	1.710.359.000
1	2	41	1	Akreditasi Puskesmas	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Hulu Sungai Tengah	6 Puskesmas	1.692.359.000		6 Puskesmas	1.710.359.000
1	2	46		Program Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	Persentase produk pangan yang memenuhi standar kesehatan		90 % persen	14.005.000		90 % persen	20.000.000
1	2	46	1	Pengawasan Mutu Keamanan Pangan	Jumlah kader PIRT yang mendapat pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan / Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) dalam rangka Sertifikasi P IRT	Hulu Sungai Tengah	30 orang	14.005.000		30 orang	20.000.000
					Jumlah sample makanan yang diuji		3 buah			buah	0
1	2	47		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru lahir	Prosentase Persalinan oleh Nakes di Faskes		100 %	1.182.975.500		100 %	2.286.017.100

1	2	47	1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Bersalin	Jumlah Ibu Hamil Mendapat Penyuluhan P4K dan KP ibu	Hulu Sungai Tengah	330 orang	155.475.500		330 orang	49.938.000
					Jumlah Petugas yang mengikuti Orientasi dan Peningkatan Kapasitas		133 orang			133 orang	1.100.004.100
					Jumlah Kemitraan dengan Dukun Kampung		135 kali			135 kali	27.000.000
					Jumlah Buku PUS dan Kohort KB yang tercetak		340 buah			340 buah	18.000.000
					Jumlah Kasus Kematian ibu dan bayi yang dilaksanakan AMP		56 kasus			56 kasus	63.575.000
1	2	47	2	Pemberian Jaminan Persalinan Bagi Ibu Hamil Kurang Mampu	Jumlah Ibu Hamil Miskin/Kurang Mampu yg Tidak Memliki Jaminan Kesehatan Mendapat Pelayanan Jampersal	Hulu Sungai Tengah	1000 Orang	1.027.500.000		1000 Orang	1.027.500.000
1	2	49		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prosentase Cakupan Angka Kesakitan yang dapat dicegah dengan imunisasi		100 %	383.540.700		100 %	585.859.100
1	2	49	2	Peningkatan Pelayanan Imunisasi	Jumlah petugas yang terampil melaksanakan Pelayanan imunisasi	Hulu Sungai Tengah	19 orang	275.085.000		19 orang	345.514.000
					Jumlah Peserta Advokasi dan Sosialisasi terkait Imunisasi		55 orang			55 orang	0
					Jumlah sarana tempat penyimpanan vaksin yang diadakan dan dipelihara		20 Buah			20 Buah	0
					Jumlah Calon jemaah haji/umrah yang dilayani kesehatannya (termasuk vaksinasinya)		300 orang			320 orang	0
1	2	49	3	Peningkatan Surveilen dan Penanggulangan KLB	Jumlah petugas yang terampil melaksanakan pengamatan	Hulu Sungai Tengah	19 orang	108.455.700		19 orang	240.345.100
1	2	49		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentasi Puskesmas yang melakukan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menularsesuai standart		19 %	1.113.980.000		19 %	1.276.393.300
1	2	49	1	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah Petugas Yang terampil melaksanakan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Endemik, epidemik	Hulu Sungai Tengah	19 orang	1.113.980.000		19 orang	901.033.300
					Jumlah Fogging/penyemprotan sarang nyamuk		600 kali			600 kali	375.360.000
1	2	49		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan faktor resiko PTM		100 %	1.469.380.000		100 %	900.000.000

1	2	49	4	Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Petugas Puskesmas yang terampil melaksanakan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Hulu Sungai Tengah	57 Orang	1.469.380.000		57 Orang	400.000.000
					Prosentase WUS yang periksa papsmear, IVA dan Kanker Payudara		60 %			60 %	500.000.000
1	2	49		Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prosentase cakupan pengendalian penyakit gangguan jiwa dan korban nafza yang dilaksanakan PKM		100 %	58.480.000		100 %	700.000.000
1	2	49	5	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Jumlah peserta Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kesehatan Jiwa	Hulu Sungai Tengah	100 Orang	28.080.000		100 Orang	200.000.000
					Jumlah petugas kesehatan jiwa yang dilatih		57 Orang			57 Orang	200.000.000
1	2	49	6	Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan NAPZA pada Remaja	Jumlah siswa/guru yang diberikan sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Napza di sekolah Tingkat SLTP/SLTA sederajat	Hulu Sungai Tengah	80 Orang	30.400.000		80 Orang	300.000.000
1	2	50		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Prosentase SDM Kesehatan yang ber Sertifikat/kompeten		232 Orang	6.272.156.000		232 Orang	5.312.000.000
1	2	50	1	Penyediaan dan Peningkatan Sumberdaya Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan yang terkontrak	Hulu Sungai Tengah	232 Orang	6.272.156.000		232 Orang	5.137.000.000
					Jumlah Tenaga Kesehatan Teladan		27 Orang			27 Orang	125.000.000
					Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Bersertifikat Uji Komptensi		100 Orang			100 Orang	50.000.000
1	2	50		Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan	Persentase PKM dengan ketersediaan alat kesehatan sesuai standar dan berfungsi baik		1 Paket	5.330.000.000		1 Paket	10.080.000.000
1	2	50	2	Pengadaan Peralatan Kesehatan	Jumlah Peralatan kesehatan yang di adakan	Hulu Sungai Tengah	1 Paket	5.080.000.000		1 Paket	10.000.000.000
1	2	50	3	Pemeliharaan Alat Kesehatan	Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	50 %	250.000.000		50 %	80.000.000
1	2	51		Program Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk	Prosentase penduduk yang dilayani dan dirujuk		106600 %	30.397.200.000		100 %	29.470.850.000
1	2	51	1	Peningkatan Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat	Jumlah penduduk yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan dari Alokasi APBD	Hulu Sungai Tengah	106600 orang	30.397.200.000		106600 orang	29.470.850.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : RSUD H. Damanhuri

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				88.710.244.000			103.100.000.000
1	2			Kesehatan				88.710.244.000			103.100.000.000
1	2	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Rasio Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Sesuai Standar		100 %	15.194.238.000		0 %	54.800.000.000
1	2	26	2	Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi Gedung Rumah Sakit	Jumlah unit fasilitas RS yang dibangun	Kecamatan Barabai	7 unit	15.194.238.000		7 unit	54.800.000.000
					Jumlah unit fasilitas RS yang ditingkatkan		3 unit			0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas RS yang direhabilitasi		0 unit			0 unit	0
1	2	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Persentase sarana RSUD sesuai standar		100 %	8.516.006.000		100 %	26.500.000.000
1	2	26	1	Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran	Jumlah alkes/kedokteran yang dibeli	Kecamatan Barabai	95 unit	8.516.006.000		95 unit	26.500.000.000
1	2	44		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan keperawatan		90 %	14.524.500.000		90 %	0
1	2	44	1	Kegaiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan	persentasi SDM keperawatan yang bersertifikasi	Kecamatan Barabai	90 %	0		90 %	0
					Persentasi pasien yang memakai gelang identitas		90 %			90 %	0
					Persentasi pemeriksaaan kesehatan karyawan		90 %			90 %	0
					Persentasi Pengadaan pakaian dinas sesuai tugas dan fungsinya		90 %			90 %	0

1	2	44	4	Penyediaan Administrasi BLUD RSUD	Jumlah bulan penyediaan keperluan administrasi BLUD	Kecamatan Barabai	12 Bulan	14.524.500.000		12 Bulan	0
					Jumlah ASN yang di layani		470 orang			470 orang	0
					Jumlah Dokumen keuangan yang sesuai Standar		70 Dokomen			70 Dokomen	0
					Persentasi Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu		90 %			90 %	0
					Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan		15 Dokumen			15 Dokumen	0
					Persentasi Dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu		15 Dokumen			15 Dokumen	0
1	2	44		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan medik dan penunjang		90 %	50.475.500.000		90 %	21.800.000.000
1	2	44	5	Peningkatan Mutu Pelayanan Medik dan Penunjang	Persentasi Pengadaan peralatan kesehatan sesuai standar	Kecamatan Barabai	90 %	50.475.500.000		90 %	0
					Persentasi Pengadaan makan minum petugas jaga		90 %			90 %	0
					Persentasi Pemeliharaan air limbah sesuai standar		90 %			90 %	0
					Persentasi Pengadaan bahan linen pasien		90 %			90 %	0
					Jumlah tenaga paramedis yang terlatih sesuai standar		30 %			30 %	0
					persentasi SDM pelayanan medis yang bersertifikasi		40 %			40 %	0
					Persentasi ketepatan waktu pemberian makan pasien		95 %			95 %	1.300.000.000
					Persentasi Kelengkapan Persediaan Obat		95 %			95 %	8.000.000.000
					Persentasi kelengkapan BAKHP		95 %			95 %	8.000.000.000
					Persentasi Ketepatan terapi gizi/diet pasien		90 %			90 %	0
					Persentasi kelengkapan diagnosis penunjang		95 %			95 %	1.000.000.000
					Jumlah tenaga spesialis yang tersedia		22 orang			22 orang	3.500.000.000
1	2	44		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentasi Peralatan kesehatan yang yang berfungsi dengan baik		90 %	0		90 %	0
1	2	44		Program Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat terkait kebersihan lingkungan RS		90 %	0		90 %	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				265.567.819.391			382.334.086.750
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				265.567.819.391			382.334.086.750
1	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Administrasi perkatoran yang terlayani dengan baik		100 %	1.504.912.000		100 %	1.369.250.000
1	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK Makanan Harian,Rapat dan Tamu	Kecamatan Barabai	1980 HOK	72.600.000		1980 HOK	275.400.000
1	3	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Kecamatan Barabai	20 Buah/Unit	299.930.000		20 Buah/Unit	2.500.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	150.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	19.700.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	62.650.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	4.500.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		3000 Eksempar			3000 Eksempar	4.500.000
1	3	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	534 OH	812.078.000		534 OH	700.000.000
1	3	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga teknis/administrasi yang tersedia	Kecamatan Barabai	13 OB	320.304.000		13 OB	150.000.000
1	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan prasarana aparatur yang ditingkatkan		100 %	887.750.000		100 %	279.500.000
1	3	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Kecamatan Barabai	1 Buah/Unit	450.700.000		1 Buah/Unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		1 Buah/Unit			1 Buah/Unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 Buah/Unit			1 Buah/Unit	0

1	3	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Barabai	10 Buah/Unit	340.240.000		10 Buah/Unit	170.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		0 Buah/Unit			0 Buah/Unit	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		64 Buah/Unit			64 Buah/Unit	29.500.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		0 Buah/Unit			0 Buah/Unit	0
1	3	2	50	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas R4/R2 yang dibeli	Kecamatan Barabai	0 Buah/Unit	96.810.000		0 Buah/Unit	0
					Jumlah Kendaraan Dinas R4 / R2 yang dipelihara		20 Buah/Unit			20 Buah/Unit	80.000.000
1	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %	35.250.000		100 %	75.000.000
1	3	6	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Barabai	10 Jenis Dokumen	35.250.000		10 Jenis Dokumen	75.000.000
1	3	17		Program Perlindungan Tebing Sungai	Panjang Tebing Sungai Yang Dilindungi		13272 Meter	5.100.800.000		13272 Meter	6.500.000.000
1	3	17	8	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi,dan pemeliharaan Konstruksi Perkuatan Tebing Sungai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	25 Dokumen	5.100.800.000		25 Dokumen	6.500.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0
1	3	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah DI yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara		12 Buah/Unit	23.376.720.000		12 Buah/Unit	12.000.000.000
1	3	24	19	Integrated Participatory Deplopment and Mangemen of Irigation (IPDMIP)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	2 Dokumen	15.532.670.000		2 Dokumen	5.000.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0
1	3	24	22	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	15 Dokumen	7.320.050.000		15 Dokumen	6.000.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0
1	3	24	24	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pintu Air	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	5 Dokumen	524.000.000		5 Dokumen	1.000.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0

1	3	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Jumlah jembatan pertanian dan perkebunan yang dibangun/direhab/dipelihara		12 Buah	2.026.500.000		12 Buah	3.500.000.000
1	3	24	25	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaanan Jembatan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	12 Dokumen	2.026.500.000		12 Dokumen	3.500.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0
1	3	24		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Persentase P3A yang Aktif		100 Buah	590.300.000		100 Buah	1.000.000.000
1	3	24	26	Peningkatan Pembinaan Pemanfaatan Irigasi	Jumlah P3A yang dibina	Hulu Sungai Tengah	10 Buah	590.300.000		10 Buah	1.000.000.000
1	3	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Sarana dan Prasarana Air Minum yang terbangun		60,38 Meter	18.656.214.800		60,38 Meter	5.750.000.000
1	3	27	10	Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Hulu Sungai Tengah	10000 Dokumen Evaluasi	17.146.394.800		10000 Dokumen Evaluasi	5.000.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan		2 Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		2 Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		Dokumen			Dokumen	0
1	3	27	11	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Hulu Sungai Tengah	180 Dokumen Evaluasi	1.509.820.000		180 Dokumen Evaluasi	750.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan		Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		Dokumen			Dokumen	0
1	3	28		Program Pengendalian Banjir	Lamanya genangan banjir tidak lebih dari 5 hari		2 Hari	4.908.250.000		2 Hari	11.500.000.000
1	3	28	7	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	20 Dokumen	3.410.000.000		20 Dokumen	10.000.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0
1	3	28	8	Pembangunan/rehabilitasi bangunan pengendali dan pengatur sungai	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	2 Dokumen	1.498.250.000		2 Dokumen	1.500.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		0 Dokumen			0 Dokumen	0
1	3	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tingkat keberhasilan program nasional keciptakaryaan yang dilaksanakan di daerah		0 persen	238.890.000		0 persen	0

1	3	29	4	Optimalisasi Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab/Kota (Satker PIP Kab/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	0 Dokumen Perencanaan	238.890.000		0 Dokumen Perencanaan	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		dokumen monitoring			dokumen monitoring	0
					Jumlah dokumen hasil evaluasi		Dokumen			Dokumen	0
1	3	35		Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase peraturan Tata ruang Daerah yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundangan Tata Ruang		0 persen	864.850.000		0 persen	0
1	3	35	16	Kegiatan Perencanaan Tata Ruang	Jumlah naskah perencanaan tata ruang yang disusun	Hulu Sungai Tengah	1 Dokumen Perencanaan	864.850.000		0 Dokumen Perencanaan	0
					Jumlah laporan hasil monitoring		Laporan Monitoring			Laporan Monitoring	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi		Laporan Hasil Evaluasi			Laporan Hasil Evaluasi	0
1	3	36		Program Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya kepuasan pelayanan pemanfaatan ruang		0 persen	313.950.000		0 persen	0
1	3	36	10	Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen hasil evaluasi (Jumlah rekomendasi yang diterbitkan)	Hulu Sungai Tengah	30 Dokumen evaluasi	313.950.000		0 Dokumen evaluasi	0
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan		Dokumen Perencanaan			Dokumen Perencanaan	0
					Jumlah laporan hasil monitoring		Laporan Monitoring			Laporan Monitoring	0
1	3	38		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Sarana dan Prasarana Air Limbah yang terbangun		19,45 % Unit	8.633.690.000		19,45 % Unit	5.000.000.000
1	3	38	1	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	10 Dokumen	8.633.690.000		10 Dokumen	5.000.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Dokumen hasil evaluasi		Dokumen			Dokumen	0
1	3	38		Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah	-		-	0		-	0
1	3	43		Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Daerah Rawa	Jumlah panjang jaringan rawa yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara		1000 Meter	887.000.000		1000 Meter	1.000.000.000
1	3	43	21	Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Rawa	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	5 Dokumen	887.000.000		5 Dokumen	1.000.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		0 Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Dokumen hasil evaluasi		0 Dokumen			Dokumen	0

1	3	45		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang dibangun dan ditingkatkan		90772 Meter	53.915.604.750		90772 Meter	88.359.304.650
1	3	45	4	Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	0 Dokumen	3.568.720.000		0 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		2 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		2 Dokumen			2 Dokumen	3.568.720.000
1	3	45	5	Peningkatan Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	6 Dokumen	50.346.884.750		6 Dokumen	450.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		6 Dokumen			6 Dokumen	900.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		12 Dokumen			12 Dokumen	83.240.584.650
1	3	45		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan yang direhabilitasi dan dipelihara		58740 Meter	57.195.181.040		58740 Meter	119.789.075.600
1	3	45	6	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 Dokumen	3.499.465.000		1 Dokumen	75.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		1 Dokumen			1 Dokumen	3.082.000.000
1	3	45	7	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	3 Dokumen	53.440.556.040		3 Dokumen	225.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		6 Dokumen			6 Dokumen	900.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		9 Dokumen			9 Dokumen	115.224.415.600
1	3	45	8	Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 Dokumen	255.160.000		1 Dokumen	16.500.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		1 Dokumen			1 Dokumen	11.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		2 Dokumen			2 Dokumen	255.160.000
1	3	45		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi		100 Buah	48.899.736.800		100 Buah	75.711.956.500
1	3	45	9	Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 Dokumen	4.195.106.000		1 Dokumen	75.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		1 Dokumen			2 Dokumen	4.195.106.000
1	3	45	10	Peningkatan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	10 Dokumen	39.043.868.300		10 Dokumen	500.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		13 Dokumen			13 Dokumen	1.300.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		13 Dokumen			23 Dokumen	63.056.088.500
1	3	45	11	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 Dokumen	501.440.000		1 Dokumen	75.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		1 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		1 Dokumen			1 Dokumen	501.440.000

1	3	45	12	Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	3 Dokumen	4.967.952.500		3 Dokumen	225.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		3 Dokumen			3 Dokumen	450.000.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		3 Dokumen			6 Dokumen	4.967.952.000
1	3	45	13	Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 Dokumen	191.370.000		1 Dokumen	12.500.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring		1 Dokumen			1 Dokumen	12.500.000
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi		1 Dokumen			2 Dokumen	191.370.000
1	3	46		Program Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dan berfungsi dengan baik		3000 meter	11.800.795.000		3000 meter	17.500.000.000
1	3	46	1	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Hulu Sungai Tengah	3 dokumen	11.800.795.000		3 dokumen	17.500.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		10 dokumen			15 dokumen	0
					Jumlah dokumen hasil evaluasi		10 dokumen			15 dokumen	0
1	3	47		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Panjang trotoar yang dibangun, ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara		1250 meter	8.119.415.001		5000 meter	9.000.000.000
1	3	47	1	Kegiatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Trotoar	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Hulu Sungai Tengah	2 dokumen	8.119.415.001		2 dokumen	9.000.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		3 dokumen			2 dokumen	0
					Jumlah dokumen hasil evaluasi		3 dokumen			2 dokumen	0
1	3	47		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Jumlah gedung negara dan prasarana publik yang dibangun/dipelihara		5 unit	15.560.000.000		5 unit	22.000.000.000
1	3	47	2	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Negara dan Prasarana Publik	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Hulu Sungai Tengah	2 dokumen	15.560.000.000		2 dokumen	22.000.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		4 dokumen			5 dokumen	0
					Jumlah dokumen hasil evaluasi		4 dokumen			5 dokumen	0
1	3	47		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Jumlah rumah negara yang dipelihara		1 unit	0		1 unit	500.000.000
1	3	47	3	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Negara	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 dokumen	0		1 dokumen	500.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		1 dokumen			1 dokumen	0
					Jumlah dokumen hasil evaluasi		1 dokumen			1 dokumen	0
1	3	47		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Jumlah rekomendasi teknis yang terbitkan sesuai standar		20 dokumen	248.500.000		20 dokumen	500.000.000

1	3	47	4	Kegiatan Inspeksi Bangunan Gedung Negara dan Prasarana Publik	Jumlah gedung/bangunan yang diinspeksi	Hulu Sungai Tengah	20 unit	248.500.000		20 unit	500.000.000
1	3	47		Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Publik	Luas Ruang Terbuka Hijau yang terbangun/direhabilitasi		1 Ha	1.803.510.000		1 Ha	1.000.000.000
1	3	47	5	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah dokumen hasil perencanaan	Hulu Sungai Tengah	1 dokumen	1.803.510.000		1 dokumen	1.000.000.000
					Jumlah laporan hasil monitoring		0 dokumen			0 dokumen	0
					Jumlah dokumen hasil evaluasi		0 dokumen			0 dokumen	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				30.892.491.500			87.137.880.000
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				30.892.491.500			87.137.880.000
1	4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	513.613.500		100 %	466.080.000
1	4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Barabai	4840 HOK	12.500.000		4840 HOK	40.200.000
1	4	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Kecamatan Barabai	20 Kali	46.361.500		20 Kali	2.900.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	34.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	33.500.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	24.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	3.700.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		12 Bulan			12 Bulan	3.600.000
1	4	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Barabai	310 OH	339.600.000		310 OH	252.180.000
1	4	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Barabai	4 Orang	115.152.000		4 Orang	72.000.000
1	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 Persen	59.500.000		60 Persen	174.000.000
1	4	2	5	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Kecamatan Barabai	7 Buah	0		7 Buah	50.000.000
1	4	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit yang dipelihara	Kecamatan Barabai	1 Unit	2.000.000		1 Unit	30.000.000

1	4	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli	Kecamatan Barabai	3 Buah	9.500.000		5 Buah	40.000.000
					jumlah unit peralatan yang dibeli		0 Buah			5 Buah	5.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		5 Buah			5 Buah	2.500.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		4 Buah			5 Buah	5.000.000
1	4	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara	Kecamatan Barabai	7 Buah	48.000.000		7 Buah	41.500.000
1	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 Persen	16.250.000		100 Persen	7.800.000
1	4	6	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Barabai	7 Dokumen	16.250.000		7 Dokumen	7.800.000
1	4	15		Program Pengembangan Perumahan	Jumlah RTLH yang ditingkatkan kualitasnya tahun berjalan		1550 Unit	13.163.283.000		1550 Unit	23.075.000.000
1	4	15	12	Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang didampingi bersama Fasilitator untuk meningkatkan kualitas nya menjadi Layak Huni melalui Program APBN	Hulu Sungai Tengah	400 MBR	147.950.000		400 MBR	200.000.000
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring rumah bagi MBR yang dtingkatkan kualitasnya melalui pendampingan program BSPS Dana APBN		1 Dokumen			Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi rumah bagi MBR yang dtingkatkan kualitasnya melalui pendampingan program BSPS Dana APBN		1 Dokumen			Dokumen	0
1	4	15	13	Penyediaan Bantuan Rumah Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (BRS-MBR)	Jumlah rumah bagi MBR yang dtingkatkan kualitasnya	Hulu Sungai Tengah	1550 Unit	12.673.083.000		1550 Unit	18.425.000.000
					Jumlah rumah bagi MBR yang terbangun		100 Unit			100 Unit	3.450.000.000
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Verifikasi Backlog (tidak punya rumah) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		1 Dokumen			1 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		1 Dokumen			1 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni		1 Dokumen			1 Dokumen	0
1	4	15	14	Penyusunan Kebijakan Perumahan dan Permukiman	Jumlah NSPK Daerah tentang Perumahan dan Permukiman yang disusun pada Tahun Berjalan	Hulu Sungai Tengah	2 Dokumen	342.250.000		2 Dokumen	1.000.000.000

1	4	21		Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Kawasan Perumahan	Jumlah sarana dan prasarana kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan		11000 meter	6.490.000.000		11000 meter	15.750.000.000
1	4	21	15	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan	Panjang jalan lingkungan di kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya (lebar di atas 3 m)	Hulu Sungai Tengah	5500 meter	6.490.000.000		5500 meter	8.250.000.000
					Panjang drainase lingkungan di kawasan perumahan yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya		5500 meter			5500 meter	7.500.000.000
					Jumlah Dokumen perencanaan jalan dan drainase lingkungan kawasan perumahan		2 Dokumen			2 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Perumahan		2 Dokumen			2 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Perumahan		2 Dokumen			2 Dokumen	0
1	4	22		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman	Jumlah sarana dan prasarana kawasan permukiman yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya pada tahun berjalan		13500 meter	6.708.125.000		13500 meter	12.200.000.000
1	4	22	10	Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Kawasan Permukiman	Panjang jalan lingkungan Kawasan Permukiman yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya (lebar di bawah 3 m)	Hulu Sungai Tengah	8500 meter	6.708.125.000		8,500 meter	5.950.000.000
					Panjang drainase lingkungan kawasan permukiman yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya		5000 meter			5,000 meter	6.250.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Permukiman		2 Dokumen			2 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Permukiman		2 Dokumen			2 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan / Peningkatan Jalan dan drainase Lingkungan Kawasan Permukiman		2 Dokumen			2 Dokumen	0
1	4	23		Program Penyediaan Perumahan	Jumlah backlog yang tertangani pada tahun berjalan		250 MBR	0		250 MBR	6.015.000.000
1	4	23	6	Penyediaan Rusun dan Rumah Khusus	Jumlah rusun dan rumah khusus yang terbangun (bagi Nelayan Rawa, PNS, anggota POLRI/TNI, dll) dengan dana APBN maupun dana APBD		1 Unit	0		1 Unit	6.000.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Rusun/Rusus		1 Dokumen			1 Dokumen	0

					Jumlah Laporan Hasil MonitoringPenyediaan Rusun/Rusus		1 Dokumen			1 Dokumen	0
1	4	23	7	Penyediaan Rumah Umum dan Komersil	Jumlah rumah bersubsidi bagi MBR yang terbangun	Hulu Sungai Tengah	100 Unit	0		100 Unit	15.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan Rumah Umum dan Komersil		1 Dokumen			1 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penyediaan Rumah Umum dan Komersil		1 Dokumen			1 Dokumen	0
1	4	24		Program Penanganan Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh yang Tertangani pada tahun berjalan		51,71 Ha	3.636.720.000		51,71 Ha	16.950.000.000
1	4	24	9	Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	Luas permukiman kumuh yang tertangani (pendampingan program APBN) dengan berbasis masyarakat	Hulu Sungai Tengah	10 Ha	211.720.000		10 Ha	300.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		1 Dokumen			1 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		1 Dokumen			1 Dokumen	0
					Jumlah laporan Hasil Evaluasi Kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		1 Dokumen			1 Dokumen	0
1	4	24	16	Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan Permukiman Kumuh	Panjang jalan lingkungan di kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya	Kecamatan Barabai	10500 meter	3.425.000.000		10500 meter	7.350.000.000
					Panjang drainase lingkungan di kawasan kumuh yang terbangun dan ditingkatkan kualitasnya		5250 meter			5250 meter	6.300.000.000
					Luas RTH / RTP Kawasan Kumuh yang tertangani		1 Kawasan			2 Kawasan	2.000.000.000
					Jumlah rumah yang ditata di kawasan kumuh		50 unit			50 unit	1.000.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh		4 Dokumen			4 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh		4 Dokumen			4 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh		4 Dokumen			4 Dokumen	0
1	4	26		Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Permukiman yang Tertangani dengan Infrastruktur yang layak pada tahun berjalan		3 Kawasan	305.000.000		3 Kawasan	12.500.000.000
1	4	26	4	Kegiatan Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis	Luas Permukiman Kawasan Strategis yang tertangani infrastrukturnya	Hulu Sungai Tengah	1 Kawasan	305.000.000		1 Kawasan	2.500.000.000

					Jumlah Kawasan Permukiman Bersejarah yang di revitalisasi		1 Kawasan			1 Kawasan	5.000.000.000
					Luas Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) yang dikembangkan		2 m2			2 m2	5.000.000.000
					Jumlah Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis		1 Dokumen			1 Dokumen	0
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Permukiman Kawasan Strategis		1 Dokumen			1 Dokumen	0
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				10.287.120.000			10.000.000.000
2	4			Pertanahan				10.287.120.000			10.000.000.000
2	4	16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Rasio Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum		60 Persentase	10.287.120.000		60 Persentase	10.000.000.000
2	4	16	3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan umum	Hulu Sungai Tengah	6 Hektar	10.287.120.000		6 Hektar	10.000.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				12.091.183.000			11.761.000.000
1	5			Ketentraman dan Ketertiban				12.091.183.000			11.761.000.000
1	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat		100 %	348.626.000		100 %	610.000.000
1	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	1200 Hari Orang Kali (HOK)	24.000.000		1200 Hari Orang Kali (HOK)	60.000.000
1	5	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	500 Lembar	83.550.000		500 Lembar	5.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan Internet		12 Bulan			12 Bulan	60.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		12 Kali			12 Kali	36.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 12			12 12	24.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	36.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	24.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		730 Eksemplar			730 Eksemplar	5.000.000
1	5	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH perjalanan dinas	Hulu Sungai Tengah	340 OH	183.500.000		240 OH	240.000.000
1	5	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	12 Orang/Bulan	57.576.000		60 Orang/Bulan	120.000.000

1	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	1.967.600.000		100 %	1.131.000.000
1	5	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	25.000.000		0 Unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 Unit			0 Unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	20.000.000
1	5	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	2 Jenis	51.500.000		5 Jenis	150.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		0 Jenis			5 Jenis	50.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		5 Jenis			5 Jenis	15.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		3 Jenis			3 Jenis	6.000.000
1	5	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	15 Unit	1.891.100.000		5 Unit	650.000.000
					Jumlah mobil/R2 yang dipelihara		24 Unit			24 Unit	240.000.000
1	5	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kehadiran pegawai		90 %	487.000.000		90 %	880.000.000
1	5	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Hulu Sungai Tengah	330 Stel	301.500.000		500 Stel	750.000.000
1	5	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus	Hulu Sungai Tengah	212 Stel	185.500.000		165 Stel	130.000.000
1	5	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyampaian dokumen penganggaran, keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar		100 %	4.200.000		100 %	35.000.000
1	5	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	7 Dokumen	4.200.000		7 Dokumen	35.000.000
1	5	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP		B Nilai	0		B Nilai	0
1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (keamanan, ketentraman, ketertiban)		75 %	4.820.657.000		75 %	5.000.000.000
1	5	16	6	Operasional Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP	Hulu Sungai Tengah	216 Kali	4.820.657.000		600 Kali	5.000.000.000

1	5	16		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase linmas yang aktif menjaga kamtibmas diwilayahnya		100 %	1.679.900.000		100 %	665.000.000
1	5	16	7	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP	Hulu Sungai Tengah	96 Kali	1.679.900.000		540 Kali	540.000.000
					Jumlah Satlinmas yang terlatih		700 Orang			350 Orang	125.000.000
1	5	18		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap Perda		75 %	366.600.000		75 %	840.000.000
1	5	18	9	Pembinaan dan Pengawasan permasalahan peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah dokumen berita acara kesepakatan	Hulu Sungai Tengah	4 Dokumen	196.600.000		12 Dokumen	45.000.000
					Jumlah laporan		4 Dokumen			12 Dokumen	120.000.000
					Persentase peserta penyuluhan yang sadar hukum		85 %			85 %	50.000.000
1	5	18	13	Penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah operasi dan patroli sesuai SOP	Hulu Sungai Tengah	24 Kali	125.000.000		300 Kali	300.000.000
					Jumlah pemeriksaan sesuai SOP		50 Berkas			50 Berkas	25.000.000
1	5	18	15	Pendidikan dan pelatihan polisi pamong praja	Jumlah peserta diklat yang terlatih sesuai kompetensi	Hulu Sungai Tengah	150 Orang	45.000.000		150 Orang	300.000.000
1	5	27		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase kebakaran yang ditangani		100 %	2.390.000.000		100 %	2.450.000.000
1	5	27	5	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Hulu Sungai Tengah	100 %	2.390.000.000		100 %	450.000.000
					Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar		1 Jenis			1 Jenis	2.000.000.000
1	5	29		Program Peningkatan kemampuan petugas	Persentase kecelakaan dalam melaksanakan tugas		0 %	26.600.000		0 %	150.000.000
1	5	29	2	Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	Jumlah peserta diklat yang terlatih sesuai kompetensi	Hulu Sungai Tengah	150 Orang	26.600.000		150 Orang	150.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				956.017.300			1.942.973.901
1	5			Ketentraman dan Ketertiban				956.017.300			1.942.973.901
1	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		371,02 %	318.701.000		371,02 %	334.600.000
1	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	245 HOK	7.500.000		245 HOK	35.000.000
1	5	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	10 Jenis	40.065.000		2 Jenis	1.500.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet,		12 Bulan			12 Bulan	12.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Jenis			12 Jenis	4.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Jenis			12 Jenis	7.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Jenis			15000 Jenis	4.500.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		720 expl			720 expl	3.600.000
1	5	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	49 OH	96.620.000		49 OH	120.000.000
1	5	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	12 OB	174.516.000		12 OB	147.000.000
1	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	51.421.300		100 %	77.491.300

1	5	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	jumlah unit yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	1 Unit	12.000.000		1 Unit	12.000.000
					Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun		unit			0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		unit			0 unit	0
1	5	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli		11 Buah	15.491.300		11 Buah	12.116.300
					Jumlah peralatan yang dipelihara		5 buah			5 buah	1.625.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		7 buah			7 buah	1.750.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		unit			0 unit	0
1	5	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	7 Buah	23.930.000		7 Buah	50.000.000
1	5	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		6 Buah	11.500.000		8 Buah	16.000.000
1	5	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	6 Dok	11.500.000		6 Dok	16.000.000
1	5	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Meningkatnya wawasan kebangsaan		3 %	56.450.000		3 %	191.664.000
1	5	17	8	Peningkatan peran serta ulama dalam peran peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta yang Paham akan wawasan kebangsaan	Hulu Sungai Tengah	4 pertemuan/koordinasi	56.450.000		4 pertemuan/koordinasi	191.664.000
					Jumlah Rekomendasi Izin Penelitian		buah			0 buah	0
1	5	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase ormas yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah		0 %	156.250.000		100 %	284.537.853
1	5	18	4	Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	Jumlah permasalahan yg direkomendasikan penyelesaiannya oleh FKDM	Hulu Sungai Tengah	200 Rekomendasi	132.300.000		200 Rekomendasi	164.747.853
					Jumlah kegiatan Ormas yang mendukung program pemerintah.		ormas			0 ormas	0
1	5	18	5	Fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Jumlah permasalahan yg direkomendasikan penyelesaiannya oleh FKUB	Hulu Sungai Tengah	4 Rekomendasi	23.950.000		200 Rekomendasi	119.790.000
					Jumlah kegiatan Ormas yang mendukung program pemerintah.		ormas			0 ormas	0

1	5	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah potensi konflik sosial terjadi di masyarakat yang dapat diselesaikan		0 kasus	83.200.000		0 kasus	457.464.066
1	5	19	3	Peningkatan Peran Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA)	Jumlah potensi permasalahan konflik yang dibicarakan.	Hulu Sungai Tengah	4 Pertemuan	38.950.000		4 Pertemuan	239.036.287
1	5	19	10	Fasilitasi Tim Terpadu Peanganan Gangguan Keamanan	Jumlah rekomendasi atau langkah2 Tim Terpadu yang disepakati	Hulu Sungai Tengah	4 Pertemuan	44.250.000		4 Pertemuan	218.427.779
1	5	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah kasus narkoba yang terjadi		0 kasus	130.225.000		>11 kasus	219.615.000
1	5	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah peserta yang memahami akan bahaya Narkoba	Hulu Sungai Tengah	0 org	130.225.000		0 org	219.615.000
1	5	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi peserta pemilu		Jumlah Peserta %	22.300.000		Jumlah Peserta %	53.058.984
1	5	21	6	Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	jumlah parpol yg difasilitasi untuk mendapatkan bantuan keuangan	Hulu Sungai Tengah	12 Parpol	22.300.000		12 Parpol	53.058.984
1	5	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol Yang dapat mempertanggungjawabkan Bantuan dengan benar dan tepat waktu		0 %	0		0 %	0
1	5	21	22	Pembinaan Partai Politik	Persentase partai Politik yang di fasilitasi mendapat bantuan keuangan	Hulu Sungai Tengah	0 %	0		0 %	0
1	5	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase wawasan masayarakat dalam berpolitik		0 %	40.470.000		0 %	70.000.000
1	5	21	20	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan Politik	Hulu Sungai Tengah	2 Peserta	40.470.000		2 Peserta	70.000.000
1	5	21		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase wawasan pemuda dalam berpolitik		0 %	66.580.000		0 %	120.182.698
1	5	21	16	Latihan Dasar Kepimpinan siswa	Jumlah Peserta Yang Memahami Pendidikan Politik		150 org	66.580.000		150 org	120.182.698
1	5	26		Program Koordinasi Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan	Persentase lembaga sosial dan keagamaan yang aktif		50 %	18.920.000		50 %	118.360.000
1	5	26	3	Peningkatan Pembinaan kepada Ormas	Jumlah Partisipasi Lembaga Sosial dan Keagamaan yang aktif dalam mendukung program-program pemerintah	Hulu Sungai Tengah	20 ormas	18.920.000		20 ormas	38.500.000
					Jumlah ormas dan LSM yang terdaftar		10 ormas			10 ormas	79.860.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				4.955.139.000			5.416.784.604
1	6			Sosial				4.955.139.000			5.416.784.604
1	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	1.390.639.000		100 %	1.105.198.628
1	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	100 %	267.375.000		100 %	136.216.068
1	6	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	226.960.000		12 bulan	1.100.000
					Junlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			12 bulan	91.800.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan pembersih		bulan			12 bulan	11.980.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		bulan			12 bulan	100.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		bulan			12 bulan	220.000.000
					Jumlaj bahan bacaan dan buku yang dibeli		bulan			12 bulan	4.800.000
1	6	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH perjalanan dinas	Hulu Sungai Tengah	78 OK	390.000.000		78 OK	215.302.560
1	6	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	18 OB	506.304.000		18 OB	324.000.000
1	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	317.200.000		100 %	557.198.515

1	6	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Unit fasilitasi gedung yang dibangun,	Hulu Sungai Tengah	100 unit	45.000.000		4 unit	26.620.000
					Unit fasilitas yang dipelihara		0 unit			4 unit	30.000.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			2 unit	50.000.000
1	6	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	100 unit	152.000.000		24 unit	240.000.000
					Jumlah peralatan yang dibeli		0 unit			12 unit	80.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		0 unit			24 unit	8.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		0 unit			7 unit	17.500.000
1	6	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	100 unit	120.200.000		72 unit	105.078.515
1	6	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentasi penyampaian dokomen penganggaran , keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar		3 Dokumen	34.550.000		3 Dokumen	45.775.000
1	6	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokomen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	3 Dokumen	10.000.000		3 Dokumen	16.637.500
					Persentasi Nilai Evaluasi SAKIP		3 eksemplar			3 eksemplar	12.500.000
1	6	6	17	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokomen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	3 Dokumen	24.550.000		3 Dokumen	16.637.500
1	6	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokomen yang disusun		3 Eksemplar	0		3 Eksemplar	0
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah orang yang menerima bantuan		100 %	14.140.000		100 %	0
1	6	16	16	Pelayanan Masyarakat Terlantar	Jumlah korban bencana yang diberi bantuan dan penanganan dan jumlah pelayanan pada orang terlantar dan mayat terlantar	Hulu Sungai Tengah	100 %	14.140.000		100 %	0
1	6	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	% PMKS yang mendapat rehabilitasi		0 %	829.600.000		0 %	200.000.000
1	6	16	17	Penanganan Korban Bencana dan Korban Sosial	Jumlah orang yang menerima bantuan	Hulu Sungai Tengah	0 orang	681.900.000		0 orang	0

1	6	16	18	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	Jumlah PMKS yang direhabilitasi	Hulu Sungai Tengah	0 orang	147.700.000		175 orang	200.000.000
1	6	26		Peningkatan Pemberdayaan PMKS	Persentasi PMKS		750 org	1.199.160.000		750 org	2.014.862.460
1	6	26	1	Pelatihan keterampilan berusaha bagi PMKS	Jumlah PMKS yang dilatih		0 org	245.550.000		1000 org	794.500.000
1	6	26	2	Peningkatan Pemberdayaan KAT	Jumlah rumah layak huni yang terbangun	Hulu Sungai Tengah	0 buahpaket	763.460.000		150 buahpaket	975.362.460
1	6	26	3	Peningkatan SDM Sosial Masyarakat	Jumlah tenaga yang dilatih dan dibina	Hulu Sungai Tengah	0 org	190.150.000		1000 org	245.000.000
1	6	26		Peningkatan Pemberdayaan PMKS	% Terpeliharanya nilai nilai perjuangan dan makam		0 %	20.150.000		0 %	60.000.000
1	6	26	4	Melaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan taman makam pahlawan	Jumlah taman makam pahlawan yang terpelihara	Hulu Sungai Tengah	0 buah	20.150.000		5 buah	60.000.000
1	6	27		Proram Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentasi PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial		500 org	798.400.000		500 org	900.000.001
1	6	27	1	Peningkatan Pemberian Jaminan Sosial	Jumlah anak/panti asuhan yang diberi bantuan	Hulu Sungai Tengah	0 org	423.400.000		1800 org	900.000.000
					Jumlah penerima bantuan Rastra, PKH dll		0 orang			0 orang	0
1	6	27	2	Peningkatan Perlindungan Sosial	Jumlah anak terlantar yang dibantu	Hulu Sungai Tengah	0 org	375.000.000		2000 org	1
1	6	28		Program Pendataan Sosial	Persentasi data akurat dan valid		100 %	351.300.000		100 %	533.750.000
1	6	28	1	Pengumpulan Data Sosial	Jumlah RT yang terdata	Hulu Sungai Tengah	7 RT	302.400.000		7 RT	287.000.000
1	6	28	2	Pengolahan Data Sosial	Jumlah RT yang terdata	Hulu Sungai Tengah	7 RT	24.200.000		7 RT	79.500.000
1	6	28	3	Pengembangan Sistem Informasi Data Sosial	Jumlah sistem yang dikembangkan	Hulu Sungai Tengah	1 buah	24.700.000		1 buah	167.250.000
					Jumlah koordinasi pengelolaan data yang dilaksanakan		0 kali			0 kali	0
1	6	28		Program Pendataan Sosial	Jumlah data yang di verifikasi		6 dok	0		6 dok	0
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				4.965.193.000			6.402.615.809
2	2			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				469.620.000			1.070.560.000

2	2	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	% Kelompok usaha perempuan /keluarga/masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi		100 %	226.720.000		100 %	425.000.000
2	2	18	14	Pengembangan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Desa P2W-KSS dan Kec. GSI	Hulu Sungai Tengah	1desa, 1 kec, 9 desa prima, 50 org desa/kec.	226.720.000		1desa, 1 kec desa/kec.	155.000.000
					Jumlah pembinaan desa Prima		5 kali			5 kali	130.000.000
					Jumlah peserta pelatihan/sosialisasi pemberdayaan perempuan		50 orang			50 orang	140.000.000
2	2	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	% Perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan		0 %	70.200.000		0 %	265.560.000
2	2	18	16	Pengembangan Pengarusutamaan Gender	Jumlah perempuan di parlemen, pemerintahan, dan swasta	Hulu Sungai Tengah	15 org	70.200.000		10 org	123.919.000
					Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG		0 unit			15 unit	141.641.000
2	2	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	% SKPD yang anggaran Responsef gender		0 %	0		0 %	0
2	2	21		Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Persentase Kecamatan yang mendukung KLA		100 %	102.320.000		80 %	240.000.000
2	2	21	1	Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak dan Partisipasi Anak	Jumlah desa/kelurahan yang mendukung KLA	Hulu Sungai Tengah	100 desa/kelurahan	102.320.000		3 desa/kelurahan	140.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan yang memahami pemenuhan hak anak		0 peserta			100 peserta	100.000.000
2	2	23		Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti		10 %	70.380.000		100 %	140.000.000
2	2	23	1	Peningkatan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	Hulu Sungai Tengah	30 kasus	70.380.000		30 kasus	50.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi/pelatihan perlindungan perempuan dan anak		100 peserta			100 peserta	90.000.000
2	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				4.495.573.000			5.332.055.809
2	8	15		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah peningkatan peserta KB aktif		100 orang	4.087.985.500		100 orang	5.332.055.809
2	8	15	10	Pembinaan KB	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan,Jumlah tenaga kontrak PPLKB, Jumlah alkon yang dibeliJumlah sarana prasarana KB yang terbentuk	Hulu Sungai Tengah	204 buah	677.185.000		204 buah	607.805.809

2	8	15	11	Bantuan Operasional KB	Jumlah Kampung KB yang terbentuk	Hulu Sungai Tengah	11 kec	3.410.800.500		11 kec	4.724.250.000
2	8	15		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan		kali	0		11 kali	0
2	8	15		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah tenaga kontrak PPLKB		OB	0		96 OB	0
2	8	15		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah Alkon yang dibeli		buah	0		0 buah	0
2	8	15		Program Pelayanan Keluarga Berencana	Jumlah sarana prasarana KB yang dibeli/dibangun		buah	0		0 buah	0
2	8	27		Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga	Persentasi masyarakat yang berperan terhadap ketahanan keluarga		100 %	407.587.500		100 %	0
2	8	27	1	Pembinaan Kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok Tri Bina meningkat dengan klasifikasinya (Dasar, berkembang, paripurna)	Hulu Sungai Tengah	100 %	283.917.500		100 %	0
2	8	27	2	Pengolahan Data dan Informasi Program KKBPK	Jumlah Dokumen pelaporan bulanan	Hulu Sungai Tengah	0 -	123.670.000		0 -	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar				1.091.465.500			3.000.915.600
1	5			Ketentraman dan Ketertiban				610.420.000			1.776.785.000
1	5	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase wilayah desa tangguh dan tanggap bencana		0 %	16.280.000		0 %	195.000.000
1	5	22	1	Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Jumlah masyarakat yang paham	Hulu Sungai Tengah	180 Orang	16.280.000		180 Orang	65.000.000
					Jumlah desa tangguh bencana		2 Desa			2 Desa	65.000.000
					Jumlah tenaga tanggap bencana yang aktif		25 Orang			25 Orang	65.000.000
1	5	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penurunan korban dan kerugian akibat bencana		100 %	576.320.000		85 %	1.491.785.000
1	5	22	3	Posko Komando Siaga Bencana	Jumlah sarana mobilitas kebencanaan yang tersedia dan berfungsi dengan baik	Hulu Sungai Tengah	25 Buah	363.575.000		3 Buah	250.000.000
					Tingkat waktu tanggap darurat penanganan bencana		1 Jam			1 Jam	300.000.000
1	5	22	4	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk Ditempat Penampungan Sementara	Jumlah logitik yang disalurkan	Hulu Sungai Tengah	15 Item	212.745.000		15 Item	591.785.000
					Jumlah pelayanan kebencanaan non pangan		7 Item			7 Item	350.000.000
1	5	22		Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pemulihan aspek fisik dan non fisik pasca bencana		100 %	17.820.000		60 %	90.000.000
1	5	22	5	Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana	Hulu Sungai Tengah	100 %	17.820.000		100 %	90.000.000
1	6			Sosial				481.045.500			1.224.130.600
1	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran		100 %	0		12 %	0
1	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	356.000.500		100 %	1.121.130.600

1	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	100 HOK	11.840.000		151 HOK	15.000.000
1	6	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	100 %	68.833.500		100 %	1.500.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	1.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	21.898.600
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	12.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	12.500.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		732 Buah			732 Buah	3.232.000
1	6	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	171 OK	146.387.000		171 OK	1.000.000.000
1	6	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	6 OB	128.940.000		3 OB	54.000.000
1	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana yang memadai		100 %	0		100 %	0
1	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	107.295.000		100 %	78.000.000
1	6	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	jumlah unit yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	1 Buah	18.000.000		1 Buah	18.000.000
1	6	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	16 Buah	23.210.000		16 Buah	15.000.000
1	6	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	3 Buah	66.085.000		3 Buah	45.000.000
1	6	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	17.750.000		100 %	25.000.000
1	6	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (RKA, DPA, laporan Keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun, Renstra, Renja, LKIP, LKPj&LPPD)	Hulu Sungai Tengah	8 Dokumen	17.750.000		8 Dokumen	25.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.662.089.800			1.286.359.200
2	3			Pangan				2.662.089.800			1.286.359.200
2	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	893.415.000		100 %	342.552.000
2	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	7235 OK	18.500.000		7235 OK	56.502.000
2	3	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	24 kali	158.345.000		0 kali	0
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		7 eksemplar			0 eksemplar	0
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		0 buah			0 buah	0
2	3	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	122 OH	257.750.000		0 OH	0
					Indeks Kepuasan Masyarakat		7 OK			124 OK	286.050.000
2	3	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	22 orang	458.820.000		0 orang	0
2	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75 %	551.980.400		75 %	0

2	3	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 unit	134.110.400		0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			0 unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		4 unit			0 unit	0
2	3	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 unit	76.090.000		0 unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		7 buah			0 buah	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		53 unit			0 unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		9 unit			0 unit	0
2	3	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	7 unit	341.780.000		0 unit	0
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		7 unit			0 unit	0
2	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	32.857.200		100 %	21.457.200
2	3	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hulu Sungai Tengah	0 dokumen	32.857.200		7 dokumen	21.457.200
2	3	18		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Lumbung Pangan Masyarakat yang Terisi Bahan Pangan Utama		100 %	923.574.000		100 %	483.870.000
2	3	18	2	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	Hulu Sungai Tengah	20 desa	923.574.000		20 desa	483.870.000
					Jumlah kelompok lumbung pangan masyarakat yang terbentuk		1 kelompok			0 kelompok	0
2	3	18		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Tingkat Konsumsi Pangan		1 Laporan	122.790.000		1 Laporan	280.000.000
2	3	18	10	Pengembangan Diversifikasi Pangan	Jumlah Kelompok Wanita Yang Memanfaatkan Pekarangan Untuk Menghasilkan Produk dan Jumlah Promosi dan Lomba Yang Dilaksanakan B2SA	Hulu Sungai Tengah	1, 30 Kali dan Kelompok	122.790.000		1, 30 Kali dan Kelompok	280.000.000
2	3	18		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase pemberdayaan kelompok distribusi pangan masyarakat yang berpartisipasi untuk menjaga stabilisasi harga pangan		3 %	121.673.200		%	0

2	3	18	16	Pengembangan Cadangan Pangan	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah	Hulu Sungai Tengah	10000 kg	121.673.200		0 kg	0
					Jumlah permasalahan pangan yang diputuskan		2 buah			0 buah	0
					Jumlah Pemantau Analisis Harga Pangan		12 orang			0 orang	0
					Jumlah kelompok PLDMP dan PUPM yang terbina		17 kelompok			0 kelompok	0
2	3	18		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Keamanan pangan segar		20 Sample	15.800.000		20 Sample	158.480.000
2	3	18	8	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Kelompok Yang Paham Tentang Keamanan Pangan	Hulu Sungai Tengah	22 Sample	15.800.000		22 Sample	158.480.000
					Jumlah Sampel Komoditi Pangan yang diuji		0 Sample			0 Sample	0
3				Urusan Pilihan				2.229.245.000			610.000.000
3	1			Kelautan dan Perikanan				2.229.245.000			610.000.000
3	1	21		Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dibina		3 Kelompok	303.800.000		3 Kelompok	380.000.000
3	1	21	7	Pengembangan Prasarana Penangkapan	- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang aktif	Hulu Sungai Tengah	10 kelompok	303.800.000		10 kelompok	380.000.000
					Jumlah Alat Tangkap Yang Ramah Lingkungan		6 Jenis			Jenis	0
3	1	21		Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Jenis Populasi ikan di Perairan yang ditebar		2 Jenis	0		2 Jenis	0
3	1	21		Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)		3 Kelompok	0		Kelompok	0
3	1	21		Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum		20 Ton	205.380.000		Ton	180.000.000
3	1	21	8	Pengkayaan Sumber Daya Ikan	Jumlah Bibit Lokal Yang ditebar di Perairan	Hulu Sungai Tengah	40000 ekor	205.380.000		40000 ekor	180.000.000
3	1	29		Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Jumlah Kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti		2 Lap.	0		2 Lap.	0
3	1	29		Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Tentang Adanya Penangkapan Ikan dengan Bahan dan Alat Terlarang		20 Lap.	0		Lap.	0
3	1	30		Pengembangan Sarana Prasarana Pengolahan, Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Meningkat omzetnya		9 kelompok	213.780.000		9 kelompok	50.000.000

3	1	30	2	Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah hasil olahan produk perikanan yang diproduksi/dipasarkan	Hulu Sungai Tengah	10 Kelompok	213.780.000		10 Kelompok	50.000.000
3	1	31		Program Pengembangan Usaha Perikanan	Luas Budidaya Perikanan Luas Budidaya Perikanan		102,75 hektar	1.506.285.000		102,75 hektar	0
3	1	31	1	Pengembangan Budidaya Perikanan	Luas Kolam yang di bangun	Hulu Sungai Tengah	3 m2	761.470.000		3 m2	0
					Luas Karamba yang dibangun		0 m2			0 m2	0
					Luas Lahan Mina Padi Yang di Laksanakan		0,5 ha			0 ha	0
					Jumlah kelompok UPR yang aktif		7 kelompok			0 kelompok	0
3	1	31	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan	Jumlah Benih Ikan Unggul yang di Produksi	Hulu Sungai Tengah	280 ekor	744.815.000		0 ekor	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				27.936.596.500			47.959.590.400
2	5			Lingkungan Hidup				20.503.268.500			36.234.590.400
2	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	1.321.392.000		100 %	1.837.000.000
2	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	1700 HOK	43.500.000		1700 HOK	80.000.000
2	5	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	36 Surat	778.740.000		36 Surat	3.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	850.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		1 Paket			1 Paket	2.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	16.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	95.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	18.500.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		1440 Buah			1440 Buah	4.500.000
2	5	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	400 OH	318.000.000		400 OH	600.000.000
2	5	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	84 OB	181.152.000		84 OB	168.000.000
2	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	1.235.540.000		100 %	10.310.000.000
2	5	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 Buah	60.000.000		1 Buah	5.000.000.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 Kawasan			0 Kawasan	0

					jumlah unit yang dipelihara		4 Unit			4 Unit		20.000.000
2	5	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	10 Unit	107.500.000		10 Unit		65.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		10 unit			10 unit		50.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		55 Unit			55 Unit		15.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		20 Unit			20 Unit		20.000.000
2	5	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	2 Unit	1.068.040.000		4 Unit		640.000.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		130 Unit			130 Unit		4.500.000.000
2	5	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	24.000.000		100 %		25.000.000
2	5	6	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	6 Dokumen	24.000.000		6 Dokumen		25.000.000
2	5	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Tertangani dengan baik		66 %	15.342.854.000		66 %		21.493.590.400
2	5	15	16	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sampah yang terangkut	Hulu Sungai Tengah	20 ton	4.967.679.000		20 ton		4.983.590.400
					Jumlah Masyarakat yang memahami pengelolaan sampah dari sumbernya		350 orang			350 orang		75.000.000
					Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi persampahan		1 laporan			1 laporan		75.000.000
2	5	15	17	Kegiatan Pengelolaan TPA	Nilai pengoperasian TPA (minimal)	Kecamatan Batang Alai Utara	75 .	491.715.000		75.5 .		1.500.000.000
2	5	15	18	Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Prasarana & Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang diadakan	Hulu Sungai Tengah	150 unit	9.883.460.000		150 unit		13.000.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan yang dipelihara		55 unit			55 unit		1.860.000.000
2	5	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Persentase titik pantau yang memenuhi baku mutu kualitas lingkungan		68 %	2.464.132.500		68 %		2.354.000.000
2	5	16	3	Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Air Sungai	Hulu Sungai Tengah	27 Parameter	128.285.000		27 Parameter		110.000.000
					Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau Udara		11 Parameter			11 Parameter		6.000.000
					Jumlah Parameter Pada Setiap Titik Pantau air limbah		10 Parameter			10 Parameter		10.000.000

2	5	16	14	Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah Adiwiyata (Akumulasi)	Hulu Sungai Tengah	21 Buah	255.490.000		21 Buah	400.000.000
					Jumlah Kampung Iklim Terbentuk		1 Buah			1 Buah	50.000.000
2	5	16	18	Kegiatan Pemeliharaan RTH	Luas RTH Yang Terkelola dengan Baik	Hulu Sungai Tengah	70300 Ha	380.895.000		70300 Ha	300.000.000
					Jumlah PJU Perkotaan Barabai yang berfungsi dengan baik		400 unit			400 unit	175.000.000
2	5	16	19	Kegiatan pelayanan pengujian kualitas lingkungan hidup	Jumlah layanan pengujian kualitas lingkungan hidup	Hulu Sungai Tengah	6 produk	1.613.320.000		6 produk	8.000.000
					Jumlah alat uji kualitas lingkungan yang diadakan/dipelihara		34 unit			34 unit	680.000.000
					Jumlah bahan pengujian kualitas lingkungan yang diadakan		40 jenis			40 jenis	215.000.000
2	5	16	20	Kegiatan Pembangunan Kota Bersih, Teduh dan Sehat	Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan	Hulu Sungai Tengah	10 Rekomendasi	86.142.500		10 Rekomendasi	300.000.000
					Jumlah tanaman yang ditanam		500 Buah			500 Buah	100.000.000
2	5	25		Program Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan		50 %	68.100.000		50 %	65.000.000
2	5	25	1	Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Sengketa Akibat Dugaan Pencemaran Lingkungan	Jumlah Pengaduan Masyarakat Yang Dimediasi Sesuai Standar	Hulu Sungai Tengah	5 buah	23.000.000		5 buah	10.000.000
					Persentase Peserta Sosialisasi Yang Dapat Menjawab 70% Soal Post Test		50 %			50 %	15.000.000
2	5	25	9	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Hulu Sungai Tengah	2 buah	15.000.000		2 buah	15.000.000
					Jumlah Buku Laporan		0 buah			0 buah	0
2	5	25	10	Kegiatan Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha/Masyarakat Yang Taat Terhadap Peraturan Perundangan	Hulu Sungai Tengah	25 orang	30.100.000		25 orang	25.000.000
2	5	26		Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pesertase tutupan lahan hutan		0.15 %	47.250.000		0.15 %	150.000.000
2	5	26	1	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama dan Pemberdayaan MHA dan Kearifan Lokal	Jumlah pertemuan MHA/kearifan lokal yang difasilitasi	Hulu Sungai Tengah	0.15 %	47.250.000		0.15 %	150.000.000
2	9			Perhubungan				7.433.328.000			11.725.000.000
2	9	16		Program pengadaan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Standar		100 %	4.282.132.000		100 %	6.520.000.000

2	9	16	9	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal	Jumlah Terminal yang dibangun/direhabilitasi/ dipelihara	Hulu Sungai Tengah	3 Buah	358.488.000		2 Buah	750.000.000
2	9	16	10	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Parkir	Jumlah Kawasan Parkir Yang Terkelola dengan Baik	Hulu Sungai Tengah	8 Kawasan	2.722.844.000		8 Kawasan	4.500.000.000
2	9	16	11	Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Perhubungan	Jumlah Rambu & Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang diadakah	Hulu Sungai Tengah	85 Buah	1.200.800.000		85 Buah	1.200.000.000
					Jumlah Rambu & Fasilitas Perlengkapan Jalan Yang Dipelihara dengan Baik		50 Buah			50 Buah	70.000.000
2	9	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan / Lulus Uji KIR		98 %	2.639.452.000		98 %	3.785.000.000
2	9	20	7	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah bukti tanda lulus yang diterbitkan sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	3348 Buah	2.639.452.000		3348 Buah	175.000.000
					Jumlah Alat Pengujian Yang Baik		12 Buah			12 Buah	3.500.000.000
					Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor yang berfungsi dengan baik		12 Buah			12 Buah	110.000.000
2	9	28		Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Peningkatan Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		80 %	452.694.000		80 %	1.300.000.000
2	9	28	1	Kegiatan Peningkatan Ketertiban & Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Penertiban & Keamanan Lalu Lintas	Hulu Sungai Tengah	5180 Kali	452.694.000		5180 Kali	950.000.000
					Jumlah Pelanggaran Angkutan Orang & Barang di jalan raya		8 Kali			8 Kali	350.000.000
2	9	28		Program Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Persentase Rekomendasi Rekayasa Lalin yang Dilaksanakan		85 %	59.050.000		85 %	120.000.000
2	9	28	2	Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Forum Koordinasi yang dilaksanakan	Hulu Sungai Tengah	2 Kali	59.050.000		2 Kali	120.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				6.942.804.200			4.856.844.600
2	6			Administrasi Kependudukan dan Capil				6.942.804.200			4.856.844.600
2	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100% persen	2.188.831.000		85% persen	1.409.020.000
2	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	450 OK OK	12.125.000		450 OK OK	116.270.000
2	6	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat	Hulu Sungai Tengah	12 Bulan Bulan	270.704.000		12 Bulan Bulan	0
					Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air dan Telpon		12 Bulan Bulan			12 Bulan Bulan	0
					Jumlah Bulan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan		12 Bulan Bulan			12 Bulan Bulan	0
					Jumlah Bulan Penyediaan ATK		12 Bulan Bulan			12 Bulan Bulan	0
					Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan Bulan			12 Bulan Bulan	0
					Jumlah Bahan Bacaan dan Buku yang di beli		720 eksamplar eksamplar			720 eksemplar eksamplar	0
2	6	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	600 OH OH	673.266.000		600 OH OH	224.750.000
2	6	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	74 orang orang	1.232.736.000		74 orang orang	1.068.000.000
2	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		78% persen	548.715.000		78% persen	305.000.000
2	6	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 unit Unit	382.500.000		1 unit Unit	250.000.000

2	6	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	26 buah buah	115.625.000		26 buah buah	40.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		5 jenis peralatan kantor Jenis			5 jenis peralatan kantor Jenis	15.000.000
2	6	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil dan R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	7 unit Unit	50.590.000		7 unit Unit	0
2	6	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyampaian Dokumen Pengangggaran, Keuangan dan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standart		100% persen	7.100.000		400% persen	25.000.000
2	6	6	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	5 dokumen dokumen	7.100.000		5 dokumen dokumen	25.000.000
2	6	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rata-rata dokumen kependudukan yang diselesaikan tepat waktu		1 Hari kerja	1.163.020.900		1 Hari kerja	1.182.555.000
2	6	15	3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Hulu Sungai Tengah	10.000 buah buah	1.100.155.900		10.000 buah buah	1.128.875.000
					Jumlah KTP-el yang diterbitkan		10.000 keping keping			10.000 keping keping	0
					Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan		21.502 keping keping			21.502 keping keping	0
					Jumlah Tenaga Operator e-KTP dan Kartu Keluarga di Kecamatan dan Kabupaten yang dapat mengoperasikan aplikasi SIAK		56 orang orang			56 orang orang	0
2	6	15	11	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi yang memahami tentang peraturan kependudukan	Hulu Sungai Tengah	440 orang orang	62.865.000		440 orang orang	53.680.000
2	6	16		Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Rata-rata dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan tepat waktu		1 Hari kerja	673.375.000		1 Hari kerja	721.408.600
2	6	16	3	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan & Akta Perceraian)	Hulu Sungai Tengah	10.100 berkas Berkas	572.040.000		10.100 berkas Berkas	513.013.600
2	6	16	5	Pemutakhiran Data Pencatatan Sipil	Jumlah Data Akta Pencatatan Sipil yang di input dari Non SIAK ke SIAK	Hulu Sungai Tengah	3.500 berkas berkas	101.335.000		3.500 berkas berkas	208.395.000
					Jumlah Tenaga Operator Pencatatan Sipil		10 orang orang			10 orang orang	0

2	6	19		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Kecamatan yang terkoneksi dengan SIAK di Kabupaten dan sarana, prasarana serta aplikasi yang berfungsi baik dan lancar di Kabupaten		100% persen	867.942.300		100% persen	837.897.500
2	6	19	1	Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah Kantor Kecamatan yang terkoneksi dengan SIAK di Kabupaten	Hulu Sungai Tengah	11 Kecamatan Kecamatan	867.942.300		11 Kecamatan Kecamatan	837.897.500
					Jumlah sarana, prasarana dan aplikasi SIAK yang bisa difungsikan dengan baik dan lancar		11 Kecamatan Kecamatan			11 Kecamatan Kecamatan	0
2	6	19		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	persentase Desa dan Kelurahan yang menerapkan Database Kependudukan		100 %	393.570.000		100 %	304.162.100
2	6	19	2	Pengembangan data base kependudukan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan Database Kependudukan	Hulu Sungai Tengah	161 Desa & 8 Kelurahan desa dan kelurahan	393.570.000		161 Desa & 8 Kelurahan desa dan kelurahan	304.162.100
2	6	20		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Data Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan oleh Instansi/SKPD		3 Jenis Dokumen Jenis Dokumen	178.126.000		3 Jenis Dokumen Jenis Dokumen	26.899.400
2	6	20	1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Jumlah laporan informasi kependudukan yang disusun berupa Buku Profil Perkembangan Kependudukan, Buku Induk Kependudukan dan Buku Agregat Kependudukan	Hulu Sungai Tengah	3 Jenis Dokumen Jenis Dokumen	178.126.000		3 Jenis Dokumen Jenis Dokumen	26.899.400
2	6	20		Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Inovasi Pelayanan Kependudukan yang diterapkan.		20 jenis	922.124.000		20 jenis	44.902.000
2	6	20	2	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Website yang dikelola dan Jumlah inovasi pelayanan yang dilaksanakan	Hulu Sungai Tengah	1 buah buah	922.124.000		1 buah buah	44.902.000
					Jumlah Inovasi Pelayanan yang dilaksanakan		20 jenis Jenis			20 jenis Jenis	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				3.375.850.900			1.993.474.230
2	7			Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.375.850.900			1.993.474.230
2	7	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100% %	711.457.100		100% %	62.357.350
2	7	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rutin dan insidentil non Program	Hulu Sungai Tengah	100% OK	48.230.000		100% OK	62.357.350
2	7	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat		12 bulan	84.385.100		0 bulan	0
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internit		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bulan Penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			0 bulan	0
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		buah			0 buah	0
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		buah			0 buah	0
2	7	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	0 orang	337.750.000		0 orang	0
2	7	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	241.092.000		0 bulan	0
2	7	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		0 %	193.415.000		0 %	0
2	7	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 tahun	15.000.000		0 tahun	0

2	7	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 tahun	94.775.000		0 tahun	0
2	7	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	0 buah	83.640.000		0 buah	0
2	7	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		0 %	23.800.000		0 %	0
2	7	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	0 buah	23.800.000		0 buah	0
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rasio nilai swadaya masyarakat terhadap APBDes		70 %	0		70 %	0
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	% KPMD yang aktif		0 %	0		0 %	0
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	% Kelembagaan Desa yang aktif		100 %	709.569.000		0 %	72.530.000
2	7	15	7	Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK yang telah dibina	Hulu Sungai Tengah	181 PKK	590.349.000		181 PKK	0
2	7	15	9	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa	Jumlah LPM yang telah dibina	Hulu Sungai Tengah	322 Orang	119.220.000		322 Orang	72.530.000
2	7	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	% jumlah lembaga adat/budaya yang aktif berpartisipasi dalam pelestarian budaya Jumlah pertemuan Pokjanal dan jumlah kader Posyandu yang difasilitasi		100 %	244.930.000		3 %	164.500.000
2	7	15	10	Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar dan Budaya Masyarakat	Jumlah lembaga adat/budaya Desa yang telah dibina	Hulu Sungai Tengah	3 Buah	244.930.000		3 Buah	32.500.000
					Jumlah pertemuan Pokjanal		3 Kali			3 Kali	15.000.000
					Jumlah Kader Posyandu yang difasilitasi		322 orang			322 orang	117.000.000
2	7	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase desa yang memiliki BUMDesa yang aktif		5 persen	62.220.000		5 persen	196.152.400
2	7	16	2	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah Pengelola BUMDesa yang punya keterampilan manajemen BUMDesa		30 orang	12.110.000		30 orang	58.277.400
2	7	16	16	Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Masy. Desa	Jumlah BUMDes yang terbentuk	Hulu Sungai Tengah	10 BUMDesa	50.110.000		10 BUMDesa	70.000.000
					Jumlah pengelola pasar desa yang terbentuk		1 Pengelola Pasar Desa			1 Pengelola Pasar Desa	50.000.000

					Jumlah Posyantek yang terbentuk		0 posyantek			1 posyantek	17.875.000
2	7	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah Pengelola Pasar Desa yang terbentuk		0 1 Pasar Desa	0		0 1 Pasar Desa	0
2	7	17		Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Rasio Nilai swadaya masyarakat terhadap APBDes dan persentasi kelembagaan desa yang aktif dan persentasi jumlah lembaga adat/budaya yang aktif berpartisipasi dalam pelestarian budaya		80 %	267.900.000		80 %	739.804.280
2	7	17	1	Pemberdayaan Lembaga Adat	Jumlah lembaga adat/ budaya desa yang telah dibina	Hulu Sungai Tengah	3 jumlah lembaga	28.570.000		3 jumlah lembaga	31.652.500
2	7	17	4	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Jumlah LPM yang telah dibina	Hulu Sungai Tengah	322 orang	69.420.000		322 orang	72.530.000
2	7	17	14	Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa yang dibina dalam pelaksanaan gotong royong	Hulu Sungai Tengah	55 desa	41.015.000		55 desa	204.162.000
2	7	17	19	Revitalisasi Posyandu Melalui Pokjanal	jumlah Kader Posyandu yang telah dibina	Hulu Sungai Tengah	550 Orang	112.515.000		550 Orang	206.810.780
2	7	17	22	Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) sesuai Pedoman	Hulu Sungai Tengah	4 Desa	16.380.000		161 Desa	224.649.000
2	7	20		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	persentasi aparatur pemerintahan desa terampil		141 desa persen	122.732.300		141 desa persen	49.235.200
2	7	20	7	Pelatihan aparatur pemerintahan desa	Jumlah peserta aparatur pemerintahan desa yang terampil	Hulu Sungai Tengah	190 orang	122.732.300		190 orang	49.235.200
2	7	20		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	% Desa dengan pengadministrasian yang lengkap dan baik		100 %	306.755.500		0 %	232.140.000
2	7	20	8	Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa difasilitasi		161 desa	306.755.500		161 desa	85.750.000
					Jumlah peserta aparatur pemerintahan desa yang terampil		161 orang			161 orang	67.500.000
					Jumlah desa yang menyusun profil desa		161 desa			161 desa	78.750.000
					Jumlah desa yang berprestasi		14 desa			14 desa	140.000
2	7	20		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	% desa yang lengkap struktur pemerintahan desanya		100 %	271.249.000		0 %	103.500.000
2	7	20	9	Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi	Hulu Sungai Tengah	161 desa	271.249.000		161 desa	103.500.000

2	7	20		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	% desa yang menyusun APBDes dan laporan keuangan dan laporan aset desa sesuai standart dan tepat waktu		100 %	314.463.000		0 %	250.800.000
2	7	20	10	Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Jumlah desa yang menyusun APBDes dan laporan keuangan	Hulu Sungai Tengah	161 desa	314.463.000		172 desa	78.800.000
					Jumlah desa yang menyusun laporan aset desa		0 desa			161 desa	172.000.000
2	7	20		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	% Desa dengan pengadministrasian yang lengkap		100 %	0		0 %	0
2	7	22		Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Posyantek yang aktif		1 persen	0		1 persen	0
2	7	22		Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna	Persentase Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa		1 persen	0		1 persen	0
2	7	22		Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna	% Desa yang melaksanakan Kerjasama Antar Desa		1 %	0		1 %	0
2	7	22		Program Pengembangan Sumber daya alam dan teknologi tepat guna	% Posyantek yang aktif		1 %	147.360.000		1 %	122.455.000
2	7	22	2	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Lomba Inovasi Tepat Guna yang dilaksanakan dan diikuti	Hulu Sungai Tengah	2 kali	147.360.000		2 kali	57.455.000
					Jumlah desa/ masyarakat yang mengikuti Gelar TTG		1 desa			1 desa	30.000.000
					Jumlah TTG yang masuk kriteria yang diikutsertakan dalam Gelar TTG Nasional		1 TTG			1 TTG	35.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				9.252.034.900			5.260.500.000
2	10			Komunikasi dan Informatika				9.185.984.900			5.035.500.000
2	10	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 indeks	764.246.900		80 indeks	846.000.000
2	10	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	1660 HOK	24.750.000		460 HOK	25.000.000
2	10	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	201.968.900		12 bulan	12.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			12 bulan	150.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		0 Jenis			5 Jenis	5.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	10.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	22.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	13.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		724 explr			724 explr	5.000.000
2	10	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	201 OH	180.360.000		201 OH	250.000.000
2	10	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	13 orang	357.168.000		13 orang	354.000.000
2	10	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80 %	6.819.548.000		80 %	1.620.000.000

2	10	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan	Hulu Sungai Tengah	1 buah	6.146.500.000		1 buah	25.000.000
2	10	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	17 Unit	238.798.000		40 Unit	200.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		20 buah			20 buah	100.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		28 Unit			30 Unit	800.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		12 Unit			30 Unit	50.000.000
					jumlah unit yang dipelihara		2 unit			2 unit	15.000.000
2	10	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	11 buah	434.250.000		11 buah	330.000.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		5 buah			5 buah	100.000.000
2	10	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		80 %	25.900.000		80 %	40.000.000
2	10	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		7 dokumen	25.900.000		7 dokumen	40.000.000
2	10	15		Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik	Persentase infrastruktur telekomunikasi desa yang terlayani		85 %	49.990.000		85 %	250.000.000
2	10	15	6	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen / produk hukum dan kajian TIK	Hulu Sungai Tengah	2 Dokumen	49.990.000		2 Dokumen	200.000.000
					Jumlah Data dan Informasi Pos dan Telekomunikasi yang dikelola (Data Tower Telekomunikasi, Jasa Titipan, TV Kabel dan Warnet, Radio Komunitas)		4 Data			4 Data	25.000.000
					Jumlah Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Publik		4 Kemitraan			4 Kemitraan	25.000.000
2	10	16		Pengembangan dan pengelolaan informasi publik	Persentasi Media Informasi Publik yang di kelola		90 %	145.510.000		90 %	348.000.000
2	10	16	13	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	Jumlah Media yang Dikelola dalam Penyebarluasan Informasi	Hulu Sungai Tengah	4 Media	145.510.000		4 Media	110.000.000
					Jumlah Jam Penyelenggaraan Siaran Radio Suara Murakata		5490 Jam			5490 Jam	175.000.000
					Jumlah SDM yang Paham Komunikasi dan Informasi Publik		30 Orang			30 Orang	63.000.000

2	10	20		Pengembangan dan pengelolaan E-Government	Persentase Aplikasi yang dikembangkan		90 %	85.090.000		90 %	230.000.000
2	10	20	3	Pengelolaan dan Pengembangan E Government	Jumlah Aplikasi dan Web yang Dibangun dan Dikembangkan	Hulu Sungai Tengah	25 Aplikasi	85.090.000		25 Aplikasi	185.000.000
					Jumlah kerjasama dengan instansi terkait tentang pengelolaan tata kelola E-Government		25 SKPD			25 SKPD	45.000.000
2	10	22		Pengembangan dan pengelolaan sarana infrastruktur TIK	Persentase peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur TIK yang maksimal		80 %	1.287.200.000		80 %	1.586.500.000
2	10	22	4	Pengadaan dan Pengembangan infrastrutur TIK	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pendukung Infrastruktur TIK	Hulu Sungai Tengah	26 unit	1.287.200.000		30 unit	515.000.000
					Jumlah SKPD yang terintegrasi dalam jaringan infrastruktur TIK		37 skpd			37 skpd	1.041.500.000
					Persentase Peningkatan Pemenuhan Standar Infrastruktur TIK Sesuai Ketentuan		35 %			35 %	30.000.000
2	10	22		Pengembangan dan pengelolaan sarana infrastruktur TIK	Persentase start up daerah yang tumbuh		6 %	8.500.000		6 %	115.000.000
2	10	22	5	Peningkatan Kapasitas SDM TIK bagi Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan programer/TIK	Hulu Sungai Tengah	5 Orang	8.500.000		5 Orang	60.000.000
					Jumlah lomba cipta aplikasi		1 Lomba			1 Lomba	55.000.000
2	14			Statistik				53.280.000			155.000.000
2	14	15		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase item data statistik daerah yang disajikan		90 %	53.280.000		90 %	155.000.000
2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah Dokumen/Buku Data dan Statistik Sektoral Daerah	Hulu Sungai Tengah	2 Dokumen	53.280.000		2 Dokumen	130.000.000
					Jumlah SDM yangTerlatih Tentang Statistik		40 Orang			42 Orang	25.000.000
2	15			Persandian				12.770.000			70.000.000
2	15	23		Pengembangan Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang terakreditasi		65 %	12.770.000		65 %	70.000.000
2	15	23	2	Pengamanan Informasi dan Persandian	Jumlah SKPD Yang Paham Tentang Keamanan Informasi dan Persandian	Hulu Sungai Tengah	25 SKPD	12.770.000		25 SKPD	40.000.000
					Jumlah SDM yang Terlatih Tentang Persandian		3 Orang			3 Orang	30.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				2.708.229.200			4.764.677.000
2	1			Tenaga Kerja				971.328.600			2.328.850.000
2	1	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		400 orang	14.800.000		400 orang	250.000.000
2	1	16	2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Kartu Tanda Pencari Kerja, Permintaan Tenaga Kerja, Pemanggilan Tenaga Kerja (AK1 - AK5) yang diterbitkan sesuai ketentuan	Hulu Sungai Tengah	4000 Orang	14.800.000		4000 Orang	250.000.000
2	1	16		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Pencari Kerja terlatih yang bekerja		0 Orang	724.548.600		120 Orang	1.573.850.000
2	1	16	8	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	Jumlah tenaga kerja yang terlatih dan terampil	Hulu Sungai Tengah	200 Orang	721.718.600		120 Orang	1.473.000.000
2	1	16	9	Kegiatan Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja (Padat Karya Produktif/Infrastruktur) dan Kewirausahaan	Jumlah perorangan/kelompok usaha yang dibina	Hulu Sungai Tengah	3 Orang/Kelompok	2.830.000		3 Orang/Kelompok	100.850.000
					Jumlah perorangan/kelompok usaha yang diberi modal		0 Orang/Kelompok			0 Orang/Kelompok	0
2	1	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus perselisihan yang dimediasi		100 %	46.220.000		100 %	100.000.000
2	1	17	2	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus perselisihan Perburuhan/HI (PHI/PHK) yang difasilitasi dan ditangani	Hulu Sungai Tengah	1 Kasus	46.220.000		1 Kasus	100.000.000
2	1	20		Program Peningkatan Keselamatan Kerja	Persentase tenaga kerja penerima upah yang menjadi peserta BPJS		93.75 %	185.760.000		93.75 %	405.000.000
2	1	20	1	Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah kepesertaan tenaga Kerja penerima upah yang menjadi peserta Jamsostek (BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan)	Hulu Sungai Tengah	3750 Orang	160.760.000		3750 Orang	135.000.000

2	1	20	3	Pembinaan Organisasi Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang ikuti sosialisasi dan faham terhadap sistem pengupahan berbasis struktur dan skala upah serta produktivitas	Hulu Sungai Tengah	100 Perusahaan	25.000.000		100 Perusahaan	135.000.000
					Jumlah perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		72 Perusahaan			72 Perusahaan	135.000.000
2	12			Penanaman Modal				1.736.900.600			2.435.827.000
2	12	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		400 %	990.720.600		100 %	1.007.327.000
2	12	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	440, 220 HOK	38.245.000		440, 220 HOK	84.326.000
2	12	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	24 Kali	241.250.600		24 Kali	20.145.000
					Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik,Air, Telepon dan Jaringan Internet		12 Bulan			12 Bulan	113.000.000
					Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		0 Buah			0 Buah	0
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	85.536.000
					Jumlah Bulan Penyedian ATK		12 Bulan			12 Bulan	60.000.000
					Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	40.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		1080 Eksampler			1080 Eksampler	4.320.000
2	12	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	120, 50, 20 OH	213.465.000		120, 50, 20 OH	150.000.000
2	12	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi	Hulu Sungai Tengah	26 OB	497.760.000		25 OB	450.000.000
2	12	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		20 %	207.680.000		20 %	690.000.000
2	12	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitasi gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	89.750.000		0 Unit	0
2	12	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	77.930.000		0 Unit	0

					Jumlah unit yang dipelihara		5 Unit			5 Unit	75.000.000
					Jumlah unit peralatan yang dibeli		1 Jenis			3 Jenis	100.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		1 Jenis			2 Jenis	50.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		2 Jenis			2 Jenis	10.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		0 Buah			0 Buah	0
2	12	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	3,11 buah	40.000.000		3,11 buah	55.000.000
					Jumlah mobil/R2 yang dibeli		0 Buah			1 Buah	400.000.000
2	12	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin kerja/pelayanan aparatur		40 %	12.500.000		20 %	30.000.000
2	12	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Jenis Seragam Khusus Layanan	Hulu Sungai Tengah	2/50 Jenis/Stel	12.500.000		2/50 Jenis/Stel	30.000.000
2	12	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		20 %	54.000.000		20 %	120.000.000
2	12	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti dan faham materi bimtek/diklat	Hulu Sungai Tengah	12 Orang	54.000.000		12 Orang	120.000.000
2	12	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyampaian dokumen penganggaran, keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		400 %	23.250.000		100 %	31.500.000
2	12	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	9 Dokumen	23.250.000		9 Dokumen	31.500.000
2	12	15		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah Investor yang berinvestasi		20 Investor	101.700.000		20 Investor	102.000.000
2	12	15	1	Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah Jenis Promosi Investasi Daerah (Pariwisata, Perdagangan, Properti, Pertanian)	Hulu Sungai Tengah	2 Kegiatan	65.750.000		2 Kegiatan	55.000.000
2	12	15	3	Kegiatan Penyusunan RUPM (Rencana Umum Penanaman Modal)	Jumlah Kajian Akademis sesuai standar teknis	Hulu Sungai Tengah	0 Dokumen	21.350.000		0 Dokumen	0
					Jumlah Naskah Akademis RUPM sesuai standar teknis		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Naskah RUPM sesuai standar teknis		0 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Profil Potensi Unggulan Daerah Kabupaten HST		1 Profil			1 Profil	22.000.000

2	12	15	4	Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal Daerah	Jumlah Investor yang dilayani melalui Sistem Pelayanan Perizinan Secara Elektronik	Hulu Sungai Tengah	20 Investor	14.600.000		20 Investor	25.000.000
					Jumlah Investor Penanaman Modal yang terlayani		0 Investor			0 Investor	0
2	12	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan		0,90 %	347.050.000		0,90 %	455.000.000
2	12	18	2	Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Survei Pelayanan Perizinan	Jumlah Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat	Hulu Sungai Tengah	2 Kali Kegiatan	30.750.000		2 Kali Kegiatan	100.000.000
2	12	18	10	Kegiatan Pengembangan Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Jumlah Media Sosialisasi	Hulu Sungai Tengah	30 Buah	100.000.000		30 Buah	100.000.000
2	12	18	11	Kegiatan Pelayanan Perizinan	Jumlah Perizinan yg diterbitkan sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	750 Izin	132.400.000		750 Izin	145.000.000
					Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dilayani dengan Menggunakan Aplikasi		15 Izin			15 Izin	0
					Jumlah SDM Aparatur Pelayanan yang Mengikuti dan Lulus Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan		0 Orang			0 Orang	0
2	12	18	12	Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah Pengaduan yg diselesaikan	Hulu Sungai Tengah	5 Pengaduan	83.900.000		5 Pengaduan	110.000.000
3				Urusan Pilihan				0			0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				9.683.033.000			7.579.600.000
2	13			Kepemudaan dan Olah Raga				9.683.033.000			7.579.600.000
2	13	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 %	2.137.168.000		80 %	909.000.000
2	13	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	520 HOK	26.000.000		300 HOK	15.000.000
2	13	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	286.860.000		12 bulan	2.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, telepon, air dan internet		12 bulan			12 bulan	150.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	3.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	19.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	17.000.000
					Jumlah bahan bacaan/buku yang dibeli		1440 eksemplar			1000 eksemplar	4.000.000
2	13	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH perjalanan dinas	Hulu Sungai Tengah	418 OH	1.330.580.000		149 OH	270.000.000
2	13	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	336 OB	493.728.000		336 OB	429.000.000
2	13	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100 %	188.585.000		100 %	175.600.000
2	13	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	1 unit	30.410.000		1 unit	25.000.000

2	13	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah perlengkapan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	75.625.000		12 bulan	3.600.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		15 buah			15 buah	6.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		15 buah			15 buah	6.000.000
					Jumlah peralatan yang dibeli		19 buah			30 buah	55.000.000
2	13	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	11 unit	82.550.000		11 unit	80.000.000
2	13	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran Keuangan dan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	26.625.000		100 %	20.000.000
2	13	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	9 dokumen	26.625.000		9 dokumen	20.000.000
2	13	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif		73,91 %	835.220.000		73,91 %	1.675.000.000
2	13	16	1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Hulu Sungai Tengah	4 OKP	835.220.000		4 OKP	200.000.000
					Jumlah peserta pemuda yang terampil		50 orang			50 orang	125.000.000
					Jumlah peserta paskibraka yang terampil		45 orang			45 orang	675.000.000
2	13	16	3	Fasilitasi Akshi Bakhti Sosisal Kepemudaan	Jumlah peserta paskibraka yang terampil	Hulu Sungai Tengah	45 orang	0		45 orang	675.000.000
					Jumlah organisasi pemuda yang terlibat		0 organisasi			0 organisasi	0
2	13	16	4	Pelatihan Kepemimpinan Pemuda	Jumlah pemuda yang mampu berwirausaha	Hulu Sungai Tengah	0 orang	0		0 orang	0
2	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga		40 %	1.033.200.000		120 %	1.900.000.000
2	13	20	3	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah atlet yang terbina untuk mengikuti kompetisi olahraga	Hulu Sungai Tengah	120 orang	1.033.200.000		120 orang	950.000.000
					Jumlah atlet yang terseleksi untuk mengikuti kompetisi olahraga pada tingkat Provinsi Kalsel		120 orang			120 orang	950.000.000
2	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase kompetisi olahraga yang dilaksanakan/diikuti secara teratur		25 %	0		%	0

2	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase nomor cabang olahraga pelajar dan Olahraga Masyarakat yang meraih medali pada Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan		10 %	0		0 %	0
2	13	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase cabang olahraga yang melaksanakan kompetisi secara teratur		10 %	0		0 %	0
2	13	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Prasarana dan Sarana Olahraga Pada semua Cabang Olahraga		2 %	5.462.235.000		2 %	2.900.000.000
2	13	21	2	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Prasarana dan Sarana / fasilitas pendukung lainnya yang dibangun / direhabilitasi sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	2 buah	5.352.900.000		2 buah	2.500.000.000
2	13	21	7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Prasarana dan Sarana olahraga yang dipelihara sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	13 buah	109.335.000		13 buah	400.000.000
3				Urusan Pilihan				5.257.221.000			1.310.400.000
3	2			Pariwisata				5.257.221.000			1.310.400.000
3	2	15		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Destinasi Pariwisata yang dipasarkan		11 %	0		11 %	0
3	2	15		Program pengembangan pemasaran pariwisata	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri yang diikuti		5 event	2.845.000.000		5 event	500.000.000
3	2	15	9	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri yang diikuti	Hulu Sungai Tengah	5 event	2.845.000.000		4 event	500.000.000
3	2	15		Program pengembangan pemasaran pariwisata	pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan		11 event	0		4 event	0
3	2	16		Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase Obyek Wisata yang memenuhi Sapta Pesona		3 %	1.366.146.000		3 %	200.000.000
3	2	16	2	Peningkatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Prasarana dan Sarana yang sesuai Sapta Pesona	Hulu Sungai Tengah	3 buah	1.366.146.000		3 buah	200.000.000
3	2	16		Program pengembangan destinasi pariwisata	Prosentase Percepatan Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat		3 %	760.275.000		5 %	250.000.000
3	2	16	3	Pembinaan Pariwisata Berbasis Masyarakat	Prosentase Percepatan Pembangunan Pariwisata berbasis masyarakat	Hulu Sungai Tengah	3 %	760.275.000		5 %	250.000.000
3	2	17		Program pengembangan Kemitraan	Persentase Mitra Jasa Usaha Pariwisata yang Aktiv dan bekerjasama		120 %	285.800.000		80 %	360.400.000
3	2	17	3	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Peserta yang dapat Memahami Min 75% di Bidang Jasa Usaha Kepariwisataan	Hulu Sungai Tengah	120 orang	180.800.000		80 orang	180.200.000

3	2	17	8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Pokdarwis/HPI yang aktif	Hulu Sungai Tengah	120 Kelompok	105.000.000		80 Kelompok	180.200.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Perpustakaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				1.460.503.000			2.731.728.000
2	17			Perpustakaan				1.263.023.000			2.442.324.000
2	17	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 %	432.907.000		85 %	1.626.863.000
2	17	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	228 Kotak	10.355.000		228 Kotak	7.980.000
2	17	1	21	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	228.176.000		12 bulan	178.883.000
2	17	1	22	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	8 orang	194.376.000		8 orang	1.440.000.000
2	17	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		500 %	246.048.000		400 %	151.728.000
2	17	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 unit	37.375.000		0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			0 unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 unit			1 unit	39.575.000
2	17	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	6 buah	162.403.000		6 buah	52.500.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		10 jenis			10 jenis	3.003.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		2 jenis			2 jenis	8.400.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		0 unit			0 unit	0
2	17	2	50	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 buah	46.270.000		0 buah	0
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		7 buah			7 buah	48.250.000

2	17	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	6.650.000		100 %	4.500.000
2	17	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	7 dokumen	6.650.000		7 dokumen	4.500.000
2	17	15		Program pengembangan minat dan budaya baca	Persentasi Peningkatan Pengunjung Menjadi anggota		25 persen	201.263.000		25 persen	265.463.000
2	17	15	1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untutk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Layanan perpustakaan	Hulu Sungai Tengah	8 jenis	114.725.000		8 jenis	138.000.000
					Jenis Publikasi dan Sosialisasi		3 jenis			3 jenis	38.000.000
2	17	15	2	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Peserta Lomba	Hulu Sungai Tengah	136 Peserta	86.538.000		136 Peserta	89.463.000
2	17	15		Program pengembangan minat dan budaya baca	Persentasi Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka		7 persen	348.010.000		7 persen	345.760.000
2	17	15	11	Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Hulu Sungai Tengah	1000 judul	348.010.000		1000 judul	325.000.000
					Jumlah koleksi yang siap dilayankan		5000 eksampler			5000 eksampler	20.760.000
2	17	18		Program Peningkatan Akses Perpustakaan	Meningkatnya persentasi Perpustakaan yang aktif		34 persen	28.145.000		34 persen	48.010.000
2	17	18	1	Pembinaan dan Pengembangan perpustakaan	Jumlah perpustakaan yang aktif	Hulu Sungai Tengah	30 perpustakaan	28.145.000		30 perpustakaan	48.010.000
2	18			Kearsipan				197.480.000			289.404.000
2	18	19		Program Perbaikan Pengelolaan Kearsipan	Persentase PD yang melaksanakan arsip dinamis		41,6 %	160.980.000		41,6 %	205.780.000
2	18	19	1	Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Jumlah Jenis Sarana Penyimpan arsip dinamis	Hulu Sungai Tengah	2 Jenis	160.980.000		2 Jenis	61.600.000
					Jumlah PD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis		6 PD			6 PD	86.400.000
					Jumlah PD yang diaudit		6 PD			6 PD	29.780.000
					Jumlah Peserta Sosialisasi yang memahami pengelolaan kearsipan		80 Org			80 Org	28.000.000
2	18	19		Program Perbaikan Pengelolaan Kearsipan	Persentase peningkatan khasanah arsip statis di LKD		45 %	5.000.000		45 %	53.624.000
2	18	19	2	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Khasanah Arsip statis di LKD	Hulu Sungai Tengah	220 Dokumen	5.000.000		220 Dokumen	53.624.000

2	18	19		Program Perbaikan Pengelolaan Kearsipan	Persentase arsip yang dapat diakses melalui aplikasi JIKN		45 %	31.500.000		45 %	30.000.000
2	18	19	3	Penyediaan Layanan Informasi Arsip Melalui Aplikasi JIKN	Jumlah arsip yang dapat diakses melalui aplikasi JIKN	Hulu Sungai Tengah	310 Dokumen	31.500.000		310 Dokumen	30.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
3				Urusan Pilihan				16.383.676.835			20.716.575.434
3	3			Pertanian				16.383.676.835			20.716.575.434
3	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	2.973.649.000		100 %	3.989.029.000
3	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang Disediakan	Hulu Sungai Tengah	7872 HOK	105.700.000		78986 HOK	438.150.000
3	3	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat	Hulu Sungai Tengah	40 0	362.073.000		0 0	254.940.000
					Jumlah Bulan Pembayaran Rekening Listrik, Air, Telepon dan Internet		12 Bulan			12 Bulan	154.750.000
					Jumlah Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disewa		0 0			0 0	520.000.000
					Jumlah Bulan Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	638.589.000
					Jumlah Bulan Penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	109.000.000

					Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	13.000.000
					Jumlah Bahan Bacaan dan Buku yang Dibeli		2196 Eksamplar			2160 Eksamplar	10.800.000
3	3	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	490 OH	1.078.800.000		490 OH	606.000.000
3	3	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi	Hulu Sungai Tengah	82 Orang	1.427.076.000		82 Orang	1.243.800.000
3	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	358.100.000		100 %	1.035.000.000
3	3	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Fasilitas Gedung yang Dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	36.000.000		3 Unit	450.000.000
					Jumlah Unit yang Dipelihara		16 Unit			16 Unit	65.000.000
3	3	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah Unit Peralatan Yang Dibeli	Hulu Sungai Tengah	45 Unit	228.400.000		10 Unit	520.000.000
					Jumlah Perlengkapan yang Dibeli		140 Unit			0 Unit	0
					Jumlah Peralatan yang Dipelihara		227 Buah			0 Buah	0
					Jumlah Perlengkapan yang Dipelihara		0 Buah			0 Buah	0
3	3	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang Dibeli	Hulu Sungai Tengah	2 Unit	93.700.000		0 Unit	0
					Jumlah Mobil / R2 yang Dipelihara		5 Buah			0 Buah	0

3	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyampaian Dokumen Penganggaran ,Keuangan dan Kinerja yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standart		100 %	44.300.000		100 %	25.000.000
3	3	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun	Hulu Sungai Tengah	7 Dokumen	44.300.000		7 Dokumen	25.000.000
3	3	19		Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	% Produktivitas Perkebunan		0.4;0,5;1.5;1.0;0.3;0 %	858.745.000		0,4;0,5;1,5;1,0;0,3;0 %	937.616.000
3	3	19	14	Penanganan OPT	Jumlah Luas Areal Penanganan OPT	Hulu Sungai Tengah	150 Ha	186.065.000		100 Ha	77.616.000
					Jumlah Petani yang Mengadopsi Teknologi		50 Orang			50 Orang	0
3	3	19	20	Kegiatan Pengadaan Sarana Perkebunan	Jumlah Alat Mesin Perkebunan	Hulu Sungai Tengah	34 Buah	672.680.000		43 Buah	860.000.000
					Jumlah Pembeku Lateks		1000 Liter			100 Liter	0
					Panjang Jalan Produksi Perkebunan		3 Km			3 Km	0
3	3	26		Program Peningkatan Produksi TPH	Luas Panen TPH		57742; 1327; 664; 118; 67; 8; 660 Hektar	7.235.103.334		53.650;1.256;618;118;67;8;660 Hektar	6.880.000.000
3	3	26	1	Kegiatan Pengembangan TPH	Jumlah Bantuan Benih TPH yang Disalurkan (Benih Padi)	Hulu Sungai Tengah	10000 Kg	669.383.334		10000 Kg	600.000.000

					Jumlah Bantuan Benih TPH yang Disalurkan (Benih Sayuran)		100 Bungkus			100 Bungkus	0
					Jumlah Bantuan Bibit TPH yang Disalurkan (Bibit Jeruk)		2200 Batang			2200 Batang	100.000.000
					Jumlah Bantuan Bibit TPH yang Disalurkan (Bibit Durian)		1000 Batang			1000 Batang	0
					Jumlah Batuan Pupuk yang Disalurkan		36790 Kg			2500 Kg	30.000.000
3	3	26	10	Kegiatan Fasilitasi AUTP	Jumlah Usaha Tani yang Berasuransi	Hulu Sungai Tengah	4500 Ha	21.000.000		4500 Ha	250.000.000
3	3	26	11	Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air	Jumlah luas lahan sawah yang dioptimalkan		100 Ha	678.240.000		100 Ha	700.000.000
3	3	26	13	Kegiatan Pengadaan Sarana TPH	Jumlah Alat Mesin TPH yang disalurkan	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	757.580.000		0 Unit	0
3	3	26	14	Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Infrastruktur TPH	Jumlah Infrastruktur TPH yang Dibangun / Direhabilitasi	Hulu Sungai Tengah	20 Buah	5.108.900.000		20 Buah	5.200.000.000
3	3	26		Program Peningkatan Produksi TPH	Produktivitas TPH		52,00; 40,15; 13,13; 84,70; 17,45; 75,40; 148,24 Ku/Ha	988.642.001		52,00;40,15;13,13;84,70;17,45;75,40;148,24 Ku/Ha	1.215.224.100
3	3	26	6	Kegiatan Penyediaan Benih Bermutu TPH	Jumlah Bibit dan Benih Bersertifikat yang Dihasilkan dari UPTD	Hulu Sungai Tengah	25,65 ton Ton	217.467.501		25,65 ton Ton	370.400.000
3	3	26	7	Kegiatan Perlindungan TPH	Jumlah Pestisida yang Diadakan		2673 Botol/Liter/Kg	381.744.500		2673 Botol/Liter/Kg	392.221.800

					Jumlah Luas Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman		2500 Ha			2500 Ha	0
3	3	26	9	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyaluran Pupuk Bersubsidi	Jumlah Serapan Pupuk Bersubsidi	Hulu Sungai Tengah	10000 Ton	315.500.000		10000 Ton	350.000.000
3	3	26	12	Kegiatan Penangkaran TPH	Jumlah Bantuan Saprodi yang Disalurkan Kepada Penangkar	Hulu Sungai Tengah	378 Kg/Botol/Liter	73.930.000		378 Kg/Botol/Liter	102.602.300
3	3	26		Program Peningkatan Produksi TPH	Luas Tanam dengan Indeks Pertanaman > 200		11304 Hektar	0		56.199 Hektar	0
3	3	35		Program Pengembangan Komoditas Perkebunan	Jumlah Luas Tanaman Yang Menghasilkan		17.160;4.500;560;100;265;355;20 Ha	425.180.000		17.160;4.500;560;100;265;355;20 Ha	1.060.625.000
3	3	35	8	Kegiatan Pengembangan Komoditas Perkebunan	Jumlah Bibit Perkebunan yang Disalurkan	Hulu Sungai Tengah	22000 Batang	425.180.000		2250;1500;25000;5000;1500;10500 Batang	1.060.625.000
					Jumlah Pupuk dan Pestisida yang Disalurkan		22096 Kg/Liter			22096 Kg/Liter	0
3	3	39		Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	% Kelompok yang Meningkat Skornya		30 %	153.755.000		30 %	210.500.000
3	3	39	1	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Kelembagaan Petani	Jumlah Kelompok yang Dilatih	Hulu Sungai Tengah	35 Kelompok	153.755.000		35 Kelompok	210.500.000
3	3	39		Program Peningkatan Kualitas SDM Pertanian	% Peningkatan Skor Kinerja Penyuluh Pertanian		5 %	1.292.240.000		5 %	292.700.000
3	3	39	2	Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Ketenagaan Penyuluh Pertanian	Jumlah RKP dan Programa yang Tersusun	Hulu Sungai Tengah	150 RKP	200.940.000		150 RKP	292.700.000

					Jumlah Media Informasi Pertanian		0 0			0 0	0
					Jumlah Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh yang Difasilitasi		0 Unit/Penyuluh			0 Unit/Penyuluh	0
3	3	39	3	Integrated Participatory Development adn Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Terekrutnya Staf Lapangan	Hulu Sungai Tengah	- Orang	1.091.300.000		- Orang	0
					Terlaksananya pelatihan penyuluh swadaya		- Kali			- Kali	0
					Terlaksananya Sekolah Lapang (SL)		- Lokasi			- Lokasi	0
					Terfasilitasinya buku pencatatan petani		- Buah			- Buah	0
					Terlaksananya form berbagi pengalaman petani		- Kali			- Kali	0
					Terlaksananya kunjungan antar daerah		- Kali			- Kali	0
					Terlaksananya pertemuan bulanan mereview pelaksanaan penyuluhan		- Paket			- Paket	0
					Pemberian penghargaan penyuluh		- Orang			- Orang	0
					Pemberian penghargaan petani		- Paket			- Paket	0

					Tersedianya tempat penyimpanan benih di lapangan		- Buah			- Buah	0
					Terlaksananya demonstrasi alsintan		- Paket			- Paket	0
					Terlaksananya demonstrasi		- Paket			- Paket	0
					Terlaksananya Pemetaan awal value chain		- Paket			- Paket	0
					Terlaksananya validasi value chain		- Paket			- Paket	0
					Terfasilitasinya value chain		- Paket			- Paket	0
3	3	40		Program Peningkatan Sarana Pengolahan dan Pemasaran	Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Pertanian		25 Kelompok	198.810.000		44 Kelompok	2.440.881.334
3	3	40	1	Kegiatan Penanganan Pasca Produk Pertanian	Jumlah Alat Pengolahan dan Pengemasan Produk Pertanian	Hulu Sungai Tengah	7 Unit	81.310.000		10 Unit	2.226.697.334
3	3	40	2	Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Produk Pertanian	Jumlah Peserta yan Dilatih	Hulu Sungai Tengah	240 Orang	117.500.000		240 Orang	214.184.000
					Jumlah Produk Olahan yang Dipromosikan		6 Event			5 Event	0
3	3	41		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	% Peningkatan Populasi Ternak		2.5/10 %	1.563.325.000		2.5/10 %	2.380.000.000
3	3	41	1	Pembibitan dan Produksi Ternak	Jumlah Bibit Ternak yang Disalurkan	Hulu Sungai Tengah	7566 Ekor	932.610.000		10130 Ekor	1.750.000.000
					Jumlah Strow dan N2 Cair		0 0			0 0	0

					Jumlah Pemotongan Ternak yang Terawasi		850 Ekor			850 Ekor	85.000.000
3	3	41	2	Pembangunan / Pemeliharaan/ Pengadaan Prasarana dan Sarana Peternakan	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi / Pengadaan Sarana Produksi Peternakan	Hulu Sungai Tengah	2 Unit	630.715.000		2 Unit	250.000.000
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan		3 Unit			3 Unit	120.000.000
					Jumlah Pembuatan Instalasi Bio-Urine, Pakan Ternak dan Komposter		3 Unit			3 Unit	175.000.000
3	3	41		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	% Penurunan Angka Kematian Ternak		5 %	291.827.500		5 %	250.000.000
3	3	41	3	Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah Pengendalian Penyakit Hewan Menular	Hulu Sungai Tengah	25 Jenis	232.600.000		25 Jenis	85.000.000
					Jumlah Penanganan dan Pengendalian Kasus Endemik		8500 Ekor			8500 Ekor	150.000.000
3	3	41	4	Peningkatan Kualitas Pakan Ternak	Jumlah Pakan Ternak dan Pengolahan Pakan Ternak	Hulu Sungai Tengah	220 Ton	59.227.500		220 Ton	15.000.000
3	3	41		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Ternak	% peningkatan produktivitas ternak		2.5 %	0		0 %	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Dinas Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
2				Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar				94.863.100			410.370.000
2	11			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				94.863.100			410.370.000
2	11	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	Jumlah MoU dengan distributor yang dilaksanakan		50 MoU	47.798.500		50 MoU	238.370.000
2	11	15	8	Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pengusaha UKM yang mengikuti sosialisasi	Hulu Sungai Tengah	50 UKM	31.328.500		50 UKM	25.000.000
					Jumlah UKM yang dilatih		110 Orang			110 Orang	47.495.000
					Jumlah UKM yang dimoneva		180 UKM			180 UKM	28.380.000
2	11	15	12	Pengembangan Pasar Produk UKM	Jumlah UKM Yang difasilitasi untuk menjalin kemitraan	Hulu Sungai Tengah	4 UKM	16.470.000		4 UKM	75.000.000
					Jumlah UKM yang difasilitasi mendapat permodalan		50 UKM			50 UKM	12.495.000
					Jumlah UKM yang difasilitasi menjadi badan usaha		8 UKM			8 UKM	50.000.000
2	11	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentasi Pertumbuhan Omset (rata-rata)		4,5 %	0		4,5 %	0
2	11	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentasi peningkatan laba UKM (rata-rata)		4,5 %	0		4,5 %	0
2	11	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	Persentasi produk UKM yang dipasarkan		95 %	0		95 %	0
2	11	15		Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro Kecil Menengah Yang Kondusif	% Pertumbuhan pelaku usaha UKM		21 UKM	0		21 UKM	0
2	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan SDM Koperasi	Jumlah koperasi aktif		66 koperasi	47.064.600		66 koperasi	172.000.000
2	11	18	18	Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian	Jumlah pengurus koperasi yang dilatih	Hulu Sungai Tengah	120 orang	47.064.600		120 orang	100.000.000

					Jumlah koperasi yang terbentuk		1 koperasi			1 koperasi	18.000.000
					Jumlah koperasi yang melakukan RAT		65 Koperasi			65 Koperasi	34.000.000
					Jumlah koperasi yang dilakukan Moniva dan pelaporan		60 Koperasi			60 Koperasi	20.000.000
2	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan SDM Koperasi	Jumlah pengurus yang bersertifikat & kompeten		120 Orang	0		120 Orang	0
2	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan SDM Koperasi	Meningkatnya SHU		27595322200 Rupiah	0		27595322200 Rupiah	0
3				Urusan Pilihan				11.123.892.960			19.832.967.762
3	6			Perdagangan				10.342.890.960			18.457.967.762
3	6	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	1.565.161.360		100 %	1.562.045.972
3	6	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK makan minum harian, Jumlah HOK Rapat dan Tamu	Hulu Sungai Tengah	650 HOK	42.500.000		650 HOK	139.920.000
3	6	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 Bulan	232.859.360		12 Bulan	6.360.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening air, listrik, telpon dan internit		12 Bulan			12 Bulan	165.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	52.500.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	41.906.200
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			1212 Bulan	23.059.772
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		730 eksemplar			730 eksemplar	4.500.000
3	6	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Terlaksananya perjalanan dinas	Hulu Sungai Tengah	2886 OH	337.350.000		650 OH	264.200.000
3	6	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	55 Orang	952.452.000		55 Orang	864.600.000
3	6	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	214.079.600		100 %	226.401.250

3	6	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	5 Buah	50.000.000		5 Buah	84.075.000
3	6	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	50 Buah	98.669.600		50 Buah	21.440.000
					Jumlah unit peralatan yang dibeli		5 Buah			5 Buah	50.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		97 Buah			97 Buah	6.000.000
3	6	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	30 Buah	65.410.000		30 Buah	64.886.250
3	6	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentasi Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	32.250.000		100 %	30.000.000
3	6	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	8 Dokumen	32.250.000		8 Dokumen	30.000.000
3	6	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	% Temuan UTTP yang tidak benar (barang aman)		30 %	28.900.000		30 %	307.528.040
3	6	15	3	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah rekomendasi Tera ulang yang diterbitkan	Hulu Sungai Tengah	4 rekomendasi	28.900.000		4 rekomendasi	32.476.400
					Jumlah peserta sosialisasi pedagang pengguna UTTP		250 Orang			250 Orang	124.800.000
					Jumlah pelaksanaan Monitoring produk kadaluarsa		48 Kali			48 Kali	150.251.640
3	6	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentasi barang yang beredar sesuai standar		95 %	0		95 %	0
3	6	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Jumlah omset produk yang dijual keluar daerah		375.000.000.000 Rupiah	540.100.000		375.000.000.000 Rupiah	850.300.000
3	6	17	14	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah peserta yang mengikuti pameran	Hulu Sungai Tengah	100 Pelaku Usaha	540.100.000		100 Pelaku Usaha	600.300.000
					Jumlah produk yang difasilitasi pemasaran dan distribusinya		10 Produk			10 Produk	150.000.000
					Jumlah pelaksanaan monitoring harga		48 Kali			48 Kali	100.000.000

3	6	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Jumlah omset pameran		30000000000 Rupiah	0		30000000000 Rupiah	0
3	6	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Persentasi kebutuhan pokok dengan harga yang stabil		95 %	0		95 %	0
3	6	20		Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Persentase Pasar Sehat		95 %	7.460.000.000		95 %	15.045.000.000
3	6	20	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar	Jumlah pasar yang dibangun dan direhabilitasi	Hulu Sungai Tengah	4 Pasar	7.460.000.000		4 Pasar	15.000.000.000
					Jumlah sarana dan prasarana pasar yang terpelihara dengan baik		13 Pasar			13 Pasar	45.000.000
3	6	20		Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Persentasi pedagang yang taat terhadap aturan		95 %	502.400.000		95 %	436.692.500
3	6	20	7	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Luas Pasar yang ditata sesuai zonasi	Hulu Sungai Tengah	13 Kawasan/Pasar	502.400.000		13 Kawasan/Pasar	312.402.300
					Jumlah nominal retribusi pasar dan fasilitas umum yang terpungut		1544216575 Rupiah			1544216575 Rupiah	100.000.000
					Jumlah pedagang yang paham terhadap tata tertib pasar		100 Orang			100 Orang	24.290.200
3	6	20		Program Pemberdayaan dan Revitalisasi Pasar	Persentasi pedagang yang tertampung		95 %	0		95 %	0
3	7			Perindustrian				781.002.000			1.375.000.000
3	7	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah IKM baru		720 IKM	781.002.000		720 IKM	1.375.000.000
3	7	16	13	Pembinaan IKM Agro	Jumlah produk yang mendapat sertifikat	Hulu Sungai Tengah	4 Sertifikat	166.178.000		4 Sertifikat	50.000.000
					Jumlah klaster IKM agro yang terbentuk		4 Klaster			4 Klaster	150.000.000
					Jumlah IKM yang difasilitasi kemitraan		25 IKM			25 IKM	75.000.000
					Pengrajin yang dilatih		40 IKM			40 IKM	150.000.000
3	7	16	14	Pembinaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi	Jumlah klaster IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi yang terbentuk	Hulu Sungai Tengah	4 Klaster	277.551.500		4 Klaster	150.000.000
					Jumlah IKM yang difasilitasi kemitraan		25 IKM			25 IKM	75.000.000
					Pengrajin yang dilatih		40 IKM			40 IKM	200.000.000

3	7	16	15	Pembinaan IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka	Jumlah klaster IKM Industri Kimia, Tekstil dan Aneka yang terbentuk	Hulu Sungai Tengah	4 Klaster	261.072.500		4 Klaster	150.000.000
					Jumlah IKM yang difasilitasi kemitraan		25 IKM			25 IKM	75.000.000
					Pengrajin yang dilatih		40 IKM			40 IKM	200.000.000
3	7	16	16	Penyertaan dan partisipasi dalam pameran Industri Kecil Menengah	Jumlah produk unggulan IKM yang dipromosikan	Hulu Sungai Tengah	30 Produk	76.200.000		30 Produk	100.000.000
3	7	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentasi sentra industri potensial		12,84 %	0		12,84 %	0
3	7	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah peningkatan jenis produk IKM		10,74 %	0		10,74 %	0
3	7	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah peningkatan volume produksi		39,47 %	0		39,47 %	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Sekretariat Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				54.871.803.084			47.860.473.366
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				54.871.803.084			47.860.473.366
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	12.553.038.275		100 %	12.990.125.920
4	1	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Hulu Sungai Tengah	5689 buah/set	602.000.000		5686 buah/set	375.650.000
4	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Persentase penyediaan jasa administrasi keuangan	Hulu Sungai Tengah	100 %	1.800.000		100 %	64.154.200
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	155.400.000		12 bulan	520.388.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan layanan jasa surat menyurat	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	8.489.790.400		12 bulan	74.137.800
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			12 bulan	8.213.943.980
					Jumlah bulan penyediaan jasa, alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	678.645.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	175.818.940
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	82.588.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah bulan layanan perjalanan dinas	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	2.542.671.875		12 bulan	2.200.000.000

4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	33 orang	761.376.000		35 orang	604.800.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai		100 %	15.315.357.000		100 %	10.111.182.150
4	1	2	40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah rumah/fasilitas rumah jabatan yang direhabilitasi	Hulu Sungai Tengah	1 Unit	955.000.000		1 Unit	2.000.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 unit	6.439.750.000		1 unit	1.000.000.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		1 unit			1 unit	2.400.000.000
					Jumlah unit gedung yang dipelihara		8 unit			8 unit	214.956.500
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah gedung kantor yang diadakan peralatannya	Hulu Sungai Tengah	1 unit	1.451.532.000		1 unit	1.250.000.000
					Jumlah gedung kantor yang diadakan perlengkapannya		1 unit			1 unit	500.000.000
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara perlengkapannya		8 unit			8 unit	399.269.200
					Jumlah gedung kantor yang dipelihara peralatannya		8 unit			8 unit	250.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 unit	51.500.000		0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			0 unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 unit			1 unit	51.500.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 unit	23.000.000		0 unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		0 unit			0 unit	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		1 kelompok item			1 kelompok item	11.500.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		1 kelompok item			1 kelompok item	11.500.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/kendaraan roda 2 (dua) yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	16 unit	5.725.475.000		1 unit	300.000.000

					Jumlah mobil/kendaraan roda 2 (dua) yang dipelihara		85 unit			87 unit	990.186.450
4	1	2	50	Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 unit	669.100.000		0 unit	0
					Jumlah mobil yang dipelihara		11 unit			11 unit	732.270.000
4	1	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan dalam berpakaian dinas sesuai ketentuan		100 %	227.550.000		100 %	323.187.500
4	1	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan sesuai ketentuan	Hulu Sungai Tengah	8 Stel	26.500.000		5 Stel	20.000.000
4	1	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah bahan kain untuk pakaian khusus	Hulu Sungai Tengah	700 lembar	201.050.000		700 lembar	303.187.500
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan sesuai standart dan tepat waktu		100 %	13.835.000		100 %	10.338.350
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	9 dokumen	13.835.000		9 dokumen	10.338.350
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP perangkat daerah		BB predikat	0		BB predikat	0
4	1	27		Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang disusun sesuai ketentuan		100 %	135.140.000		100 %	55.000.000
4	1	27	6	Penyusunan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah produk hukum daerah tentang kelembagaan	Hulu Sungai Tengah	2 dokumen	135.140.000		2 dokumen	55.000.000
4	1	27		Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dapat menerapkan analisis jabatan sesuai aturan		100 %	148.440.000		100 %	82.500.000
4	1	27	7	Penerapan Manajemen Jabatan	Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan analisis jabatan	Hulu Sungai Tengah	37 perangkat daerah	148.440.000		37 perangkat daerah	27.500.000
					Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan analisis beban kerja		37 perangkat daerah			37 perangkat daerah	27.500.000
					Jumlah Perangkat Daerah yang terfasilitasi penerapan evaluasi jabatan		37 perangkat daerah			37 perangkat daerah	27.500.000

4	1	27		Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dapat menerapkan analisis beban kerja sesuai aturan		100 %	0		100 %	0
4	1	27		Program Pembinaan dan Pengaturan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dapat menerapkan evaluasi jabatan sesuai aturan		100 %	0		100 %	0
4	1	29		Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian	Persentase penyelesaian permasalahan bidang ekonomi yang difasilitasi		100 %	277.940.000		100 %	192.500.000
4	1	29	1	Penyusunan Kebijakan Tentang Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen draft kajian tentang bidang ekonomi	Hulu Sungai Tengah	1 dokumen	277.940.000		1 dokumen	82.500.000
					Frekuensi rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan bidang ekonomi		4 kali			4 kali	110.000.000
4	1	29		Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian	Persentase hasil kajian yang dilaksanakan		100 %	0		100 %	0
4	1	29		Program koordinasi Penyusunan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Perbub standar satuan harga Kab. HST yang terbit		2 dokumen	161.340.000		2 dokumen	156.838.000
4	1	29	3	Penyusunan Standar Satuan Harga	Jumlah SKPD yang mengumpulkan bahan penyusunan standar satuan harga Kab.HST sesuai kebutuhan SKPD	Hulu Sungai Tengah	26 SKPD	161.340.000		26 SKPD	78.419.000
					Jumlah koordinasi dalam mempersiapkan bahan penyusunan standar satuan harga Kab.HST		4 kali			4 kali	78.419.000
4	1	30		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Hasil survey tingkat kepuasan terhadap pelayanan produk hukum daerah		Tinggi predikat	199.640.000		Tinggi predikat	650.000.000
4	1	30	1	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pelayanan telaahan hukum yang diberikan sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	12,30,250 raperda, perbup, kebup	94.060.000		12,30,250 raperda, perbup, kebup	210.000.000
4	1	30	10	Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia secara elektronik	Hulu Sungai Tengah	12,30,250 perda, perbup, kebup	105.580.000		12,30,250 perda, perbup, kebup	165.000.000
					Jumlah dokumentasi dan informasi produk hukum daerah yang tersedia dalam bentuk buku		625 buku			625 buku	165.000.000
					Persentase peserta sosialisasi yang paham		50 %			50 %	110.000.000

4	1	31		Program Peningkatan Bantuan Hukum	Persentase penanganan kasus/sengketa/ perkara hukum dengan bantuan hukum		100 %	134.350.000		100 %	120.000.000
4	1	31	2	Konsultasi dan Advokasi Hukum	Jumlah kasus/sengketa/perkara hukum yang ditangani	Hulu Sungai Tengah	3 kasus/sengketa/perkara hukum	134.350.000		3 kasus/sengketa/perkara hukum	120.000.000
4	1	32		Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pertemuan keagamaan yang dilaksanakan		100 %	3.726.836.068		100 %	2.758.411.556
4	1	32	1	Bina Mental Keagamaan	Jumlah pertemuan ulama dan umara yang dilaksanakan	Hulu Sungai Tengah	2 pertemuan	1.508.606.668		2 pertemuan	903.086.800
					Jumlah pertemuan bina mental keagamaan yang dilaksanakan		26 pertemuan			26 pertemuan	1.380.932.931
4	1	32	5	Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama serta Pengembangan Syiar-Syiar Agama.	Jumlah kegiatan syiar-syiar keagamaan yang dilaksanakan	Hulu Sungai Tengah	144 kali	2.218.229.400		144 kali	474.391.825
4	1	32		Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hibah yang disalurkan sesuai aturan dan tepat sasaran		100 %	30.560.000		100 %	33.744.700
4	1	32	4	Koordinasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Keagamaan	Jumlah penerima bantuan hibah yang dimonitoring	Hulu Sungai Tengah	27 penerima	30.560.000		27 penerima	33.744.700
4	1	32		Program Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penerima hibah yang melaporkan pertanggungjawaban tepat waktu		100 %	0		100 %	0
4	1	35		Program Peningkatan dan Pengembangan SDM	Persentase mahasiswa/santri yang menerima beasiswa		100 %	1.763.030.000		100 %	291.525.000
4	1	35	1	Pemberian Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Tinggi	Jumlah mahasiswa/santri yang menerima bantuan beasiswa	Hulu Sungai Tengah	5 orang	1.763.030.000		5 orang	291.525.000
4	1	36		Program Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Daerah	Persentase regulasi BUMD yang dibuat		100 %	198.012.900		100 %	184.902.190
4	1	36	1	Pengembangan BUMD	Jumlah draft regulasi BUMD	Hulu Sungai Tengah	2 dokumen	198.012.900		2 dokumen	184.902.190
4	1	40		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah segmen batas desa yang disepakati		200 segmen	295.840.000		200 segmen	487.967.000
4	1	40	9	Pemetaan dan Penegasan Batas Wilayah	Jumlah segmen batas desa yang dilacak	Hulu Sungai Tengah	200 segmen	295.840.000		200 segmen	286.915.000

					Jumlah segmen batas kabupaten yang dilacak		1 segmen			0 segmen	129.052.000
					Jumlah survey toponimi		50 kali			50 kali	72.000.000
4	1	40		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah kecamatan yang dibakukan toponiminya		2 kecamatan	0		2 kecamatan	0
4	1	40		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah segmen batas kabupaten yang disepakati		1 segmen	0		0 segmen	0
4	1	43		Program Pembinaan Ketatalaksanaan Perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen Standar Pelayanan Publik		81 %	109.580.000		81 %	165.000.000
4	1	43	9	Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Perangkat daerah yang dibina dalam penerapan Standar Pelayanan Publik	Hulu Sungai Tengah	37 Perangkat Daerah	109.580.000		37 Perangkat Daerah	165.000.000
					Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun SOP		20 SKPD			20 SKPD	0
4	1	44		Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi,dokumentasi kehumasan	Persentase pelayanan kehumasan yang sesuai standar		100 %	381.125.000		100 %	432.300.000
4	1	44	1	Dokumentasi kebijakan keberhasilan pembangunan	Jumlah pelayanan kehumasan sesuai SOP	Hulu Sungai Tengah	9 pelayanan	381.125.000		260 pelayanan	432.300.000
4	1	45		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase informasi publik yang disebarluaskan melalui media cetak/elektronik		100 %	2.199.875.000		100 %	2.178.000.000
4	1	45	1	Penyebarluasan informasi publik	Jumlah berita daerah yang disusun sesuai standar	Hulu Sungai Tengah	9908 berita daerah	2.199.875.000		9908 berita daerah	2.178.000.000
4	1	46		Program pelayanan Keprotokolan	Persentase pelayanan keprotokolan		100 %	4.268.613.000		100 %	4.604.908.000
4	1	46	1	Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	Jumlah cakupan pelayan keprotokolan sesuai aturan	Hulu Sungai Tengah	2 pejabat	3.469.088.000		2 pejabat	3.698.904.000
4	1	46	2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Pimpinan	Jumlah cakupan pelayanan administrasi pimpinan sesuai aturan	Hulu Sungai Tengah	2 pejabat	799.525.000		2 pejabat	906.004.000
4	1	47		Program Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase pelayanan rumah tangga pimpinan		100 %	3.694.098.341		100 %	2.566.630.000
4	1	47	1	Peningkatan Pelayanan Rumah tangga Pimpinan dan perangkat daerah	Jumlah cakupan pelayanan rumah tangga pimpinan dan perangkat daerah yang dilayani dengan baik	Hulu Sungai Tengah	3 rumah jabatan	3.258.398.341		3 rumah jabatan	2.133.780.000
4	1	47	2	Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan	Jumlah sarana dan prasarana rumah tangga pimpinan yang dipelihara dengan baik	Hulu Sungai Tengah	3 rumah jabatan/dinas	435.700.000		3 rumah jabatan/dinas	432.850.000

4	1	48		Program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Persentase data RANHAM yang lengkap		100 %	40.120.000		100 %	33.000.000
4	1	48	1	Koordinasi RANHAM	Jumlah Laporan RANHAM yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Hulu Sungai Tengah	5 dokumen	40.120.000		5 dokumen	33.000.000
4	1	50		Program Pengendalian Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi administrasi pembangunan yang dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan		100 %	22.800.000		100 %	6.050.000
4	1	50	1	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring dan dievaluasi	Hulu Sungai Tengah	37 Perangkat Daerah	22.800.000		37 Perangkat Daerah	6.050.000
					Jumlah Perangkat Daerah yang melaporkan Realisasi Fisik dan Keuangan dengan benar		37 perangkat daerah			37 perangkat daerah	0
					Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan pembangunan		37 perangkat daerah			37 perangkat daerah	0
					Jumlah draft regulasi tentang bidang pembangunan yang telah disusun		1 dokumen			1 dokumen	0
4	1	51		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pelaksanaan pemilihan pengadaan barang/jasa melalui SPSE		100 %	44.532.300		100 %	300.000.000
4	1	51	1	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Perangkat Daerah yang didukung pada pengelolaan pengadaan barang/jasa	Hulu Sungai Tengah	37 perangkat daerah	44.532.300		37 perangkat daerah	300.000.000
4	1	51		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase berfungsinya SPSE dan layanannya		100 %	469.622.000		100 %	300.000.000
4	1	51	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Jumlah bulan kerja berfungsinya SPSE dan layanannya	Hulu Sungai Tengah	12 bulan	469.622.000		12 bulan	300.000.000
4	1	51		Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase pemenuhan kompetensi sumber daya manusia bidang PBJ		100 %	221.307.700		100 %	400.000.000
4	1	51	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah peserta sosialisasi/workshop sistem pengadaan barang/jasa	Hulu Sungai Tengah	100 orang	221.307.700		100 orang	400.000.000
					Jumlah personil UKPBJ yg memenuhi kompetensi		50 orang			50 orang	0
					Jumlah kasus PBJ yang diadvokasi		10 kasus			10 kasus	0

					Jumlah permasalahan PBJ yang dilayani		25 masalah			25 masalah	0
4	1	52		Program Peningkatan Koordinasi Kesehatan dan Olahraga	Persentase koordinasi kesehatan dan olahraga yang dilaksanakan		100 %	17.455.000		100 %	19.206.000
4	1	52	1	Koordinasi Pembinaan Kesehatan dan Olahraga	Jumlah koordinasi kesehatan dan olahraga yang difasilitasi dengan baik	Hulu Sungai Tengah	24 kali	17.455.000		24 kali	19.206.000
4	1	53		Program Pelayanan Pendidikan tinggi	Persentase Kerukunan Mahasiswa Murakata Putera dan Puteri di luar daerah yang terlayani.		100 %	7.365.680.000		100 %	7.556.846.000
4	1	53	1	Pembangunan /Rehabilitasi Asrama Mahasiswa di Luar Daerah	Jumlah asrama yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 unit	7.365.680.000		1 unit	5.356.846.000
					Jumlah asrama yang direhabilitasi		1 unit			1 unit	2.000.000.000
					Jumlah asrama yang disewa		2 unit			2 unit	200.000.000
4	1	54		Program Pembinaan Bidang Pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C)	Persentase fasilitasi pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang dibina untuk memiliki izin usaha		40 %	13.062.500		40 %	122.333.200
4	1	54	1	Pembinaan Bidang Pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C)	Jumlah dokumen tentang pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C)	Hulu Sungai Tengah	0 dokumen	13.062.500		0 dokumen	0
					Jumlah pelaku usaha di bidang pertambangan sumber daya alam mineral bukan logam dan batuan (galian C) yang menjadi peserta sosialisasi		66 orang			66 orang	122.333.200
4	1	55		Program Peningkatan Penerapan SAKIP	Persentase nilai SAKIP Perangkat Daerah rata-rata baik		80 %	345.260.000		80 %	408.650.000
4	1	55	1	Peningkatan Implementasi SAKIP	Jumlah laporan kinerja Pemda yang sesuai aturan	Hulu Sungai Tengah	1 dokumen	345.260.000		1 dokumen	408.650.000
					Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dokumen kinerja lengkap		37 perangkat daerah			37 perangkat daerah	0
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan data LPPD secara lengkap		100 %	94.908.000		100 %	100.020.800

4	1	56	1	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LPPD	Hulu Sungai Tengah	37 perangkat daerah	94.908.000		37 perangkat daerah	100.020.800
					Jumlah Perangkat Daerah yang diasistensi data LKPJ		37 perangkat daerah			37 perangkat daerah	0
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase SKPD yang menyampaikan data LKPJ secara lengkap		100 %	0		100 %	0
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase fasilitasi sengketa/konflik sosial yang ditangani		100 %	0		100 %	0
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase terlaksananya peringatan hari besar nasional dan hari besar daerah		100 %	256.375.000		100 %	112.805.000
4	1	56	3	Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Jumlah koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah	Hulu Sungai Tengah	10 kali	256.375.000		10 kali	112.805.000
					Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa/konflik sosial		2 kali			2 kali	0
					Persentase penyelesaiaan kelengkapan administrasi pejabat negara		100 %			100 %	0
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase fasilitasi administrasi pejabat negara yang diselesaikan		100 %	0		100 %	0
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kecamatan yang melaksanakan PATEN sesuai standar		100 %	46.740.000		100 %	49.852.000
4	1	56	2	Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan PATEN	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran monev atas penyelenggaraan PATEN sesuai standard	Hulu Sungai Tengah	11 kecamatan	46.740.000		11 kecamatan	49.852.000
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase kerjasama daerah yang difasilitasi		100 %	80.840.000		100 %	50.050.000
4	1	56	4	Koordinasi kerjasama daerah	Persentase dokumen kerjasama daerah yang diveryfikasi	Hulu Sungai Tengah	100 %	80.840.000		100 %	50.050.000
4	1	56		Program Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase hasil koordinasi dan monev dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditindaklanjuti		100 %	18.900.000		100 %	6.600.000
4	1	56	5	Monitoring dan pelaporan atas penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Jumlah laporan hasil monev penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Hulu Sungai Tengah	4 dokumen	18.900.000		4 dokumen	6.600.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				20.015.340.620			31.979.801.400
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				8.037.404.300			3.278.283.400
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	5.045.172.400		100 %	1.669.603.400
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang tersedia	Hulu Sungai Tengah	4950 OK	379.650.000		10000 OK	430.500.000
4	1	1	23	Penyelenggaraan Dokumentasi Berbasis Foto Cetak dan Digital	Jumlah dokumentasi berbasis foto cetak dan digital	Hulu Sungai Tengah	100 buah/lembar	57.050.000		983 buah/lembar	93.350.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	36 kali	401.057.400		36 kali	2.780.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			12 bulan	196.800.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	16.620.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	48.027.400
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	96.950.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		12960 buah			12960 buah	39.880.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	20 OH	3.572.931.000		26 OH	178.396.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Teknis dan Administrasi	Hulu Sungai Tengah	23 Orang	634.484.000		28 Orang	566.300.000

4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	2.695.166.900		100 %	1.311.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 unit	912.000.000		0 unit	912.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan	Hulu Sungai Tengah	0 unit	491.676.900		0 unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 unit			0 unit	0
					Jumlah unit peralatan yang dibeli		30 unit			38 unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		12 buah			0 buah	0
					Jumlah Peralatan yang dipelihara		20 buah			137 buah	0
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		117 buah			392 buah	0
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	1 unit	399.000.000		1 unit	399.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan	Hulu Sungai Tengah	0 unit	165.360.000		0 unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 unit			0 unit	0
					Jumlah unit peralatan yang dibeli		2 unit			2 unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		2 buah			0 buah	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		0 buah			1 buah	0
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		0 buah			1 buah	0
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	8 buah	442.730.000		0 buah	0
					Jumlah Mobil/R2 yang dipelihara		12 buah			0 buah	0
4	1	2	50	Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 buah	284.400.000		0 buah	0
					Jumlah Mobil yang dipelihara		3 buah			0 buah	0
4	1	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase disiplin dan kehadiran pegawai		100 %	272.940.000		100 %	285.680.000
4	1	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Prosentase pemenuhan penunjang disiplin aparatur	Hulu Sungai Tengah	100 %	272.940.000		100 %	285.680.000

4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentasi Penyampaian Dokumen Penganggaran,Keuangan dan Kinerja yang disampaikan Tepat Waktu dan Seuai Standar		100 %	24.125.000		100 % %	12.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Yang Disusun	Hulu Sungai Tengah	9 dokumen	24.125.000		9 dokumen	12.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan sesuai standart dan tepat waktu		100 %	0		%	0
4	8			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat DPRD)				11.977.936.320			28.701.518.000
4	8	19		Program peningkatan pelayanan Pimpinan dan anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum dan Kehumasan		80 %	4.097.990.000		1 %	5.465.285.000
4	8	19	11	Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani pemeriksaan kesehatan	Hulu Sungai Tengah	30 Orang	282.075.000		30 Orang	315.530.000
4	8	19	17	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota dprd	Jumlah Bimtek Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani	Hulu Sungai Tengah	8 kali	2.105.175.000		6 kali	3.065.775.000
4	8	19	18	Reses/Hearing/Dialog dengan Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Jumlah Reses/Hearing/Dialog DPRD yang dilayani	Hulu Sungai Tengah	12 kali	1.272.090.000		15 kali	1.307.040.000
4	8	19	19	Publikasi dan penyebaran informasi	Jumlah Materi informasi dan Publikasi yang Disebarkan	Hulu Sungai Tengah	500 buah	438.650.000		500 buah	776.940.000
4	8	24		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Persidangan dan Perundang-undangan		100 %	7.879.946.320		100 %	23.236.233.000
4	8	24	1	Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Raperda yang dilayani	Hulu Sungai Tengah	100 kali	5.535.678.320		100 kali	7.881.415.000
					Jumlah Naskah Akademis/rancangan Perda Inisiatif DPRD		3 dokumen			3 dokumen	150.000.000
					Jumlah Rancangan Keputusan Yang Difasilitasi		60 dokumen			60 dokumen	0
4	8	24	6	Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani	Hulu Sungai Tengah	16 kali	2.090.248.000		16 kali	12.574.440.000
					Jumlah Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilayani		14 OK			14 OK	0
4	8	24	14	Rapat-rapat paripurna dan Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah Rapat Paripurna dan Alat Kelengkapan DPRD yang dilayani	Hulu Sungai Tengah	100 kali	254.020.000		181 kali	2.630.378.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Barabai

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				6.956.807.010			1.853.979.271
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				913.131.000			642.961.708
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat		100% --	353.066.000		100% --	356.961.708
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang di sediakan	Kecamatan Barabai	14520 HOK OK	58.000.000		14520 HOK OK	62.867.660
					Jumlah Ketersediaan Makanan dan Minuman Rapat Internal dan Pihak Luar		1160 HOK Kotak			1160 HOK Kotak	35.157.397
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet	Kecamatan Barabai	12 bulan bulan	88.625.000		12 bulan bulan	30.459.641
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		2 kali			2 kali	10
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan bulan			12 bulan bulan	10.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan bulan			12 bulan bulan	25.977.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan bulan			12 bulan bulan	9.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		12 bulan bulan			12 bulan bulan	3.000.000
					Jumlah jasa pengiriman surat		12 bulan bulan			12 bulan bulan	500.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Barabai	240 org/hari	136.865.000		240 org/hari	150.000.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Barabai	12 bulan bulan	69.576.000		12 bulan bulan	30.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		88.140.017 --	542.165.000		88.140.017 --	252.000.000

4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Kecamatan Barabai	0 unit	32.665.000		0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		3 Unit			2 Unit	30.000.000
					jumlah unit yang dipelihara		3 Unit			2 Unit	15.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Barabai	10 Unit	91.850.000		10 Unit	10.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		20 Unit			20 Unit	10.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		20 Unit			20 Unit	40.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		25 Unit			25 Unit	10.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Kecamatan Barabai	1 Unit	17.200.000		0 Unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		2 Unit			1 Unit	15.000.000
					jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	10.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Barabai	10 Unit	35.000.000		10 Unit	10.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		12 Set set			12 Set set	12.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		10 Unit			10 Unit	5.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		10 Unit			10 Unit	4.000.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Kecamatan Barabai	2 Unit	365.450.000		2 Unit	60.000.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		20 Unit			5 Unit	20.000.000
4	1	2	50	Pengadaan dan Pemeliharaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil yang dibeli	Kecamatan Barabai	1 Unit	0		0 Unit	0
					Jumlah Mobil yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	1.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Dokumen yang disampaikan tepat waktu		7 Dokumen Dokumen	17.900.000		7 Dokumen Dokumen	34.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Barabai	7 Dokumen	17.900.000		7 Dokumen	24.000.000
					Pelaksanaan Publikasi kinerja SKPD melalui Pameran Pembangunan		1 kegiatan			1 kegiatan	10.000.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				6.043.676.010			1.211.017.563
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Prosentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan kecamatan		B %	67.886.000		B %	251.362.563
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga***	Kecamatan Barabai	15525 --	19.240.000		15525 --	2.300.000

					Jumlah Kelurahan /desa yang dilakukan Pembinaan***		18 Desa/Kelurahan kelurahan/desa			18 Desa/Kelurahan kelurahan/desa	115.762.500
					JUmlah Objek Yang Membayar PBB***		8010 --			8010 --	12.155.063
					Jumlah Ketersediaan Konsumsi Pertemuan Forum Koordinasi Kecamatan dan Lintas Sektor di Kecamatan|***		12 kali Kotak			12 kali Kotak	54.000.000
					Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan		10 desa			10 desa	0
					Jumlah Penyelenggaraan Peringatan hari Besar Nasional		34 kali			0 kali	0
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Prosentase Pelayanan Pembuatan Dokumen yg sesuai Standar***	Kecamatan Barabai	75 % %	48.646.000		75 % %	67.145.000
					Jumlah Dokumen pelayanan yg di terbitkan sesuai standar		225 Dokumen			0 Dokumen	0
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		100 % --	65.720.000		100 % --	78.000.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yg dapat melaksanakan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Hulu Sungai Tengah	12 desa	65.720.000		12 desa	18.000.000
					Jumlah desa yang pertanggungjawaban Administrasi Keuangan tertib dan tepat waktu		12 desa			12 desa	21.000.000
					Jumlah Desa yg di Evaluasi RAPBD desa		12 desa			12 desa	17.000.000
					Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan pembakal		12 desa			10 desa	22.000.000
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang		50% %	5.910.070.010		50% %	881.655.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Barabai	382 usul	61.280.000		382 usul	21.105.000
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		4 Keg			0 Keg	0
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		34 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan/Desa		16 kali			8 kali	4.000.000
					Jumlah Peserta Sosialisasi Pembangunan Desa		80 org			80 org	10.000.000
					Jumlah Kelurahan/Desa yang dinilai Perkembangannya (stimulan)		36 Desa			18 Desa	28.000.000

4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan ****	Kecamatan Barabai	0 Unit	162.960.000		0 Unit	0
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi ****		0 Keg			0 Keg	0
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar ****		34 Dokumen			0 Dokumen	0
					Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat		3 kali			0 kali	0
					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		10 even			5 even	10.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		0 Keg			0 Keg	0
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		34 Organisasi			19 Organisasi	74.550.000
4	9	19	5	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Darat	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan	Barabai Darat	34 Unit	964.384.600		16 Unit	210.000.000
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		1 Keg			0 Keg	0
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		0 Dokumen			0 Dokumen	0
4	9	19	6	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Barat	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan	Barabai Barat	0 Unit	892.434.100		0 Unit	0
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		0 Keg			0 Keg	0
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		1366 Dokumen			682 Dokumen	0
4	9	19	7	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Utara	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan	Barabai Utara	8 Unit	1.047.740.200		3 Unit	230.000.000
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		8 Keg			3 Keg	34.000.000
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		1605 Dokumen			750 Dokumen	33.000.000
4	9	19	8	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Timur	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan	Barabai Timur	0 Unit	944.822.390		0 Unit	0
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		0 Keg			0 Keg	0

					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		0 Dokumen			0 Dokumen	0
4	9	19	9	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Barabai Selatan	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan	Barabai Selatan	10 unit	937.323.790		5 unit	0
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		8 Keg			4 Keg	0
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		875 Dokumen			442 Dokumen	5.000.000
4	9	19	10	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bukat	Jumlah pembangunan/rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan	Bukat	21 Unit	899.124.930		7 Unit	130.000.000
					Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		10 KEG			4 KEG	60.000.000
					Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar		1215 Dokumen			605 Dokumen	32.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Pandawan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.463.747.400			2.156.180.500
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				869.917.400			1.477.042.100
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	330.660.000		100 %	322.280.900
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Pandawan	840 HOK	42.000.000		840 HOK	46.860.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Kecamatan Pandawan	1200 Surat	60.896.000		1200 Surat	925.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik dan air		12 bulan			12 bulan	27.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		1 penyedia			1 penyedia	6.550.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	7.620.200
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	12.968.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	13.477.700
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		540 Eks			720 Eks	2.880.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Pandawan	674 OH	132.400.000		674 OH	150.000.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Pandawan	3 Orang	95.364.000		3 Orang	54.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		70 %	516.377.400		70 %	1.114.961.200
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun		1 unit	19.262.400		1 unit	150.000.000

					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		1 unit			1 unit	250.000.000
					jumlah unit yang dipelihara		1 unit			1 unit	21.461.200
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Pandawan	87 unit	97.000.000		87 unit	166.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		10 unit			10 unit	50.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		20 unit			20 unit	6.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		5 unit			5 unit	5.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Kecamatan Pandawan	0 unit	10.315.000		0 unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			0 unit	0
					jumlah unit yang dipelihara		1 unit			1 unit	12.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Pandawan	0 unit	17.000.000		6 unit	17.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		6 unit			6 unit	3.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		0 unit			3 unit	3.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		0 unit			3 unit	1.500.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Kecamatan Pandawan	3 buah	372.800.000		3 buah	400.000.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		8 buah			8 buah	30.000.000
4	1	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan kedisiplinan Aparatur		82 %	9.500.000		82 %	25.800.000
4	1	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PSL yang dibeli	Kecamatan Pandawan	1 stel	9.500.000		1 stel	3.000.000
					Jumlah PDU yang dibeli		1 stel			1 stel	3.000.000
					Jumlah PDH yang dibeli		20 stel			20 stel	13.000.000
					Jumlah Atribut dan kelengkapannya yang dibeli		21 set			21 set	6.800.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyampaian dokumen penganggaran, keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		80 %	13.380.000		80 %	14.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun		13 dokumen	13.380.000		13 dokumen	14.000.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				593.830.000			679.138.400
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	265.995.000		B indeks	399.738.400

4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Peserta (Masyarakat/ Perangkat dan Lembaga Desa) yg mengikuti Sosialisasi Bidang Pemerintahan	Kecamatan Pandawan	1000 Orang	126.415.000		1000 Orang	101.277.400
					Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum yang diselesaikan		6 masalah			6 masalah	17.000.000
					Jumlah penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kegiatan			1 Kegiatan	30.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang sesuai standar	Kecamatan Pandawan	1800 dokumen	3.660.000		1800 dokumen	9.000.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan	Kecamatan Pandawan	10 kali	135.920.000		10 kali	107.461.000
					Jumlah peserta Sosialisasi Bidang Trantib		1700 Orang			1700 Orang	135.000.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		70 %	137.650.000		70 %	92.400.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Kecamatan Pandawan	21 Desa	137.650.000		21 Desa	7.250.000
					Jumlah desa yang pertanggungjawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu		21 Desa			21 Desa	22.300.000
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		21 Desa			21 Desa	14.850.000
					Jumlah Desa yang melaksanakan Pilbakal		18 Desa			18 Desa	48.000.000
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang		90 %	190.185.000		90 %	187.000.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Pandawan	100 usulan	54.095.000		176 usulan	15.000.000
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan/desa (PBB, BUMDES, dll)		6 kali			6 kali	15.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		270 Orang			270 Orang	15.000.000
					Jumlah kelurahan/desa yang di nilai perkembangannya		21 Desa			21 Desa	10.000.000
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Kecamatan Pandawan	30 surat	136.090.000		30 surat	2.000.000
					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		3 Kegiatan			3 Kegiatan	90.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		12 kali			12 kali	15.000.000
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		23 organisasi			23 organisasi	25.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				3.323.096.000			12.334.682.000
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				1.003.015.000			7.419.662.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase lancarnya pelayanan administrasi perkantoran		100 %	539.275.000		100 %	1.446.062.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1395 HOK	33.225.000		1395 HOK	34.000.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat/dokumen	Kecamatan Labuan Amas Selatan	12 bulan	127.662.000		12 bulan	162.742.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, listrik, dan internet		72 bulan			72 bulan	162.742.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			`12 bulan	162.742.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	162.742.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	162.742.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku		730 ekssemplar			730 ekssemplar	162.742.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH perjalanan dinas	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1702 OH	187.660.000		908 OH	243.610.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan adminsitrasi		112 OB	190.728.000		136 OB	192.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang cukup memadai		100 %	427.140.000		100 %	5.911.600.000

4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1 unit	38.600.000		1 unit	1.349.440.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		2 unit			2 unit	1.349.440.000
					jumlah unit yang dipelihara		1 unit			1 unit	1.349.440.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1 Unit	11.000.000		1 Unit	451.950.000
					Jumlah unit fasilitas yang dibeli		0 Unit			0 Unit	0
					Jumlah Unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	451.950.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Labuan Amas Selatan	1 Unit	13.970.000		1 Unit	27.060.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		4 Unit			4 Unit	27.060.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		10 Unit			10 Unit	27.060.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		10 Unit			10 Unit	27.060.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dibeli	Kecamatan Labuan Amas Selatan	3 Unit	363.570.000		3 Unit	425.570.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		10 Unit			10 Unit	425.570.000
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang memiliki sertifikat diklat teknis/bimbingan teknis/sosialisasi		6 orang	0		5 orang	20.000.000
4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis/bimbingan teknis/sosialisasi	Kecamatan Labuan Amas Selatan	5 PNS	0		5 PNS	20.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan tepat waktu dan sesuai standar		100 %	36.600.000		100 %	42.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Labuan Amas Selatan	12 dokumen	36.600.000		12 dokumen	42.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Predikat penilaian SAKIP minimal B		B Predikat	0		Predikat	0
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				2.320.081.000			4.915.020.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B Nilai IKM	213.240.000		B Nilai IKM	315.020.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Persentase jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	Kecamatan Labuan Amas Selatan	100 %	178.260.000		100 %	132.500.000

					Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan kecamatan		4 kali			kali	0
					Jumlah data pertanahan dan kependudukan yang tersedia		18 dokumen			dokumen	0
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang diterbitkan sesuai standar	Kecamatan Labuan Amas Selatan	150 dokumen	4.720.000		1000 dokumen	20.000.000
					Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemerintahan umum		85 Nilai IKM			Nilai IKM	0
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi (masyarakat/perangkat dan lembaga desa)		72 orang			orang	0
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Persentase jumlah koordinasi gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Labuan Amas Selatan	100 %	30.260.000		100 %	102.000.000
					Jumlah peserta pembinaan tentang ketenteraman dan ketertiban		144 orang			orang	0
					Persentase jumlah koordinasi kejadian bencana dan konflik sosial yang dapat ditangani		100 %			%	0
					Persentase jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan		100 %			100 %	30.260.000
					Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib		200 orang			0 orang	30.260.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan dengan administrasi pemerintahan desa		10 %	124.020.000		59 %	0
4	9	18	4	Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Kecamatan Labuan Amas Selatan	0 desa/kelurahan	124.020.000		0 desa/kelurahan	0
					Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa		17 desa			10 desa	0
					Jumlah desa pertanggungjawaban administrasi keuanganb tertib dan tepat waktu		17 desa			10 desa	0
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		17 desa			10 desa	0
					Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan pembakal		17 desa			17 desa	0
					Jumlah desa yang menyelenggarakan pemilihan Badan Perwakilan Desa		17 desa			0 desa	0
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang		100 %	1.982.821.000		100 %	4.600.000.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Labuan Amas Selatan	180 usulan	68.020.000		180 usulan	20.000.000

					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan/desa (PBB, BUMDesa, Program K/L, dll)		2 kali			2 kali	20.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		120 orang			120 orang	20.000.000
					Jumlah desa/kelurahan yang dinilai perkembangannya		18 desa/kelurahan			18 desa/kelurahan	20.000.000
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Kecamatan Labuan Amas Selatan	120 dokumen	256.840.000		120 dokumen	130.000.000
					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		6 jenis			6 jenis	130.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		5 kegiatan			5 kegiatan	130.000.000
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		19 TP-PKK			19 TP-PKK	130.000.000
4	9	19	3	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pantai Hambawang Barat	Jumlah Kelurahan yang terpenuhi keperluan operasional serta kegiatan Pemberdayaan dan Pembangunannya	Pantai Hambawang Barat	1 buah	1.657.961.000		1 buah	1.000.000.000
					Jumlah pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan		7 paket			7 paket	1.000.000.000
					jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi		0 kali			1 kali	1.000.000.000
					Jumlah dokumen pelayanan yang diterbitkan sesuai standar		120 dokumen			120 dokumen	1.000.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Labuan Amas Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.264.676.100			1.822.234.100
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				779.235.100			827.054.100
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase realisasi pelayanan administrasi perkantoran		100 %	357.310.100		100 %	302.054.100
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Prosentase ketersediaan makanan dan minuman kantor	Kecamatan Labuan Amas Utara	100 %	44.760.000		100 %	55.000.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen administrasi yang diterbitkan	Kecamatan Labuan Amas Utara	100 Dokumen	129.774.100		100 Dokumen	19.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	50.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		3 Kegiatan			3 Kegiatan	13.200.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	8.110.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	35.544.100
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	14.080.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		730 Eksemplar			730 Eksemplar	2.920.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Labuan Amas Utara	18 Kegiatan	143.200.000		18 Kegiatan	68.200.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Labuan Amas Utara	2 Orang	39.576.000		6 Orang	36.000.000

4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang cukup memadai		100 %	408.000.000		100 %	375.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan kantor	Kecamatan Labuan Amas Utara	85 %	43.850.000		85 %	300.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Terlaksananya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan rumah jabatan	Kecamatan Labuan Amas Utara	90 %	19.200.000		90 %	50.000.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas	Kecamatan Labuan Amas Utara	85 %	344.950.000		85 %	25.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen yang disusun		10 Dokumen	13.925.000		10 Dokumen	150.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, laporan keuangan dan kinerja SKPD	Kecamatan Labuan Amas Utara	10 Dokumen	13.925.000		10 Dokumen	150.000.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				485.441.000			995.180.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	173.411.000		B indeks	352.500.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	Kecamatan Labuan Amas Utara	100 Masalah	46.860.000		10 Masalah	132.500.000
					Jumlah penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT RI, Kesaktian Pancasila, Pahlawan)		1 Kegiatan			3 Kegiatan	60.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar	Kecamatan Labuan Amas Utara	200 Dokumen	40.731.000		150 Dokumen	20.000.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan (konflik perikanan (setrum, dll), konflik proses pembangunan (premanisme), konflik keagamaan (aliran menyimpang), konflik sosial (penyahagunaan napza), potensi bencana)	Kecamatan Labuan Amas Utara	1 Permasalahan	85.820.000		5 Permasalahan	100.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib		150 Orang			950 Orang	40.000.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persenase desa dengan administrasi yang tertib (baik, sedang, kurang)		8 %	99.140.000		10 %	185.680.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Kecamatan Labuan Amas Utara	15 Desa	99.140.000		15 Desa	45.680.000

					Jumlah desa yang pertanggungjawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu		16 Desa			16 Desa	65.000.000
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		16 Desa			16 Desa	75.000.000
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase desa dengan hasil evaluasi minimum dengan nilai 301		16 Desa	212.890.000		16 Desa	457.000.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Labuan Amas Utara	4 dokumen	64.250.000		4 dokumen	45.000.000
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan/desa (PBB, BUMDES, dll		17 Kegiatan			8 Kegiatan	30.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		200 OH			200 OH	15.000.000
					Jumlah kelurahan/desa yang di nilai perkembangannya		16 Desa			12 Desa	90.000.000
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Kecamatan Labuan Amas Utara	100 Dokumen	148.640.000		100 Dokumen	90.000.000
					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		3 Kegiatan			3 Kegiatan	90.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		4 Program			4 Program	7.000.000
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		17 Organisasi			17 Organisasi	90.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Haruyan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.167.254.000			1.961.328.000
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				800.174.000			1.422.378.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		B Indeks	361.899.000		B Indeks	437.628.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK Yang Disediakan	Kecamatan Haruyan	720 HOK	36.000.000		720 HOK	69.808.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat	Kecamatan Haruyan	180 Kali	53.171.000		180 Kali	6.300.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik,air,telpon		12 Bulan			12 Bulan	30.000.000
					Jumlah Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		3 Penyedia			3 Penyedia	9.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	20.000.000
					Jumlah Bulan Penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	15.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	10.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		24 Eksampler			24 Eksampler	2.520.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Haruyan	855 OH	121.000.000		159 OH	125.000.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Haruyan	84 OB	151.728.000		84 OB	150.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	430.375.000		100 %	960.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Fasilitas Yang Ditingkatkan	Kecamatan Haruyan	1 Unit	25.000.000		1 Unit	500.000.000

					Jumlah Unit Yang Dipelihara		2 Unit			2 Unit	25.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah Unit Peralatan Yang Dibeli	Kecamatan Haruyan	3 Unit	65.000.000		3 Unit	30.000.000
					Jumlah Perlengkapan Yang Dibeli		30 Buah			30 Buah	15.000.000
					Jumlah Peralatan Yang Dipelihara		14 Buah			14 Buah	10.000.000
					Jumlah Perlengkapan Yang Dipelihara		10 Buah			10 Buah	5.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Unit Yang Dipelihara	Kecamatan Haruyan	1 Unit	13.700.000		1 Unit	15.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah Peralatan Yang Dibeli	Kecamatan Haruyan	5 Buah	8.000.000		5 Buah	10.000.000
					Jumlah Perlengkapan Yang Dipelihara		3 Buah			3 Buah	5.000.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 Yang Dipelihara	Kecamatan Haruyan	10 Buah	318.675.000		10 Buah	45.000.000
					Jumlah Mobil Dinas Camat Yang Dibeli		1 Unit			1 Unit	300.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Perencanaan,Penganggaran,Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar		100 %	7.900.000		100 %	24.750.000
4	1	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran,dan Laporan Keuangan dan Kinerja	Kecamatan Haruyan	6 Dokumen	7.900.000		6 Dokumen	24.750.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0		0 0	0		0	0
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peridikat penilaian SAKIP minimal B		B Nilai	0		Nilai	0
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				367.080.000			538.950.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	117.025.000		B indeks	262.950.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan Umum Yang Diselesaikan	Kecamatan Haruyan	4 Masalah	76.425.000		6 Masalah	90.450.000
					Jumlah penyenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional		1 kali			1 kali	75.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar	Kecamatan Haruyan	2640 Dokumen	11.000.000		700 Dokumen	40.000.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Pembinaan Tentang Bidang Trantib	Kecamatan Haruyan	20 Kali	29.600.000		20 Kali	30.000.000
					Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan		4 masalah			4 masalah	0

					Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib		800 orang			800 orang	27.500.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		17 Desa	95.600.000		17 Desa	60.000.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa		17 desa	95.600.000		17 desa	15.000.000
					Jumlah desa yang pertanggungjawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu		17 desa			17 desa	15.000.000
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		17 desa			17 desa	15.000.000
					Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan pembakal		14 desa			14 desa	15.000.000
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang		17 %	154.455.000		0 %	216.000.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Haruyan	170 Kegiatan	33.420.000		170 Kegiatan	30.000.000
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan/desa (PBB, BUMDES, dll)		0 kali			4 kali	6.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		340 orang			340 orang	20.000.000
					Jumlah kelurahan/desa yang di nilai perkembangannya		17 desa			17 desa	20.000.000
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Kecamatan Haruyan	0 rekomendasi	121.035.000		145 rekomendasi	5.000.000
					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		0 event			6 event	100.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		0 kegiatan			120 kegiatan	0
					Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan/desa Jumlah organisasi PKK yang aktif		0 PKK			18 PKK	35.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Batu Benawa

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				674.246.000			1.310.100.000
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				405.546.000			668.100.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhi pelayanan administrasi perkantoran		100 %	294.246.000		100 %	223.100.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Pagat	560 HOK	28.000.000		600 HOK	30.000.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Materai	Hulu Sungai Tengah;Kecamatan Batu Benawa;Pagat	300 lembar	60.020.000		300 lembar	2.100.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			12 bulan	20.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	30.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	10.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	20.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		4 buah			4 buah	5.000.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	670 OH	130.650.000		1163 OH	50.000.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	4 Orang	75.576.000		4 Orang	56.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana yang memadai		50 %	106.800.000		50 %	440.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	jumlah unit bangunan yang dipelihara	Pagat	1 unit	50.000.000		1 unit	100.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli		6 unti	7.500.000		6 unti	40.000.000

					Jumlah perlengkapan yang dibeli		20 unit			20 unit	20.000.000
					Jumlah unit peralatan yang dipelihara		15 unit			15 unit	10.000.000
					jumlah unit perlengkapan yang dipelihara		12 unit			12 unit	5.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Pagat	1 unit	17.400.000		1 unit	50.000.000
					jumlah unit yang dipelihara		1 unit			1 unit	30.000.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		1 unit			1 unit	40.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah unit perlengkapan yang dibeli	Pagat	9 unit	0		6 unit	40.000.000
					jumlah unit perlengkapan yang dipelihara		10 unit			10 unit	20.000.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah unit mobil/R2 yang dibeli	Pagat	2 unit	31.900.000		2 unit	60.000.000
					Jumlah unit Mobil / R2 yang dipelihara		8 unit			10 unit	25.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase dokumen laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan sesuai standart dan tepat waktu		7 %	4.500.000		100 %	5.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Pagat	9 dokumen	4.500.000		9 dokumen	5.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		B Kategori	0		Kategori	0
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				268.700.000			642.000.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	94.300.000		B indeks	375.000.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	Kecamatan Batu Benawa	8 Permasalahan	53.500.000		8 Permasalahan	120.000.000
					Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional		1 Hari Besar			1 Hari Besar	25.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan sesuai standar	Pagat	1500 Dokumen	3.000.000		1500 Dokumen	50.000.000
					Jumlah ruang pelayanan PATEN yang refresentatif		1 Ruangan			1 Ruangan	10.000.000

4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib	Kecamatan Batu Benawa	560 Orang	37.800.000		560 Orang	150.000.000
					Jumlah permasalahan bidang trantib yang diselesaikan		4 Permasalahan			4 Permasalahan	20.000.000
4	9	16		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase Desa hasil evaluasi minimal katagore berkembang		14 %	137.400.000		14 %	197.000.000
4	9	16	3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Batu Benawa	42 Usulan	41.550.000		42 Usulan	40.000.000
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan desa (PBB, BUMDes, dll)		14 Kali			14 Kali	10.000.000
					Jumlah sosialisasi Pembangunan Desa		6 Kali			6 Kali	8.000.000
					Jumlah Desa yang dinilai perkembangannya		14 Desa			14 Desa	15.000.000
4	9	16	5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi	Kecamatan Batu Benawa	140 Kegiatan	95.850.000		140 Kegiatan	80.000.000
					Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat		12 Rekomendasi			12 Rekomendasi	12.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		12 Fasilitasi			12 Fasilitasi	12.000.000
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		14 Organisasi			14 Organisasi	20.000.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		14 %	37.000.000		14 %	70.000.000
4	9	18	4	Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah Desa yang dapat melaksanakan pengelolaan adminstrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Batu Benawa	14 Desa	37.000.000		14 Desa	30.000.000
					Jumlah Desa yang pertanggung jawaban administrasi keuangan tertib dan tapat waktu		14 Desa			14 Desa	25.000.000
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		14 Desa			14 Desa	15.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Hantakan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				735.735.000			1.904.680.000
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				491.955.000			948.680.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	indeks kepuasan masyarakat		100 Indeks	367.855.000		B Indeks	273.080.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Hantakan	100 OK	29.000.000		580 OK	40.000.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Kecamatan Hantakan	100 Lembar	49.953.000		100 Lembar	1.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik,air,telepon		100 bulan			12 bulan	20.000.000
					Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		100 bulan			12 bulan	4.000.000
					Jumlah bulan dan penyediaan alat kebersihan		100 bulan			12 bulan	24.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		100 bulan			12 bulan	10.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		100 bulan			12 bulan	5.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan buku yang dibeli		100 bulan			12 bulan	1.080.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kecamatan Hantakan	100 OH	173.750.000		1093 OH	120.000.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Hantakan	100 %	115.152.000		100 %	48.000.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi pelayanan administrasi perkantoran		%	0		%	0
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	0		%	0

4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		1 %	118.800.000		100 %	660.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Hantakan	1 %	19.050.000		100 %	150.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Hantakan	6 %	34.350.000		100 %	80.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kecamatan Hantakan	1 %	19.050.000		100 %	80.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Prosentase peningkatan saranan dan prasarana aparatur	Kecamatan Hantakan	1 %	46.350.000		100 %	350.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase penyampaian dokumen penganggaran keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		10 dokomen	5.300.000		80 dokomen	15.600.000
4	1	6	16	Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan SKPD	jumlah dokomen yang disusun	Kecamatan Hantakan	100 dokomen	5.300.000		100 dokomen	15.600.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				243.780.000			956.000.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	90.210.000		B indeks	261.000.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan Pemerintahan Umum yang diselesaikan	Kecamatan Hantakan	12 permasalahan	49.650.000		2 permasalahan	40.000.000
					2.Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar nasional		kali			1 kali	80.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar	Kecamatan Hantakan	17 dokumen	20.000.000		400 dokumen	60.000.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahann trantib yang terselesaikan	Kecamatan Hantakan	12 permasalahan	20.560.000		2 permasalahan	56.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib		12 orang			160 orang	25.000.000
4	9	16		Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Persentase desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa		12 %	117.870.000		75 %	505.000.000
4	9	16	3	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Hantakan	10 Buah	31.220.000		10 Buah	250.000.000
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan / desa (PBB,BUMDES,dll)		5 kali			5 kali	25.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		400 orang			400 orang	25.000.000
					Jumlah kelurahan / desa yang dinilai perkembangannya		12 desa			12 desa	25.000.000
4	9	16	5	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	1Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Kecamatan Hantakan	12 desa	86.650.000		12 desa	120.000.000

					2.Jumlah jenis kegiatan / event keagamaan , olahraga dan kepemudaan yang difasilitasi		5 kali			5 kali	60.000.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan tertib administrasi pemerintahan desa		12 %	35.700.000		75 %	190.000.000
4	9	18	4	Pembinaan penyelenggaraan Administrasi Desa	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaanadministrasi pemerintahan desa	Kecamatan Hantakan	12 desa	35.700.000		12 desa	100.000.000
					Jumlah desa yang pertanggung jawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu		desa			12 desa	20.000.000
					Jumlah desa yang di evaluasi RAPB Desa		desa			12 desa	15.000.000
					Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan pembakal		desa			12 desa	55.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Batang Alai Selatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.431.735.000			1.615.484.194
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				958.629.000			1.174.290.969
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		12 Mutu Layanan	396.596.000		B Mutu Layanan	508.474.460
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Batang Alai Selatan	12 HOK	50.500.000		1010 HOK	75.414.460
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Kecamatan Batang Alai Selatan	12 OH	76.344.000		144 OH	112.700.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	0
					Jumlah bulan penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		12 Bulan			12 Bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	0
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	0
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		12 Bulan			12 Bulan	0
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Batang Alai Selatan	12 OH	160.600.000		1362 OH	170.360.000

4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Batang Alai Selatan	12 Orang	109.152.000		8 Orang	150.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	531.493.000		100 %	520.500.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Kecamatan Batang Alai Selatan	0 Buah	40.743.000		0 Buah	75.500.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 Unit			0 Unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	0
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Batang Alai Selatan	12 Bulan	72.100.000		12 Bulan	50.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		4 Unit			4 Unit	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		26 Unit			26 Unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		8 Unit			8 Unit	0
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Kecamatan Batang Alai Selatan	2 Unit	23.500.000		2 Unit	20.000.000
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		2 Unit			2 Unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		2 Unit			2 Unit	0
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Batang Alai Selatan	0 Buah	27.000.000		0 Buah	30.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		0 Unit			0 Unit	0
					Jumlah peralatan yang dipelihara		4 Unit			4 Unit	0
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		8 Unit			8 Unit	0
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil /R2 yang dibeli	Kecamatan Batang Alai Selatan	4 Unit	368.150.000		2 Unit	300.000.000
					Jumlah Mobil/R2 yang dipelihara		9 Unit			7 Unit	45.000.000
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Kecamatan		100 %	0		100 %	115.316.509

4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis yang diikuti oleh PNS	Kecamatan Batang Alai Selatan	5 Kegiatan	0		5 Kegiatan	115.316.509
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	30.540.000		100 %	30.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Batang Alai Selatan	8 Dokumen	30.540.000		8 Dokumen	30.000.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				473.106.000			441.193.225
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	186.686.000		B indeks	282.837.500
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi pemerintahan umum dan Pembinaan Wilayah	Kecamatan Batang Alai Selatan	19 Kegiatan	98.750.000		12 Kegiatan	147.741.000
					Jumlah penyenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kegiatan			1 Kegiatan	0
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen Pelayanan yg sesuai standar	Kecamatan Batang Alai Selatan	24 Dokumen	47.436.000		24 Dokumen	93.170.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Trantibmas dan Penanggulangan Bencana	Kecamatan Batang Alai Selatan	19 Kegiatan	40.500.000		12 Kegiatan	41.926.500
					Terlaksananya sosialisasi bidang trantib		8 Kegiatan			8 Kegiatan	0
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		18 %	0		100 %	0
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang		19 %	286.420.000		100 %	158.355.725
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Batang Alai Selatan	120 Usulan	95.780.000		120 Usulan	25.056.075
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan/desa (PBB, BUMDES, dll)		4 Kegiatan			4 Kegiatan	0
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		4 Orang			100 Orang	0

					Jumlah kelurahan/desa yang di nilai perkembangannya		19 Desa/Kelurahan			19 Desa/Kelurahan	0
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kesra	Kecamatan Batang Alai Selatan	19 Kegiatan	190.640.000		12 Kegiatan	133.299.650
					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		4 Kegiatan			4 Kegiatan	0
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		19 Kegiatan			4 Kegiatan	0
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		20 Kec/Desa/Kelurahan			20 Kec/Desa/Kelurahan	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Batang Alai Utara

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				906.617.700			968.500.000
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				669.947.700			765.000.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		70 Indeks	270.257.700		70 Indeks	265.000.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Batang Alai Utara	1200 HOK	30.000.000		1200 HOK	35.000.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat	Kecamatan Batang Alai Utara	0 kali	58.378.700		0 kali	0
					Jumlah Bulan pembayaran rekening listrik,air dan telepon		12 bulan			12 bulan	40.000.000
					Jumlah Penyedia Jasa Peralatan Kantor yang disewa		8 Unit			8 Unit	8.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	6.000.000
					Jumlah Bulan ATK		12 bulan			12 bulan	20.000.000
					Jumlah bulan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	15.000.000
					Jumlah bahan bacaan yang dan buku yang dibeli		365 eksemplar			365 eksemplar	2.000.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Batang Alai Utara	525 OH	92.515.000		525 OH	85.000.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Kecamatan Batang Alai Utara	3 OB	89.364.000		3 OB	54.000.000

4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		10 %	375.290.000		10 %	473.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Fasilitas Gedung yang dibangun	Kecamatan Batang Alai Utara	2 Unit	10.640.000		2 Unit	400.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah Fasilitas yang ditingkatkan	Kecamatan Batang Alai Utara	4 unit	5.000.000		4 unit	6.000.000
					Jumlah Unit yang dipelihara		10 Unit			10 Unit	12.000.000
					Jumlah Unit perlatan yang dibeli		0 unit			10 unit	25.000.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Unit Fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Kecamatan Batang Alai Utara	0 Unit	12.500.000		0 Unit	0
					Jumlah Unit Fasilitas yang ditingkatkan		0 Unit			0 Unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	15.000.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara	Kecamatan Batang Alai Utara	10 Unit	347.150.000		10 Unit	15.000.000
					Jumlah Mobil /R2 yang dibeli		3 Unit			0 Unit	0
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Penyampian dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar.		100 Persentase	24.400.000		100 Persentase	27.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yng disusun	Kecamatan Batang Alai Utara	10 Dokumen	24.400.000		10 Dokumen	15.000.000
					Jumlah Dokumen yang disusun		10 Dokumen			10 Dokumen	12.000.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				236.670.000			203.500.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	88.110.000		B indeks	112.000.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum yang diselesaikan	Kecamatan Batang Alai Utara	4 masalah	58.350.000		4 masalah	50.000.000
					Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kali			1 Kali	25.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen Pelayanan yang sesuai standar	Kecamatan Batang Alai Utara	750 Dokumen	6.200.000		750 Dokumen	12.000.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan	Kecamatan Batang Alai Utara	6 kali	23.560.000		6 kali	15.000.000

					Jumlah Sosialisasi Bidang trantib		2 Kali			2 Kali	10.000.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa dengan tertib Administrasi Pemerintahan Desa		12 %	36.400.000		80 %	28.500.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dapat melaksanakan Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa		12 Desa	36.400.000		12 Desa	2.000.000
					Jumlah Desa yang Pertanggungjawaban Administrasi Keuangan tertib dan tepat waktu		12 Desa			12 Desa	3.500.000
					Jumlah Desa Yang dievaluasi APBDesa		14 Desa			14 Desa	11.000.000
					Jumlah Desa yang melaksanakan Pilbakal dan BPD		14 Desa			14 Desa	12.000.000
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase Kelurahan/Desa Hasil Evaluasi Minimal Kategori berkembang		50 Persentase	112.160.000		50 Persentase	63.000.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan Pembangnan yang dapat diakomodir	Kecamatan Batang Alai Utara	250 Usulan	38.660.000		250 Usulan	12.000.000
					Jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan/Desa (PBB, BUMDesa, dll)		2 Kali			2 Kali	5.000.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		70 OK			70 OK	6.000.000
					Jumlah Kelurahan/Desa yang dinilai perkembangannya		14 Desa			14 Desa	11.000.000
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi Tim Koordinasi Kesejahtraan Rakyat	Kecamatan Batang Alai Utara	140 Buah	73.500.000		140 Buah	3.000.000
					Jumlah Jenis Kegiatan/event Keagamaan , Olah Raga, dan Kepemudaan yang difasilitasi		5 Jenis			5 Jenis	8.000.000
					Jumlah Fasilitasi Kegiatan Penyaluran Bantuan yang tepat sasaran		12 Kali			12 Kali	6.000.000
					Jumlah Organisasi PKK yang aktif		15 Buah			15 Buah	12.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Batang Alai Timur

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.444.940.500			1.636.088.001
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				1.193.300.500			983.548.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	596.450.500		100 %	336.548.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Batang Alai Timur	550 Orang Kali	26.750.000		100 Orang Kali	54.158.000
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Kecamatan Batang Alai Timur	500 Buah	58.982.500		500 Buah	19.725.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	7.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		3 Jenis			3 Jenis	6.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	23.781.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	10.500.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		12 Bulan			12 Bulan	6.500.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	5.581.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Batang Alai Timur	30 OK	395.566.000		30 OK	197.303.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Kecamatan Batang Alai Timur	4 Orang	115.152.000		4 Orang	6.000.000

4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		80 %	595.050.000		80 %	518.900.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Kecamatan Batang Alai Timur	0 Unit	0		0 Unit	0
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan	Kecamatan Batang Alai Timur	0 Unit	161.550.000		0 Unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		2 Unit			2 Unit	11.800.000
					Jumlah unit peralatan yang dibeli		4 Unit			4 Unit	25.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		15 Jenis			15 Jenis	153.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		4 Jenis			4 Jenis	5.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		10 Jenis			10 Jenis	6.500.000
4	1	2	47	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah unit fasilitas rumah jabatan/dinas yang dibangun	Kecamatan Batang Alai Timur	0 Unit	27.250.000		0 Unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		1 Unit			1 Unit	150.000.000
					Jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	5.000.000
4	1	2	48	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Rumah Dinas	Jumlah unit peralatan yang dibeli	Kecamatan Batang Alai Timur	4 Jenis	36.950.000		4 Jenis	15.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		5 Jenis			5 Jenis	20.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		2 Jenis			4 Jenis	2.500.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		5 Jenis			5 Jenis	5.000.000
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Kecamatan Batang Alai Timur	3 Unit	369.300.000		2 Unit	70.000.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		12 Unit			12 Unit	50.100.000
4	1	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan SDA		90 %	0		90 %	112.500.000
4	1	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah karyawan mengikuti Bimtek	Kecamatan Batang Alai Timur	6 orang	0		6 orang	112.500.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	1.800.000		100 %	15.600.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Batang Alai Timur	9 Dokumen	1.800.000		9 Dokumen	15.600.000

4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				251.640.000			652.540.001
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	77.710.000		B indeks	243.890.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan umum yang diselesaikan	Kecamatan Batang Alai Timur	20 Dokumen	42.210.000		20 Dokumen	8.000.000
					Jumlah penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional		1 Kali			1 Kali	57.000.000
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar	Kecamatan Batang Alai Timur	80 Dokumen	6.600.000		80 Dokumen	82.500.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselesaikan	Kecamatan Batang Alai Timur	25 Dokumen	28.900.000		25 Dokumen	47.695.000
					Jumlah peserta sosialisasi bidang trantib		90 Orang			90 Orang	48.695.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		91 %	38.300.000		91 %	91.200.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Kecamatan Batang Alai Timur	10 Desa	38.300.000		10 Desa	35.700.000
					Jumlah desa yang pertanggungjawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu		10 Desa			10 Desa	22.500.000
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		11 Desa			11 Desa	22.500.000
					Jumlah desa yang dilaksanakan Pilbakal		9 Desa			9 Desa	10.500.000
4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentase kelurahan/desa hasil evaluasi minimal kategori berkembang		91 %	135.630.000		91 %	317.450.001
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah usulan pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Batang Alai Timur	32 Item	36.580.000		32 Item	5.250.000
					Jumlah rapat koordinasi pembangunan kelurahan/desa (PBB, BUMDES, dll)		5 Kali Keg.			5 Kali Keg.	7.500.000
					Jumlah peserta sosialisasi pembangunan desa		400 Orang Kali			400 Orang Kali	19.500.000
					Jumlah kelurahan/desa yang di nilai perkembangannya		11 Desa			11 Desa	190.000.001
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah rekomendasi tim koordinasi kesejahteraan rakyat	Kecamatan Batang Alai Timur	12 Jenis	99.050.000		12 Jenis	26.600.000

					Jumlah jenis kegiatan/event keagamaan, olahraga, dan kepemudaan yang difasilitasi		6 Jenis			6 Jenis	40.000.000
					Jumlah fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		3 Jenis			3 Jenis	8.600.000
					Jumlah organisasi PKK yang aktif		12 Organisasi			12 Organisasi	20.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Limpasu

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				1.114.588.000			973.390.000
4	1			Administrasi Pemerintahan (Sekretariat Daerah)				805.510.000			787.390.000
4	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata pemenuhan Belanja Kebutuhan administrasi Perkantoran		100 %	294.090.000		100 %	258.390.000
4	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Kecamatan Limpasu	470 OH	49.400.000		470 OH	0
4	1	1	27	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jasa Pengiriman Surat	Kecamatan Limpasu	100 bulan	43.926.000		12 bulan	1.436.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air dan rtelpon		12 bulan			12 bulan	4.800.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	3.300.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	9.770.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		12 bulan			12 bulan	2.160.000
					Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		4 jenis			4 jenis	20.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		4 bulan			12 bulan	8.028.000
4	1	1	28	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Kecamatan Limpasu	100 OH	114.400.000		100 OH	154.896.000
4	1	1	29	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Kontrak Tekhnis dan administrasi	Kecamatan Limpasu	3 OB	86.364.000		5 OB	54.000.000
4	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	503.590.000		100 %	504.000.000
4	1	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit Fasilitas Umum yang dibangun	Kecamatan Limpasu	1 unit	12.490.000		1 unit	199.000.000

					Jumlah Bangunan Kantor yang dipelihara		1 buah			1 buah	15.000.000
4	1	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang di pelihara	Kecamatan Limpasu	5 unit	76.050.000		5 unit	50.000.000
					jumlah unit perlengkapan yang dipelihara		10 unit			10 unit	50.000.000
					pengadaan peralatan kantor		4 unit			4 unit	40.000.000
					pengadaan perlengkapan kantor		0 Unit			0 Unit	0
4	1	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil/R2 yang dipelihara/dibeli	Kecamatan Limpasu	9 unit	415.050.000		9 unit	150.000.000
4	1	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dokumen yang disampaikan tepat waktu		5 Dokumen	7.830.000		5 Dokumen	25.000.000
4	1	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Kecamatan Limpasu	5 dokumen	7.830.000		5 dokumen	25.000.000
4	9			Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)				309.078.000			186.000.000
4	9	15		Program Peningkatan Pelaksanaan Tugas Camat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan		B indeks	120.638.000		B indeks	66.000.000
4	9	15	1	Koordinasi Pembinaan Pemerintahan Umum Kecamatan	Jumlah Permasalahan Pemerintahan umum Yang diselesaikan	Kecamatan Limpasu	4 permasalahan	72.650.000		6 permasalahan	34.000.000
					Jumlah penyelenggaraan peringatan hari besar Nasional		1 Kali			1 Kali	0
4	9	15	2	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Dokumen pelayanan yang terbitkan sesuai standar	Kecamatan Limpasu	17 jenis	19.788.000		17 jenis	9.000.000
4	9	15	4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah permasalahan pemerintahan trantib yang diselessaikan ,	Kecamatan Limpasu	3 permasalahan	28.200.000		3 permasalahan	17.000.000
					jumlah peserta sosialisasi bidang trantib		150 Orang			150 Orang	6.000.000
4	9	18		Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan tertib administrasi Pemerintahan Desa		95 %	35.200.000		95 %	37.000.000
4	9	18	15	Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dapat melaksanakan pengelolaan administrasi pemerintahan desa		9 desa	35.200.000		9 desa	12.000.000
					Jumlah desa yang pertanggungjawaban administrasi keuangan tertib dan tepat waktu		9 desa			9 desa	10.000.000
					Jumlah desa yang dievaluasi RAPB Desa		9 desa			9 desa	10.000.000
					Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan pembakal		2 desa			2 desa	5.000.000

4	9	19		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan/Desa	Persentasi Kelurahan/ Desa hasil evaluasi mnimal kategori berkembang		70 %	153.240.000		70 %	83.000.000
4	9	19	1	Koordinasi Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Usulan Pembangunan yang dapat diakomodir	Kecamatan Limpasu	90 Usulan	20.450.000		90 Usulan	18.000.000
					Jumlah Rapat Koordinasi Pembangunan Kelurahan/Desa (PBB, BUMDES, dll)		4 Kegiatan			4 Kegiatan	0
					Jumlah Kelurahan/ Desa yang dinilai Perkembangannya		9 Desa			9 Desa	0
4	9	19	2	Koordinasi Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rekomendasi Tim Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	Kecamatan Limpasu	9 Tim	132.790.000		4 Tim	65.000.000
					Jumlah Jenis kegiatan/ Event Keagamaan, Olah Raga dan Kepemudaan yang di fasilitasi		6 Kegiatan			6 Kegiatan	0
					Jumlah Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan yang tepat sasaran		13 Kegiatan			13 Kegiatan	0
					Jumlah Organisasi PKK yang aktif		10 Kecamatan/ Desa			10 Kecamatan/ Desa	0

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Inspektorat

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				4.975.122.200			4.519.264.200
4	2			Pengawasan				4.975.122.200			4.519.264.200
4	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat		90 %	866.684.000		90 %	747.846.000
4	2	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	1500 HOK	69.250.000		1500 HOK	75.000.000
4	2	1	25	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	24 gram	80.206.000		100 gram	5.000.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bulan			12 bulan	16.800.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bulan			12 bulan	8.586.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bulan			12 bulan	35.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bulan			12 bulan	19.840.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		744 exampler			744 exampler	4.320.000
4	2	1	26	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	200 OH	562.500.000		200 OH	572.500.000
4	2	1	27	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	6 orang	154.728.000		6 orang	10.800.000
4	2	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		85 %	787.165.500		85 %	310.785.500
4	2	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 unit	10.000.000		0 unit	0

					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 unit			0 unit	0
					Jumlah unit yang dipelihara		1 gedung			1 gedung	10.000.000
4	2	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	29 unit/buah	228.065.500		29 unit/buah	89.370.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		8 unit/buah			9 unit/buah	116.075.500
					Jumlah peralatan yang dipelihara		30 buah			30 buah	20.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		20 buah			20 buah	8.500.000
4	2	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 unit	549.100.000		0 unit	0
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		12 unit			12 unit	66.840.000
4	2	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100% %	12.300.000		100 %	12.300.000
4	2	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	7 dokumen	12.300.000		7 dokumen	12.300.000
4	2	10		Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SKPD/Obrik yang telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan		90 %	2.738.032.700		90 %	2.845.607.700
4	2	10	1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah obrik yang diperiksa	Hulu Sungai Tengah	80 obrik	1.022.010.000		80 obrik	774.736.000
					Jumlah temuan yang ditindaklanjuti		150 Temuan			120 Temuan	120.457.000
					Jumlah kasus yang ditangani		12 Kasus			12 Kasus	73.612.000
					Jumlah rapat hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjut eksternal		4 triwulan			4 triwulan	100.000.000
4	2	10	7	Sosialisasi dan Koordinasi Implementasi Pelaksanaan Good Governance Pemerintah Kabupaten HST	Jumlah kegiatan sosialisasi & Implementasi GG	Hulu Sungai Tengah	5 Kegiatan	1.716.022.700		5 Kegiatan	1.776.802.700
4	2	11		Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas (APIP)	Persentase tenaga APIP yang bersertifikat (sesuai Standar Kompetensi)		100 %	147.300.000		90 %	167.300.000
4	2	11	1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.	Jumlah tenaga pemeriksa yang memiliki serifikat sesuai jenjang	Hulu Sungai Tengah	10 orang	147.300.000		5 orang	40.000.000
					Jumlah tenaga APIP yang memahami tentang tehnis pengawasan		30 orang			30 orang	67.300.000

					Jumlah tenaga APIP yang mengikuti diklat pengembangan profesi		15 orang			15 orang	60.000.000
4	2	12		Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase Kelengkapan Kebijakan Sistem dan Prosedur		100 %	36.580.000		90 %	36.355.000
4	2	12	1	Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah pedoman pengawasan (SOP	Hulu Sungai Tengah	3 SOP	36.580.000		3 SOP	10.300.000
					Jumlah ASN yang melaporkan kekayaan		1500 ASN			2000 ASN	26.055.000
4	2	13		Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SKPD yang memenuhi level Maturitas SPIP		60 %	146.560.000		60 %	154.570.000
4	2	13	1	Kegiatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah SKPD yang menerapkan maturitas SPIP secara efektif	Hulu Sungai Tengah	8 SKPD	146.560.000		8 SKPD	62.340.000
					Jumlah SKPD yang dapat ditetapkan sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi (WBK)		4 SKPD			4 SKPD	92.230.000
4	2	13		Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		20 %	0		30 %	0
4	2	14		Program Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) yang telah direviu		80 %	179.850.000		80 %	183.850.000
4	2	14	14	Reviu Rencana Kegiatan dan Laporan Keuangan	Jumlah LHP hasil direviu tepat waktu	Hulu Sungai Tengah	39 LHR	179.850.000		39 LHR	183.850.000
4	2	15		Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapat nilai baik (Minimal B)		80 %	60.650.000		80 %	60.650.000
4	2	15	1	Kegiatan Evaluasi Laporan kinerja Perangkat Daerah dan review LKIP Pemda	Jumlah LHE LKIP	Hulu Sungai Tengah	26 SKPD	60.650.000		26 SKPD	60.650.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				5.253.254.500			7.992.100.000
4	3			Perencanaan				4.691.654.500			7.392.100.000
4	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		85 %	1.025.401.500		85 %	992.100.000
4	3	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK makan minum harian, Jumlah HOK Rapat dan Tamu	Hulu Sungai Tengah	450 HOK	61.140.000		450 HOK	60.000.000
4	3	1	19	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 kl	292.935.500		12 kl	600.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bln			12 bln	175.000.000
					Jumlah penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa		0 bh			0 bh	0
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bln			12 bln	25.000.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bln			12 bln	90.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bln			12 bln	10.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		610 eksp			610 eksp	4.500.000
4	3	1	20	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	250 OH	375.750.000		250 OH	375.000.000
4	3	1	21	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	72 OB	295.576.000		72 OB	252.000.000
4	3	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	% sarana prasarana yang memadai		100 %	181.460.000		100 %	800.000.000

4	3	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	23.750.000		0 Unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		2 Unit			2 Unit	100.000.000
					jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	50.000.000
4	3	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	10 bh	93.410.000		10 bh	200.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dibeli		10 Unit			10 Unit	200.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		25 Unit			25 Unit	125.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		30 Unit			30 Unit	60.000.000
4	3	2	50	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	64.300.000		0 Unit	0
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		20 Unit			20 Unit	65.000.000
4	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% dokumen laporan kinerja, penganggaran dan keuangan yang disampaikan sesuai standart dan tepat waktu		100 %	26.370.000		100 %	10.000.000
4	3	6	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	10 dokumen	26.370.000		10 dokumen	10.000.000
4	3	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi SAKIP		B grade	0		B grade	0
4	3	15		Program Pengembangan Data /informasi	% kelengkapan data dan informasi yang valid		95 %	374.465.000		95 %	550.000.000
4	3	15	2	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Persentase Jumlah data yang terkumpul dan disusun	Hulu Sungai Tengah	95 %	92.470.000		95 %	100.000.000
4	3	15	5	Penyusunan profile daerah	Jumlah buku profil daerah yang disusun	Hulu Sungai Tengah	1 buku	94.570.000		1 buku	100.000.000
4	3	15	6	Survey Persepsi Publik	jumlah laporan hasil survey persepsi publik	Hulu Sungai Tengah	1 Laporan Survey	187.425.000		1 Laporan Survey	350.000.000
4	3	19		Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	% program dan kegiatan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan		100 %	236.220.000		100 %	800.000.000
4	3	19	7	Koordinasi perencanaan penanganan program nasional di daerah	Jumlah masalah/keputusan pokja yang diselesaikan sesuai pedoman/juknis	Hulu Sungai Tengah	1 keputusan pokja	236.220.000		1 keputusan pokja	800.000.000

4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase program dan kegiatan Renja SKPD yang selaras dengan RKPD		100 %	1.113.565.000		100 %	890.000.000
4	3	21	5	Penyusunan rancangan RPJMD	jumlah dokumen rancangan awal/akhir RPJMD dan Perubahan RPJMD	Hulu Sungai Tengah	0 dokumen	597.640.000		0 dokumen	0
4	3	21	8	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah rancangan Perkada RKPD yg diproses sesuai jadwal (murni dan perubahan) dengan substansi dan proses sesuai dengan Permendagri No.86 tahun 2017	Hulu Sungai Tengah	2 rancangan	333.820.000		2 rancangan	150.000.000
4	3	21	9	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Musrenbang yang dilaksanakan	Hulu Sungai Tengah	1 kali	126.245.000		1 kali	350.000.000
4	3	21	11	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah SKPD yang diasistensi penyusunan dokumen perjanjian kinerja (murni dan perubahan)	Hulu Sungai Tengah	76 Perangkat Daerah	18.660.000		76 Perangkat Daerah	90.000.000
4	3	21	19	Monitoring, Evaluasi,Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah monitoring, pengendalian dan evaluasi RPJMD dan atau RKPD yang dilaksanakan	Hulu Sungai Tengah	3 kali	37.200.000		3 kali	300.000.000
4	3	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Renstra PD yang selaras dengan RPJMD		100 %	0		100 %	200.000.000
4	3	21	20	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah aplikasi perencanaan pembangunan yang berfungsi	Hulu Sungai Tengah	3 aplikasi	0		3 aplikasi	200.000.000
4	3	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Ekonomi		100 %	705.013.000		100 %	1.500.000.000
4	3	22	3	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral bidang ekonomi	Hulu Sungai Tengah	1 Rencana Induk/rencana aksi	449.500.000		1 Rencana Induk/rencana aksi	1.500.000.000
4	3	22	10	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	Indeks kinerja komisi irigasi kabupaten Hulu Sungai Tengah	Hulu Sungai Tengah	80 Skor	255.513.000		80 Skor	0
					Tersusunnya Dokumen PSETK Daerah Irigasi		- Daerah Irigasi			- Daerah Irigasi	0
4	3	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	% Rata-rata capaian target Renja SKPD bidang Ekonomi		85 %	55.680.000		85 %	175.000.000
4	3	22	4	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Ekonomi	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	Hulu Sungai Tengah	4 SKPD	55.680.000		4 SKPD	175.000.000

4	3	23		Program perencanaan sosial dan budaya	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang Sosial Budaya		100 %	94.630.000		100 %	200.000.000
4	3	23	7	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Sosial dan SDM	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	Hulu Sungai Tengah	8 SKPD	35.280.000		8 SKPD	100.000.000
4	3	23	8	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Budaya	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	Hulu Sungai Tengah	19 SKPD	59.350.000		19 SKPD	100.000.000
4	3	23		Program perencanaan sosial dan budaya	% Rata-rata capaian target Renja SKPD sosial budaya		85 %	281.020.000		85 %	400.000.000
4	3	23	5	Penyusunan perencanaan pengembangan bidang sosial dan SDM	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral sub bidang sosial dan SDM	Hulu Sungai Tengah	1 Rencana Aksi	153.460.000		1 Rencana Aksi	200.000.000
4	3	23	9	Penyusunan perencanaan pengembangan bidang pemerintahan dan budaya	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral sub bidang pemerintahan dan budaya	Hulu Sungai Tengah	1 Rencana Aksi	127.560.000		1 Rencana Aksi	200.000.000
4	3	27		Program Perencanaan Infrastruktur	% program dan kegiatan RKPD yang dituangkan ke Renja SKPD bidang infrastruktur		100 %	90.180.000		100 %	150.000.000
4	3	27	1	Koordinasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Infrastruktur	Jumlah SKPD yang diasistensi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi Renja	Hulu Sungai Tengah	6 SKPD	90.180.000		6 SKPD	150.000.000
4	3	27		Program Perencanaan Infrastruktur	% Rata-rata capaian target Renja SKPD bidang infrastruktur		85 %	374.020.000		85 %	500.000.000
4	3	27	3	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Daerah	Jumlah rencana induk/rencana aksi perencanaan sektoral bidang infrastruktur	Hulu Sungai Tengah	1 dokumen	374.020.000		1 dokumen	500.000.000
4	3	29		Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	% program dan kegiatan PPAS dan RKA yang sesuai dengan RKPD		95 %	110.250.000		95 %	150.000.000
4	3	29	2	Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Jumlah SKPD yang RKA/RKAP sudah diverifikasi yang sesuai dengan RKPD, KUA dan PPAS	Hulu Sungai Tengah	74 SKPD	43.500.000		74 SKPD	75.000.000
4	3	29	3	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Penyusunan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Jumlah dokumen rancangan dan kesepakatan KUA , KUPA , PPAS dan PPAS-P	Hulu Sungai Tengah	8 buah	66.750.000		8 buah	75.000.000
4	3	30		Program Peningkatan Pembiayaan Pembangunan	Persentase kegiatan yang disetujui oleh Pemerintah Pusat (APBN dan DAK) dan Pemerintah Provinsi		40 %	23.380.000		50 %	75.000.000

4	3	30	1	Koordinasi Penyusunan Program dan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah usulan yang disampaikan sesuai dengan ketentuan (APBN, APBD Prov dan DAK)	Hulu Sungai Tengah	600 usulan	23.380.000		700 usulan	75.000.000
4	7			Penelitian dan Pengembangan				561.600.000			600.000.000
4	7	28		Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Jumlah topik kajian penelitian dan pengembangan yang dihasilkan		1 topik kajian	561.600.000		2 topik kajian	600.000.000
4	7	28	2	Penyusunan Kajian Kebijakan pembangunan, inovasi dan teknologi	Jumlah Judul Permasalahan/Topik yang dikaji	Hulu Sungai Tengah	1 Topik Kajian	320.200.000		1 Topik Kajian	250.000.000
4	7	28	3	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah orang yang mendapat desiminasi hasil litbang	Hulu Sungai Tengah	40 Orang	11.250.000		40 Orang	50.000.000
4	7	28	4	Penyusunan Kajian Kebijakan sosial, ekonomi dan pemerintahan	Jumlah judul permasalahan/topik yang dikaji	Hulu Sungai Tengah	1 Topik Kajian	230.150.000		1 Topik Kajian	300.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				2.154.560.568			1.724.325.300
4	4			Keuangan				2.154.560.568			1.724.325.300
4	4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		80 %	532.357.900		80 %	584.830.000
4	4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	650 OK	17.550.000		650 OK	17.550.000
4	4	1	25	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 kali	157.231.900		12 kali	900.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 bln			12 bln	60.000.000
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 bln			12 bln	7.500.000
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 bln			12 bln	150.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 bln			12 bln	10.000.000
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		720 eksp			720 eksp	2.880.000
4	4	1	26	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	100 OH	300.000.000		100 OH	300.000.000
4	4	1	27	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	24 OB	57.576.000		24 OB	36.000.000
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana prasarana yang memadai		100 %	302.397.868		100 %	240.000.000
4	4	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	Jumlah unit fasilitas gedung yang dibangun	Hulu Sungai Tengah	0 Unit	96.973.200		0 Unit	0
					Jumlah unit fasilitas yang ditingkatkan		0 Unit			0 Unit	0
					jumlah unit yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	50.000.000
4	4	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	4 Unit	145.384.668		5 Unit	50.000.000

					Jumlah perlengkapan yang dibeli		31 Unit			5 Unit	50.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	15.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		1 Unit			1 Unit	15.000.000
4	4	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	3 Unit	60.040.000		0 Unit	0
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		8 Unit			8 Unit	60.000.000
4	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase penyampaian laporan tepat waktu		100 %	14.950.000		100 %	15.000.000
4	4	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	10 dokumen	14.950.000		10 dokumen	15.000.000
4	4	16		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase KIB SKPD yang sesuai dengan neraca LKPD		100 %	183.850.000		100 %	165.000.000
4	4	16	3	Penyusunan Sistem Informasi Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah SKPD yang dilakukan rekonsiliasi BMD	Hulu Sungai Tengah	37 %	76.000.000		37 %	85.000.000
4	4	16	5	Penghapusan dan Penjualan BMD	Persentase Usulan Penghapusan BMD SKPD yang terealisasi	Hulu Sungai Tengah	37 %	107.850.000		37 %	80.000.000
4	4	16		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase BMD Yang Punya Legalitas		90 %	715.000.000		90 %	250.000.000
4	4	16	6	Sertifikasi Tanah BMD	Jumlah BMD (tanah) yang disertifikasi	Hulu Sungai Tengah	200 Persil	715.000.000		100 Persil	250.000.000
4	4	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase SKPD menyampaikan Rencana Kerja Anggaran dan Rancangan DPA serta Anggaran Kas tepat waktu		100 %	82.965.000		100 %	82.990.400
4	4	17	3	Penyusunan Raperda Tentang APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA, Rancangan DPA dan DPA	Hulu Sungai Tengah	40 SKPD	37.619.800		40 SKPD	37.620.000
4	4	17	4	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi Anggaran Kas dan SPD	Hulu Sungai Tengah	40 SKPD	27.715.400		40 SKPD	27.715.400
4	4	17	5	Penyusunan Raperda Tentang Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi RKA Perubahan, Rancangan DPA dan DPPA	Hulu Sungai Tengah	40 SKPD	6.600.000		40 SKPD	6.625.000
4	4	17	6	Penyusunan Rancangan peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah SKPD yang diverifikasi Perubahan Anggaran Kas dan SPD	Hulu Sungai Tengah	40 SKPD	11.029.800		40 SKPD	11.030.000
4	4	18		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu		100 %	21.500.000		100 %	28.125.000
4	4	18	2	Fasilitasi Penatausahaan Pengeluaran	Jumlah SP2D yang dikeluarkan dengan Sumber Dana dan Kode Rekening	Hulu Sungai Tengah	6000 buah	21.500.000		4000 buah	28.125.000
4	4	18		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyampaian Laporan Dana Transfer Tepat Waktu		100 %	29.414.800		100 %	37.699.900
4	4	18	3	Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan dana transfer yang disampaikan	Hulu Sungai Tengah	0 buah	29.414.800		0 buah	37.699.900

4	4	18		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase Pembayaran Gaji Tepat Waktu		100 %	10.450.000		100 %	10.450.000
4	4	18	1	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan gaji pada SKPD	Jumlah daftar gaji SKPD telah disesuaikan dan dicetak	Hulu Sungai Tengah	0 Daftar Gaji	10.450.000		0 Daftar Gaji	10.450.000
4	4	23		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan	Persentase SKPD dan BPKAD menyampaikan Laporan Keuangan SKPD Tepat Waktu dan sesuai SAP		100 %	211.825.000		100 %	200.380.000
4	4	23	1	Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi	Hulu Sungai Tengah	2 Orang	22.205.000		2 Orang	26.375.000
4	4	23	7	Penyusunan Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diverifikasi	Hulu Sungai Tengah	4 SKPD	189.620.000		4 SKPD	174.005.000
4	4	23		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kualitas Laporan Keuangan	Tepat Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban APBD Pemerintah Daerah		100 %	49.850.000		100 %	109.850.000
4	4	23	8	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disampaikan	Hulu Sungai Tengah	9 Buah	49.850.000		9 Buah	109.850.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				2.973.040.800			3.788.577.600
4	4			Keuangan				2.973.040.800			3.788.577.600
4	4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	318.576.000		95 %	321.000.000
4	4	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	720 HOK HOK	27.000.000		720 HOK	35.000.000
4	4	1	26	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah	250 OH	216.000.000		250 OH	250.000.000
4	4	1	27	Penyediaan Jasa Tenaga Teknis/Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga kontrak teknis dan administrasi	Hulu Sungai Tengah	24 Orang	75.576.000		24 Orang	36.000.000
4	4	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana yang memadai		100 %	272.000.000		100 %	265.000.000
4	4	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	10 buah	209.000.000		10 buah	50.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		10 buah			10 buah	150.000.000
					jumlah perlengkapan yang dipelihara		10 buah			10 buah	15.000.000
4	4	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil/R2 yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	11 buah	63.000.000		11 buah	50.000.000
4	4	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Dokumen yang disampaikan tepat waktu		100 %	10.250.000		100 %	50.000.000
4	4	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	15 Dokumen	10.250.000		15 Dokumen	50.000.000

4	4	19		Program Intensifikasi pajak dan retribusi daerah non PBB dan BPHTB	Prosentase jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang target pemungutannya berbasis potensi.		23 %	145.810.000		23 %	245.051.000
4	4	19	13	Pelayanan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah.	Jumlah Surat Ketetapan Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai penilaian	Hulu Sungai Tengah	11870 Lembar	145.810.000		11870 Lembar	81.986.000
					Jumlah pendaftaran pajak daerah yang diselesaikan tepat waktu.		11870 WP			11870 WP	0
					Jumlah orang yang hadir saat sosialisasi		100 Orang			100 Orang	116.755.000
					Jumlah wajib pajak baru yang memiliki NPWD		11000 WP			11000 WP	36.310.000
					Jumlah Media yang direspon masyarakat		150 Lembar			150 Lembar	10.000.000
4	4	19		Program Intensifikasi pajak dan retribusi daerah non PBB dan BPHTB	Indeks Kualitas pelayanan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah		9 WP	218.240.000		9 WP	525.599.600
4	4	19	15	Pemutakhiran data sumber-sumber retribusi daerah.	Jumlah Jenis data wajib retribusi daerah yang termuktahirkan	Hulu Sungai Tengah	5 Jenis	157.240.000		5 Jenis	125.518.000
					Jumlah dokumen kajian analisis potensi retribusi daerah		1 Dokumen			1 Dokumen	26.310.000
					Jumlah pemungutan jenis retribusi secara non tunai		1 Jenis			1 Jenis	0
					Jumlah media pungut retribusi yang dicetak		8000 Pak			8000 Pak	166.835.600
					Jumlah Frekuensi uji petik jenis retribusi daerah		3 Kali/ Keg			3 Kali/ Keg	50.000.000
					Jumlah rekomendasi/ hasil koordinasi yang dirumuskan		4 Dokumen			4 Dokumen	10.000.000
4	4	19	18	Evaluasi penerimaan pajak dan retribusi daerah.	Jumlah Laporan bulanan penerimaan pajak dan Retribusi	Hulu Sungai Tengah	12 Dokumen	61.000.000		12 Dokumen	26.936.000
					Jumlah laporan bulanan pemakaian media pungut pajak dan retribusi daerah Stiker lunas pajak reklamePajak non PBB,		12 Dokumen			12 Dokumen	100.000.000
					Jumlah laporan Triwulanan Evaluasi Penerimaan Pajak non PBB, BPHTB dan Retribusi Daerah		4 Dokumen			4 Dokumen	20.000.000
4	4	20		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Indeks Kepuasan Pelayanan pemungutan PBB dan BPHTB		7 Skala	203.450.000		7 Skala	318.431.000
4	4	20	1	Pendataan dan Pengelolaan Data Base SISMIOP PBB dan BPHTB	Jumlah Wajib Pajak PBB Baru dan BPHTB yang Terdata	Hulu Sungai Tengah	PBB 1.800 WP BPHTB 320 WP	203.450.000		PBB 1.800 WP BPHTB 320 WP WP	277.431.000
					Jumlah Wajib Pajak PBB yang Datanya Terkoreksi Sesuai Kondisi Sebenarnya		84935 WP			84935 WP	25.000.000

					Jumlah Pengaduan/Keberatan Pajak PBB dan BPHTB yang Dapat Diselesaikan		10 WP			10 WP	16.000.000
4	4	20		Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	Terwujudnya Basis data dan Potensi PBB dan BPHTB yang Handal		100 %	999.524.000		100 %	1.422.580.000
4	4	20	3	Penetapan dan Verifikasi PBB dan BPHTB	Jumlah SPPT, DHKP dan SSPD Sesuai Pokok Ketetapan PBB dan BPHTB yang tercetak.	Hulu Sungai Tengah	84935 WP	292.750.000		85000 WP	322.000.000
					Prosentase Zona wilayah tanah yang termutakhirkan NJOP nya		80 %			80 %	0
4	4	20	5	Penagihan PBB dan BPHTB	Prosentase Realisasi Pemungutan PBB sesuai dengan Pokok Ketetapan / Target	Hulu Sungai Tengah	95 %	706.774.000		95 %	581.416.000
					Jumlah Subjek dan Objek Wajib Pajak Piutang PBB dan BPHTB yang Tervalidasi & Terverifikasi Piutangnya.		42000 WP			42000 WP	176.414.000
					Jumlah Berita Acara Hasil Koordinasi (Rekomendasi) yang Dirumuskan Terkait dengan PBB dan BPHTB		8 Dokumen			8 Dokumen	292.750.000
					Jumlah Laporan Bulanan Realisasi Penerimaan PBB & BPHTB secara Maksimal		12 Dokumen			12 Dokumen	50.000.000
4	4	22		Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Indeks Kualitas Sistem Pembinaan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah		6.5 Indeks	623.939.000		6.5 Indeks	452.398.000
4	4	22	5	Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan	Hulu Sungai Tengah	0 Dokumen	499.739.000		1 Dokumen	31.515.000
					Jumlah Aplikasi Sistem Yang Diciptakan		1 Unit			1 Unit	162.433.000
					Jumlah Aplikasi Sistem Yang Berkembang dan Terpelihara		2 Unit			2 Unit	120.000.000
4	4	22	9	Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah pengaduan/keberatan pajak dan retribusi daerah yang berhasil diselesaikan dan jumlah berita acara pemeriksaan pajak dan retribusi daerah yang dihasilkan	Hulu Sungai Tengah	50 Dokumen	124.200.000		50 Dokumen	105.250.000
					Jumlah Rumusan Hasil Rekonsiliasi Pajak dan retribusi Daerah yang dihasilkan		4 Dokumen			4 Dokumen	33.200.000
4	4	22		Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase Jenis Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah Yang Komprehensif		85 %	181.251.800		85 %	188.518.000
4	4	22	10	Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Regulasi Pajak Daerah Yang Diciptakan	Hulu Sungai Tengah	3 dokumen	181.251.800		3 dokumen	113.518.000
					Jumlah Standar Operasional Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah Yang Disusun		1 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000

Tabel T-B. 56.

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Tahun 2020

Nama SKPD : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				11.000.225.500			6.744.897.406
4	5			Kepegawaian				3.029.365.500			4.604.897.406
4	5	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat		100 %	1.075.613.000		100 %	1.126.006.028
4	5	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah HOK yang disediakan	Hulu Sungai Tengah	900 Porsi	55.000.000		900 Porsi	55.524.528
4	5	1	25	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pengiriman surat	Hulu Sungai Tengah	12 Bulan	155.113.000		12 Bulan	7.200.000
					Jumlah bulan pembayaran rekening listrik, air, telepon dan internet		12 Bulan			12 Bulan	158.122.800
					Jumlah bulan penyediaan alat dan bahan kebersihan		12 Bulan			12 Bulan	25.621.750
					Jumlah bulan penyediaan ATK		12 Bulan			12 Bulan	60.000.000
					Jumlah bulan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan		12 Bulan			12 Bulan	14.119.780
					Jumlah bahan bacaan dan buku yang dibeli		744 Buah			744 Buah	5.417.170
4	5	1	26	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Jumlah OH Perjalanan Dinas	Hulu Sungai Tengah;Diluar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	200 OK	865.500.000		200 OK	800.000.000
4	5	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100 %	128.762.500		100 %	602.950.000
4	5	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di rehab	Hulu Sungai Tengah	0 unit	0		0 unit	0
4	5	2	45	Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Kantor	jumlah unit yang dipelihara	Hulu Sungai Tengah	2 Unit	30.000.000		2 Unit	40.000.000
4	5	2	46	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Kantor	jumlah unit peralatan yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	2 Jenis	47.962.500		2 Jenis	40.000.000

					Jumlah perlengkapan yang dibeli		3 Jenis			3 Jenis	30.000.000
					Jumlah peralatan yang dipelihara		4 Jenis			4 Jenis	30.000.000
					Jumlah perlengkapan yang dipelihara		5 Jenis			5 Jenis	30.000.000
4	5	2	49	Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah mobil/R2 yang dibeli	Hulu Sungai Tengah	5 Buah	50.800.000		5 Buah	362.950.000
					Jumlah Mobil / R2 yang dipelihara		19 Buah			19 Buah	70.000.000
4	5	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Penyampaian Dokumen Penganggaran, Keuangan dan Kinerja Yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standart		100 %	23.800.000		100 %	42.000.000
4	5	6	19	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Laporan Keuangan dan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	Hulu Sungai Tengah	6 Dokumen	23.800.000		6 Dokumen	42.000.000
4	5	11		Program Pembinaan Kedudukan Hukum dan Disiplin PNS/ASN	Persentase SKPD yang memberikan tindakan dan melaporkan Pelanggaran disiplin ASN		80 %	137.500.000		80 %	248.453.804
4	5	11	1	Pembinaan Disiplin Aparatur	Jumlah pelanggaran disiplin PNS yang selesai diproses tindakan hukumnya.	Hulu Sungai Tengah	5 Orang	137.500.000		5 Orang	136.615.304
					Jumlah penurunan pelanggaran disiplin.		4 Orang			4 Orang	0
					Jumlah proses pemberian izin perkawinan/perceraianyang sesuai prosedur dan tepat waktu.		20 Orang			20 Orang	0
					Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan faham		73 orang			73 orang	111.838.500
4	5	12		Program Pemberhentian dan Kesejahteraan ASN	Persentasi pegawai yang dilayani adminisrasi kepegawaiannya selesai		97 %	47.050.000		97 %	440.735.919
4	5	12	6	Peningkatan Pengeloaan Administrasi Kesejahteraan ASN	Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala, Surat Izin Cuti PNS, yang diproses akurat dan selesai tepat waktu	Hulu Sungai Tengah	900 SK	47.050.000		900 SK	90.000.000
					Jumlah administrasi kepegawaian (Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, SK Pensiun dll) yang diproses akurat dan selesai tepat waktu		700 Dokumen			700 Dokumen	283.541.489
					Jumlah PNS/ASN yang diusulkan untuk mendapatkan Piagam Penghargaan		300 orang			300 orang	67.194.430
4	5	13		Program Pengembangan Aparatur Daerah	Persentasi proses SK/dokumen yang diselesaikan tepat waktu		97 %	675.600.000		97 %	851.856.155
4	5	13	3	Seleksi dan Pengangkatan dalam Jabatan	Jumlah calon JPT yang lulus seleksi sesuai prosedur	Hulu Sungai Tengah	15;200 PNS	608.600.000		15;200 PNS	645.995.155
4	5	13	7	Peningkatan Pengeloaan Administrasi Mutasi ASN	Jumlah SK Mutasi PNS Di Dalam Kabupaten, Surat Rekomendasi Mutasi Keluar/Masuk, dan SK Dalam Jabatan Fungsional PNS akurat dan selesai tepat waktu	Hulu Sungai Tengah	500 SK	10.400.000		500 SK	85.861.000

4	5	13	8	Pengelolaan Administrasi Kenaikan Pangkat dan Pengangkatan PNS/ASN	Jumlah SK Kenaikan Pangkat PNS, SK Penambahan Masa Kerja, dan SK Pengangkatan menjadi PNS yang diproses akurat dan selesai tepat waktu	Hulu Sungai Tengah	700 SK	56.600.000		700 SK	120.000.000
4	5	17		Pemutakhiran Data, Formasi dan Pengadaan ASN	Persentase data, formasi dan Pengadaan ASN yang akurat dan tepat waktu		90 %	941.040.000		90 %	1.292.895.500
4	5	17	1	Pemutakhiran Database Kepegawaian	Jumlah ASN yang datanya akurat	Hulu Sungai Tengah	3500 orang	112.340.000		3500 orang	150.455.000
4	5	17	2	Seleksi Penerimaan ASN	Jumlah peserta seleksi CPNS/ASN yang telah diverifikasi	Hulu Sungai Tengah	200 orang	828.700.000		200 orang	1.142.440.500
4	6			Pendidikan dan Pelatihan				7.970.860.000			2.140.000.000
4	6	15		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Daerah	Persentasi Aparatur yang lulus diklat dengan kriteria baik dan pengembangan karir yang terpola		100 %	7.970.860.000		100 %	2.140.000.000
4	6	15	10	Pendikan dan Pelatihan Bagi PNS/ASN	Jumlah ASN yang telah mengikuti diklat prajabatan, PIM, Fungsional/Tupoksi dengan hasil baik	Hulu Sungai Tengah;Diluar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	698 orang	7.516.420.000		698 orang	950.000.000
4	6	15	11	Pembinaan Pengembangan SDM PNS/ASN Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi, Ujian Dinas/UKPPI, tugas belajar. Ijin belajar dan pencantuman gelar akademik	Hulu Sungai Tengah	125, 60, 150 orang	454.440.000		125, 60, 150 orang	540.000.000
					Jumlah ASN yang mendapat bantuan tugas belajar/ikatan dinas sesuai dengan tupoksi		10 orang			10 orang	650.000.000